



DERITA PENGHAYAT KEPERCAYAAN, TRANSGENDER, & MINORITAS AGAMA

Penulis: Adil Al Hasan, Ahmad Mustaqim, Arizka Setya Windhiarti, Atikah Nurul Ummah, Bambang Muryanto, Eka Widhi Artanti, Halimatus Sakdiyah E.M, Mariyana Ricky P.d, Mawa Kresna, Michelle Gabriela Momole, Nuriyah Hanik Fatikhah, Pito Agustin Rudiana, Rizka Nur Laily M, Sabrina Mutiara Fitri, Sirojul Khafid, Widi Pradana Riswan, Yuwantoro Winduajie.

DERITA PENGHAYAT KEPERCAYAAN, TRANSGENDER, & MINORITAS AGAMA



Kumpulan Tulisan Jurnalis
Program Fellowship
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Yogyakarta, 2022



Penulis:

Adil Al Hasan, Ahmad Mustaqim, Arizka Setya
Windhiarti, Atikah Nurul Ummah, Bambang Muryanto,
Eka Widhi Artanti, Halimatus Sakdiyah E.M, Mariyana
Ricky P.d, Mawa Kresna, Michelle Gabriela Momole,
Nuriyah Hanik Fatikhah, Pito Agustin Rudiana, Rizka
Nur Laily M, Sabrina Mutiara Fitri, Sirojul Khafid, Widi
Pradana Riswan, Yuwantoro Winduajie.

Editor:

Bambang Muryanto

Desain Cover:

Anang Saptoto

Tata Letak:

Tri Harjono

Cetakan Pertama, Februari 2022

Tebal : 348 halaman

Ukuran : 145 mm x 210 mm

ISBN :

Penerbit:

AJI Yogyakarta
Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55294

Derita Kelompok Minoritas Agama, Penghayat Kepercayaan, dan Transgender

Kelompok minoritas berbasis agama, kepercayaan, dan identitas gender sering menjalani hidup dalam situasi nirkemanusiaan. Diskriminasi, stigma, dan kekerasan kerap menimpa mereka dalam berbagai situasi, seperti mimpi buruk yang terulang. Pasalnya, negara tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Tengoklah situasi kelompok dengan identitas gender nonbiner yang hidup dalam kondisi ketakutan, terdiskriminasi, diabaikan, tersingkir, dan tercerabut dari nilai kemanusiaan. Berbasis pada riset, sejumlah lembaga yang fokus pada isu keberagaman, lesbian, gay, biseksual, dan transgender menjadi kelompok yang paling dibenci di Indonesia.

Kebenaran riset itu semakin kuat dengan temuan dalam liputan jurnalis yang mengikuti program fellowship Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta bertajuk Memotret Praktek Baik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Kelompok Minoritas. Sebanyak 14 jurnalis yang menyelesaikan liputan itu berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, bekerja di media massa arus utama maupun pers kampus.

Dari 14 karya jurnalistik yang dikerjakan selama hampir dua bulan, sejumlah tulisan menggambarkan tekanan dan diskriminasi terhadap LGBT. Di Universitas Gadjah Mada

(UGM), Yogyakarta misalnya, terungkap ada perisakan hingga penolakan seorang mahasiswa yang menyatakan dirinya sebagai seorang transman.

Dosen sebagai intelektual yang seharusnya menghargai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender malah membuat mahasiswa tersebut semakin tertekan. Dampaknya, dia putus kuliah.

Mahasiswa yang melela atau *coming out* sebagai transman itu tak punya kesempatan lagi mendapatkan akses pendidikan. Dia harus bertahan di tengah kebencian yang menyasar LGBT. Pada tulisan lain, transpuan kerap mendapatkan kekerasan, serangan fisik hingga kekerasan seksual selama mereka bekerja sebagai pengamen.

Cerita muram tidak hanya menimpa minoritas berbasis identitas gender. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terjadi penyerobotan situs ritual dan tanah milik Masyarakat Adat yang memeluk agama lokal, Marapu untuk kepentingan industri gula. Siswa penghayat juga tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dipaksa mengikuti mata pelajaran agama samawi, dan terkendala sistem administrasi sekolah.

Persoalan lainnya adalah kasus diskriminasi berbasis agama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Tujuh tahun lalu, Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Desa Suka Makmur dibakar massa.

Provinsi NAD yang menganut hukum syariah memiliki Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang menyulitkan pendirian rumah ibadah milik kelompok minoritas. Setelah kasus pembakaran Gereja HKI Suka Makmur, rekonsiliasi belum mencapai titik temu hingga saat ini.

Konflik di Aceh Singkil ini menjadi potret buruk intoleransi di tengah makin tebalnya konservatisme dan politik penyeragaman atas nama mayoritas.

Sebagai daerah dengan mayoritas warga yang memeluk Islam,

diskriminasi ternyata juga menimpa warga Muhammadiyah di Kabupaten Bireun. Selain itu, kelompok Salafi di Aceh Barat juga dilarang mengelola masjid yang mereka dirikan. Sesuatu yang ironis di daerah dengan julukan Serambi Mekah itu.

Pembaca, AJI Yogyakarta juga mengirim tiga jurnalis ke Provinsi NAD dan tiga jurnalis ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu publik mendapatkan informasi tentang pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas di daerah itu. Di Aceh, jurnalis dan masyarakat sipil terhambat membawa persoalan itu ke publik. Situasi sosial dan politik menjadi salah satu penyebab mereka tidak bisa bebasnya menyuarakan kasus penindasan terhadap kelompok minoritas.

Tidak hanya soal pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, jurnalis juga memotret proses pernikahan pasangan penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Sleman. Ini adalah praktik baik dimana negara sudah mengakui ritual pernikahan versi penghayat kepercayaan. Pernikahan penghayat yang baru pertama kali terjadi di Kabupaten Sleman itu adalah angin segar bagi para penghayat yang selama bertahun-tahun tidak diakui oleh negara.

Buku yang berisi antologi liputan pelanggaran HAM terhadap minoritas berbasis agama, kepercayaan, dan identitas gender ini merupakan ikhtiar AJI Yogyakarta menyuguhkan sumber pengetahuan yang dikemas dalam karya jurnalistik. Produksi pengetahuan yang jauh dari sempurna ini melengkapi buku-buku sebelumnya yang berbicara tentang pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas.

Kami memandang isu kebebasan beragama dan berkeyakinan relevan dengan situasi Indonesia yang sebentar lagi menghadapi tahun politik. Sejumlah ahli politik memprediksi Pemilu 2024 akan diwarnai dengan sentimen politik identitas atas nama agama dan identitas gender. Bila tidak berhati-hati, maka masyarakat sipil akan menjadi korban lagi untuk kesekian kalinya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada editor

buku, Bambang Muryanto yang juga menjadi mentor bagi 14 jurnalis, bersama Pito Agustin Rudiana dan Mawa Kresna. Tiga mentor itu berjibaku mendampingi seluruh jurnalis dan melakukan reportase ke NTT dan Aceh.

Buku itu tidak akan terwujud tanpa kerja keras dari tim yang dipimpin Nailatus Sukriya. Naila bekerja bersama Bhekti Suryani, A.S Rimbawana, Yongky Gigih Prasisko, dan Eny Sudarwati. Sekretaris AJI Yogyakarta, Ahmad Mustaqim juga membantu kerja tim di tengah kesibukannya.

Liputan para jurnalis ini juga tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai jaringan AJI Yogyakarta dan komunitas. Mereka membantu mempertemukan jurnalis dengan kelompok minoritas, memberikan data dan dokumen, serta menerima berbagai wawancara.

Kami berharap terbitnya buku ini bisa mendorong jurnalis untuk bekerja secara independen, berpijak pada prinsip HAM, dan membawa nilai antikekerasan dalam meliput isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Semoga buku ini bisa membawa dampak, mendorong negara melihat fakta-fakta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Buku ini bagian dari kritik dan memberi masukan kepada pengambil kebijakan agar bertanggung jawab dan memperhatikan kelompok minoritas demi kehidupan Indonesia yang lebih adil dan beradab.

Salam damai

Shinta Maharani
Ketua AJI Yogyakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANGANTAR	5
DAFTAR ISI	9
BAB 1	
Kisah Penganut Agama Lokal atau Penghayat Kepercayaan	13
Jalan Berliku Pelajar Penghayat Dapat Pendidikan Kepercayaan, Alami Diskriminasi (<i>Rizka Nur Laily M</i>)	15
Pemerintah DIY Setengah Hati Sediakan Layanan Pendidikan bagi Penghayat (<i>Rizka Nur Laily M</i>)	30
Proses Berliku Pengadaan Layanan Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul (<i>Halimatus Sakdiyah E.M</i>)	41
Kisah Hani, Siswa Penghayat yang Dipaksa Ikuti Pelajaran Agama Islam di Sekolah (<i>Arizka Setya Windhiarti</i>)	56
Jalan Panjang Pernikahan Penghayat Kepercayaan (<i>Sirojul Khafid</i>)	65

Penghayat Kepercayaan di Solo Kian Pudar, Sederet Faktor Jadi Pemicu (<i>Mariyana Ricky P.d</i>)	82
Persekusi Tak Halangi Penghayat Kepercayaan di Solo Untuk Berekspresi (<i>Mariyana Ricky P.d</i>)	91
Pasang Surut Pernikahan Pemeluk Sapta Darma dan Sumarah Sejak Orde Baru Hingga Kini (<i>Atikah Nurul Ummah</i>).....	99
Gema Pakti Berjuang untuk Regenerasi Penghayat Kepercayaan (<i>Adil Al Hasan</i>).....	111
Tangis Umat Pahoman Sejati Saat para Penambang Merusak Merapi, Siapa Peduli? (<i>Widi Pradana Riswan</i>).....	123
Pahoman Sejati Bukan Penyembah Gunung Merapi dan Tak Boleh Membunuh Nyamuk (<i>Widi Pradana Riswan</i>).....	126
Dari Budo Budi ke Pahoman Sejati, Warga Penghuni Sisi Selatan Gunung Merapi (<i>Widi Pradana Riswan</i>).....	130
Sedulur Sikep: Kami Hidup Mandiri Tanpa Uluran Tangan (<i>Sabrina Mutiara Fitri</i>)	135

BAB 2

Kisah Kehidupan Transgender	143
Jatuh Bangun Transpuan Yogyakarta Membuka Identitas Gender Saat Berekspresi (<i>Yuwantoro Winduajie</i>).....	144

Kabar Kabur Vaksin Covid-19, Waria Kulon Progo Sempat Menolak karena Takut Mati (<i>Ahmad Mustaqim</i>)	163
Para Waria Pencari Tuhan: Kisah Kelahiran Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan, Yogyakarta (<i>Eka Widhi Artanti</i>)	173
Derita Transgender di Dunia Online (<i>Nuriyah Hanik Fatikhah</i>)	182
Institusi Pendidikan: Katanya Inklusif, Ternyata Homophobic (<i>Michelle Gabriela Momole</i>)	193

BAB 3

Kisah Kelompok Minoritas di Aceh	211
Bom Waktu Intoleransi di Aceh Singkil: Larangan Pendirian Gereja Berbalut Aturan Qanun (<i>Mawa Kresna</i>)	212
Kelompok Salafi di Aceh Barat Tak Boleh Beribadah di Masjid Milik Sendiri (<i>Yuwantoro Winduajie</i>)	229
Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Kota Santri Samalanga, Bak Api dalam Sekam (<i>Pito Agustin Rudiana</i>)	242

BAB 4

Kisah Marapu di Kabupaten Sumba Timur	291
Tak Putus Dirundung Diskriminasi, Kisah Pelajar Marapu di Sumba Timur (<i>Rizka Nur Laily M</i>)	292

Potret Diskriminasi terhadap Pemeluk Marapu di Sumba Timur (<i>Sirojul Khafid</i>)	306
Nestapa Warga Marapu yang Tak Bisa Ritual di Katuada Njara Lagi (<i>Bambang Muryanto</i>).....	318
Profil penulis	341

BAB 1

KISAH PENGANUT AGAMA LOKAL ATAU PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Jalan Berliku Pelajar Penghayat Dapat Pendidikan Kepercayaan, Alami Diskriminasi

Jumat, 1 Juli 2022 15:08

Reporter: Rizka Nur Laily M

Sore itu, sinar matahari perlahan beranjak ke barat, warna langit biru jadi semburat oranye. Alunan gending dari aplikasi pemutar lagu di ponsel pintar terdengar di Pendopo Wisnuwardana, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada Kamis (9/6/2022).

Sesekali volume lagu itu kalah kencang dengan suara motor yang melintas di jalan depan pendopo. Di sana, Bayu Setiawan (18), salah satu pelajar penghayat kepercayaan Palang Putih Nusantara (PPN) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Kasihan, Bantul atau SMKI Yogyakarta, sedang latihan menari.

"Ini tari Klana Raja," terang pelajar kelahiran Kabupaten Gunungkidul itu.

Bayu adalah satu dari sembilan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sudah mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Pemenuhan hak tersebut tidak didapat semudah membalik tangan, ada proses panjang hingga pengalaman menyakitkan yang dialami para pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ini.

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME merupakan salah satu kelompok sosial di Indonesia yang sering menjadi korban diskriminasi sejak disahkannya Ketetapan MPRS Nomor

2 Tahun 1960 di mana negara berhak menentukan legalitas agama. Selanjutnya, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 menegaskan agama resmi yang diakui negara yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Menyusul, pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan agama Konghucu.



Pelajar penghayat kepercayaan di DIY sedang beribadah di Sanggar Candi Busana. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

Penetapan agama resmi itu menunjukkan adanya diskriminasi keyakinan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memeluk agama resmi sering mendapat perlakuan diskriminatif dari negara dalam mengakses hak-haknya. Termasuk yang hingga kini masih dialami pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME untuk memperoleh hak pendidikan sesuai keyakinan yang dianutnya.

Empat tahun silam, pada tahun ajaran 2017/2018, Ihsan

(bukan nama sebenarnya), pelajar SMA Negeri 11 Yogyakarta yang tercatat sebagai pemeluk agama Islam menyatakan keinginannya mengakses layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) di sekolah. Uniknya, Ihsan berasal dari keluarga pesantren.

"Orangtuanya membebaskan untuk memilih sendiri keyakinannya. Setelah mempelajari beberapa paguyuban kepercayaan selama sebulan, dia akhirnya memilih Sumarah," ujar Nugroho, penyuluhan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME SMA Negeri 11 Yogyakarta, Sabtu (28/5/2022).

Ihsan menjadi pelajar pertama di Provinsi DIY yang mengakses layanan pendidikan kepercayaan. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan yang disahkan Mendikbud saat itu, Anies Baswedan.

Permendikbud tersebut mengatur pemenuhan hak pelajar penghayat kepercayaan mendapat pendidikan sesuai keyakinan yang dianutnya, alih-alih dipaksa mengikuti pelajaran salah satu agama. Pasalnya, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berbeda dengan enam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan spiritualitas dan budi pekerti yang didapat para pelajar penghayat kepercayaan sudah sewajarnya berbeda.

Menurut Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berasal dari keyakinan yang diwariskan para leluhur berbagai suku bangsa di Indonesia.

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME didefinisikan sebagai setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai

penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Sedangkan pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di SMA Negeri 11 terlaksana berkat koordinasi antara pelajar dan orangtua murid, sekolah, dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) DIY. Dalam prosesnya, orangtua Ihsan yang beragama Islam membuat surat pernyataan memberi izin putranya mengikuti pendidikan kepercayaan. Mereka juga wajib mengajukan surat permohonan pelayanan pendidikan kepercayaan yang ditujukan kepada kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah berkoordinasi dengan MLKI DIY untuk menyediakan penyuluhan pendidikan kepercayaan.

"Dulu awalnya di emperan, terus di perpustakaan, kadang ada ruang kosong juga bisa dipakai. Kalau di perpustakaan, di tengah pembelajaran banyak siswa keluar masuk jadi tidak optimal," ungkap Nugroho saat ditemui di Pendopo Paguyuban Kepercayaan Sumarah, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Kendati sarana prasarana yang disediakan SMA Negeri 11 Yogyakarta belum sepenuhnya memuaskan, Ihsan termasuk pelajar yang beruntung lantaran prosesnya untuk mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME relatif mulus, terlebih bagi statusnya sebagai pelajar beragama Islam.

Proses Panjang, Diolok-olok Guru dan Teman Pelajar Penghayat Kepercayaan di DIY

Proses panjang dan berliku untuk mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME justru dialami beberapa pelajar dari keluarga penghayat kepercayaan. Disahkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tidak diikuti dengan kesiapan di tingkat bawah, mulai dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga level sekolah.



Tri Sanyoto bersama dua putrinya, Laras dan Indah, pelajar penghayat kepercayaan di DIY (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

Tri Sanyoto (41), orangtua pelajar penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SDN Triwidadi, Bantul mengaku butuh waktu 1,5 tahun untuk memperjuangkan hak anaknya atas layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di sekolah.

"Saat itu kelas tiga, dia kuat banget pengen minta pelajaran kepercayaan. Kelas lima semester dua baru dapat," kata Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Kabupaten Bantul itu, Minggu (12/6/2022).

Sebelum anaknya, Sekar Indah Nugrahaini (12) mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada 2020 silam, Tri bolak-balik berkoordinasi dengan pihak sekolah hingga bertandang langsung ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bantul.

"Saya mengajukan ke guru wali kelas tiga, beliau langsung menolak karena hal baru dan belum paham mau gimana. Kemudian waktu kelas lima ada lampu hijau, wali kelas mengajukan ke kepala sekolah," imbuhan pemilik usaha angkringan di dekat kampus Akprind, Kota Yogyakarta itu.

Kepala Sekolah SDN Triwidadi Bantul, Muginah, mengaku pihaknya membuka tangan seluas-luasnya bagi pelajar penghayat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Meski demikian, ia belum memahami sepenuhnya alur pelaksanaan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di sekolah.

"Kami ke Departemen Agama untuk menanyakan guru pendidikan kepercayaan. Ternyata di sana tidak ada yang mengurus Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Mereka bingung, kami juga bingung karena sebelumnya memang belum pernah ada pelajar penghayat," ujar Muginah dalam diskusi terbatas lintas stakeholder bertajuk Pemenuhan Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SD dan SMP Kabupaten Gunungkidul di Warung Sego Abang Gunungkidul, Rabu (22/6/2022).

Di tempat berbeda, pada tahun ajaran 2019/2020 silam, Darma Tri Hadi Prayitno Wisnutomo (18), pelajar penghayat kepercayaan Sapta Darma di SMK Negeri 2 Yogyakarta, mengaku perlu meyakinkan pihak sekolah agar bersedia memenuhi haknya memperoleh layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

"Saat masa orientasi pelajar baru, saya bilang ke guru agama Kristen kalau saya mau dapat layanan pendidikan kepercayaan. Gurunya nanya, enggak mau ikut agama yang lain saja? Saya kukuh tetap ingin dapat pelajaran kepercayaan," ujarnya saat ditemui setelah acara Sanggaran Remaja Sapta Darma di Sanggar Candi Busono, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Minggu (12/6).

Saat menemui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Yogyakarta, Wisnu juga mendapat pertanyaan serupa. Wakasek Bidang Kurikulum itu berdalih, selama ini sekolah belum pernah melayani pendidikan kepercayaan.

"Beliau bilang tidak ada guru pelajaran kepercayaan. Saya

nekat bilang akan bawa guru sendiri. Padahal saya juga belum tahu siapa guru yang bisa mengajar saya, pokoknya yakin aja dulu," imbuhan Wisnu, sapaan akrabnya.

Selain mengalami perilaku diskriminatif dari guru agama Kristen dan Wakasek Bidang Kurikulum, Wisnu juga pernah mendapat perilaku intoleran dari guru jurusan Mesin SMK Negeri 2 Yogyakarta.

"Pagi-pagi waktu berjabat tangan, ada guru nanya agama saya apa, saya bilang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Beliau menimpali, semoga mendapatkan pencerahan dari Allah SWT," tutur pelajar SMK jurusan Multimedia yang lulus pada Juni 2022 ini.

Wisnu tak sendiri, Oktavia Eka Putri Larasati (20), pelajar penghayat kepercayaan Sapta Darma di SMK Karya Rini Sleman juga beberapa kali mendapat perilaku intoleran di sekolah sejak dirinya tercatat sebagai pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada tahun ajaran 2019/2020 silam.



Pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi DIY (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)



Para remaja Sapta Darma sedang berkegiatan di Sanggar Candi Busana, Kota Yogyakarta. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

"Teman-teman nanya kitab sucinya apa, ada juga yang bilang kok sujud hadap ke timur, hari raya tanggal 1 Sura apa itu tidak musyrik, gitu-gitu," ujar gadis yang akrab disapa Laras itu, Minggu (12/6/2022).

Duduk di kursi kayu di samping Laras, sang adik, Sekar Indah Nugrahaini (12) mengaku mendapat pertanyaan serupa dari teman-temannya di sekolah. Alih-alih sakit hati, Indah mengaku terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kepercayaannya sesuai pengetahuan yang dimiliki.

"Enggak sakit hati. Kalau ditanya ya menjelaskan setahu saya," ujar pelajar yang lulus SD pada Juni 2022 ini.

Dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif menungkapkan, ketidaksiapan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga sekolah dalam memberikan layanan pendidikan kepercayaan lantaran belum ada kebijakan yang solid dan tegas mengikat.

"Dari sisi kebijakan, Permendikbud itu belum kuat. Terlihat semangat pemerintah untuk memenuhi hak para penghayat,

tetapi ada banyak hal yang tidak bisa terakomodasi jika dasarnya hanya Permendikbud," tuturnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/6) malam.

Apabila negara serius hadir memberikan hak pendidikan kepada para penghayat, imbuhan dia, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan sama dengan pemberian layanan pendidikan agama resmi yang diatur Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kedua peraturan ini tegas mewajibkan pelaksana pendidikan di Indonesia dalam hal ini Dinas Pendidikan daerah dan masing-masing sekolah melayani pendidikan agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur dengan jelas dan detail segala perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Mulai dari ketersediaan ruang belajar khusus, tenaga pendidik, hingga insentif tenaga pendidik.

Sementara keberadaan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dua aturan di atas. Hal ini menyebabkan Dinas Pendidikan di daerah dan kabupaten/kota hingga sekolah tidak kunjung siap memberikan layanan pendidikan kepercayaan.

"Layanan pendidikan kepercayaan yang sudah terlaksana hampir pasti karena penghayat proaktif. Padahal harusnya sekolah yang siap duluan memberikan layanan itu," jelas Samsul.

Praktik Baik di Sekolah Lain

Berdasarkan data MLKI DIY, sejak 2018 hingga Juni 2022, tercatat enam sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK di provinsi setempat yang telah melayani pendidikan Kepercayaan

Terhadap Tuhan YME. Keenam sekolah tersebut adalah SDN Triwidadi di Kabupaten Bantul, SMPN 1 Kota Yogyakarta, SMKN 1 Kasihan Bantul atau SMKI Yogyakarta, SMAN 11 Yogyakarta, SMKN 2 Yogyakarta, dan SMK Karya Rini di Kabupaten Sleman.



SMPN 1 Kota Yogyakarta sudah memberikan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada pelajar penghayat. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

Sementara itu, Agus dari Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikpora DIY mengungkapkan, selain keenam sekolah tersebut, ada empat SMA/SMK lain yang memiliki pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

“Data real time menunjukkan ada tambahan empat pelajar penghayat. Satu di SMA Kolese de Brito, SMK Kuncup Samigaluh, SMK Adi Suciyo, dan SMKN 7 Yogyakarta,” jelasnya pada forum diskusi lintas stakeholder yang difasilitasi Yayasan Lembaga Pengkajian Islam dan Transformasi Sosial (YLKiS) di Gunungkidul, Rabu (22/6).

Terlepas dari perbedaan data antara MLKI DIY dengan

Disdikpora DIY, SMPN 1 Kota Yogyakarta dan SMKI Yogyakarta adalah dua sekolah yang memberikan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dengan cukup baik. Para pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di dua sekolah ini mengaku puas dengan layanan pendidikan yang mereka peroleh.

“Enggak ada kendala, ruangan dan buku udah tercukupi,” tutur Werdi Sekar Sasmitoningrum (15), pelajar penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMPN 1 Kota Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 1 Kota Yogyakarta, Agus Margono, menjelaskan pihak sekolah menyediakan ruangan khusus untuk pelajaran agama minoritas dan kepercayaan. Ruang berukuran sekitar 2 x 3 meter persegi itu berada satu lokasi dengan ruang karawitan. Namun, pelaksanaan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME lebih sering dilakukan di perpustakaan sekolah.

“Kalau di perpustakaan malah enak, bersih, ada AC,” jelas Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6) siang.



Buku-buku yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)



Sri Endang Sulistyowati sedang memberikan pelajaran kepada pelajar penghayat kepercayaan di SMK Karya Rini, Sleman. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

Selain ruangan dan buku yang sudah mencukupi kebutuhan, Sekar mengaku tidak pernah merasa didiskriminasi oleh guru dan teman-temannya.

"Teman-teman nanya, gimana sih kepercayaan itu? Ya saya jawab. Mereka nanya karena pengen tahu," tutur pelajar yang akrab disapa Sekar itu.

Senada, Bayu (18) dan Prayitno (16), pelajar penghayat kepercayaan PPN di SMKI Yogyakarta juga mengaku tidak pernah mendapat perlakuan yang menyakitkan hati, baik dari sesama pelajar maupun guru.

"Pernah berpapasan dengan guru, ditanya kenapa tidak ikut salat Jumat. Saya jawab, saya ini kepercayaan," tutur Bayu.

Pertanyaan itu, imbuhan Bayu, berangkat dari ketidaktahuan guru yang bersangkutan tentang keyakinannya. Ia pun memaklumi hal tersebut. Beberapa kawannya juga bertanya mengenai paguyuban kepercayaan yang dianutnya. Bayu mengaku menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan senang hati.

Di SMKI Yogyakarta, Bayu dan Yitno adalah angkatan kedua yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Sebelumnya, sekolah tersebut telah meluluskan dua pelajar penghayat yang menjadi pioneer pelaksanaan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Bantul.

"Kami hanya meneruskan, masuk langsung dapat pelajaran kepercayaan. Sebelumnya kan sudah ada Mas Bagas dan Mbak Sinta yang dapat pelajaran kepercayaan," terang Bayu.

Sebagai angkatan pertama pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di SMKI Yogyakarta, Trisnandi Bagas dan Sinta mengalami sejumlah pengalaman menyakitkan hati, diolok-olok oknum guru dan temannya.

"Waktu masa perkenalan di kelas, saat itu pelajaran Sejarah, gurunya bilang bahwa kepercayaan iku ora cetho (tidak jelas). Dia pulang diam saja, terus nangis dan cerita itu ke saya," ungkap Suroso, ayah Bagas.

Suroso yang juga tokoh Paguyuban Penghayat Kepercayaan PPN itu mengatakan, perlakuan diskriminatif oknum guru Sejarah terhadap putranya terjadi lantaran pihak sekolah belum melakukan sosialisasi.

"Saat saya temui di sekolah, Wakasek Kurikulum langsung minta maaf. Beliau mengaku belum memberikan sosialisasi kepada teman-teman guru mengenai kewajiban sekolah memberikan layanan pendidikan kepercayaan," ujarnya saat ditemui di Pendopo Wisnuwardhana, Kota Yogyakarta, Minggu (19/6/2022) malam.

Wakasek Kurikulum SMKI Yogyakarta saat itu, lanjut Suroso, berjanji memastikan perlakuan diskriminatif pada pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di sekolah tersebut tidak terjadi lagi. Pengalaman pahit dua pelajar penghayat kepercayaan PPN yang kini mahasiswa ISI Yogyakarta itu menjadi catatan khusus pelaksanaan pendidikan kepercayaan di SMKI Yogyakarta. Kini, Bayu dan Yitno memetik buah manisnya. Komunikasi terbuka antara pelajar penghayat

kepercayaan, orang tua/wali murid, dan pihak sekolah menjadi kunci utama pelaksanaan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang inklusif.



Para pelajar yang memeluk Sapti Darma sedang melaksanakan sujudan di Sanggar Candi Busana, Kota Yogyakarta (dok. Sri Endang Sulistyowati)

Sekretaris MLKI DIY, Sri Endang Sulistyowati, menuturkan salah satu sekolah yang sudah melaksanakan layanan pendidikan kepercayaan dengan baik adalah SMPN 1 Kota Yogyakarta.

“Di sana bisa pakai ruangan yang ada LCD-nya, jadi pembelajaran tidak monoton dengan buku saja,” ujar tokoh Paguyuban Kepercayaan Angesthi Sampurnaning Kautaman (ASK) itu.

Selain sarana dan prasarana yang memadai, lanjut Endang, penyuluhan pendidikan kepercayaan di SMPN 1 Kota Yogyakarta juga mendapat insentif dari pihak sekolah.

Insentif itu menjadi angin segar tambahan bagi penyuluhan pendidikan kepercayaan, selain yang mereka terima dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Kemdikbudristek sejak Juli 2020 lalu. Sebelum itu, Kemdikbudristek tak memiliki anggaran khusus untuk memberi insentif para penyuluhan pendidikan

kepercayaan.

Wakasek Bidang Kurikulum SMPN 1 Kota Yogyakarta, Agus Margono, menuturkan bahwa selain memberikan insentif dari dana internal sekolah, pihaknya juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengukuhkan status penyuluhan pendidikan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya.

“Bukan UMR (Upah Minimum Regional), tapi semampu sekolah,” ujar Agus.

Dia juga mengungkapkan SMPN 1 Kota Yogyakarta memiliki kebijakan internal, setiap kelas berisi pelajar dengan latar belakang agama/keyakinan berbeda.

“Itu komitmen kami untuk mengajarkan siswa tentang toleransi,” imbuh Agus.

Sementara itu, menurut Samsul Maarif, praktik baik atau buruk sekolah-sekolah di Provinsi DIY yang sudah memberikan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah fakta-fakta sempalan. Ada penyebab kunci mengapa sekolah A berhasil menyelenggarakan pendidikan kepercayaan dengan baik, sementara sekolah lain diwarnai praktik diskriminasi dan intoleransi.

“Jika pendidikan kepercayaan diatur dalam UU Sisdiknas atau minimal Peraturan Pemerintah seperti pendidikan agama secara umum, saya yakin tidak ada alasan bagi sekolah atau Dinas Pendidikan tidak siap atau belum siap,” imbuh penulis buku Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia itu.

Samsul menambahkan, sebaiknya masyarakat Indonesia khususnya penghayat kepercayaan tidak hanya puas dengan keberadaan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 yang pada praktiknya masih diskriminatif.

“Ada ruang penting dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang harus kita kawal bersama, memperjuangkan layanan pendidikan kepercayaan agar ke depan pelaksanaannya bisa ideal seperti layanan pendidikan agama,” pungkasnya.

Pemerintah DIY Setengah Hati Sediakan Layanan Pendidikan bagi Penghayat

Oleh: Rizka Nur Laily M

Jumat, 1 Juli 2022

Suara Sarjiyana, orangtua pelajar penghayat kepercayaan Palang Putih Nusantara (PPN) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Trowono 2 Kabupaten Gunungkidul, terdengar lirih di sambungan telepon.

Ia meminta wawancara via telepon itu dilakukan di hadapan tokoh PPN, Suroso, sebab khawatir informasi yang disampaikan tidak cukup jelas bagi penerimanya.

Malam itu, kebahagiaan dan semangat Sarjiyana tertangkap jelas melalui intonasi suaranya. Pada tahun ajaran baru 2022/2023 yang dimulai Juli nanti, kedua anaknya, masing-masing naik kelas 2 dan 4 SD bakal mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti sesuai keyakinan yang dianutnya.

"Senang akhirnya pendidikan kepercayaan akan terlaksana," ujarnya singkat, Minggu (19/6/2022).

Senada, Sularto, ayah pelajar penghayat kepercayaan PPN di SDN Kendal, Kabupaten Gunungkidul, juga mengaku gembira lantaran sang anak akan segera mendapat pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) di sekolah.

"Kami sudah siap, baik orangtua maupun anaknya," tuturnya saat ditemui usai acara diskusi terbatas lintas stakeholder bertajuk Pemenuhan Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SD dan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Kabupaten Gunungkidul di Warung Sego Abang Gunungkidul, Rabu (22/6).

Mengenai permohonan layanan pendidikan kepercayaan yang baru diajukan saat anaknya naik kelas 2 SD, Sularto mempertimbangkan kondisi psikologis sang anak. Selain itu, saat anaknya mulai masuk SD, belum ada penyuluhan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Gunungkidul. Alhasil, selama duduk di bangku kelas 1 SD, sang anak mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.

"Di sekolah anak tidak ingin lagi belajar agama yang berbeda dengan keyakinan yang dihayati di rumah," imbuh Sularto.

Terwujudnya layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME itu sejatinya bukan hal istimewa, tetapi hak dasar yang semestinya didapat para pelajar penghayat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut setiap pelajar berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, serta diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Secara lebih khusus, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan menyatakan setiap pelajar penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berhak mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mengacu pada dua aturan di atas, layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Kabupaten Gunungkidul yang akan dimulai Juli 2022, sungguh terlambat. Tapi, toh bisa "dimaafkan" karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

"Tahun 2016, saat Permendikbud tentang layanan pendidikan kepercayaan terbit, ada siswa di Gunungkidul yang ingin mengakses. Tapi hingga lulus SMP tidak kesampaian karena tidak ada penyuluhan pendidikan kepercayaan," ungkap Ketua

Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Gunungkidul, Suroso, Minggu (19/6).

Laki-laki yang juga tokoh PPN itu menambahkan, setelah terbitnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, pihaknya aktif menyosialisasikan hak para pelajar penghayat untuk mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan di kalangan internal PPN. Tak heran jika para pelajar penghayat kepercayaan PPN termasuk yang paling banyak mengakses layanan pendidikan kepercayaan di Provinsi DIY.

"Negara harusnya fair, melihat data orangtuanya kepercayaan ya anak seharusnya dapat pendidikan kepercayaan. Tidak dipaksa ikut pelajaran salah satu agama," ujarnya saat ditemui di Pendopo Wisnuwardhana, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Belum Ada Guru Resmi

Sudah enam tahun sejak Permendikbud tentang layanan pendidikan kepercayaan disahkan, belum ada guru resmi yang memiliki latar belakang pendidikan kepercayaan. Bahkan, Program Studi (Prodi) Pendidikan Kepercayaan di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang baru dibuka tahun 2021 dan merupakan satu-satunya di Indonesia.

Dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif menjelaskan, tidak adanya Prodi Pendidikan Kepercayaan di perguruan tinggi dikarenakan beberapa faktor. Mulai dari tidak adanya nomenklatur dari pemerintah yang menegaskan adanya kebutuhan akan Prodi Pendidikan Kepercayaan hingga pertimbangan perguruan tinggi yang bersangkutan.

"Mendirikan prodi (program studi) baru kan banyak pertimbangannya. Dari sisi kampus sendiri misalnya, bagaimana peluangnya jika buka, ada tidak mahasiswanya," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (30/6/2022)

malam.

Samsul mengatakan, terbentuknya Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Untag adalah bentuk afirmasi.

"Negara tidak terlibat langsung secara kukuh sebagaimana yang dilakukan terhadap agama, misalnya memfasilitasi layanan pendidikan agama di perguruan tinggi khusus. Ini menunjukkan rapuhnya struktur kebijakan untuk layanan pendidikan penghayat kepercayaan," imbuh dia.

Buntutnya, untuk sementara para pelajar penghayat kepercayaan dididik oleh penyuluhan. Sekretaris MLKI DIY, Sri Endang Sulistyowati menuturkan, selama guru resmi yang memiliki latar belakang Pendidikan Kepercayaan belum ada, proses pendidikan dilakukan oleh penyuluhan yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Karena situasi darurat, pengajarnya masih penyuluhan yang sudah lulus bimtek," ujarnya saat ditemui di kediamannya di Kota Yogyakarta, Kamis (9/6/2022).

Di Provinsi DIY, hingga Juni 2022 tercatat ada 13 penyuluhan pendidikan kepercayaan yang telah mengikuti bimtek. Dari jumlah tersebut, delapan penyuluhan aktif mengajar. Tugas mereka tersebar di seluruh wilayah DIY, termasuk di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang sebelumnya tidak ada.

Sebenarnya, dalam formulir pendaftaran calon penyuluhan pendidikan kepercayaan yang diterbitkan Direktorat KMA Kemendikbudristek, yang bersangkutan harus bersedia melaksanakan tugas mengajar di mana saja. Namun, MLKI DIY memberikan penugasan dengan mempertimbangkan jarak antara domisili penyuluhan dengan lokasi sekolah pelajar penghayat kepercayaan.

"Kemarin saya ditawari mengajar di Gunungkidul, tapi tidak

mampu. Saya punya pekerjaan di rumah, anak-anak masih kecil dan harus saya antar ke sekolah. Bukannya saya tidak mau mengabdikan diri, tapi ya harus sesuai kekuatan saya," ungkap Nugroho, salah satu penyuluhan pendidikan kepercayaan di DIY.

Menurut Koordinator Program Yayasan Lembaga Pengkajian Islam dan Transformasi Sosial (YLKiS), Tri Noviana, tidak adanya penyuluhan di Gunungkidul menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan di daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu.

"Syarat jadi penyuluhan S1, di Gunungkidul tidak ada tokoh kepercayaan yang memenuhi syarat itu. Sudah ada siswa penghayat kepercayaan, tapi belum ada pengajarnya," ujarnya di Kantor LKiS, Bantul, Senin (13/6).

Pihak LKiS yang selama ini aktif mengadvokasi pendidikan kepercayaan di DIY melaporkan permasalahan tersebut ke Direktorat KMA Kemendikbudristek.

"Setelah lapor ke Direktorat KMA, Gunungkidul dapat porsi khusus untuk bimtek," imbuh Novi.

Pada Desember 2021 lalu, tokoh PPN di Gunungkidul, Suroso, telah mendapatkan sertifikat lulus bimtek penyuluhan pendidikan kepercayaan dari Direktorat KMA Kemendikbudristek. Dia mengaku siap menjadi penyuluhan kepercayaan di sekolah-sekolah Gunungkidul yang memiliki pelajar penghayat.

"Ada empat siswa di Gunungkidul yang siap, tiga SD, satu SMP," kata laki-laki yang akrab dipanggil Pak So itu.

Distribusi Buku Kacau, Nilai Belum Masuk Dapodik

Belum ada guru resmi yang berlatar belakang Pendidikan Kepercayaan menjadi pekerjaan rumah skala nasional. Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Provinsi DIY juga masih menghadapi banyak kendala, misalnya soal distribusi buku yang belum optimal. Nugroho mengungkapkan, selama

mengajar dia hanya mendapat satu buku untuk pegangan.

"Siswa saya kasih *soft file*, tidak ada buku cetaknya mungkin karena terbatas ya stoknya," ujarnya saat ditemui di Pendopo Paguyuban Kepercayaan Sumarah di Ketanggungan, Kota Yogyakarta, Sabtu (29/5).

Sementara itu, Sekretaris MLKI DIY, Sri Endang Sulistyowati menuturkan, ketersediaan buku untuk penyuluhan dan pelajar penghayat kepercayaan di DIY bisa dipenuhi dengan stok yang ada di rumahnya.

"Direktorat KMA mengirimnya memang ke Sekretaris MLKI. Kalau ada siswa enggak dapat berarti gurunya tidak minta ke saya," tuturnya.

Selain itu, catatan merah lain dalam pelaksanaan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Provinsi DIY adalah pihak sekolah tidak bisa memasukkan mata pelajaran tersebut ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini berujung pada nilai Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tidak bisa masuk pada kolom rapor elektronik (E-raport).

"Tidak bisa dimasukkan ke Dapodik karena belum ada guru resmi, atau kalau penyuluhan ini diberi SK dari Dinas Pendidikan Kota sebenarnya (mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan) sudah bisa ditampilkan di e-raport," terang Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum SMPN 1 Kota Yogyakarta, Agus Margono.

Selama ini, kata dia, pihak sekolah membuatkan lembar penilaian khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang dilampirkan pada rapor siswa.

Sedangkan di SMK Karya Rini Sleman yang saat ini belum menerapkan sistem rapor elektronik, belum tercantumnya mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam Dapodik sekolah tidak menjadi kendala.

"Kami rapornya masih manual, jadi mata pelajaran pendidikan kepercayaan ya ditulis langsung seperti mata pelajaran lain.

Jadi satu, tidak terpisah," tutur Wakasek Bidang Kurikulum SMK Karya Rini Sleman, Eko Sulistyawati.

Tak Semua Sekolah Siap

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun merdeka.com di lapangan, enam sekolah di DIY yang telah memberikan layanan pendidikan kepercayaan tak ada satu pun yang siap sejak awal. Keenam sekolah tersebut adalah SMK Karya Rini Sleman, SMPN 1 Kota Yogyakarta, SD Triwidadi Bantul, SMAN 11 Yogyakarta, SMKN 2 Yogyakarta, dan SMKI Yogyakarta. Faktor utama ketidaksiapan tersebut yakni minimnya informasi yang miliki pihak sekolah terkait Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

"Pengalaman pertama bagi kami. Saya baca-baca (Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016), mulai paham. Banyak diskusi dengan orangtua pelajar penghayat, dari beliau saya jadi banyak tahu tentang alur pelaksanaan pendidikan kepercayaan," tutur Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum SMK Karya Rini Sleman, Eko Sulistyawati, Rabu (22/6).

Dia menjelaskan, SMK Karya Rini Sleman terbuka menerima pelajar dari berbagai latar belakang agama/keyakinan. Namun, baru sekali ada siswa penghayat yang mengajukan permohonan mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan di sekolah, yakni tahun 2019 silam.

Senada, Wakasek Bidang Kurikulum SMPN 1 Kota Yogyakarta, Agus Margono, mengaku pihaknya pertama kali memberikan layanan pendidikan kepercayaan tahun 2020 lalu.

"Sekolah bingung karena baru kali ini. Mau diikutkan pelajaran Agama Katolik seperti waktu SD, tapi siswa ini penghayat kepercayaan. Waktu itu terus MLKI ke sekolah, bilang kalau sudah ada guru (penyuluhan) dan menunjukkan buku ajarnya," ungkap Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Kepala Sekolah SDN Triwidadi Kabupaten Bantul, Muginah, menceritakan tak lama setelah pihaknya menerima surat

permohonan layanan pendidikan kepercayaan dari orangtua pelajar, dia mendatangi Kantor Kemenag setempat untuk menanyakan ketersediaan guru. Padahal hingga kini segala urusan terkait Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME termasuk layanan pendidikan kepercayaan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Ini menunjukkan Muginah tidak paham bagaimana alur pelaksanaan layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di sekolah.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Trowono 2 Kabupaten Gunungkidul, Supartini mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih bingung bagaimana alur pelaksanaan pendidikan kepercayaan di sekolah. Di SDN 2 Trowono tercatat dua pelajar penghayat yang sudah mengajukan permohonan mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan yang akan mulai pada tahun ajaran 2022/2023 nanti.

"Informasi yang saya terima beda-beda, masih bingung mana alur yang benar secara kedinasan," ujarnya saat ditemui di Gunungkidul, Rabu (22/6).

Menurut Koordinator Program YLKIS, Tri Noviana, sekolah mengalami kebingungan dalam memberikan layanan pendidikan kepercayaan karena tidak ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan setempat.

"Negara (pemerintah pusat) sudah hadir untuk memenuhi hak pelajar penghayat, tapi instansi di bawahnya belum. Belum semua daerah menerima keberadaan layanan pendidikan kepercayaan," ujarnya.

Peran Dinas Pendidikan, Antara Ada dan Tiada

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 3 menyebutkan dalam menyediakan pendidikan kepercayaan, pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Provinsi DIY, impelementasi

pasal ini belum optimal. Buktinya, koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekolah, dan MLKI setempat sangat minim.

Indikasinya, ada perbedaan informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Suherman menuturkan hingga kini pihaknya belum mengetahui informasi keberadaan pelajar penghayat kepercayaan di tingkat SMA/sederajat swasta. Sedangkan Wakasek Bidang Kurikulum SMK Karya Rini Sleman, Eko Sulistyawati mengaku pihak sekolah sudah melaporkan informasi pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan ke Dinas Dikpora DIY.

"Belum tahu ada pelajar penghayat di SMK swasta. Setahu kami ya baru ada di SMKI Yogyakarta dua siswa dan SMKN 2 Yogyakarta satu siswa," ujar Suherman saat ditemui di ruang kerjanya di Dinas Dikpora DIY, Senin (20/6).

Selain itu, ketidaksiapan pihak sekolah saat pertama kali menerima permohonan layanan pendidikan kepercayaan karena tidak ada sosialisasi dari Dinas Dikpora DIY maupun Dinas Pendidikan di tiap kabupaten/kota soal Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016. Saat dikonfirmasi, Suherman tak menjelaskan alasan mengapa Dinas Dikpora DIY tidak melakukan sosialisasi khusus terkait Permendikbud ini.

"Kami sosialisasikan ke sekolah yang memiliki siswa penghayat kepercayaan, kan tidak semua sekolah ada siswa penghayatnya," ujar Suherman.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul, Asbani, mengaku pihaknya pernah mendapatkan sosialisasi terkait Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA). Ia menambahkan dalam beberapa kesempatan, Disdik Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi Permendikbud yang sama kepada sekolah

dasar dan menengah pertama di wilayah kerjanya.

"Kami sosialisasi ke daerah-daerah pada even-even yang ada, artinya memang tidak secara khusus," kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (27/6).

Asbani juga mengungkapkan, mulai tahun 2020 hingga awal Juni 2022 ini pihaknya belum menerima laporan dari sekolah soal keberadaan pelajar penghayat kepercayaan.

"Baru dua minggu lalu (sekitar pertengahan Juni 2022), ada laporan pelajar penghayat kepercayaan di SDN Trowono II Kecamatan Saptosari," ujarnya.

Ia menegaskan, Disdik Kabupaten Gunungkidul akan melakukan pendataan ulang berapa jumlah pelajar penghayat kepercayaan di wilayah tugasnya.

"Lalu koordinasi dengan MLKI karena kami tidak punya tenaga pendidik," jelas mantan kepala sekolah itu.

Sementara itu, ditanya soal kendala yang dialami pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dikpora DIY dan Disdik Kabupaten Gunungkidul, jawaban Suherman dan Asbani serupa. Mulai dari belum ada data valid persebaran pelajar penghayat kepercayaan, ketiadaan guru pendidikan kepercayaan, hingga tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di sekolah.

Padahal, Ketua MLKI DIY, Bambang Purnama mengatakan kendala-kendala tersebut bisa teratasi jika Dinas Pendidikan daerah berkoordinasi dengan MLKI setempat.

"Kurikulum, silabus, RPP, buku teks pelajar, guru (penyuluhan), semuanya sudah ada," tutur laki-laki yang juga dosen mata kuliah Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) itu.

Menurut Samsul Maarif, ketidaksiapan sekolah dan Dinas Pendidikan daerah dalam memberikan layanan pendidikan kepercayaan dikarenakan belum ada kebijakan yang solid dari pemerintah pusat. Disahkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tidak diikuti dengan kesiapan infrastruktur yang

menunjang pelaksanaannya. Ketiadaan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi hingga insentif tenaga pendidik yang tidak jelas menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan.

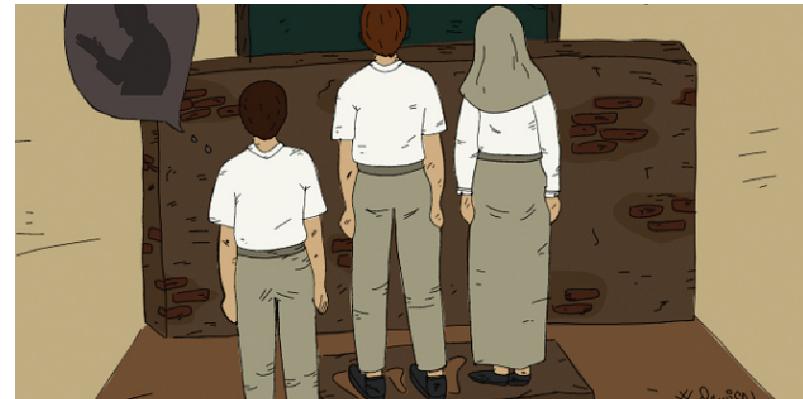
"Layanan pendidikan kepercayaan masih jauh dari ideal, harusnya sama dengan layanan pendidikan agama. Negara hadir menyediakan guru dan infrastruktur pendukung. Sekarang belum ada kebijakan yang menuntut sekolah untuk itu," ujar dia.

Padahal, lanjut dia, muatan materi yang diajarkan dalam pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan YME bersifat inklusif dan dibutuhkan bangsa. Menurut Samsul, penghayat kepercayaan mempunyai modal penting bagaimana mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan komitmen kebangsaan melalui pendidikan kepercayaan di sekolah dan/atau kampus.

Dalam pelaksanaan pendidikan kepercayaan, pelajar dan penyuluhan tidak harus berasal dari paguyuban kepercayaan yang sama. Selain itu, materi-materi yang dipelajari juga tidak spesifik menjurus pada satu paguyuban kepercayaan tertentu, melainkan memberikan pengetahuan kepada pelajar betapa beragamnya paguyuban kepercayaan di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan pendidikan agama hari ini, di mana pelajar beragama Islam misalnya, diajar oleh guru beragama Islam dan hanya mempelajari pengetahuan seputar agama yang bersangkutan.

"Modul-modul pendidikan kepercayaan itu kan universal sifatnya, itulah pendidikan yang ideal. Kita belajar agama sebenarnya ingin mengenal agama orang lain agar lebih terasa persaudaraan sebangsanya, itu yang tidak dimiliki pelajaran agama secara umum," pungkas Samsul.



Proses Berliku Pengadaan Layanan Pendidikan Kepercayaan di Gunungkidul

Oleh: Halimatus Sakdiyah E.M

Dimuat di situs lpmrheto.com, 6 Juli 2022

Belum diperolehnya hak pendidikan kepercayaan bagi siswa-siswi sekolah di Gunungkidul membuat para penghayat kepercayaan gelisah.

Siswa-siswi penghayat terpaksa mengenyam pendidikan agama yang tak dianutnya. Para orangtua khawatir regenerasi penghayat terhenti. Proses perjuangan pengadaan layanan itu berliku panjang dan menemui beragam tantangan.

Telepon seluler Sapri (bukan nama sebenarnya) berdering. Dari seberang, suara Ketua Cabang Palang Putih Nusantara

(PPN), Suroso menanyakan kesiapan berkas anaknya Sapri, sebut saja Gendis yang akan diserahkan kepada sekolah barunya. Suroso menyempatkan epada memberikan semangat kgadis lulusan sekolah dasar. Pengeras suaranya diaktifkan dan saya diizinkan mendengarkan dan mengutip pembicaraannya.

"Halo, *ketompo ning ndi Nduk?* [diterima dimana nduk?]," sapa Suroso.

"*Ning* (di) SMP Negeri 1 Saptosari," jawab Gendis.

"Jalan terus toh pendidikan penghayat?"

"*Nggeh* [iya],"

"Semangat *nggeh*, *ra' sah* malu, banyak yang dukung, [Semangat ya, tidak usah malu, banyak yang mendukung]," ujar Suroso.

"*Nggeh*,"

Telepon ditutup. Gendis tersenyum bungah. Keinginannya mendapat layanan pendidikan penghayat kepercayaan sudah di depan mata. Sapri optimis, anaknya bisa mengerti ajaran orangtuanya dan kelak meneruskan sebagai penghayat.

Keluarga Sapri adalah satu dari empat keluarga di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menganut kepercayaan Kejawen Urip Sejati, Palang Putih Nusantara (PPN). Ini adalah salah satu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Gendis belum dapat mengakses pendidikan kepercayaan hingga tahun terakhir di sekolah dasar. Ia terpaksa mengikuti pelajaran agama Islam.

Siang itu, Gendis terlihat gugup dan malu menceritakan pengalamannya mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

"*Yo jawab, sak isane*, baca Al-Fatihah, *po piye* [Ya jawab, sebisanya, baca Al-Fatihah, apa gimana]," ujar kakaknya, sebut saja Ki Pangkir saat meyakinkan Gendis untuk menjawab.

"Iya, disuruh baca surat-surat [surah-surah pendek Al-Qur'an]," ujar Gendis.

Ki Pangkir mengatakan sejak awal mendaftar, sekolah sudah diberi tahu bahwa Gendis dan keluarganya adalah penghayat kepercayaan. Tetapi sekolah tidak dapat memberikan pendidikan kepercayaan bagi Gendis karena saat itu belum ada guru pengajar penghayat.

Keluarga Gendis mau tidak mau menerima dan membiarkan Gendis mendapat pendidikan agama Islam. Pihak sekolah memberikan keringanan pada Gendis mengikuti pendidikan agama Islam semampunya dan tidak memaksa memperoleh nilai baik.

Gendis pun pernah diejek teman-temannya karena dia penghayat. Gendis tampak enggan menceritakan kembali peristiwa lama itu.

"Diejek nggak punya agama," kenang Gendis.

Semula, ia mendiamkan saja ulah teman-temannya. Usai mendengar ceritanya, keluarga Gendis meminta sekolah memberikan pemahaman pada para siswa dan menguatkan Gendis kembali.

Gendis merasa perundungan yang dialaminya belum keterlaluan. Namun keluarganya akan mengambil langkah tegas jika ada yang mengejek Gendis.

"Saya cuma mau bilang, *nek kelewatan tak tekanane* [kalau keterlaluan, saya datangi], begitu saya," ujar Ki Pangkir.

Sejak peristiwa itu, Gendis mengaku tidak pernah lagi diejek teman-temannya.

Keluarga Gendis mengetahui kabar ada pendidikan kepercayaan dari pengurus pusat PPN pada akhir 2020 lalu. Itu yang jadi alasan, mereka ingin mengakses layanan itu untuk Gendis saat duduk di SMP.

"Karena saya juga penghayat. Orangtua juga penghayat. Saya juga ingin pendidikan sebagai penghayat karena ingin meneruskan perjuangan orangtua," jawab Gendis.

Gendis menyatakan tak takut dianggap berbeda atau malah dirundung teman-temannya.

"Didiemin aja," jawabnya.

Sapri menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar anaknya bisa memperoleh layanan pendidikan kepercayaan di bangku SMP saat pendaftaran ulang pada 26 Juni 2022. Sedangkan masa belajar di SMP dimulai 11 Juli 2022. Dokumen-dokumen itu adalah Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua, surat pengantar dari PPN, surat pernyataan Gendis dan orangtuanya adalah penghayat kepercayaan, dan surat permohonan layanan pendidikan kepercayaan ke sekolah.

Menyusun Rencana agar Anak Tak Dirundung

Di Desa Kepek juga ada kakak beradik, Resti dan Yuli (bukan nama sebenarnya) yang merupakan siswa penghayat kepercayaan PPN. Mereka masih duduk di SD Trowono II, kelas 3 dan kelas 1. Bahkan pihak sekolah tidak tahu mereka adalah penghayat kepercayaan.

Saat saya bertandang ke rumahnya, Selasa (07/06), Resti dan Yuli tampak malu dan enggan berbincang. Mereka memilih masuk ke rumah usai bersalaman.

Orangtuanya, Suryono dan Sartini (bukan nama sebenarnya) berkisah, dahulu banyak penghayat dari beragam organisasi di lingkungan mereka. Seiring berjalaninya waktu, jumlahnya berkurang karena banyak yang meninggal dan generasi muda tidak lagi menganutnya. Suryono dan Sartini sendiri berharap anak-anaknya bisa meneruskan keyakinan mereka sebagai penghayat.

Terlebih, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME saat ini telah diakui secara resmi oleh negara. KTP mereka sudah memiliki kolom Kepercayaan dan isinya Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dan pernikahannya telah tercatat secara resmi dalam catatan sipil. Jika pendidikan kepercayaan dapat diberikan kepada anak-anaknya, maka kian lengkap kebahagiaan mereka.

"Lebih lega, lebih seneng lagi. Biar (anak-anak) menyambung

perjuangan kami ke depan. Jadi nggak sia-sia sampai di sini, ada penerusnya," ucap Suryono.

Selama ini, ia tak keberatan dua anaknya mendapat pendidikan agama Islam di sekolah. Bagi Suryono, pelajaran ini untuk menambah pengetahuan anak-anaknya saja dan tidak diterapkan di rumah.

Meskipun begitu, Suryono ingin anaknya memperoleh pendidikan kepercayaan pada tahun ajaran baru ini. Suryono optimis, dua anaknya akan mengenyam pendidikan kepercayaan itu.

"Gurunya sudah ada, tinggal laporan ke sekolah. Yang diajarkan juga sudah tahu, sudah pernah liat [modulnya], pernah dikirimkan Pak Suroso," ujarnya.

Suryono dan Sartini berencana meminta layanan pendidikan kepercayaan dan meminta pihak sekolah. Mereka juga minta agar pihak sekolah tidak langsung memberitahukan identitas anak-anaknya kepada teman-temannya. Cara ini diharapkan dapat membantu menghindarkan anak-anaknya dari kemungkinan perundungan dan dikucilkan oleh teman-temannya.

Bercita-cita sebagai Guru Penghayat

Sah Susanto adalah pemuda penghayat kepercayaan yang tidak memperoleh layanan pendidikan kepercayaan selama ia duduk di SMP dan SMK Taman Siswa Playen. Ia lulus dari SMK, tahun 2022 ini.

Padahal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan sudah ada saat ia duduk di bangku SMP. Lagi-lagi penyebabnya adalah tidak ada guru atau penyuluhan penghayat kepercayaan di Gunungkidul.

Sama dengan penghayat kepercayaan lainnya, Santo juga terpaksa mengikuti pendidikan agama Islam.

"Islam, terpaksa itu sampai lulus, ya diikuti saja," ujar Santo saat ditemui di rumah Gendis, Senin (30/05).

Guru sekaligus Wakil Kurikulum di SMK Taman Siswa, Intan Kurnia Putri membenarkan sekolah belum mampu memberikan layanan pendidikan kepercayaan. Bahkan nilai Pendidikan agama Islamnya tinggi.

Pengalaman tidak memperoleh pendidikan kepercayaan selama sekolah mendorong Santo ingin menjadi guru penghayat kepercayaan di Gunungkidul. Untuk itu ia kuliah di Program Studi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag). Santo berhasil mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), program beasiswa kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membiayai kuliahnya.

Sekolah Tak Tahu Apa-apa

Sementara pihak SD Trowono II mengaku baru mengetahui kedua siswanya, Resti dan Yuli adalah penghayat kepercayaan setelah orangtua datang ke sekolah tiga hari sebelum kedatangan saya. Selama ini, pihak sekolah mengira keduanya beragama Islam seperti mayoritas warga Desa Keprek.

Staff Tata Usaha SD Trowono II, Winarsih menceritakan dahulu Resti dan Yuli sekolah di TK Masithoh, Kamis (09/06). Mereka mengikuti kegiatan agama di TK itu, seperti latihan membaca bacaan salat, hafalan surat-surat pendek, serta sholawatan.

Menurut Winarsih, kedua siswa itu tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti pendidikan agama Islam. Tidak ada pengajuan keberatan dari orangtua membuat sekolah tidak tahu bahwa kedua siswanya adalah penghayat kepercayaan.

"Kan, di sini pendidikan agama Islam. Walinya juga gak komplain gimana-gimana gitu. Jadi kami *mboten ngeh* (tidak tahu), soalnya walinya ngikut saja," terangnya.

Saya kemudian meminta izin melihat dokumen kedua siswa tersebut. Di dalamnya secara jelas tercatat tulisan

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama. Winarsih mengaku baru mengecek kembali dokumen itu setelah orangtua Resti dan Yuli datang ke sekolah.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sapto Sari, Heni Kushardiyani, melalui telepon mengatakan, pihak SD Trowono II telah melaporkan dua siswanya yang penghayat kepercayaan, Selasa (14/06). Heni Ia telah mengimbau sekolah menemui wali siswa untuk mendiskusikan tentang layanan pendidikan kepercayaan yang diharapkan.

"Dari wali sudah meminta layanan, sementara kami belum tahu untuk guru-guru. Katanya sudah ada yang siap mengajar. Modul dan lainnya juga belum tau," ujar Heni.

Sah Susanto, yang turut membantu menyiapkan dokumen Resti dan Yuli membenarkan. Bahwa pihak sekolah telah menemui orangtua murid untuk berdiskusi tepat sehari setelah kedatangan saya di sekolah.

Alasan Layanan Pendidikan Kepercayaan Belum Diadakan

Jika para penghayat kepercayaan mengetahui informasi tentang layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul pada tahun ajaran 2022, maka pihak sekolah justru kekurangan informasi. Belum ada persiapan apapun dari sekolah untuk memberikan layanan pendidikan kepercayaan.

Sekolah belum mengetahui mekanisme pelaksanaan pendidikan kepercayaan dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan, organisasi penghayat, maupun MLKI.

Kepala Sekolah SD Trowono II, Supartini menjelaskan kesulitan lainnya seperti mencari tenaga pengajar khusus penghayat kepercayaan dan ruang khusus untuk siswa yang jumlahnya sedikit, dan buku pelajarannya.

"Tidak ada persiapan karena memang tidak tahu. Tidak tahu kalau ada siswa yang aliran kepercayaan itu, pelajarannya bagaimana, kitabnya juga bagaimana. Saya juga belum dapat gambaran apa-apa kalau aliran kepercayaan," jelas Supartini,

Kamis (09/06).

Kondisi sama juga terjadi di SMP N 1 Saptosari. Lantaran belum ada siswa penghayat sekolah di sana, pihak sekolah tidak mempersiapkan layanan pendidikan tersebut. Kepala Sekolah SMPN 1 Saptosari, Suyanta ketika dihubungi melalui WhatsApp menjelaskan sejauh ini belum ada sosialisasi mengenai pendidikan kepercayaan,Kamis (09/06)

"Karena itu merupakan hak, kami terima sesuai aturan yang ada. Sekolah akan mengupayakan memberi pelayanan sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," tulis Suyanta.

Saya juga mendatangi SMK Taman Siswa Playen yang pernah mempunyai siswa penghayat kepercayaan tetapi belum dapat mengakses layanan pendidikan kepercayaan hingga lulus. Jawabannya sama, belum ada sosialisasi serta belum tersedianya pengajar.

"Kami kan takut kalau memberikan materi yang berkaitan dengan (pendidikan kepercayaan) itu, kami sendiri pun gak tahu," kata guru sekaligus Wakil Ketua Kurikulum SMK Taman Siswa Playen, Intan Kurnia Putri, Senin (13/06).

Sementara itu minimnya data jumlah siswa penghayat kepercayaan di Gunungkidul juga menjadi alasan belum tersedianya layanan pendidikan kepercayaan di sana.

Saya mengunjungi Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul Senin (13/06). Kepala Dinas, Nunuk Setyowati tidak berada di kantor. Saya ditemui Sekretaris Dinas Pendidikan, Winarno dan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Taufik Aminudin.

Winarno mengatakan tidak ada data jumlah siswa penghayat dan keterbatasan guru menjadi alasan tidak adanya layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

Taufik menjelaskan, komunikasi antara Disdik dan MLKI berlangsung ketika mereka bersama-sama memverifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tentang jumlah pelajar penghayat yang ternyata salah. Mereka mengunjungi SD

Gelaran 1 Karangmojo yang jaraknya cukup dekat dari Disdik. Dapodik merupakan sistem pendataan berskala nasional dan merupakan sumber data utama dalam pendidikan.

Perwakilan Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat (KMA) Kemendikbudristek, Harti dalam workshop bertajuk Layanan Pendidikan Kepercayaan yang diselenggarakan Pusat Kajian Islam dan Sosial (Yayasan LKiS), menyatakan ada 108 siswa penghayat kepercayaan di Gunungkidul. Mereka terdiri dari 88 anak TK, 11 anak di tingkat SD, dan 9 anak di tingkat SMP/SMK pada 27 Januari 2022.



Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Winarno dan Kepala Bidang SD, Taufik Aminudin. (Foto: Halimatus Sakdiyah E.M)

"Kami datang ke SD, di sana memang ada kesalahan ketika input data. Saat PPDB [Pendaftaran Peserta Didik Baru] SD hanya ngambil data dari TK. Nah, dari TK itu yang agamanya tidak dimasukkan, langsung dianggap penghayat," papar Taufik.

Menurut Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Asbani mengatakan Disdik belum memiliki data jumlah siswa penghayat kepercayaan di Gunungkidul.

"Jadi belum ada laporan dari sekolah atas keberadaan siswa

penghayat. Nah, ketika kami belum tahu, berarti kami belum memberikan layanan," ujar Asbani.

Praktik Baik

Ketua MLKI Gunungkidul dan Ketua Cabang Palang Putih Nusantara (PPN) Gunungkidul, Suroso adalah tokoh penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang aktif memperjuangkan hak-hak penghayat. Dulu ia memperjuangkan hak penghayat agar dapat mencatatkan kepercayaannya pada KTP. Kini ia berjuang lagi mengupayakan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.



Ketua MLKI Gunungkidul, Suroso di Pendopo Wisnuwardana. (Foto: Halimatus Sakdiyah E.M)

Bekerja sama dengan Yayasan LKiS, Suroso turut melakukan penelitian tentang pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul sejak akhir 2020 lalu. Hasilnya, ada banyak hambatan, seperti tidak ada tenaga penyuluhan, minim data, dan masih ada kekhawatiran dari orangtua.

"Hampir rata-rata orangtua alasannya sama, khawatir anak-anaknya mendapatkan perlakuan seperti orangtuanya dulu," ujar Suroso ketika saya wawancara untuk tugas skripsi, Selasa (05/04). Ia memberi izin saya mengutip pernyataannya untuk tulisan ini.

Suroso mengatakan tahun 90-an, para penghayat kepercayaan mendapatkan tentangan yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Bahkan negara lebih parah lewat lurah, camat, dan perangkatnya.

Saat melakukan penelitian itu, Suroso dan tim LKiS juga melakukan sosialisasi tentang pendidikan kepercayaan dan mendata siapa saja penghayat kepercayaan yang menginginkan anaknya memperoleh layanan pendidikan itu.

Hasil penelitian disusun menjadi *policy brief* yang diserahkan kepada pihak kementerian, khususnya Direktorat KMA Kemendikbudristek. Dikutip dari *policy brief* tersebut, dari 292 penghayat yang telah mengganti KTP, sebagian besar berusia lanjut dan anaknya sudah dewasa.

Ada 6 peserta didik SD dari 23 KK, tetapi hanya 4 peserta didik dari 3 KK yang ingin mengakses layanan pendidikan kepercayaan. Hingga saat ini, data 4 siswa itu yang dikantongi Suroso dan menjadi motivasinya memperjuangkan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

Akhirnya, Suroso berhasil mengikuti bimbingan teknik (bimtek) penyuluhan kepercayaan yang diadakan oleh Direktorat KMA Kemendikbudristek pada 2021 lalu. Dari tiga peserta bimtek asal Gunungkidul, hanya Suroso yang lolos dan telah memperoleh sertifikat dari Direktorat KMA. Dua peserta gagal karena tak bisa mengikuti bimtek sampai selesai.

"Siap! Saya siap mendonasikan diri saya, gak ngarep-ngarep [berharap] karena saya masih menganggap apapun yang saya lakukan ini perjuangan," tutur Suroso pada wawancara, Sabtu (25/06).

Berdasarkan prosedur yang ada, untuk mengakses layanan pendidikan, wali murid harus mengajukan surat pernyataan sebagai penghayat dan surat permohonan layanan pendidikan kepercayaan ke sekolah. Setelah itu, sekolah melaporkannya ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan mengkoordinasikannya dengan MLKI untuk memperoleh modul dan penyuluhan. Prosedur ini disebut Suroso dengan "cara dari bawah ke atas".

Menurut dia, cara ini memberi celah terjadinya perundungan terhadap anak penghayat kepercayaan karena sekolah hanya memberikan layanan dari permohonan yang ada. Tanpa memiliki pemahaman tentang pendidikan kepercayaan. Suroso berinisiatif mengubah prosedur itu “dari atas ke bawah” agar dinas memberikan sosialisasi terlebih dulu kepada sekolah sebelum layanan diberikan.

“Harapan saya kalau nanti *clear* di Disdik jadi punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada lembaga di bawahnya. Tidak ada alasan lagi sekolah itu tidak tahu,” jelas Suroso di Pendopo Wisnuwardana, Jum’at (10/06).

Pendekatan Suroso terhadap pihak Dinas Pendidikan Gunungkidul sejauh ini berupa lobi yang dilakukan secara kultural pada awal 2022. Saat itu, Suroso mewakili MLKI mengikuti kegiatan studi banding ke Kampung Jalawastu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Suroso melakukan pendekatan kepada perwakilan Disdik.

Sayangnya, mendekati tahun ajaran baru, ada perombakan struktur pimpinan di dinas itu. Orang yang dilobi Suroso pindah tugas sehingga advokasi harus diulang dari awal.

“Saya punya 4 anak yang siap untuk dididik pendidikan kepercayaan. *Deal enggak deal*, tahun ajaran baru ini tetap jalan,” tegas Suroso.

Yang terpenting, Suroso melanjutkan, anak-anak penghayat yang ingin mengakses layanan tersebut tidak terganggu perkembangan mentalnya. Pihaknya pun berusaha membantu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyosialisasikan ke Disdik. Kemudian Disdik bersama MLKI menyosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Soal verifikasi data Dapodik, Suroso membenarkan terjadi kesalahan data. Ia menyayangkan sampel sekolah yang digunakan bukan sekolah di wilayah yang banyak penghayat kepercayaan berada.

“Sejak awal, saya juga gak yakin kalau SD itu ada siswa

penghayat karena memang di situ tidak ada data dari lima kelompok paguyuban [organisasi penghayat kepercayaan] yang aktif,” ujar Suroso, Sabtu (25/06).

Pada tanggal 22 Juni 2022, LKiS menggelar *focus group discussion* (FGD) tentang layanan pendidikan kepercayaan yang dihadiri berbagai pihak yang berkepentingan. LKiS mengundang Kepala Sekolah SD Negeri Pajangan, Bantul sebagai pembicara agar bisa membagikan pengalamannya dalam memberikan layanan pendidikan penghayat kepercayaan kepada para guru di Gunungkidul.

“Targetnya memberikan informasi ada empat siswa penghayat dan mendiskusikan bagaimana strateginya agar mereka mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan. Lalu memberikan penjelasan tentang praktik baik sekolah lain yang telah memberikan layanan pendidikan kepercayaan di SD,” kata Program Manager dari LKiS, Tri Noviana, Senin (26/06).

Perwakilan Disdik tidak berkenan diwawancara karena merasa tidak berwenang. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul menolak ditemui dengan alasan banyak tamu dan persoalan tersebut telah dipasrahkan kepada bidang-bidang di bawahnya.

Saat ini, Suroso fokus advokasi ke sekolah-sekolah dan mendampingi wali murid yang ingin mengakses pendidikan kepercayaan. Ia sudah merasa cukup melakukan pendekatan terhadap pihak Disdik. Ia berharap Disdik memulai komunikasi lebih dulu dan menunjukkan komitmennya untuk memenuhi layanan pendidikan kepercayaan di Gunungkidul.

“Harapan saya, dinas yang mendekati saya. Kami kan sudah tiga kali Mbak, jadi apapun itu hitungannya tiga kali. Jadi nek hitungan normal kan, lahir, urip, mati. Kalau sudah tiga kali tanggapannya tidak ada progres apa-apa, ya kami aksi. Dinas mau menolak atau tidak, yang di bawah jalan terus. Gak akan terpengaruh,” tukas Suroso.

Menanggapi strategi Suroso, Tri Noviana menyatakan penghayat

kepercayaan yang mereka dampingi berhak menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan. Meskipun Yayasan LKiS tetap akan mendampingi advokasi ini secara perlahan.

"Ya gak papa, itu hak mereka untuk mengajukan pengajuan layanan pendidikan penghayat," tutur Tri Noviana.

Pendidikan Kepercayaan Model Pendidikan Inklusif

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sudah mengakui penghayat kepercayaan memiliki kedudukan setara dengan agama. Para penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dengan para pemeluk agama, termasuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kepercayaan mereka. Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Satuan Pendidikan, bahwa peserta didik penghayat dapat mengakses pendidikan agama dengan pendidikan kepercayaan

Dosen Center for Religious and Cross-culture Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Samsul Ma'arif mengatakan pendidikan kepercayaan bagi anak-anak penghayat merupakan upaya mengatasi diskriminasi yang selama ini mereka alami. Anak-anak penghayat tidak lagi terpaksa memilih pendidikan agama lain di sekolah yang berbeda dengan kepercayaan orangtuanya.

"Pendidikan kepercayaan saat itu penting supaya tidak ada diskriminasi dan agar anak-anak penghayat itu tidak menjadi musuh bagi orangtuanya, bisa mempelajari dan menghormati orangtuanya dan ajarannya," terang Samsul, Jum'at (10/06).

"Putusan MK itu sebagai produk kebijakan negara terakhir mestinya menjadi pedoman dalam isu ini. Jadi putusan MK menyatakan, agama tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat selama tidak termasuk kepercayaan. Jadi negara ketika ingin mengelola agama, baik itu KTP, pendidikan, rumah ibadah, dan seterusnya mesti termasuk kepercayaan."

Jadi hak kepercayaan itu setara," tambah Samsul.

Dengan keputusan itu, tidak ada alasan lagi melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Samsul mengapresiasi perjuangan para penghayat kepercayaan Gunungkidul dalam memperjuangkan pendidikan kepercayaan.

Samsul menambahkan pendidikan kepercayaan juga merupakan



Penulis sedang mewawancara Dosen CRCS UGM, Samsul Ma'arif di UGM.
(Foto: Halimatus Sakdiyah E.M)

contoh model pendidikan inklusif. Ada 192 kepercayaan yang tercatat di Indonesia. Apabila semua ajaran kepercayaan itu dirangkum dalam satu modul pembelajaran memungkinkan peserta didik saling mengetahui kepercayaan lain. Menurut Samsul, itu merupakan contoh baik untuk menghilangkan stigma.

"Model pendidikan inklusif ini tidak ada dalam pendidikan agama," tegasnya.

Sementara Ketua MLKI Gunungkidul, Suroso menegaskan arti penting pendidikan kepercayaan bagi penghayat, yaitu sebagai dasar regenerasi.

"Kapan kami punya kesempatan untuk mendidik generasi muda kalau anak-anak kami dipaksa negara untuk mengikuti pendidikan agama?" tanya Suroso.

Kisah Hani, Siswa Penghayat yang Dipaksa Ikuti Pelajaran Agama Islam di Sekolah

Bau petrichor (ampo) menguar di antara lorong sempit pedesaan di salah satu desa di daerah Magelang. Lorong kecil yang dibangun dengan semen di sepanjang kanan dan kiri rumah-rumah warga ini basah terguyur air hujan. Saat berjalan di lorong menuju rumah Pak Kamidjan, Ketua Paguyuban Palang Putih Nusantara (PPN) Magelang, saya menemui dua anak perempuan yang asyik bercengkrama di sudut salah satu rumah. Tawa renyahnya sesekali membuat bahu mereka terguncang.

Oleh: Arizka Setya Windhiarti

Disiarkan di Radio MQ FM Jogja, 1 Juli 2022

Di tengah percakapan, raut wajahnya mendadak berubah menjadi datar tatkala ia menceritakan suasana belajar sekolah. Ia tampak sedih mengingat memori ketika sedang belajar pendidikan agama di bangku kelasnya.

Betapa tidak, Hani yang kini duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD) Negeri Giripurno 2 itu hampir setiap hari Kamis menerima hukuman. Ia harus membersihkan toilet dan menyapu halaman karena tidak mau mengikuti pelajaran agama Islam, agama yang tidak ia yakini. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak

sekecil itu, malah menjadi momok untuk Hani.

Hani yang tinggal di Dusun Onggosoro ini harus menempuh perjalanan dua kilometer menuju sekolah. Tepat pukul 06.30 lonceng sekolah berbunyi, Hani bersama teman-temannya berhamburan masuk ke dalam ruang kelas.

Pagi yang cerah menemani mereka memulai proses pembelajaran. Para siswa membuka buku dan menulis huruf Arab. Setelah 90 menit berlalu, sang guru meminta para siswa melaksanakan sholat dhuha. Dengan penuh semangat, semua anak bergegas keluar dari ruangan berukuran 8x7 meter. Suara derap langkah kaki mengiringi semua siswa menuju mushola di pojok belakang sekolah.

Namun dari kejauhan ada seorang anak yang justru termenung. Anak itu adalah Hani, ia hanya duduk sambil memandangi teman-temannya yang sedang antri untuk wudhu. Seorang guru menghampirinya. Dengan suara keras, ia meminta Hani menyusul teman-temannya untuk berwudhu.

Hani menolak karena ia adalah seorang penghayat kepercayaan yang bernaung di bawah PPN. Ia memiliki cara berdoa sendiri, tetapi gurunya tetap memaksa dan beralasan sholat merupakan bagian dalam pelajaran agama Islam. Hani memilih diam.

Tak disangka, diamnya justru berbalas hukuman. Hani diberi sapu dan diminta membersihkan halaman sekolah seluas setengah lapangan sepak bola. Pasrah, dengan muka menunduk, ia berjalan terseok meninggalkan depan kelas menuju halaman sekolah.

"Pernah dipaksa ikut sholat sekali sama guru, tetapi saya menolak ikut sholat. Ketika guru menanyakan alasannya, saat itu saya jujur mengatakan saya tidak bisa wudhu," kata Hani.

Sebagai seorang penghayat kepercayaan, ia lebih mengenal ibadah sembahyangan, aksara Jawa, lantunan tembang, dan geguritan. Tapi sayangnya, sejak Hani di kelas 3, ekspresi keagamaan itu sama sekali tak boleh ditampakkan. Sekedar berdoa dengan posisi duduk bersila dan tangan menyilang

ketika akan belajar pun tak boleh. Setiap hari, sebelum pelajaran dimulai, para murid diminta membaca asmaul husna dan doa belajar dalam bahasa Arab dengan suara lantang.

Padahal ada banyak anak penghayat kepercayaan menuntut ilmu di SD Negeri Giripurno 2. Letak sekolah ini berdekatan dengan Dusun Onggosoro, Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang hampir 40 persen dari 170 kepala keluarga yang tinggal di dusun itu adalah warga PPN.



Hani dihukum dengan cara menyapu halaman karena menolak untuk sholat Dhuha. (Foto: Arizka Setya Windhiarti)

Hani yang baru berusia 10 tahun terpaksa harus bersentuhan dengan huruf-huruf Arab yang asing dan rumit dan ikut sholat dhuha meski tak sesuai dengan keyakinannya. Di sekolah, waktu terasa berjalan lambat bagi Hani.

Perlakuan tak mengenakan juga datang dari kawan-kawannya yang kerap melontarkan kata-kata yang membuat Hani merasa makin tak nyaman dan tak aman. Salah seorang teman sekelas seperti tak habis melontarkan ejekan padanya karena tidak sholat.

"Ejekan itu sering membuat saya marah," katanya.

Darah Hani mendidih, dadanya sesak, dan ia tak kuasa menahan kakinya sehingga menendang kawannya. Tendangan itu berujung pada baku hantam. Hani dijambak, namun ia membalas dengan tendangan sekali lagi.

Tak butuh waktu lama, pertengkarannya itu sampai ke telinga gurunya. Mereka dipanggil dan diminta menceritakan kronologi kejadian. Berbusa-busa Hani menjelaskan, sang guru tanpa diduga justru memintanya mengalah dan tidak membuat keributan. Ia juga disarankan ikut sholat agar tidak dibuli oleh teman sekelasnya. Kondisi itu membuatnya sering enggan berangkat ke sekolah meski ia sudah berseragam lengkap.

Hani sering mengadu pada orangtuanya, yaitu Anto dan Sekar. Namun mereka memilih diam dan menerima, sesuai falsafah ajaran kejawen urip sejati, ning nung nang nong.

Ning yang berarti wening, menandakan seorang penghayat harus merenungkan keinginan atau cita-cita dengan pikiran yang wening atau bersih. Jika hati kita sudah wening atau bersih maka selanjutnya harus nung, menjalankannya dengan semangat. Selanjutnya nang, artinya harus melakukan apa yang semestinya dilakukan, memenuhi kewajiban dan jangan diulur-ulur. Terakhir nong, nong kono atau di sana, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai.

Pemakaian yang dialami Hani seharusnya tidak terjadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), peserta didik penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berhak mendapat layanan pendidikan kepercayaan sesuai dengan hak-hak peserta didik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekolah dapat menyediakan layanan pendidikan untuk penghayat kepercayaan melalui sistem pusat Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik bisa menjadi dasar

penyaluran dana bos, pemberian tunjangan profesi guru, dan perencanaan program-program pendidikan.

Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, Dwi Agus Muchdiharto, mengatakan pihak sekolah dapat menggunakan sistem Dapodik untuk merencanakan pendidikan bagi murid yang memilih kolom pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Dalam Dapodik telah ada tujuh pilihan pendidikan agama, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Sistem Dapodik ini telah terintegrasi dalam aplikasi nasional, sehingga seluruh sekolah tidak ada perbedaan data soal kolom agama.

"Nanti setiap kali penerimaan siswa baru, sekolah akan memberikan format kepada siswa untuk diisi termasuk di dalamnya agama/kepercayaan. Setelah itu direkap dan dimasukkan atau entry data. Setiap kali diketikkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sudah muncul dari awal. Yang paling inti adalah dari SD-nya karena data itu mengalir dan NISN hanya satu sehingga mestinya kalau dari SD itu datanya bagus atau data primer, tinggal masuk saja," ujar Dwi Agus.

Ia menambahkan dahulu, SD memiliki sedikit sumber daya manusia dan belum melek teknologi, namun saat ini sudah banyak tenaga yang pengetahuan IT-nya bagus. Semua sekolah tinggal klik, tidak ada perbedaan antarsekolah sebab Dapodik merupakan aplikasi nasional. Tinggal ketelitian dari operator pihak sekolah, terutama yang memiliki siswa yang banyak semisal 700 atau 400 siswa.

Meskipun sudah ada kolom pendidikan penghayat dalam Dapodik ternyata para siswa penghayat tidak lantas mudah mendapat layanan pendidikan. Para orangtua siswa harus mengajukan permohonan dengan membuat surat pernyataan kepada kepala sekolah agar anaknya mendapat layanan pendidikan penghayat kepercayaan dan melampirkan surat pernyataan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)

yang menegaskan bahwa orangtua merupakan penghayat kepercayaan.

Prosedur pengajuan layanan pendidikan ini sebenarnya sudah disampaikan orangtua Hani bersama Ketua PPN Magelang, Kamidjan. Bahkan pengajuan dilakukan tiga kali mulai tahun 2019.

Tetapi pihak sekolah selalu beralasan tidak memiliki guru penghayat dan belum ada materi pendidikannya. Selain itu, guru sekolah minta orangtua mendidik anaknya secara penghayat di kelompok masing-masing. Di sekolah, anak-anak penghayat masih mengikuti pelajaran agama Islam untuk mengisi nilai pada rapot.

"Saya sudah mengajukan itu kalau tidak salah ada tiga kali ke Dinas Pendidikan tetapi materi ajar dan buku pedoman tentang penghayat kepercayaan baru tahun ini saya terima. Karena sudah ada bukunya, saya akan minta Dinas Pendidikan supaya menindaklanjuti sekolah-sekolah yang sudah ada siswa penghayat," ujar Kamidjan.

Wakil Ketua MLKI Jateng-DIY, Suroso mengatakan tidak ada alasan bagi satuan pendidikan tidak memberikan hak pendidikan kepada penghayat, tak terkecuali di Desa Giri Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) berlaku, layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan terus mengalami kemajuan baik sistem Dapodiknya, ketersediaan kurikulum hingga penyuluhan kepercayaan.

"Yang jelas langkah yang akan kami jalankan itu, sesuai Permendikbud No.27 Tahun 2016. Jadi untuk menentukan langkah selanjutnya kita melihat situasi dan kondisi sekolah seperti apa, agar kita bisa menentukan harus kemana dan bagaimana. Selama ini, rata-rata sekolah memiliki alasan klasik seperti menyebut bahwa pendidikan penghayat merupakan

barang baru sehingga pihak sekolah harus mencari terlebih dulu. Tetapi alasan itu masih enak didengar, kalau yang tidak mengenakkan, diterima tetapi ketika proses belum berjalan tiba-tiba ada perundungan yang diterima oleh anak," kata Suroso

Belum terpenuhinya layanan pendidikan penghayat di salah satu sekolah dasar di daerah Giripurno, Borobudur, Magelang terasa ganjil. Kepala SD Negeri Giripurno 2, Ali Maskuri beralasan belum ada kurikulum dan guru penghayat. Ia tergolong baru sebagai kepala sekolah SD. Sebagai pejabat baru, pihaknya mengetahui sekira 10 persen siswanya merupakan penghayat kepercayaan.



Ketua Palang Putih Nusantara Magelang, Kamidjan (tengah) menunjukkan buku-buku ajar untuk murid penghayat kepercayaan di rumahnya. (Foto: Arizka Setya Windhiarti)

Ia mengatakan pemenuhan layanan pendidikan untuk siswa penghayat sulit dikabulkan. Pihak sekolah merasa keberatan jika harus mencari guru penghayat bagi siswanya karena sekolah masih kekurangan guru olahraga. Ali juga khawatir soal urusan administrasi yang akan bertambah jika memberikan layanan pendidikan untuk siswa penghayat kepercayaan.



Kepala SD Negeri Giripurno 2 Borobudur, Magelang, Ali Masykur. (Foto: Arizka Setya Windhiarti)

"Siswa penghayat kepercayaan di sekolah kami masih mengikuti pelajaran agama Islam karena memudahkan kami. Sampai saat ini kami masih kekurangan guru olahraga. Tetapi fokusnya tidak di sana, di Dapodik itu gak ada agama penghayat, itu hanya kepercayaan warga sini saja. Di luar daerah tidak ada, kurikulumnya juga gak ada. Itu kan kejawen kepercayaan jaman dulu, paling mereka juga ikut-ikutan orangtuanya. Kalau kita tidak menyelenggarakan itu ya tidak apa-apa. Dari pada kami kesulitan dan kebanyakan urusan administrasi, sebaiknya ditulis Islam saja," tandas Ali.

Dengan suara tegas dan percaya diri, ia bahkan berencana mewajibkan seluruh siswa mengikuti kelas hafalan dengan target juz 30. Rencana ini pasti berlaku juga untuk Hani dan para siswa penghayat kepercayaan. Mereka, sama nasibnya seperti Hani, tidak bisa berdoa yang sesuai dengan ajaran PPN.

Namun karena sudah mengetahui konsekuensinya jika tidak mengikuti pelajaran agama Islam, akhirnya mereka berusaha mengikuti perintah guru tanpa protes dan mengeluh. Mereka

hanya berharap, suatu saat nanti bisa mendapatkan pelajaran pendidikan penghayat di sekolah.

"Sedih sekali dan pengen pindah sekolah," kata Hani.

Ketika menyampaikan harapan itu, Hani merasa lemas karena pesimis dan putus asa. Matanya berkaca-kaca sambil memandang rintik air hujan yang jatuh di depannya. Bibirnya tetap mengukir senyum manis. Harapannya sungguh dalam, ia bisa mendapatkan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di kelasnya, seperti teman teman muslim selama ini.

Hani, Anto, dan Sekar bukan nama sebenarnya, redaksi menyamarkan identitasnya demi keamanan mereka.

Jalan Panjang Pernikahan Penghayat Kepercayaan

Oleh: Sirojul Khafid

Dimuat di situs harianjogja.com, 05 Juli 2022

Setelah kepercayaan penghayat bisa masuk ke kolom agama di KTP, pernikahan dengan adat penghayat memungkinkan untuk digelar. Penghayat kepercayaan tidak perlu lagi menggunakan adat agama resmi untuk bisa menikah dan tercatat oleh negara. Namun apakah jalannya semudah itu?



Baskoro dan Sekar saat menjalani prosesi sujud dalam prosesi pernikahan mereka di Sleman, 27 Maret 2022 (Foto: Istimewa)

Kain putih terhampar di depan belasan orang. Di dalam bangunan kayu bernama Sanggar Candi Busana Kadisobo di Turi, Sleman itu semua yang datang duduk bersila di depan kain itu. Mayoritas kain berukuran satu meter persegi. Diletakkan dengan posisi seperti bentuk layangan, ujung lancipnya berada di depan.

Hanya ada satu kain putih yang ukuran dan bentuknya berbeda. Kain itu milik pasangan pengatin Baskoro Waskitho Husodo dan Sekar Dwi Yulianti yang menikah hari itu. Mereka duduk bersama di atas kain putih berukuran 1x2 meter.

Keduanya juga mengenakan baju khas adat Jawa berwarna putih. Di belakang tempat duduk Baskoro dan Sekar, ada kedua orangtua mereka. Di baris belakangnya lagi: para penghayat kepercayaan Sapta Darma. Sementara di hadapan Baskoro dan Sekar, pemuka penghayat Sapta Darma, Bambang Purnomo yang bertindak sebagai juru dhaup atau penghulu duduk dengan pandangan fokus ke depan.

Tidak lama setelah semua berkumpul, Baskoro, Sekar, dan orang-orang di belakang mereka sujud empat kali. Hening. Tidak ada yang menoleh apalagi bicara. Kebanyakan dari mereka memejamkan mata. Barulah setelah empat sujud terlaksana, juru dhaup mulai berbicara.

“Dengan jujur dan suci hati, mulai hari ini, kami sebagai suami-istri dan sanggup melaksanakan ajaran Sapta Darma,” kata juru dhaup yang diucapkan dalam bahasa Jawa.

Ia meminta dua orang di depannya untuk menirukan ucapannya. Sekar bersusah payah menahan harunya, agar tidak berubah menjadi tangis. Dia tidak pernah menyangka hari itu akan tiba, saat dia bisa menikah dengan adat Sapta Darma, sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikir sejak memantapkan hati memeluk Sapta Darma beberapa tahun lalu.

Ribuan hari sebelum Sekar bisa berikrar setia dengan Baskoro, jangankan memikirkan pernikahan dengan adat

Sapta Darma, dahulu dia masih harus menyembunyikan identitas kepercayaannya.

Sujud Pertama

Sekar kecil mungkin tampak seperti anak-anak pada umumnya. Dia bermain, sekolah, dan berteman di lingkungan rumahnya. Saat di sekolah, Sekar memakai jilbab, identitas yang merujuk pada agama Islam.

Tapi semua yang tampak dari luar belum tentu sama dengan yang ada di dalam. Sekar memang memakai jilbab, tapi itu adalah tuntutan lingkungan sekolah. Institusi itu mengharuskan anak memeluk salah satu dari enam agama resmi di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Itu tahun 2008, saat Sekar masih berumur sekitar lima tahun.

Meski kadang menjalankan ibadah Islam, Sekar juga menjalankan sujud tiga kali sebagai implementasi ibadah Sapta Darma. Dari sejak buyutnya, keluarga besar Sekar memang warga Sapta Darma. Meski dalam perjalannya, keluarga yang masih menjadi penghayat kepercayaan Sapta Darma hanya keluarga Sekar, satu keluarga tante, dan buyutnya. Sisanya memilih berpindah ke agama resmi negara.

“Di Cirebon, masyarakatnya belum begitu familiar dengan penghayat kepercayaan. Kami di sana juga ada sanggar [tempat ibadah Sapta Darma] aja pernah diomongin masyarakat sekitar. Dibilang aliran sesat, nyembah dukun, dan lainnya,” kata Sekar saat ditemui di sela-sela acara pertemuan Sapta Darma di Terban, Gondokusuman, Jogja, Minggu (12/6/2022).

“Waktu itu aku masih takut banget [menjadi penghayat kepercayaan],” tambahnya.

Ketakutan ini yang membuat Sekar masih menjalankan dua jenis ibadah. Terlebih saat di sekolah, dia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sekar juga tetap ikut acara seperti Maulid Nabi Muhammad atau ujian pelajaran agama di sekolah.



Baskara dan Sekar. (Foto: Sirojul Khafid)

Namun sejak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan (SMK), dia sudah memantapkan hati menjadi warga Sapta Darma. "Sejak lulus SMK tahun 2019, aku langsung pindah ke Jogja. Bekerja setahun sebelum kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta," kata Sekar.

"Waktu di Jogja, semua orang biasa aja sama penganut penghayat kepercayaan, kerasa toleransi banget."

Saat mulai tinggal di Jogja, perempuan kelahiran 2001 ini semakin percaya diri menjalankan ibadah Sapta Darma. Dia juga bergabung dengan organisasi kepemudaan dalam naungan Sapta Darma. Di situ Sekar pertama kali bertemu dengan Baskoro, orang yang kini menjadi suaminya.

Sebagai warga penghayat kepercayaan, Baskoro lebih beruntung. Ia tumbuh dalam lingkungan yang lebih akrab dengan kepercayaan. Bagi Baskoro, semua kepercayaan sama saja, selama berperilaku baik dengan sesama manusia dan

lingkungan, maka tidak akan diganggu.

Meski sebagai penghayat kepercayaan, Baskoro bisa menjadi ketua pemuda kampung. Bahkan ibunya menjadi ketua Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga beberapa kali. Sejak kakek dan nenek Baskoro hidup, keluarga mereka memang dipandang baik dan menjadi panutan. Status ningrat kakek dan neneknya juga membuat masyarakat sekitar sudah tahu keberadaan dan rekam jejak keluarga Baskoro.

Kehidupan Baskoro di lingkungan rumah dengan di sekolah cukup berbeda. Tidak jauh berbeda dengan Sekar, Baskoro versi murid sekolah juga menjalankan ibadah Islam. Meski menjalankan ibadah Sapta Darma, dia pernah mengikuti lomba dalam agama Islam.

"Semenjak SMK itu ditanya sama ibu, ibu enggak maksa. Ditanya ibu mau pilih Sapta Darma atau agama. Saya pilih ikut ibu. Saya melihat perilaku orangtua saya juga baik," kata Baskoro di rumahnya, Trimulyo, Sleman, Rabu (1/6/2022).

"Dulu menjalani dua ibadah, Sapta Darma dan agama dengan cukup serius, enggak setengah-setengah. Tapi saat saya memilih sesuatu, melihat perbandingannya, saya merasa lebih baik Sapta Darma, jadi ini saja."

Sujud Kedua

Saat mempelai, keluarga, dan warga sudah berkumpul, prosesi pernikahan dimulai dengan sujud bersama. Dalam ibadah sehari-sehari, warga Sapta Darma melakukan sujud sebanyak tiga *bungukan*. Dalam pernikahan ada satu sujud tambahan. Sujud tambahan dilakukan apabila ada hajat-hajat tertentu, tidak hanya dalam pernikahan.

Sujud pertama merupakan konektivitas hamba dengan Tuhan-Nya. Sujud kedua adalah pengakuan atas segala kesalahan dan permohonan ampun. Sujud ketiga, bentuk dari taubat, setelah mengakui kesalahan. Sedangkan sujud keempat adalah bentuk kesetiaan, terutama dalam konteks

pernikahan.

Meski ibadah sujud dimulai secara bersama, belum tentu selesainya bersama. Setiap orang berbeda-beda, tergantung kekhusuan setiap individu.

"Yang penting coba buat ngelamain sujud, minimal 15 menit, yang penting lama. Dari durasi sujud yang lama itu, lama-lama bisa merasakan. Semakin cepat sujud, semakin enggak jadi," kata Baskoro.

"Perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ini terkait hubungan dengan Tuhan," tambahnya.

Sujud dalam ibadah Sapta Darma, termasuk dalam pernikahan, memiliki ruang yang penting. Apabila dalam suatu pernikahan salah satu mempelai berasal dari kepercayaan lain, dia harus dituntun untuk sujud terlebih dahulu. Penuntunan sujud ini setidaknya 15 hari sebelum melangsungkan adat pernikahan. Bagi pemula, sujud harus dibimbing oleh pemuka penghayat Sapta Darma. Tidak bisa sujud sendiri.

Sedari awal, Baskoro dan Sekar sudah penghayat kepercayaan. Mereka sujud bersama di atas satu kain. Dalam aturannya, kain ini harus baru, belum pernah dipakai. Kain ini yang nantinya bisa mereka gunakan untuk ibadah bersama setelah menikah.

Baskoro dan Sekar sujud sembari memejamkan matanya. Terlihat seperti tidak ada gangguan sedikit pun. Sebagai sesama anggota organisasi kepemudaan Sapta Darma, mereka memang sering beribadah bersama di sanggar meski tidak tepat bersebelahan.

Sejak Sekar pindah ke Jogja dan bergabung dengan organisasi itu, ia sering bertemu Baskoro. Dia juga tinggal di sekitar sanggar Sapta Darma di wilayah Taman Siswa, Jogja. Cinta tumbuh karena dua sejoli itu sering bertemu.

"Tahun 2019 bertemu Baskoro di sanggar Tamansiswa. Dia sering ada acara di situ juga, mulai saling dekat di sanggar," kata Sekar.

"Yang bikin suka Baskoro, status kepercayaan sudah sama. Hubungan cinta dengan pria sebelumnya tidak sekepercayaan, dia enggak mau pindah, malah saya ditarik ke kepercayaannya dia, dia bilang 'nggak usah ke situ, sesat, sini aja.' Aku enggak bisa."

Rajutan cinta dengan Baskoro semakin rekat saat nenek Sekar juga mengetahui kisah itu. Made, panggilan Sekar pada neneknya, berpesan kepada cucunya agar mempertahankan cinta dengan Baskoro. Made ingin keturunan dari cucunya juga penghayat Sapta Darma.

"Made pengen keturunannya ada yang menjaga kepercayaan ini. Saya ingat-ingat banget pesan Made. Pernah pengen pisah dengan Baskoro, tapi enggak bisa, nyatu terus," kata Sekar.

Kandas dalam kisah cinta karena kepercayaan juga pernah Baskoro alami. Hubungan cinta bertahun-tahun awalnya berjalan baik. Perempuan itu tahu dan menerima kepercayaan yang Baskoro hayati. Namun keadaan mulai berubah saat Baskoro hendak menjalani hubungan yang lebih serius.

"Dulu waktu mau serius, dia malah enggak mau, saya enggak mau mengalah [pindah kepercayaan]. Ada temen saya yang ngalah dan tidak meneruskan lagi [kepercayaan Sapta Darma], sebenarnya masih meneruskan tapi sembunyi-sembunyi. Mungkin hatinya enggak bisa berpaling dari Sapta Darma," kata Baskoro yang saat ini berusia 26 tahun.

Kandasnya cerita asmara itu membawa Baskoro bertemu dengan Sekar. Alasan Baskoro menyukai Sekar yang usianya enam tahun lebih muda ini, salah satunya adalah karena sesama warga Sapta Darma. Baskoro juga menyukai Sekar lantaran perempuan itu berani berbicara di depan umum.

Berani berbicara di depan umum, cerdas, tangkas, dan lainnya menjadi modal penting dalam organisasi kepemudaahan Sapta Darma. Hal ini dilatih sebulan sekali dalam perkumpulan pemuda Sapta Darma. Di hari Minggu pekan kedua setiap bulan, mereka berkumpul dan mendengarkan pemaparan

materi Sapta Darma.

Selain sujud bersama, mereka juga membaca wewarah dan sesanti. Dalam wewarah atau pedoman hidup, ada tujuh poin ajaran Sapta Darma. Isinya adalah setia dan tawakal kepada Pancasila Allah, yaitu bahwa Tuhan mempunyai lima sifat luhur yang mutlak; bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya; turut serta membela nusa dan bangsa; menolong siapa saja tanpa pamrih, berani hidup berdasarkan kekuatan dan kepercayaan diri sendiri, bersikap susila dan berbudi pekerti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dan meyakini bahwa dunia tidak abadi dan selalu berubah.

Sementara sesanti atau semboyan berbunyi '*Ing ngendi bae, marang sapa bae, warga Sapta Darma kudu suminar pindha baskara*' yang berarti 'di mana saja, kepada siapa saja, warga Sapta Darma harus senantiasa bersinar laksana surya.'

Dari pertemuan pertama pada 2019, lalu ngapel ke rumah Sekar pada 2020, dilanjut lamaran pada 9 April 2021, tepat pada hari ulang tahun Sekar. Lamaran diterima, pernikahan pun digelar 27 Maret 2022.

Sujud Ketiga

Prosesi sujud masih berlangsung. Sebagai juru dhaup, Bambang yang duduk di depan sebelah kanan harus memastikan sujud terlaksana dengan benar. Sementara duduk di sebelah kiri depan, petugas Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman yang menjadi saksi pernikahan.

Setelah empat *bungkukan* sujud selesai, Bambang mengambil alih acara. Dia membimbing sepasang anak manusia di depannya untuk berikrar.

"Allah Hyang Maha Agung. Allah Hyang Maha Rokhim. Allah Hyang Maha Adil. Kami berdua berprasetia di hadapan Hyang Maha Kuasa: Dengan jujur dan suci hati, mulai hari ini,

kami sebagai suami-istri dan sanggup melaksanakan ajaran Kerohanian Sapta Darma. Dengan jujur dan suci hati, sanggup melaksanakan ajaran Kerohanian Sapta Darma. Demikian prasetya kami berdua, semoga Allah Hyang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan pengayoman ketenteraman dan kebahagiaan kepada kami berdua," kata Bambang, diikuti oleh Baskoro dan Sekar.



Pernikahan Baskara dan Sekar sudah bisa tercatat di Disdukcapil Kabupaten Sleman. (Foto: Istimewa)

Bambang menyelesaikan tugasnya. Kini petugas dari Disdukcapil Sleman yang bekerja. Dia memberikan Akta Nikah kepada mempelai untuk ditandatangani. Dengan ini, pernikahan Baskoro dan Sekar secara adat Sapta Darma telah sah dan tercatat oleh negara.

Penandatanganan dan pemberian Akta Nikah mungkin hanya butuh beberapa detik, namun proses menuju pengajuannya tidak singkat. Untuk bisa menikah dan tercatat dalam kepercayaan tertentu, kedua mempelai harus seragam jenis kepercayaannya

di KTP. Baskoro sudah mengganti kolom kepercayaan di KTP sejak lama. Sementara Sekar baru mengurusnya tahun 2019.

Saat baru pindah ke Jogja dan melihat teman-temannya sudah mengganti kolom kepercayaan di KTP, Sekar termotivasi untuk mengganti. Dia pergi ke Cirebon, menuju Kantor Disdukcapil. Niatnya mengubah kolom agama dengan kepercayaan berujung perdebatan di bagian pelayanan.

"Bagian pelayanan bilang kalau di sistem enggak ada keterangan untuk agama penghayat kepercayaan, pokoknya susah banget, sampai dilihatin di komputernya, waktu dicetak masih tertera Islam di bagian agama," kata Sekar.

Namun Sekar bukan tipe orang yang mau pulang tanpa hasil. Dia gigih berjuang untuk mengubah kolom agama. Dia menghubungi temannya di Bandung yang pernah mengubah keterangan agama. Tetapi tetap saja tidak bisa, sampai seseorang turun dari lantai atas ke bagian pelayanan. Sekar menebak dia merupakan kepala bidang atau kepala dinas.

Barulah setelah 'orang atas' turun, proses penggantian keterangan di kolom agama bisa dilakukan. "Langsung bisa diganti, dan dia juga minta maaf. Dia bilang kalau di daerah sini belum tahu ada penghayat kepercayaan [di kolom KTP]. Foto di KTP yang tadinya berhijab tidak bisa diganti, juga langsung boleh," katanya.

Ketidaksinkronan birokrasi juga dihadapi Baskoro saat mengurus pernikahan dengan adat Sapta Darma. Lantaran pernikahan dengan adat Sapta Darma belum pernah terjadi di Sleman, dia bertanya kepada teman di Bantul yang pernah melaksanakan pernikahan dengan adat Sapta Darma pada 2018. Kala itu, butuh waktu enam bulan untuk mengurusnya. Salah satu kendalanya, lantaran juru *dhaup* yang hendak bertugas belum memiliki sertifikasi dari pemerintah.

Dengan rencana menikah bulan Maret, Baskoro mengurusnya sejak Januari. Beberapa kali dia berkunjung ke Disdukcapil Sleman untuk mencari tahu persyaratan dan sejenisnya.

Petugas pelayanan bilang cukup menyertakan syarat berupa berkas fotokopi kedua mempelai, KTP mempelai, dan saksi.

Apabila petugas Disdukcapil tidak datang ke pernikahan, harus ada keterangan dari saksi saat mengurus ke Disdukcapil. Apabila petugas Disdukcapil datang ke pernikahan, keterangan dari saksi pernikahan tidak diperlukan.

"Ngurusnya terlalu mudah, malah jadi bingung. Takut saya. Soalnya dulu Mbak Tika [penghayat Sapta Darma di Bantul] ngurus nikahannya ribet," Kata Baskoro. "Tapi buat mastiin kalau tidak perlu syarat lainnya, saya kontak orang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."

Setelah mengontak orang kementerian, beberapa waktu setelahnya Baskoro mendapat telepon dari petugas Disdukcapil Sleman. "Petugas Disdukcapil Sleman bilang, 'Kok enggak bilang dulu mau nikah [dengan adat Sapta Darma], harusnya 13 hari sebelum menikah memberitahukan dulu,'" kata Baskoro menirukan petugas Disdukcapil Sleman yang meneleponnya.

"Loh, saya sudah mengurus sejak Januari loh, tapi enggak ketemu beliau yang mungkin kepalanya, saya hanya di bagian pelayanan. Ya udah, tapi akhirnya tetap bisa dan Disdukcapil Sleman datang pas acara pernikahan sebagai saksi dan pencatat."

Banyak Penganut

Baskoro dan Sekar lebih beruntung bisa menikah dengan adat penghayat saat ini. Bambang mengatakan saat ini proses administrasi pernikahan penghayat memang lebih mudah. Penggantian kolom agama juga sama. Berbeda dengan sebelumnya yang masih sulit, terlebih saat memang tidak ada ruang untuk kepercayaan penghayat.

Bambang ingat betul, saat dia menikah sekitar tahun 1978. Kala itu dia masih bisa menikah dengan sesama penghayat kepercayaan tanpa banyak persyaratan. Pernikahan di bulan Oktober, berapa bulan kemudian ada kebijakan yang harus

mencantumkan agama di KTP. Masalahnya, agama di Indonesia yang diakui hanya lima.

"Dampaknya besar sekali pada jumlah penghayat. Mereka mau tidak mau secara administrasi harus memilih menjadi penghayat atau masuk ke agama [resmi pemerintah]. Keharusan itu kan pemaksaan, itu melanggar hak asasi," kata Bambang, Jumat (10/6/2022).



Ketua MLKI DIY, Bambang Purnomo. (Foto: Sirojul Khafid)

Padahal dalam menikah, kepercayaan yang tertulis di KTP untuk kedua mempelai harus sama dan sesuai dengan agama resmi. Sejak 1978, selama puluhan tahun ke depannya tidak ada lagi pernikahan dengan adat penghayat yang diakui negara di wilayah DIY.

Bagi Bambang, perkawinan tidak ada hubungannya dengan agama. Nikah itu urusan laki-laki dengan perempuan. Itu saja, Tuhan tidak mempermasalahkan. "Yang bertingkah kan manusianya, yang ngatur mereka-mereka (pejabat dalam pemerintahan) itu."

Bambang menjadi warga Sapta Darma sejak 1971. Memasuki tahun 2010, Bambang mendapat surat keterangan sebagai pemuka agama Sapta Darma. Surat keterangan ini adalah bekal bisa menjadi penghulu.

Namun surat keterangan itu tidak pernah terpakai, khususnya untuk menikahkan warga Sapta Darma. Alhasil, Bambang tidak pernah memperpanjang surat yang harusnya diperbarui setiap lima tahun sekali itu. Baru pada 2018, saat pernikahan penghayat bisa dilakukan dan ada warga Sapta Darma di Bantul yang hendak menikah, Bambang baru memperbarui suratnya.

"Surat keterangan pemuka penghayat merujuk pada lamanya menjadi pemuka penghayat. Enggak perlu membuktikan aktivitas ibadah penghayat, tapi dari Petinggi Sapta Darma ada yang mengusulkan. Saya enggak mengusulkan diri jadi pemuka penghayat, tahu-tahu dapat sertifikat," kata Bambang.

Kini, ia adalah Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) DIY. Ini adalah sebuah lembaga yang menaungi kelompok-kelompok penghayat kepercayaan.

Sejauh ini, ada tiga pemuka penghayat Sapta Darma di wilayah DIY. Apabila ada penghayat kepercayaan selain Sapta Darma yang hendak menikah, Bambang juga bisa menjadi juru penghulunya.

Kepala Disdukcapil Sleman, Susmiarto mengatakan pernikahan penghayat sama dengan pernikahan lain selain Islam. Apabila Islam memiliki lembaga khusus, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka agama lainnya berada dalam kepengurusan Disdukcapil. Apabila bukti pernikahan dalam Islam berupa buku nikah, kepercayaan lain berupa Akta Nikah.

Selama nama kelompoknya terdaftar di dinas kebudayaan setempat, pernikahan penghayat bisa dilaksanakan sesuai adatnya.

"Kebetulan pernikahan kemarin merupakan penghayat yang sudah punya nama, Sapta Darma. Jadi saya menyandingkan

datanya dengan yang sudah terdaftar di Disbud Sleman. Apabila sudah terdaftar, mereka biasanya punya kop surat, stempel, dan lainnya. Ini berkaitan dengan syarat keterangan dari pemuka kelompok penghayat tersebut,” kata Susmiarto di Kantor Disdukcapil Sleman, Tridadi, Sleman, Kamis (16/6/2022).

Di samping Disdukcapil Sleman mendapat undangan untuk datang ke pernikahan Baskoro dan Sekar, petugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga minta laporan khusus. Lantaran pernikahan penghayat masih jarang, pemerintah pusat ingin tahu prosesnya. Karena tidak bisa datang, Kemendagri meminta Disdukcapil Sleman mendokumentasikan dalam bentuk video.

Baskoro dan Sekar merupakan dua dari 22 penduduk penghayat kepercayaan di Sleman. Jumlah ini berasal dari berbagai macam kelompok penghayat kepercayaan. Susmiarto mengatakan belum banyak pengubahan di kolom agama KTP di Sleman meski hal itu sudah diperbolehkan.

Disdukcapil Sleman tidak secara khusus menyosialisasikan hal ini. Lantaran jumlahnya yang sedikit dan belum ada pemetaan wilayah di mana para penghayat berada. Mereka yang diharapkan lebih aktif mencari informasi.

“Ini hal-hal yang cukup sensitif di beberapa tempat, mereka punya kelompok yang biasanya kuat secara ikatan, jadi mereka yang sosialisasi antaranggotanya. Kami melayani saja, kami tidak menolak apabila ada pengajuan dokumen dan sebagainya,” kata Susmiarto.

“Kami mengikuti aturan yang ada, kalau tidak menjalankan peraturan, kami bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Meski aturan sudah memperbolehkan untuk mencantumkan status kepercayaan di KTP, pernikahan, dan lainnya, Bambang justru melihat para penghayat yang belum memaksimalkan fasilitas ini. Ia melihat masih ada penghayat yang ragu dalam mencantumkan kepercayaan dalam dokumen pribadi karena kurang pemahaman.

Salah satu penyebabnya, belum semua anggota keluarga

menganut penghayat kepercayaan. Kadangkala, anak-anak tidak meneruskan kepercayaan orangtuanya.

“Itu juga penghambat, anak-anaknya bilang bapak itu sudah tua, enggak usah macem-macem, ikut ini [agama yang umum] saja,” kata Bambang.

Dalam kesehariannya, para penghayat tetap melaksanakan ibadahnya, terlepas dari status di KTP sudah diubah atau belum. Apabila merujuk pada data, ada sekitar 300 warga Sapta Darma di DIY. Sedangkan jumlah total penghayat lain belum ada data pasti.



Kepala Disdukcapil Sleman, Susmiarto. (Foto: Sirojul Khafid)

“Data juga menjadi pekerjaan rumah kami. Belum tentu semua mau didata, banyak yang *ngelakoni* [menjalani], tapi tidak *ngakoni* [mengakui],” kata Bambang.

Sujud Keempat

Akta Nikah sudah di tangan Baskoro dan Sekar. Kini status mereka adalah suami istri penghayat Sapta Darma. Prosesi pernikahan secara adat Sapta Darma sudah selesai.

Petugas Disdukcapil Sleman yang datang menerangkan pada hadirin. Penghayat kepercayaan sudah bisa mencantumkan kepercayaannya di kolom KTP. Mereka juga bisa melangsungkan pernikahan sesuai adatnya, seperti Baskoro dan Sekar.

Kehadiran petugas Disdukcapil Sleman membuat Sekar terharu. Sejak menjadi warga Sapta Darma belasan tahun lalu, dia tidak pernah berpikir bisa dengan leluasa beribadah sesuai kepercayaannya, apalagi bisa melangsungkan pernikahan dengan adat ini.

Neneknya yang penghayat menikah secara Islam. Orangtuanya yang penghayat juga menikah secara Islam. Ini semua agar tercatat oleh negara, dan juga ‘menenangkan’ masyarakat sekitar. Stigma buruk kepada penghayat kepercayaan sempat membuat ayah Sekar khawatir. Terlebih saat anaknya hendak mengubah KTP dan menikah secara penghayat.

Ayah Sekar khawatir anaknya akan susah mencari kerja dan sebagainya bila mengubah kolom agama di KTP. Namun Sekar meyakinkan ayahnya bahwa saat ini keadaan sudah mulai membaik.

Keluarga besar dari pihak ibunya Sekar yang mayoritas Islam pun mulai memahami, terutama setelah mendapat penjelasan dari petugas Disdukcapil Sleman. Keluarga besar dari ibu datang sekaligus ingin tahu adat menikah secara kepercayaan.

“Penjelasan dari disdukcapil apabila penghayat sudah diakui dan dilindungi membuat mereka makin paham. Terus sudah pada tahu, jadi enggak mikir sesat lagi,” kata Sekar.

“Sampai kaya pengen nangis, bangga sendiri, karena Disdukcapil ngasih tahu ke semua orang yang hadir. Terharu banget, kehadiran mereka seperti dukungan konkret,” sambungnya.

Dahulu Sekar sering menyembunyikan dirinya yang menganut kepercayaan Sapta Darma. Kini, bisa menikah dengan adat Sapta Darma itu seperti kemenangan kecil dari sekian kekalahan-kekalahan pada masa lalunya.

Sekar tidak ragu membagikan pernikahannya di media sosial. Ia menganggap media sosial adalah sarana tepat untuk memberikan gambaran tentang penghayat pada masyarakat luas. Tidak ada cemooh dari para pengikut Sekar di media sosial. Mereka justru penasaran dengan segala adat dan cara ibadah Sapta Darma.

“Masih banyak yang mengira aku Islam, sejak tahu aku pindah ke penghayat, enggak ada juga teman yang menghindar atau sejenisnya. Mereka justru mendukung dan penasaran pengen tahu.”

Meneruskan

Pengakuan negara yang makin kuat terhadap penghayat memberi perasaan aman pada Baskoro dan Sekar untuk punya anak. Mereka ingin anaknya meneruskan ajaran dan ibadah penghayat kepercayaan. Apalagi sistem pendidikan juga sudah mengakomodasi pelajaran khusus untuk penghayat di sekolah.

Namun bagi Baskoro, yang lebih penting adalah mencontohkan nilai-nilai Sapta Darma pada anak dalam kehidupan sehari-sehari. “Mulai dari orangtua harus berperilaku baik, anaknya pasti melihat. Kedua, anak ini harus dekat dengan penghayat Sapta Darma yang lain. Dengan ketemu anak-anak penghayat Sapta Darma akan membangun kesadaran apabila mereka tidak sendiri, sedari kecil dibentuk seperti itu,” kata Baskoro.

Sekarang Baskoro dan Sekar sudah menjadi keluarga. Mereka tetap aktif mengembangkan Sapta Darma di DIY. Baskoro dan Sekar sudah mneyatu. Tidak ada istilah cerai dalam Sapta Darma dan tidak bisa pula memiliki istri atau suami lebih dari satu.

Sekar mengatakan setelah menikah ia memiliki teman yang mendampinginya. Tidak seperti dulu, ia selalu sendiri. “Sekarang jadi punya tempat buat ngeluh dan sebagainya. Kadang capek, sekali-sekali pengen manja.”

Penghayat Kepercayaan di Solo Kian Pudar, Sederet Faktor Jadi Pemicu

Oleh: Mariyana Ricky P.d

Dimuat di situs solopos.com, 30 Juni 2022

Jumlah organisasi penghayat di Kota Bengawan terus menurun. Pada 2016 jumlahnya 20, kemudian 2019 menjadi 12, dan 2022 menyisakan 10 organisasi.

Rahmanto kembali terpilih sebagai Ketua Paguyuban Pangarso Budi Utomo Roso Manunggal Jati yang merupakan paguyuban penghayat kepercayaan di Kota Solo periode 2022-2027. Namanya meraup suara terbanyak dalam musyawarah paguyuban ini di Hotel Kusuma Sahid Prince (KSPH), Sabtu (11/6/2022) malam.

Paguyuban Pangarso Budi Utomo Roso adalah salah satu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang masih hidup di Kota Bengawan. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME adalah masyarakat yang menganut agama tradisional (agama lokal) di luar enam agama yang diakui negara.

Kelompok penghayat adalah salah satu kelompok di masyarakat yang masih mengalami dikriminasi.

Rahmanto yang juga Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Solo itu menang telak karena mendapatkan 70 dari 74 suara peserta musyawarah. Ia sudah menduduki posisi ketua paguyuban

sejak 2012 silam. "Saya sudah 10 tahun menjabat sebagai ketua," katanya dalam sambutan pembukaan.

Tahun ini, ia dipercaya lagi menjadi ketua paguyuban penghayat kepercayaan di Solo itu hingga lima tahun ke depan. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan anggotanya agar ada regenerasi kepemimpinan paguyuban. Namun setiap musyawarah dan pemilihan digelar, namanya selalu muncul sebagai pemenang.



Ketua Paguyuban Pangarso Budi Utomo Roso Manunggal Jati Kota Solo, Rahmanto. (Foto: Mariyana Ricky P.D)

"Alasannya ganti ketua bisa menyebabkan kegiatan paguyuban tidak terlaksana atau tidak aktif. Hal itu juga terjadi di organisasi atau paguyuban lain sehingga malah jadi hilang," ungkap Rahmanto.

Musyawarah juga membahas mengenai keberlangsungan organisasi dan rencana kegiatan hingga tahun 2027. "Agenda yang belum lama ini kami ikuti adalah *tapa bisu* di Museum

Keris, Februari 2022, untuk memprotes pembakaran wayang oleh seorang ustaz dan Kirab Pancasila di Candi Borobudur pada 1 Juni 2022," jelasnya.

Rahmanto menjelaskan keikutsertaan dalam sejumlah kegiatan bertujuan agar organisasi penghayat kepercayaan lebih dikenal masyarakat Solo. Selain itu, sebagai bentuk silaturahmi antaranggota paguyuban dan antarorganisasi penghayat. Harapannya, mereka bisa diterima sehingga eksistensinya tak lantas hilang seiring berjalannya waktu.

Jumlah Organisasi Terus Berkurang

Sayangnya, jumlah organisasi penghayat di Kota Bengawan terus menurun. Rahmanto mengatakan tahun 2016 jumlahnya 20, tahun 2019 menjadi 12, dan tahun 2022 menyisakan 10 organisasi.

Salah satu sebabnya, sesepuh atau ketua organisasi penghayat itu meninggal dunia atau berpindah domisili. Akibatnya organisasi tidak terurus. "Tahun 2022 ini, MLKI mendapatkan dana hibah dari Bagian Kesra Setda Solo untuk mendata organisasi penghayat kepercayaan di Solo," terang Rahmanto.

Program lainnya adalah menyusun buku ajaran kepercayaan setiap organisasi agar ajarannya bisa lestari. Ketika sesepuh mereka meninggal dunia, ajaran kepercayaannya tetap ada dan bisa dipelajari oleh penghayat dan penerus.

Sekretaris MLKI Solo, Gress Raja, membeberkan kendala lainnya. Ia mengatakan banyak penghayat kepercayaan baru yang tak ingin berorganisasi. Setelah mempelajari banyak aliran kepercayaan, mereka memilih dan menghayati salah satu kepercayaan. Tetapi mereka memilih tidak aktif dalam organisasi.

"Beberapa kali saya bertemu dengan penghayat kepercayaan berusia muda yang tidak berorganisasi. KTP mereka juga masih mencantumkan agama lama. Jumlahnya tentu tidak

bisa disebut karena pendataan jumlah penghayat kepercayaan biasanya lewat organisasi," ucap Gress di rumahnya, Senin (30/5/2022).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan MLKI hingga akhir Mei 2022, jumlah penghayat kepercayaan di Solo yang terdata tak sampai 1.000 orang. Jumlah itu berasal dari 10 organisasi penghayat kepercayaan yaitu Pangarso Budi Utomo Roso Manunggal Jati, Pelajar Kawruh Jiwa, Panunggalan, Sapo Darmo, Pangudi Kerohanian Mahayana, Papandayan (Pancasila Handayaningrat), Perwatin (Persatuan Warga Teosofi Indonesia), Purnomosidi, Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran, dan Pranajati.

Asesmen dan verifikasi

Semuanya telah melewati tahapan asesmen ulang dan verifikasi sehingga benar-benar termasuk aliran kepercayaan, bukan pecahan atau campuran agama. Beberapa organisasi yang sempat terdaftar di MLKI Kota Solo namun menghilang, antara lain adalah Wiratama Widyananta Karya (Wiweka), Kulawarga Kapribaden, Ilmu Sejati, dan Subut.

Wiweka tak lagi terdaftar karena sesepuhnya meninggal dunia. Pengurus lainnya dari organisasi penghayat kepercayaan di Solo itu pindah domisili dan anggota lainnya tak melanjutkan kepengurusan. Hal yang sama terjadi pada Ilmu Sejati dan Subut.

Sedangkan Kulawarga Kapribaden tak lagi terdaftar di MLKI karena setelah asesmen ulang, ternyata doa dan ajarannya masih terkait dengan salah satu agama, ada percampuran. "Setelah kami teliti lagi, ternyata tidak bisa dikatakan sebagai ajaran penghayat," tuturnya.

Gress adalah perantau asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bermukim di Solo sejak 1995. Ia menganut Saloka, aliran kepercayaan asli Flores. Namun karena ia hanya seorang diri, akhirnya ia memilih Pelajar Kawruh Jiwa

yang dianggapnya mirip.

Di daerah asalnya, Saloka juga hampir kehilangan pengikut. Ini merupakan imbas perkembangan politik di Indonesia. Pada tahun 1965, mereka yang tidak memilih agama yang diakui pemerintah bakal dicap sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi terlarang.

Gress melihat sendiri kakek dan ayahnya yang galau saat harus memilih agama lantaran sudah memiliki keyakinan sendiri. "Kakek saya tetap memilih Saloka sedangkan ayah saya memilih Katolik. Ini banyak dilakukan orang-orang di kampung kami," ungkapnya.

Kolom Agama di KTP

Sebagai pengurus MLKI, kolom Agama di KTP milik Gress sudah berganti menjadi Kepercayaan dan berisi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Di Solo, dari ratusan penghayat kepercayaan, hanya 40-an yang sudah berganti KTP.

"Jadi mayoritas KTP-nya masih agama namun tidak menjalankan ajaran agama. Ini merupakan pilihan karena KTP terkait dengan administrasi kependudukan dan banyak hal. Apalagi kalau menikah dan sebagainya. Atau kalau mau berganti KTP mereka ada ganjalan dari keluarga. Ini tidak mudah. Kalau soal pengurusan ganti KTP sangat gampang di sini," ucapnya.

Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP adalah sejarah baru di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang memperbolehkan kolom agama diganti dengan kepercayaan dan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan mengeluarkan Permendagri No.118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga (KK), Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Ihwal menjalankan aliran kepercayaan, Gress mengaku tak

memiliki kendala.

Tidak ada tekanan atau aksi dari pihak luar aksi yang menentang dirinya atau organisasi kepercayaannya. Jumlah penghayat kepercayaan di Solo sangat sedikit sehingga kemungkinan tak banyak mengusik golongan tertentu. Namun, sampai saat ini, MLKI belum diajak bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) karena dianggap bukan agama.

Persekusi

Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Solo, Sungkono, mengatakan ada penghayat yang secara pribadi takut menjalankan aliran kepercayaan secara terang-terangan. Mereka juga tidak bergabung dengan organisasi karena khawatir mendapatkan tekanan atau persekusi.

Faktor ini ikut menyebabkan jumlah organisasi penghayat kepercayaan di Kota Solo semakin berkurang. Jumlah penghayat kepercayaan juga terus berkurang akibat kompleksnya persoalan dalam memeluk keyakinan.

Ada perbedaan pandangan antara keyakinan/kepercayaan dan ajaran olah rasa. Beberapa penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan YME belum mengakui olah rasa sebagai suatu bentuk penghayat. Sedangkan antara penghayat dan olah rasa belum ada batasan yang jelas.

"Beberapa penghayat ada yang menjalankan tradisi atau ritual aliran kepercayaan tetapi masih memeluk agama karena mereka membedakan antara ibadah agama dengan ritual aliran kepercayaan. Kalau kasusnya seperti ini, aliran kepercayaan itu tidak bisa disebut aliran kepercayaan karena sudah bercampur dengan agama," ucap Sungkono di kantornya, Rabu (15/6/2022).

Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang sejak lama menjadi rumah bagi aneka bentuk kepercayaan, aliran olah rasa, maupun olah jiwa. Paguyuban Pangarso Budi Utomo

Roso Manunggal Jati lahir di Solo sekitar 1960-an.

Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) juga lahir di Solo pada 20 Mei 1949. Organisasi yang tujuannya antara lain membentuk masyarakat yang hidup aman, damai dan sejahtera lahir dan batin ini pernah menjadi anggota Himpunan Penghayat Kepercayaan Indonesia (HPKI) dan MLKI.

Budi Pekerti

Tetapi belakangan Pangestu keluar dari MLKI sehingga jumlah organisasi penghayat kepercayaan di Solo berkurang. Alasannya, Pangestu bukan kepercayaan dan agama tetapi wadah pendidikan budi pekerti dan pengolahan jiwa yang mengutamakan konsep persatuan dalam menjalin relasi dengan sesama dan Tuhan Yang Maha Esa.



Museum Pangestu di Jalan Rajawali III/3A, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo. (Foto: Mariyana Ricky P.D)

"Pangestu menganjurkan anggotanya supaya manambah kepada Tuhan, artinya memuja Tuhan. Bagi mereka yang memeluk agama Islam atau Kristen [atau agama lain], caranya

menurut agamanya masing-masing. Kami juga bukan aliran kebatinan, tapi anggota paguyuban wajib menabur Pepadang, ajaran dari Sang Suksma Sejati," ucap Pemandu Museum Pangestu, Slamet Rahardjo, Selasa (21/6/2022).

Di Museum Pangestu yang berlokasi di Jalan Rajawali III/3a, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, masyarakat dapat menyaksikan koleksi 114 benda yang menjelaskan perjalanan sejarah paguyuban ini.

Ada penjelasan soal lambang Pangestu yang berupa kembang mawar dan kembang kamboja, berbagai tanda penghargaan yang diterima para tokoh Pangestu dan masih banyak lainnya. Koleksi itu adalah hibah dari keluarga perintis Pangestu yang berjuang menyebarluaskan ajaran Sang Guru Sejati sejak berdiri pada 1949.

"Sebagai tempat mendapatkan informasi ajaran sang guru sejati yang diterima Bapak R. Soenarto Mertowardojo pada tahun 1932. Ajaran sang guru sejati adalah sarana untuk mengolah hati dan cipta bagi mereka yang ingin bertemu dengan penuntun sejatinya di pusat hati sanubarinya," ucap Slamet.

Saat ini Pangestu memiliki kurang lebih 150.000 anggota dan 115 cabang di Indonesia. Sekira 500 anggota organisasi penghayat kepercayaan itu berada di Solo.

Kekayaan Budaya

Dosen Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Yuyun Sunesti, menyebut turunnya jumlah organisasi penghayat kepercayaan berbanding lurus dengan berkurangnya penganut penghayat aliran kepercayaan. Salah satu dampaknya, kekayaan budaya Indonesia juga ikut berkurang.

"Penghayat kepercayaan memiliki berbagai nilai-nilai kearifan lokal yang turun-temurun yang mereka jaga selama ratusan tahun. Utamanya tentang nilai-nilai pelestarian alam, tradisi, pengobatan tradisional, dan etika bermasyarakat,"

ujarnya kepada Solopos.com, Jumat (24/6/2022). Ia menilai turunnya jumlah organisasi penghayat kepercayaan tidak melulu karena sesepuh atau pemimpinnya meninggal. Para pengikut kepercayaan menghadapi persoalan sosial-politik yang sangat kompleks sehingga memaksa mereka harus bernegosiasi dengan keadaan.

"Penelitian tugas akhir mahasiswa saya tentang pengikut kepercayaan menemukan meski Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 sudah mengakui eksistensi penghayat kepercayaan namun mereka masih mendapatkan eksklusi dan diskriminasi di lapangan," ucap Yuyun.

Mereka bernegoisasi agar bisa bertahan hidup dengan nyaman dalam masyarakat. Biasanya negosiasi ini bersifat kompromisit, mereka akan mengambil sisi yang menguntungkan tetapi tidak meninggalkan sisi yang lain.

Contohnya, mereka bersedia memilih salah satu agama resmi dituliskan pada kolom agama di KTP. Tetapi dalam praktek keseharian, mereka tetap menjalankan ajaran kepercayaannya.

Yuyun menegaskan dukungan pemerintah terhadap keberadaan penghayat kepercayaan tidak terbatas urusan administratif kependudukan saja. Dukungan perlu diperluas seperti mencakup soal layanan sosial, jaminan keamanan, pendidikan, penerimaan sosial, dan kesejahteraan.

"Nah, diharapkan para penghayat bisa mendapatkan hak-hak sipil mereka dengan tetap menjadi penghayat kepercayaan secara penuh," pungkas Yuyun.

Persekusi Tak Halangi Penghayat Kepercayaan di Solo untuk Berekspresi

Oleh: Mariyana Ricky P.d

Tindakan persekusi dari kelompok intoleran tak menghalangi para penghayat kepercayaan di Kota Solo untuk menjalankan ritualnya karena telah dijamin konstitusi.

Meski jumlahnya terus menurun, organisasi penghayat kepercayaan di Kota Solo terus berusaha menjaga eksistensinya. Seperti yang dilakukan sekelompok orang di joglo kecil di Punthuk atau Gumuk Segaran di Taman Sriwedari Solo, Kamis (23/6/2022) malam Jumat Legi.

Di tengah gelap, sekitar tujuh orang berbusana khas Jawa berkumpul dan duduk di tengah gumuk. Di depan mereka ada tumpah berisi sesajen, antara lain ada air bunga mawar dan dua sisir pisang raja. Tak berapa lama, lilin-lilin di sekitar sesajen dinyalakan sehingga cahayanya sedikit menerangi Gumuk Segaran.

Sekitar pukul 21.00 WIB, salah seorang pria menyanyikan tembang Jawa, tanda acara dimulai. Selanjutnya seorang pria yang lebih tua memimpin doa dalam bahasa Jawa. Intinya memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya memberikan petunjuk kepada umat manusia agar bisa menjalani kehidupan dengan baik.

Di tengah rapalan doa, tiga orang lagi datang dan duduk di barisan belakang. Para penghayat kepercayaan di Solo itu bergabung dalam sebuah ritual menghadap Sang Pencipta.



Sejumlah penghayat kepercayaan menjalankan ritual di Punthuk atau Gumuk Segaran di Taman Sriwedari Solo. (Foto: Mariyana Ricky P.D)

"Aktivitas ini baru dua kali kami laksanakan pada tahun ini. Sebagai upaya menghidupkan kembali napak tilas tempat-tempat yang dahulu menjadi lokasi turunnya wahyu bagi para pembesar Jawa sejak zaman Kerajaan Pajang hingga Kasunanan Surakarta," tutur salah seorang peserta bernama Mbah Jantit.

Ketua II Persatuan Warga Teosofi Indonesia (Perwatin) Solo ini menjelaskan ritual diikuti anggota dari empat paguyuban penghayat kepercayaan di Solo. Selain Perwatin, ada Pelajar Kawruh Jiwa, Papandayan (Pancasila Handayaningrat), dan Pangarso Budi Utomo Roso Manunggal Jati. Ada pula dua orang penghayat yang tak bergabung dalam paguyuban.

Mbah Jantit mengaku tradisi seperti ini bakal dihidupkan secara rutin di sejumlah punden atau petilasan lain. "Pada 1980-an hingga 1990-an saya sempat menggelar tradisi jalan kaki dari Museum Keris [dulu RSJ Mangkujayan] ke Punthuk Segaran."



Segaran Taman Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah tempo dulu. (Foto: Dokumentasi sastra.org)

Jaminan Pemerintah

"Saat itu saya mengalami persekusi. Saya di-sweeping gerombolan tak dikenal. Setelah itu tradisi ini mulai jarang atau tidak dilakukan secara terang-terangan. Kini kami mencoba menghidupkan kembali," ucap Mbah Jantit.

Ia mengaku tak lagi khawatir dengan ulah kelompok tak dikenal itu karena yakin kepercayaannya sudah mendapat jaminan dari pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal status penghayat kepercayaan telah diambil berdasarkan kajian hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pidato Kapolri yang menyebar di WhatsApp Group soal kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing kami jadikan pegangan. Kami tenang saja sekarang. Memang kami akui sweeping tersebut berpengaruh terhadap kami. Namun itu bukan satu-satunya," kata dia.

Mbah Jantit mengatakan problem terbesar yang dihadapi

penghayat kepercayaan termasuk di Solo terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Waktu itu pemerintah memaksa penghayat kepercayaan memilih agama yang diakui pemerintah.

Bagi yang menolak akan dianggap sebagai kaum tak beragama yang berafiliasi dengan organisasi terlarang, salah satunya Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya banyak penghayat kepercayaan yang tidak berani muncul.

"Setelah ada Pakem, HPKI, dan MLKI, perlana kami mulai menunjukkan eksistensi. Jaminan itu juga ada lewat putusan MK," ucap Mbah Jantit yang masih mencantumkan agama resmi pada kolom agama di KTP miliknya.

Kedudukan Hukum

Pada 28 September 2016, empat orang penghayat kepercayaan atau agama lokal mengajukan judicial review UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan UU No 24/2013 tentang Perubahan Atas UU No 23/2006 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan kata agama dalam undang-undang itu yang menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, MK berpendapat kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang sepanjang tidak termasuk "kepercayaan".

Ketiga, MK menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menyatakan status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom kepercayaan di KK dan e-KTP tanpa perlu memerinci kepercayaan yang dianutnya karena jumlah penghayat kepercayaan sangat banyak dan beragam.

Cukup dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Salah seorang penghayat kepercayaan yang tak bergabung dengan organisasi di Solo, Didit Rudendar Widyatmojo, menyebut kepercayaannya adalah manembah marang Gusti Akarya Jagad. "Kami nguri-uri, di Punthuk Sriwedari pada masa dahulu, Paku Buwono X [Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat] kerap memberi wejangan kepada warga. Dia juga menerima wahyu di sini," katanya.



Peserta kirab membawa wayang kulit tokoh Semar berukuran besar dan membawa bendera merah putih sepanjang 1.000 meter dalam Kirab Jaga Wayang, Selasa (15/3/2022), dari Museum Keris menuju Museum Radyapustaka, Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah organisasi penghayat kepercayaan ikut menjadi peserta. (Foto: Solopos.com/Nicolous Irawan)

Tak hanya PB X, sosok Tumenggung Kalabendu dari Kerajaan Pajang juga mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Tuhan di lokasi itu. "Kami mendatangi tempat-tempat yang kami percaya memiliki kekuatan. Kepercayaan yang saat ini sudah asing di masyarakat, kami lestarikan," ucap Didit.

Ia mengaku belum mengganti kolom agama di KTP. Hal

itu dianggapnya akan merepotkan persoalan administrasi kependudukan bagi putra-putrinya..

Toleransi Masyarakat Sekitar

Persekusi juga dialami Rini Lastri, seorang perempuan penghayat Sapto Darmo di Kecamatan Banjarsari, Solo. Tempat ibadahnya, Sanggar Candi Busana (SCB), yang menempati halaman kediaman orang tuanya didatangi kelompok intoleran. Mereka berniat menyerang namun gagal karena perlindungan masyarakat sekitar.

"Saya tidak ingat kapan pastinya, saat peristiwa itu terjadi, saya dan keluarga sedang tidak ada di rumah. Posisi SCB kosong karena kami sedang ada tugas di SCB Pajang. Saat kami pulang, warga membuat palang dari bambu di depan gang menuju rumah dan SCB kami. Bapak-bapak kampung berkumpul di depan palang bambu itu," tuturnya, Jumat (24/6/2022).

Tetangga dan masyarakat sekitar bergotong-royong melindungi SCB. "Mereka bercerita tadi ada gerombolan yang berniat merusak tapi beruntung ketahuan warga sehingga bisa dicegah. Warga lantas berinisiatif bikin palang itu kalau-kalau mereka kembali. Ini menunjukkan sebenarnya warga sangat toleran," imbuhan Rini.

Ia mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo juga bersikap toleran terhadap para penghayat kepercayaan. Waktu itu, Wali Kota Solo periode 2000-2005, Slamet Suryanto hadir dalam peresmian SCB.

Secara pribadi, Rini mengaku jarang mendapat sikap kurang menyenangkan dari orang lain. Pasalnya, ia tak banyak berinteraksi atau berkecimpung dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang. Namun adiknya yang bekerja di instansi pemerintahan mengaku pernah mendapat cibiran.

"Dia sering menjadi sorotan dan gunjingan bagi beberapa orang yang menganggap penghayat sebagai orang tidak

beragama dan ber-Tuhan. Tetapi lambat laun mereka bisa menerima melalui obrolan-obrolan ringan," kisahnya.

Dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Samsul Maarif, menilai pemerintah masih harus menggiatkan sosialisasi mengenai kesetaraan hak antara penghayat kepercayaan dan pemeluk agama.

Negara punya kewajiban menghormati, melindungi, dan melayani para penghayat kepercayaan. Negara juga harus mengadvokasi dan memastikan para penghayat memiliki ruang aman dan nyaman untuk menjalankan keyakinannya.

"Semua orang boleh punya argumentasi apapun, tapi negara harus hadir untuk melindungi keamanan dan memberi kenyamanan bagi penghayat. Negara harus memberikan pemahaman soal penghayat dan relasinya dengan agama kepada seluruh warga negara," kata dosen yang akrab disapa Ancu kepada Solopos.com, Rabu (22/6/2022).

Berbeda tapi Setara

Ia mengingatkan putusan MK dengan tegas sudah menghadirkan norma konstitusi bahwa agama dan kepercayaan itu berbeda tapi setara. Mereka mendapatkan jaminan yang sama sesuai Pasal 29 UUD 1945, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Kemudian ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Negara wajib mengadvokasi implementasi dari norma konstitusi. Hak [agama/kepercayaan] melekat pada individu warga negara bukan pemberian," tegasnya.

Pemerintah masih harus terus didorong untuk melakukan transformasi dari politik agama rezim menjadi politik kebebasan beragama. Agama itu banyak, ada agama leluhur, nusantara,

dan kepercayaan.

Saat ini, mayoritas penghayat kepercayaan masih merasakan tendensi eksklusif dari kelompok agama. Belum banyak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah yang bisa menerima Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa masuk dalam forum ini.

"Kalau saya mendeklarasikan organisasi (kepercayaan), atau mengganti kolom agama, dampaknya bagaimana? Apakah makin eksklusif, mudah dibubarkan, atau mendapatkan diskriminasi dan persekusi?" tanyanya.

Ancu juga melihat pengisian kolom agama pada KTP yang sesuai putusan MK masih menimbulkan dilema dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penghayat kepercayaan. Mereka masih memiliki banyak pertanyaan karena dampaknya terhadap relasi penghayat dengan masyarakat.

"Untuk sampai mengganti kolom agama KTP itu soal kenyamanan," tambahnya.

Ada soal relasi dengan tetangga keluarga. Ini soal sepele tapi secara sosial dan emosional sangat signifikan. Sementara dari negara, jaminannya belum meyakinkan.

Urusan pernikahan dan pendidikan juga belum mendapatkan layanan yang semestinya. Semua ini turut berkontribusi pada surutnya jumlah penghayat kepercayaan.

Tetapi sejarah panjang yang sudah dilalui oleh berbagai organisasi penghayat kepercayaan itu justru memicu semangat mereka untuk mempertahankan diri. Negara juga wajib hadir karena para penghayat kepercayaan adalah warga negara yang hak-hak sipilnya wajib dilindungi.

Pasang Surut Pernikahan Pemeluk Sapta Dharma dan Sumarah Sejak Orde Baru Hingga Kini

Oleh: Atikah Nurul Ummah

Dimuat di situs ipmarena.com, 4 July 2022

Menikah dan tercatat dalam dokumen negara menjadi dambaan para pasangan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Selain pernikahannya diakui, hak-hak sipilnya sebagai warga negara pun dipenuhi.

Sayangnya, Putusan MK 2017 yang mengharuskan kelompok penghayat terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kendala utama. Jika belum terdaftar, maka bagaimana pernikahan penghayat diakui?

Di ruang tamu rumahnya di Terban, Kota Yogyakarta, Bambang Purnomo (69), kembali mengingat prosesi pernikahannya sebagai pemeluk Sapta Darma 44 tahun silam. Saat itu, ia duduk bersama mempelai perempuan yang kini menjadiistrinya di atas sebuah lembaran kain putih. Mereka melakukan prosesi sujud bersama sebelum mengucap janji sehidup semati disaksikan pemuka penghayat dan keluarga.

"Dulu saya menikah di rumah ini. Nah pas di sini, saya sujud," kenang Bambang kepada ARENA, Jumat, (10/06).

Dalam kepercayaan atau agama lokal, Sapta Dharma, prosesi sujud dilakukan untuk mengikat batin mempelai, meneguhkan dua hati untuk hidup bersama hingga akhir. Mereka juga minta petunjuk dan jalan keluar kepada Hyang Maha Kuasa.

Ajarannya meyakini pernikahan hanya sekali seumur hidup, tidak ada perceraian.

Sapta Darma merupakan ajaran kebatinan yang diyakini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapa Panuntun Agung Sri Gutama pada Jumat Wage, 27 Desember 1952 dini hari di Kampung Koplakan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tanggal itu diperingati sebagai salah satu hari besar Sapta Darma.

Sapta Darma memiliki tiga ajaran utama, yaitu sujud, wewarah tujuh atau tujuh arahan, dan sesanti. Bambang menganutnya sejak 1971, menjelang menjadi mahasiswa di salah satu kampus swasta di Yogyakarta.

Prosesi pernikahan Sapta Darma sedari dahulu tidak berubah. Pasangan pengantin penganut Sapta Darma saat ini juga mengikuti aturnya yang dijalani Bambang dahulu.

Awalnya adalah hening pembuka, yaitu ucapan puji syukur karena dapat berkumpul bersama dalam acara pernikahan tersebut dan memohon kelancaran prosesi pernikahan. Selanjutnya, orangtua pasangan pengantin atau wali mempelai perempuan menyerahkan pasangan pengantin kepada pemuka penghayat yang akan menikahkan.

Langkah selanjutnya, pasangan pengantin menyerahkan persyaratan administrasi kepada pemuka penghayat dan pernyataan tuntunan bahwa mereka akan hidup berumah tangga bersama. Perlengkapan administrasi terdiri dari KTP, pas foto, Akta Kelahiran, dan formulir pernikahan.

Setelah itu, prosesi sujud bersama, yaitu duduk bersila dan kemudian membungkuk ke arah timur. Dalam prosesi pernikahan, gerakan sujud ditambah satu *bungkukan* (sujud) sambil pengantin memohon dalam hati, "Semoga Hyang Maha Kuasa melimpahkan karunia, pangayoman, dan kebahagiaan bagi kami berdua selamanya".

Sedangkan tamu undangan yang mengikuti prosesi sujud juga memohon dalam hati, "Semoga Hyang Maha Kuasa

melimpahkan karunia, pangayoman, dan kebahagiaan bagi mempelai berdua."

Kemudian pembacaan janji prasetya oleh kedua mempelai dan pengukuhan sahnya pernikahan. Kedua mempelai mengucap janji bersama untuk menjalankan ajaran Sapta Darma dan janji bersama mengarungi pernikahan tersebut. Lalu ditutup dengan wejangan pemuka dan hening penutup. Dalam prosesi ini, pemuka penghayat memberikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai dan doa-doa untuk kebaikan rumah tangga keduanya.

Menikah pada September 1978 dirasa "untung" bagi Bambang. Ia bisa melangsungkan prosesi pernikahan penghayat dan memperoleh Akta Nikah secara resmi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Bahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Bambang sudah tertulis Sapta Darma pada kolom agama.

"Itu permintaan saya sendiri ketika mendapatkan KTP di Kelurahan Caturtunggal," akunya.

Namun selang sebulan setelah menikah, muncul aturan Menteri Agama pada Oktober 1978 yang salah satunya mensyaratkan tiap orang harus beragama. Artinya, kolom agama dalam KTP hanya boleh diisi lima agama yang ditentukan negara.

"Setelah Oktober 1978 situasi jadi susah, amat jarang pernikahan penghayat. Saya tahu persis karena banyak sekali kasusnya, termasuk adik saya," jelas Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sapta Darma DIY sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Kesulitan pencatatan secara sipil tersebut berlangsung lama. Sebelum akhirnya muncul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017 atau yang dikenal dengan Putusan MK 2017. Isinya, secara administrasi kolom agama dalam KTP maupun KK boleh diganti dengan kepercayaan dan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan Penghayat di Disdukcapil.

Sejak itu, proses pencatatan pernikahan penghayat sudah ada mekanismenya. Kelompok-kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang ingin melangsungkan prosesi pernikahan menurut kepercayaannya bisa memperoleh Akta Nikah langsung.

Mempelai Sapta Darma Dipingpong Urus KTP

Dalam praktik implementasi Putusan MK 2017, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME masih terkendala pengurusan KTP. Seperti pasangan Baskoro Waskitho Husodo (26) dan Sekar Dwi Yulianti, generasi muda penganut Sapta Darma yang menikah pada 27 Maret 2022 di Kabupaten Sleman, DIY.

"Saya mau menikah secara kepercayaan, ya karena kami penghayat Sapta Darma. Aturan tentang pernikahan penghayat maupun negara sudah diatur," jelas Baskoro, saat ditemui di Sanggar Candi Busono, tempat ibadah pemeluk Sapta Darma, di Taman Siswa, Yogyakarta, Sabtu, (11/06).

Setahun sebelum melangsungkan prosesi pernikahan, Baskoro bertanya kepada berbagai pihak tentang persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Informasi didapatkan dari teman yang menikah sebagai penghayat, juga dari sesepuh Sapta Darma.

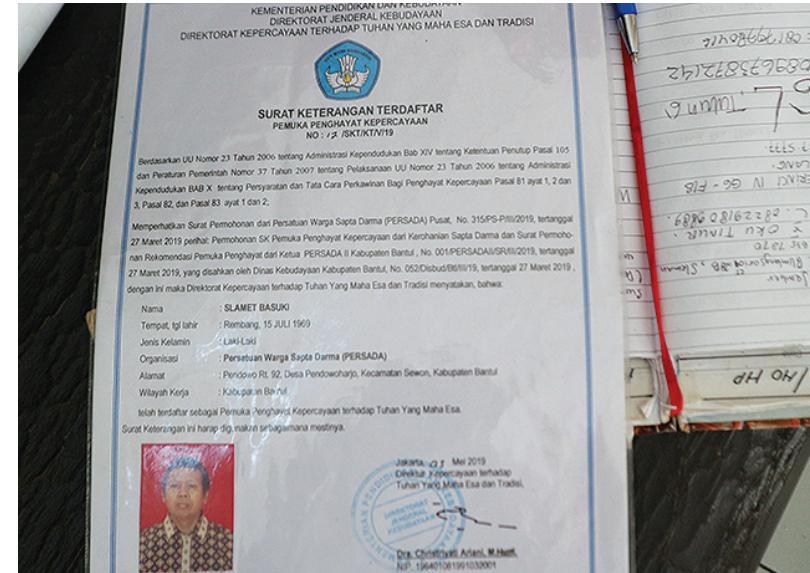
"Oh, KTP harus sama-sama penghayat. Lalu saya dan Sekar mengganti KTP," kata Baskoro.

Secara administratif, pencatatan pernikahan penghayat tidak jauh berbeda dengan pernikahan umumnya. Bawa KTP milik mempelai harus sama-sama penghayat, ada saksi dan syarat administasi umum lainnya.

Namun Baskoro dan istri mengalami kendala saat mengurus KTP meskipun mereka berasal dari kepercayaan Sapta Darma yang sudah tercatat di Dinas Kebudayaan. Baskoro mengurus pergantian KTP di Dinas Dukcapil Sleman, tetapi petugas

menyuruhnya ke Dinas Kebudayaan Sleman. Di sana, Baskoro justru disuruh kembali ke Dinas Dukcapil Sleman.

Meski "dipingpong", Baskoro mengalah hingga akhirnya memperoleh KTP di Disdukcapil. Tetapi ia kaget karena kolom agama di KTP ditulis tanda (-) strip. Padahal seharusnya ditulis dengan "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME".



Sertifikat Pemuka Penghayat Sapta Darma milik Slamet Basuki. (Foto: Dokumen Slamet Basuki)

"Kan tandanya tidak punya agama," keluh Baskoro.

Beruntung, saat pernikahan, Disdukcapil Sleman telah mengubah lagi KTP milik Baskoro, kolom Agama sudah diganti dan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. KTP baru ini diberikan bersamaan dengan penyerahan Akta Nikah.

Sekar juga menemui kendala saat mengurus KTP di tempat asalnya, Cirebon, Jawa Barat. Petugas sempat tidak mau mengubah kolom Agama menjadi Kepercayaan dan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Mempelai Sumarah Bertahan dengan Aturan Enam Agama

Berbeda dengan Sapta Darma, pernikahan penghayat kepercayaan Sumarah masih mengikuti salah satu dari enam agama yang diakui negara. Pasalnya, kolom agama dalam KTP masih diisi salah satu dari enam agama resmi negara, apakah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, ataupun Konghucu.

Prosesi pernikahan juga sesuai dengan agama dalam KTP. Mereka tetap menempuh jalan itu walaupun telah ada Putusan MK 2017 yang membolehkan kolom agama diisi dengan "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME".

"Kalau dalam Sumarah, tidak ada paksaan berpindah dari agama tertentu (menjadi kepercayaan)," jelas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sumarah DIY, Kuswijoyomulyo, Kamis (26/5/2022).

Mayoritas penghayat Sumarah masih risau karena masih ada stigma negatif mengenai penghayat kepercayaan. Sampai saat ini belum ada yang menikah secara Sumarah dan dicatatkan di Disdukcapil.

Berbeda dengan para pendahulu penghayat Sumarah yang melangsungkan prosesi pernikahan menurut Sumarah.

"Itu sebelum muncul peraturan kolom KTP harus memeluk salah satu dari lima agama," papar Kus, sapaan akrabnya yang merujuk aturan pada aturan Menteri Agama pada Oktober 1978.

Sebelum aturan itu muncul, prosesi pernikahan penghayat Sumarah tidak berbeda jauh dengan pernikahan penghayat umumnya. Dilaksanakan setelah syarat administrasi dipenuhi, lalu melakukan sujud bersama, dinikahkan oleh pemuka penghayat Sumarah, disaksikan oleh keluarga dan tamu undangan, serta mengucap janji setia antar mempelai.

Pasangan penghayat Sumarah, Nugroho (48 tahun) dan Ningrum (43 tahun) adalah contoh penghayat Sumarah yang menikah menggunakan tuntunan agama yang dianut. Bukan

menggunakan prosesi pernikahan Sumarah. Warga Kemantran, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut menikah pada 2004. Alasannya, karena saat itu belum ada aturan menikah secara penghayat sehingga belum bisa dicatatkan di Disdukcapil.

"Tetapi malam sebelum pernikahan, keluarga kami berkumpul dan mengadakan prosesi sujud bersama," jelas Nugroho, Kamis (26/5/2022).

Nugroho merupakan cucu dari penerima wahyu Sumarah, yakni Raden Ngabei Soekino Hartono. Kepercayaan Sumarah lahir sejak 8 September 1935. Lantaran ajarannya tidak ada paksaan untuk berpindah agama menjadi kepercayaan, mayoritas pemeluk Sumarah memiliki agama masing-masing.

Namun mereka tetap melaksanakan sujud Sumarah, yakni sujud untuk menciptakan ruang di dalam diri, batin dan kesunyian, yang diperlukan untuk mencapai kondisi tenteram-damai dan mewujudkan jati diri bagi pemeluknya.

Berbeda dalam Sapta Darma, penghayat Sumarah tidak diharuskan menghadap ke arah mata angin tertentu ketika melaksanakan sujud. Posisi sujud pun dengan duduk sembari memfokuskan pikiran dan berserah menuju Allah.

Keharusan Terdaftar Jadi Sumber Kendala

Koordinator Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puan Hayati), Endang Sulistyowati mengatakan pencatatan pernikahan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Indonesia mengalami pasang surut. Sebelum 1978, penghayat bisa mencatatkan pernikahannya pada catatan sipil, meskipun belum ada aturan pernikahan bagi penghayat.

Namun setelah penghayat kepercayaan masuk dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Nomor 2 Tahun 1973 dan 1978, penghayat mulai sulit mengajukan pernikahan penghayat.

"Prosesnya bergantung kepala daerah masing-masing.

Memperbolehkan atau tidak," kata Endang, Selasa, (14/7/22).

Hambatan pernikahan penghayat muncul, tepatnya setelah terbit Surat Menteri Agama Nomor B/VI/11215/78 tertanggal 18 Oktober 1978 yang ditujukan kepada para gubernur. Isinya menganulir PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Surat Menteri Agama itu menyebutkan dua hal. Pertama, tidak dikenal tata cara perkawinan, sumpah, dan penguburan menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula penyebutan "aliran kepercayaan" sebagai "agama". Kedua, orang beragama atau pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Sehingga tidak ada tata cara "perkawinan menurut aliran kepercayaan" dan "sumpah menurut aliran kepercayaan".

Hingga kemudian lahir Putusan MK 2017, yang menurut Endang masih menyisakan kendala dalam upaya pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan di Disdukcapil. Terutama setelah penerbitan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang mengenai Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ada tiga poin persoalan dalam Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019. Ayat 1, perkawinan penghayat dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. Ayat 2, pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk oleh organisasi penghayat. Ayat 3, organisasi dan pemuka penghayat terdaftar di kementerian yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan. Artinya, pemuka penghayat harus bersertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan organisasi penghayat terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Menurut Endang, keharusan organisasi penghayat kepercayaan terdaftar di Kemdikbudristek menjadi kendala utama. Lantaran

masih banyak organisasi penghayat yang belum tercatat di sana. Akibatnya, para penghayat kesulitan mengurus KTP dan Akta Nikah sebagai pemenuhan hak-hak sipilnya.

"Dan untuk terinventarisasi, prosesnya sangat panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kan kalau seperti itu, mereka tidak bisa mengakses hak-hak sipil mereka," jelas Endang.

Hingga Juni 2022, kelompok penghayat kepercayaan di DIY berjumlah 40. Yang sudah tercatat di Dinas Kebudayaan DIY berjumlah 27. Sedangkan yang belum terinventarisasi ada 13 kelompok.

Dalam proses pencatatannya, kelompok yang belum terinventarisasi itu terkendala akta notaris karena membutuhkan biaya yang tak murah. Juga kendala proses panjang, terutama dalam bagian penulisan sejarah turunnya wahyu.

"Enggak semua orang bisa mencatat dan menggambarkan dengan baik. Karena kan itu proses sejarah dan masing-masing kepercayaan berbeda," jelas Endang.

Kemudian, keharusan pemuka penghayat memiliki sertifikat izin sebagai pemuka penghayat juga merupakan hal yang berbeda dibanding pernikahan penghayat sebelum Putusan MK 2017. Bambang Purnomo mencontohkan, tahun 1978, dia dinikahkan oleh R. Sutarjo Hadikusumo yang merupakan ayah dari Baskoro. Sutarjo ditunjuk langsung sebagai pemuka penghayat oleh umat Sapta Darma karena dianggap memiliki nilai religiusitas tinggi.

Kini, Bambang juga diangkat menjadi pemuka penghayat Sapta Darma. Dia mendapatkan sertifikat resmi sebagai pemuka penghayat dari Dinas Kebudayaan pada 2010. Dia pula yang menikahkan Baskoro dan Sekar tiga tahun lalu.

"Saya ingin balas budi, karena dulu saya dinikahkan oleh ayah Baskoro. Saya senang," ujar Bambang.

Sertifikat pemuka penghayat diperoleh melalui rekomendasi dari tiap-tiap organisasi penghayat dan didaftarkan ke Dinas

Kebudayaan di bawah Kemdikbudristek. Adapun syaratnya, yakni orang yang dianggap mampu, memiliki nilai religuitas tinggi, dan mau mengabdi di organisasi tersebut. Sertifikat itu berlaku selama lima tahun sejak dibuat.

Sementara kelompok penghayat Sumarah belum ada yang diangkat menjadi pemuka penghayat. Akibatnya, belum ada pemuka penghayat Sumarah yang bertugas menikahkan pasangan penghayat di kelompoknya.

"Karena tidak sembarangan mengangkat seorang pemuka. Harus diperhatikan dengan benar syarat-syaratnya menurut Sumarah. Kami sedang susun kembali," jelas Kus.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Mayawati Jati Lestari menjelaskan, regulasi menikah secara umum harus ada keterangan menikah dari pemuka penghayat. Kemudian KK, KTP orang yang bersangkutan maupun saksinya, lalu ada pas foto. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah persoalannya lembaganya.

"Lembaga tersebut harus memiliki izin khusus dan tercatat di Direktorat Kebudayaan Kemdikbudristek (sekarang). Jadi kata kuncinya itu," jelas Mayawati, Selasa (14/6/22).

Adapun Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2019 tertulis, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun sudah ada aturannya, jumlah penghayat yang menikah menurut prosesi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME masih sangat kecil.

Data Disdukcapil Sleman misalnya, tercatat hanya ada satu pasang penghayat yang menikah secara penghayat setelah disahkannya aturan mengenai pencatatan pernikahan penghayat pada 2019 lalu. Menurut Maya, kondisi tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya, masih banyak penghayat yang belum

mengganti KTP mereka menjadi KTP pemeluk penghayat.

Berdasarkan database Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Sleman, jumlah penghayat yang memiliki KTP yang mencantumkan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam kolom agama ada 22 orang. Akibatnya, dokumen lain, seperti KK maupun Akta Nikah menyesuaikan dengan KTP.

Minimnya penggantian KTP penghayat juga tidak bisa dilepaskan dari stigma yang melekat terhadap kelompok ini. Kelompok penghayat acapkali dianggap sesat, pendukung PKI, dan beragam stigma lain yang membuat mereka tidak berani menunjukkan jati dirinya di muka umum.

"Itu tidak mudah, memulihkan mental penghayat yang sudah berpuluhan tahun terkena stigma dari masyarakat. Jangankan dari masyarakat, kadang antarkeluarga pun masih ada yang berpandangan buruk," kata Slamet Basuki, salah satu pemeluk Sapta Darma, Jumat (27/5/2022).

Endang menambahkan, stigma buruk yang melekat pada masyarakat penghayat masih kuat sampai saat ini. Dan itu berimbang pada minimnya penghayat yang mengganti KTP-nya menjadi pemeluk penghayat.

Endang menengarai ada dua alasan terkait keengganannya para penghayat untuk mengganti KTP. Orang-orang tua pemeluk penghayat tidak mau mengganti KTP karena merasa sudah tua. Sedangkan golongan muda takut mengganti KTP karena khawatir akan berimbang pada pekerjaan dan pandangan sosial masyarakat setelah mengetahui dirinya pemeluk penghayat.

"Bagaimanapun, stigma itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kami," jelas Endang.

Kendati demikian, baik Endang, Bambang, juga penghayat yang lain masih saling bahu-membahu mengadakan sosialisasi terkait pernikahan penghayat. Mengingat, pernikahan adalah salah satu ujung tonggak regenerasi para penghayat.

"Kami semua berjuang sampai saat ini. Kalau menikahnya secara penghayat, kan itu suatu hal yang penting. Karena

itu kan tonggak, pewarisan ada di situ. Kalau menikah, kan seluruhnya penghayat dan itu akan berlanjut," jelas Bambang.

Bambang, Baskoro, Nugraha, maupun penghayat yang lain berusaha membuktikan, bahwa kelompok penghayat masih berusaha melawan stigma dan berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Termasuk dalam pernikahan sekalipun.

"Perjuangan ini memang tidak mudah. Yang harus selalu kami ingat, kami harus tetap bergandengan tangan agar kelompok penghayat tetap lestari dan langgeng," pungkas Baskoro. ***

Gema Pakti Berjuang untuk Regenerasi Penghayat Kepercayaan

Oleh: Adil Al Hasan

Dimuat di situs persmaporos.com, 4 Juli 2022

Nugraha Dhayu Murti (26) sudah menghayati kepercayaan Tri Soka sejak berumur 6 tahun. Waktu ibadah, dia ditemui secara magis oleh leluhur Tri Soka. Leluhur itu bilang kalau dia adalah pewaris.

"K alau kamu di sini, uripmu bakal tentrem (hidupmu bakal tentram)," ujar Nugraha menirukan.

Sedangkan Baskoro Waskitho Husodo (26) alias Baskoro menghayati Sapta Darma sejak duduk Sekolah Dasar. Kini mereka menjadi ketua atau presidium Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa Yogyakarta (Gema Pakti DIY).

Gema Pakti DIY adalah organisasi sayap pemuda dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), sebuah organisasi yang mewadahi organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Penghayat Keparcayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) adalah ajaran spiritualisme warisan leluhur yang kaya dengan nilai pelestarian alam dan Ketuhanan.

Sabtu sore itu (04/06), jalanan Yogyakarta masih basah usai diguyur hujan. Dari Sanggar Candi Busana, tempat bagi warga penghayat kepercayaan Sapta Darma berkumpul dan beribadah di Sagan, Kota Yogyakarta terdengar suara gamelan.



Warga penghayat kepercayaan paguyuban hangudi bawana tata lahir batin sedang mengadakan ritual berdoa kepada tuhan yang maha esa di sebuah mata air di kasihan bantul, yogyakarta, kamis malam (2 juni 2022). kedekatan dengan alam adalah salah satu ciri yang menonjol dari kelompok penghayat kepercayaan. (Foto: Bambang Muryanto)

Di dalam rumah joglo yang sudah berumur tua itu beberapa pemuda dan pemudi sedang memainkan gamelan. Ada yang memainkan saron, gong, dan lainnya.

Saya masuk untuk melihat aktivitas dan berbincang bersama mereka. Nugraha bersama Baskoro bercerita tentang kegiatan latihan karawitan sebulan sekali. Tujuannya untuk menjaga rasa kekeluargaan antarpemuda penghayat kepercayaan dan penguatan fungsi pemuda khususnya sebagai generasi penerus penghayat kepercayaan. Selain itu ada pula belajar aksara Jawa.

"Ke depan, akan ada anjangsana (berkunjung) ke tempat penghayat lain di Yogyakarta," kata Nugraha.

Sanggar Candi Busana, tempat Gema Pakti berkumpul ini juga sering digunakan untuk berlatih gamelan bagi masyarakat umum. Beberapa pertemuan warga di sekitar Sagan juga sering berlangsung di sana.

Kebetulan, pemilik sanggar itu adalah ketua RW setempat, Bambang Purnama. Ia adalah seorang penghayat kepercayaan Sapta Darma dan Ketua Presidium MLKI DIY.

Secara pribadi, Baskoro merasa nyaman di perkumpulan Gema Pakti karena ada teman-teman yang satu frekuensi. Mereka saling mendukung dan memberikan semangat, sehingga dapat menguatkan pilihan kepercayaan mereka.

"Meski ada diskriminasi dari masyarakat sekitar dan teman-teman berbeda keyakinan," kata Baskoro.

Baskoro yang duduk bersila di samping kendang dan saron, bercerita tentang susahnya mengumpulkan pemuda dari tiap paguyuban penghayat. Sebenarnya, ia sudah menemui kondisi itu saat menjadi ketua Forum Pemuda Penghayat (FPP), organisasi sebelum Gema Pakti.



Warga penghayat kepercayaan Sapta Darma sedang beribadah di Candi Sapta Rengga di Surokrasan, Kota Yogyakarta, November 2017. Sapto Darma adalah salah satu kelompok penghayat kepercayaan yang memiliki banyak pengikut di Indonesia (Foto: Bambang Muryanto)

Saat itu, hanya beberapa penghayat yang mengikuti agenda rutin forum pemuda. Akhirnya FPP bubar karena banyak pemuda penghayat yang bekerja dan memiliki kesibukan masing-masing.

Saat ini Nugraha mencatat hanya ada sekitar 11 organisasi penghayat yang bergabung dalam Gema Pakti. Sedangkan jumlah organisasi penghayat di DIY ada sekitar 27. Jika makin banyak pemuda penghayat yang bergabung, Gema Pakti bisa makin tumbuh dan berkembang.

"Biar organisasi ini terbentuk dan banyak ide," ujar Baskoro.

Gema Pakti resmi berdiri tanggal 24 Oktober 2019 di Bandung saat berlangsung Sarasehan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan Musyawarah Nasional MLKI. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Jadi, Gema Pakti adalah organisasi sayap atau organisasi pendukung MLKI yang berdiri tahun 2016 lalu. Selain itu, MLKI juga memiliki organisasi perempuan, namanya Puan Hayati.

Dua organisasi ini menjadi tempat aktifitas bagi pemuda dan pemudi penghayat kepercayaan. Saat ini Gema Pakti sudah berdiri di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan berbagai daerah lainnya.

Sedikitnya pemuda penghayat yang bergabung di Gema Pakti terjadi karena jumlah pemuda di tiap paguyuban penghayat juga tidak banyak. Baskoro mengatakan banyak orang baru menjadi warga penghayat saat berusia sekitar 30-40 tahun.

"Tetap ada regenerasi, tapi tidak ada anak mudanya," kata Baskoro.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2020, menyebutkan ada 102.508 orang jiwa yang menganut penghayat kepercayaan. Jumlah ini setara dengan 0,04 persen total penduduk di Indonesia yang mencapai

272,23 juta jiwa. [1]

Jumlah di atas turun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kompas.com, 22 November 2017 melaporkan Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penghayat kepercayaan hingga 31 Juli 2017 ada 138.791 orang.

Sedangkan Jawapos.com, 9 November 2017 memperkirakan jumlah penghayat mencapai 12 juta jiwa. Jumlah ini diprediksi akan meningkat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi UU tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 61 UU ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan 5.

MLKI DIY memperkirakan ada 5 ribu pemeluk penghayat kepercayaan di seluruh Provinsi DIY. Data ini belum termasuk paguyuban yang belum terinventarisasi oleh Dirjen Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, warga penghayat individu, dan para penghayat sekaligus memeluk agama arus utama. Sedangkan paguyubannya ada 40, tetapi baru 27 yang terinventarisasi oleh Dinas Kebudayaan.

Ketua Perempuan Penghayat Kepercayaan (Puan Hayati) DIY, Sri Endang Sulistyowati merasa prihatin dengan kondisi regenerasi penghayat kepercayaan. Padahal berbagai paket kebijakan untuk menjamin hak warga penghayat kepercayaan sudah ada.

Masih ada banyak persoalan, misalnya belum semua warga penghayat mengubah administrasi kependudukan. Hal ini berakibat pada hak-hak sipil warga penghayat, seperti hak pendidikan, pernikahan, dan pemakaman menjadi terhambat.

"Banyak juga warga penghayat yang belum tahu regulasi itu," ujar Sekretaris MLKI DIY itu.

Paket kebijakan yang dimaksud Endang di atas adalah berbagai kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan negara untuk menjamin hak-hak warga penghayat kepercayaan. Ada UU Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan PP 102

Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019; Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: 01/SE/NBSF/VIII/07 tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan; Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.26 Tahun 2017 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; dan Putusan MK atas gugatan uji materi Pasal 61 UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kebijakan di atas belum termasuk regulasi tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang sudah lama ada. KBB merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) universal yang sudah diakui dalam hukum nasional Indonesia. HAM diteguhkan dalam UUD 1945 Pasal 28A-J dan Pasal 29.

Ada pula UU No.29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU HAM No.39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Endang menjelaskan saat ini penghayat muda merasa gamang dengan masa depannya. Mereka tidak ingin mendapat hambatan di lingkungan tinggal dan tempat kerja gara-gara berkeyakinan berbeda. Sebab, pandangan masyarakat terhadap penghayat kepercayaan masih belum baik.

Sedangkan para remaja yang masih di bangku sekolah takut mengikuti pelajaran penghayat kepercayaan. Alasannya takut dirisak teman atau gurunya. Akibatnya, hak anak mendapatkan fasilitas pendidikan penghayat kepercayaan menjadi tertunda.

“Semoga saja pada tahun ajaran 2022 nanti pendidikan penghayat bisa berjalan,” kata Endang (20/04).

Keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

di Indonesia merupakan wujud dari budaya spiritual yang menjadi bagian dari kebudayaan bangsa yang secara historis telah ada dan dihayati sebagian masyarakat. Maksudnya, sebuah keyakinan dinamis yang bermuara pada kesadaran total manusia akan hidup dan kehidupan yang tergantung pada sumber yang menguasai hidup sekaligus menentukan awal serta akhir kehidupan, yaitu Tuhan YME (Adrianto, 2011).

Menurut Nurcholis (2015), penghayat kepercayaan yang juga disebut sebagai agama lokal itu mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama, hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk, dan menghargai serta menghormati keberadaan kelompok-kelompok penganut agama lain yang berbeda.

Sementara itu, Nurhadi (2013: 4-5) menulis semua penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang berhimpun dalam berbagai wadah mengajarkan tuntutan atau pedoman perilaku hidup sehari-hari. Ajaran itu antara lain bernilai religius dan kewajiban kepada Tuhan YME, mengandung nilai moral soal hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama manusia, dan alam.

Menurut penghayat kepercayaan, Tuhan YME memiliki tiga aspek. Pertama, *sangkan paraning dumadi*, yaitu pencipta alam semesta, bersifat mutlak dan sumber segala kehidupan yang bimbingannya selalu dibutuhkan manusia agar kembali kepada sumber hidupnya. Kedua, *memayu hayuning bawana*, yaitu tuntunan untuk menghormati kehidupan alam sekitar. Ketiga, *manunggaling kawula gusti*, yaitu mempunyai kesadaran seutuhnya akan peran dan fungsinya manusia sebagai ciptaan Tuhan YME.

Kondisi masyarakat yang belum menyambut baik kehadiran penghayat kepercayaan juga turut mendorong turunnya jumlah penghayat kepercayaan. Endang mengatakan di Yogyakarta jumlah penghayat kepercayaan menurun karena ketika orangtua atau sesepuhnya yang aktif di paguyuban meninggal dunia

dan yang lebih muda tidak berani menggantikannya.

"Akhirnya, warga paguyuban (yang lebih muda) itu menjadi penghayat perorangan," katanya.

Di Gunungkidul ada Sus Susanto alias Santo yang menganut penghayat kepercayaan Palang Putih Nusantara (PPN). Saat ditemui di rumahnya di Saptosari, Rabu (08/06), Santo baru saja pulang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) untuk membantu sesama warga PPN mengubah kolom agamanya.

Pihak Dinas Dukcapil, kata Santo, sangat terbuka dengan warga penghayat kepercayaan yang ingin mengubah kolom agama mereka di KTP. Bahkan dinas itu pernah menawarkan warga PPN yang secara kolektif ingin mengubah, pihak Dinas Dukcapil akan datang langsung ke warga.

"Enak sekarang itu," katanya.

Sejak kecil mengikuti ajaran PPN dan sekarang menjadi anggota Gema Pakti, mendorong Santo teguh menjadi penerus penghayat seperti orangtuanya. Ia mengatakan di PPN, kesenian seperti karawitan, batik, dan tari menjadi perantara penting hubungan mereka dengan kehidupan.

Santo mengaku bisa melakukan berbagai kegiatan seni itu. Sembari bercerita, sesekali ia mempraktikkan gerakan dalam suatu tarian.

Dahulu, setiap malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Legi, Santo kecil sering diajak ayahnya beribadah bersama warga PPN di Suryodiningrat, Kota Yogyakarta. Di situ, dia melihat warga PPN juga belajar bersama dan berkesenian.

Perlahan-lahan, dia mengikuti berbagai kegiatan itu dan merasa nyaman. Di dalam kesenian, Santo bisa meresapi nilai-nilai luhur seperti filosofi nang, ning, nong dalam gamelan.

"Saat mengheningkan jiwa, rasanya nyaman," katanya.

Santo juga mengatakan saat menari di Suryodiningrat yang menjadi "markas" PPN, dia merasa ada rasa "yang lain" yang membuat dirinya nyaman. Hatinya merasa nyaman.

Keaktifan Santo dalam dunia penghayat kepercayaan membuat dirinya menjadi "tokoh". Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) yang mengadvokasi kelompok penghayat kepercayaan memintanya hadir dalam forum American Friends Service Committee di Kamboja. Sayang, ia gagal berangkat karena positif Covid-19. Usai bercerita, Santo terlihat murung. Padahal ia ingin bercerita tentang kehidupannya sebagai pemuda penghayat, kegiatan di PPN, dan pengakuan negara Indonesia terhadap penghayat kepercayaan.

Sebagai seorang pemuda penghayat kepercayaan, Santo tidak takut menunjukkan identitasnya. Sebab, sekarang penghayat kepercayaan sudah diakui negara sehingga kedudukannya setara dengan agama.

"Payung hukum sudah ada," ujarnya.

Selain itu, dia ingin menginspirasi pemuda penghayat yang lain agar tidak minder atau merasa minoritas. Sekarang kondisi penghayat lebih baik dari pada zaman orangtuanya dulu yang masih banyak diskriminasi.

Pada tahun ajaran 2022/2023 ini, Santo mendaftar kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, mengambil program studi Pendidikan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Ia ingin menjadi guru penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang saat ini masih kurang.

"Sekarang saya sedang mempersiapkan berkas-berkas buat kuliah," katanya optimis.

Di Gema Pakti, Nugraha, Baskoro, dan Santo ingin merawat penghayat kepercayaan agar berkembang dan eksis. Mereka menggunakan Gema Pakti untuk mengorganisasikan pemuda penghayat. Kalau ada kegiatan Gema Pakti di Kota Yogyakarta, Santo sering datang meski harus menempuh jarak 43 kilometer.

Masih Jadi Potret Pelanggaran HAM dan Sikap Kebangsaan yang Belum Tulus

Ketua Program Studi Lintas Agama, UGM, Samsul Maarif,

mengatakan penghayat kepercayaan di Indonesia masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Ini akibat dari pembedaan agama dan kepercayaan yang dilakukan oleh negara sehingga memicu diskriminasi.

"Itu masalah besar kita yang perlu ditransformasi," ujarnya, Rabu, 20 April 2022.

Stev Koresy Rumagit dalam jurnal berjudul Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia (2013), menjelaskan penyebab diskriminasi ini. Pertama, ada upaya membanding-bandtingkan agama yang ujungnya memberikan penilaian sempurna kepada kepercayaannya sendiri. Kedua, perbedaan suku, ras, dan agama menimbulkan perpecahan antarkelompok. Ketiga, perbedaan kelompok dalam masyarakat di suatu daerah menjadi faktor pendorong terjadinya konflik. Keempat, masalah mayoritas dan minoritas membuat diskriminasi tidak terelakan. [3]

Fenomena ini memang tidak lepas dari sejarah panjang diskriminasi yang dilakukan negara terhadap kelompok penghayat kepercayaan. UU No.1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menilai penghayat kepercayaan mengganggu ketertiban umum karena berbeda dengan agama arus utama. Puncaknya, setelah peristiwa 30 September 1965, penghayat kepercayaan diintimidasi, dipersekusi, dituduh atheist, sesat, dan dinilai antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

Untuk menghindari tudungan miring itu, kelompok penghayat kepercayaan dipaksa meleburkan diri ke dalam agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Kalau tidak, mereka dinilai mendukung PKI yang dituduh antiTuhan dan antiagama.

Stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan itu masih bertahan sampai sekarang. Laporan majalah Poros edisi XIII Tahun 2022, mewartakan pemerintah sempat menolak legalitas

paguyuban penghayat kepercayaan Pran-Soeh di Gunungkidul karena dinilai underbow PKI.

Ketua paguyuban Pran-Soeh, Yohanes Supardi (58) harus berjuang keras untuk melegalkan organisasinya. Akhirnya Paguyuban Umat Pran-Soeh Indonesia (Puspi) diresmikan pada 2 Maret 2007 dan terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Maret 2007 dengan No.12/ABH/LSM/III/2007/PN.WNSR. [4]

Sementara itu, Kepala Seksi Adat dan Tradisi, Dinas Kebudayaan DIY, Isna Elvianti menyatakan berkomitmen mendukung kegiatan paguyuban penghayat kepercayaan. Tiap tahun, ia berupaya ada program dari pemerintah untuk para penghayat kepercayaan.

Program-program yang sudah berjalan bersama MLKI dan pemuda penghayat kepercayaan adalah sarasehan upacara adat yang sudah berlangsung 3 kali dari 10 agenda. Ada pula penerbitan buletin MLKI, Wening yang terbit dua kali tiap tahun.

Menurut Isna, sumber pendanaan kegiatan bersama penghayat kepercayaan itu berasal dari Dana Keistimewaan DIY. Namun, ia tidak mau menyebutkan berapa jumlah anggarannya.

"Belum koordinasi dengan pimpinan, tetapi anggaran itu ada," katanya, Rabu (29/06).

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Suhirman mengaku belum ada program untuk organisasi pemuda penghayat. Tetapi ia mengaku sudah berkoordinasi dengan MLKI. Saat ini Disdikpora lebih fokus meningkatkan pendidikan dan ketrampilan pemuda di desa.

"Belum masuk ke sana (pemuda penghayat-red)," ujarnya.

Padahal organisasi pemuda penghayat, Gema Pakti sudah ada sejak tahun 2019. Salah satu tugas dan fungsi Disdikpora adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Jelas di sana ada kata pemuda yang tentunya juga berlaku bagi pemuda penghayat kepercayaan.

Walaupun belum punya program khusus dengan Gema Pakti,

Suhirman menepis anggapan pihaknya berlaku diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu karena tidak mampu bekerja sendiri dan agar tidak salah langkah.

"Kita tidak boleh membeda-bedakan," katanya.

Samsul menilai meski penghayat kepercayaan sudah diakui negara, tetapi masyarakat di akar rumput belum bisa menerima secara tulus. Namun ia optimis kondisi ini bisa diperbaiki

"Jika kita mau berkomitmen bergerak menuju hal yang lebih baik," tegasnya.

Negara memang sudah mengakui penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang legal. Pengakuan ini juga harus dibuktikan dengan memberikan layanan yang nyata kepada mereka. Salah satunya seperti mendukung organisasi pemuda penghayat, seperti Gema Pakti agar bisa menjalankan fungsinya sebagai "mata rantai" regenerasi bagi penghayat kepercayaan.

Referensi

1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>. Diakses pada 16 Juni 2022
2. <https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 22 Juni 2022
3. <https://www.jawapos.com/features/humaniora/09/11/2017/data-kemendikbud-jumlah-penghayat-kepercayaan-mencapai-12-juta-jiwa/>. Diakses pada 22 Juni 2022
4. Bagir, Zainal A., Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas. 2019. Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. CRCS. Universitas Gadjah Mada, hal 2.
5. Rumagit, Stev Koresy. 2013. Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. Unstrat. Vol 1, No 2.

Tangis Umat Pahoman Sejati Saat Para Penambang Merusak Merapi, Siapa Peduli?

Oleh: Widi Pradana Riswan

Dimuat di situs kumparan.com/pandangan-jogja, 6 Juli 2022

Seperti robot yang haus darah, mesin besar yang terbuat dari besi-besi berwarna oranye itu suaranya meraung-raung. Suara yang benar-benar asing bagi warga sekitar.

Talip Supriono yang sedang memahat batu, langsung berhenti. Meski berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya, tapi ruangan suara mesin itu sanggup memekakan telinganya.

Hari yang dia takutkan telah tiba.

Beberapa hari terakhir, kabar akan adanya pembukaan kawasan tambang galian C di kampungnya memang santer terdengar.

Saat Talip diam dan takut, mesin aneh itu terus bergerak membuka akses penambangan pasir dan batu di Kali Pabelan, di Dusun Wonogiri Kidul, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Magelang, hanya 8 kilometer dari puncak Merapi.

Semua peralatan memahat dia letakkan begitu saja, termasuk rokok yang masih tersisa setengah. Tanpa alas kaki, Talip bergegas lari menuju sumber suara.

Sampai di tepi sungai, ternyata sudah ada beberapa warga dusun lain. Mereka semua sedang melihat alat berat berwarna oranye itu menerabas lahan untuk mengeruk pasir dan batu

yang ada di sungai Pabelan, salah satu aliran sungai yang berhulu di Merapi.

"Saya kemudian tahu mesin itu bernama eskavator. Saya ingat, saya saat itu diam agak lama, tanpa sadar saya nangis," kata Talip.

Peristiwa itu sebenarnya sudah terjadi hampir 20 tahun silam, tapi Talip masih bisa merasakan sakitnya sampai sekarang.

Apalagi setelah perusahaan penambangan pertama itu masuk ke desa mereka, satu per satu tambang lain silih berganti ikut mengeruk pasir dan batu di sana.



Salah satu alat berat sedang mengeruk material di tebing tepi sungai Pabelan yang menurut warga baru sekitar sebulan ini beroperasi. (Foto: Widi RH Pradana)

Dan belum sebulan ini, sebuah perusahaan baru penambangan pasir dan batu kembali melakukan penambangan di dekat rumahnya. Beberapa kali warga kampung yang mayoritas adalah penganut Pahoman Sejati melakukan demonstrasi menolak tambang pasir di kampung mereka. Pahoman Sejati adalah sebuah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Beberapa kali mereka berhasil, karena sebagian perusahaan yang menambang tak jelas izinnya. Tapi lebih banyak gagalnya.



Ki Rekso Jiwo (kiri) dan Talip Supriono di Padepokan Seni Budi Aji. (Foto: Widi RH Pradana)

"Walaupun satu perusahaan pergi, tapi terus datang perusahaan tambang yang baru. Begitu terus sampai sekarang," ujarnya, Juni lalu saat ditemui Pandangan Jogja @Kumparan.

Sampai sekarang, Talip tak pernah kuat untuk menyaksikan proses penambangan material di sungai Pabelan.

Dia bahkan nyaris tak pernah menginjakkan kaki di badan sungai lagi setelah ada tambang karena merasa sudah gagal menjaga dan merawat sungai mereka.

Untuk pekerjaannya sebagai pemahat batu, Talip juga tak lagi mengambil batu di Sungai Pabelan. Talip tak tega, Talip tak kuat.

Talip dan semua umat penganut Pahoman Sejati, oleh leluhur mereka; penduduk awal di lereng selatan Merapi, diajari bahwa Merapi adalah simbah mereka.

"Kalau ada yang menyakiti Merapi, sama saja menyakiti umat Pahoman Sejati," kata salah seorang tokoh Pahoman Sejati, Kikis Wantoro.

Ia juga Ketua Padepokan Seni Budi Aji, sebuah sanggar seni yang didirikan para penganut Pahoman Sejati.

Pahoman Sejati Bukan Penyembah Gunung Merapi dan Tak Boleh Membunuh Nyamuk

Embun masih membasahi daun-daun ilalang ketika puluhan umat Pahoman Sejati menyusuri jalan setapak menuju sebuah mata air suci: Sendang Kawit atau Umbul Sewu yang terletak di Dusun Windusabrang, Desa Wonolelo, Sawangan, Magelang. Jumat (17/6), adalah salah satu hari besar bagi mereka, yakni tahun baru Jawa Kuna 6424 Respati.

Tiba di mata air, mereka duduk melingkar di tepi sendang. Umat Pahoman Sejati meyakini Sendang Kawit adalah mata air suci yang zaman dulu digunakan oleh para leluhur mereka untuk bersuci sebelum bertapa di dalam hutan.



Penganut Pahoman Sejati menuju Sendang Kawit untuk melakukan ritual Ba-drawarna. (Foto: Kikis Wantoro)



Sendang Kawit selepas ritual perayaan tahun baru Respati. (Foto: Widi RH Pradana)

Sesaji sudah diletakkan di tepi sendang. Kembang setaman sudah ditebar ke dalam mata air. Beberapa batang dupa juga sudah dinyalakan, tandanya ritual akan segera dimulai. Ritual ini adalah satu dari serangkaian ritual peringatan tahun baru Respati.

Suasana menjadi hening, diselimuti kabut tipis Merapi, semua yang datang diam tertunduk dengan mata terpejam. Yang terdengar tinggal suara gemicik air dan burung-burung yang mulai keluar dari sarangnya. Ki Rekso Jiwo mulai memimpin ritual di tepi mata air itu, ia menghadap ke Gunung Merapi.

“Kami tidak sedang menyembah Merapi, ini adalah wujud cinta kasih kami kepada Merapi,” kata Ki Rekso Jiwo selepas ritual.

Ki Reksi Jiwo berkata, semua ritual itu merupakan wujud syukur mereka kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkah melalui Merapi. Juga sebagai doa supaya Merapi dan semua yang ada di sekitarnya selalu diberikan keselamatan.

Umat Pahoman memang kerap melakukan ritual-ritual yang

berkaitan langsung dengan alam.

Selain peringatan tahun baru Respati, ada juga ritual Pisungsung Gunung setiap bulan Suro yang dilakukan untuk memperingati erupsi Merapi.

Selain itu, ada ritual bhakti alam dan merti bumi, yang tujuannya kurang lebih sama yakni untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan melalui alam yang mereka tinggali.

"Karena tanah suci kami ya ini, tanah yang setiap hari kami injak dan kotori tapi masih terus memberikan berkah, bukan tanah yang jauh di sana," ujarnya.

Talip, Kikis, Ki Rekso Jiwo, juga semua umat Pahoman Sejati sadar, jika mereka tak mungkin mampu menahan kekuatan perusahaan tambang yang mengeruk pasir batu, hingga mengakibatkan tanah suci mereka rusak.

Berkali-kali penolakan sudah dilakukan, berkali-kali juga selalu datang perusahaan yang baru. Suara mereka tak didengar sebagai kepentingan umum.

Akhirnya, yang bisa dilakukan hanyalah memuliakan tanah sucinya melalui berbagai ritual dan persembahyang. Mereka sakralkan gunung, sungai, pohon, juga mata air, supaya orang-orang sadar kalau ada Pahoman Sejati yang menyucikan tempat-tempat itu.

"Jadi orang-orang tidak seenaknya lagi merusak, tidak seenaknya lagi mengotori. Semoga ada yang peduli, kalau bagi kami Merapi ini tanah suci," kata Ki Rekso Jiwo.

Kasih Seekor Nyamuk

Soal sikap umat Pahoman Sejati pada penambang yang mereka anggap telah merusak ekosistem sungai Pabelan, ada ajaran tentang nyamuk yang terus menjadi pegangan

Ya, ajaran nyamuk memberi perintah bahwa umat Pahoman Sejati tak pernah diajari membenci. Termasuk kepada orang-orang yang kerap merusak alam Merapi. Sebab, apapun yang didasari kebencian tak akan pernah menghasilkan kebaikan.

"Kami hanya bisa merawat, melestarikan, siapa tahu mereka lihat terus jadi segan buat merusak lagi," ujar Ketua Padepokan Seni Budi Aji, sebuah sanggar seni yang didirikan para pengikut Pahoman Sejati, Kikis Wantoro.

Pahoman Sejati mengajarkan bahwa manusia hanyalah satu bagian kecil dari entitas semesta. Ada jutaan makhluk Tuhan lain yang hidup di jagat raya, yang semua punya hak atas berkat Tuhan. Dan manusia punya kewajiban untuk mengasihi semua makhluk itu.

Contoh kecilnya perlakuan terhadap nyamuk. Meski sudah menggigit, tapi bagi leluhur Pahoman Sejati, pantang hukumnya menepuk atau membunuh mereka. Sebab terbang, hinggap, dan mengisap darah yang dilakukan oleh nyamuk-nyamuk itu semua adalah kodrat Tuhan. Semua atas izin dan perintah Tuhan.

"Itu yang sulit, kadang saya masih refleks (nepuk). Baru setelah itu biasanya saya merasa bersalah kenapa membunuh mereka," lanjutnya.

Ajaran itu yang kemudian mempengaruhi cara umat Pahoman Sejati hidup. Semua hal perlu dihitung dan ditimbang supaya kehidupan tetap seimbang.

Misalnya saat mereka mau menebang pohon, penentuan hari mesti disesuaikan dengan penggunaan pohon itu, apakah akan dipakai untuk tiang, pintu, jendela, atau yang lainnya.

Bagi masyarakat petani, saat akan menggarap lahan, memulai masa tanam, atau melakukan panen juga mesti melakukan ritual khusus dan penghitungan hari yang tepat.

"Ritual itu intinya kami berdoa supaya apa yang kami tanam akan membawa hasil yang bermanfaat, tidak hanya bagi kami tapi juga bagi para perusak alam, perusak Gunung Merapi, simbah kami," pungkas Kikis.

Dari Budo Budi ke Pahoman Sejati, Warga Penghuni Sisi Selatan Gunung Merapi

Oleh: Widi Pradana Riswan

Dimuat di situs kumparan.com/pandangan-jogja, 6 Juli 2022

Sebelum bernama Pahoman Sejati, mereka menyebut diri mereka sesuai dengan nama ajaran yang mereka anut, yakni Budo Budi. Karena aturan pemerintah pada 2013 mewajibkan setiap penghayat kepercayaan memiliki organisasi, mereka memilih nama Pahoman Sejati sebagai nama organisasi.

Sejak itu, mereka menjadi umat Pahoman Sejati penganut Budo Budi. Seperti para penganut Islam yang menjadi anggota Muhammadiyah dan NU.

Masyarakat Pahoman meyakini ajaran Budo Budi diajarkan oleh Ki Hajar Windusana. Ia adalah seorang pujangga, cendekia, juga guru spiritual dari Majapahit.

Sosoknya sampai saat ini masih misterius. Tapi menurut sesepuh Pahoman Sejati, Ki Rekso Jiwo, Ki Hajar Windusana hidup sekitar abad ke-18.

Ketika agama Islam mulai masuk ke Nusantara, Ki Hajar Windusana memilih menepi ke lereng Merbabu-Merapi. Di sana, dia mendirikan sebuah padepokan dan perpustakaan dengan koleksi mencapai 1.000 naskah lebih.

Tahun 1822, ketika Belanda melakukan ekspedisi, perpusatakan tersebut dijarah hingga hanya tersisa beberapa naskah saja.



Sesepuh Pahoman Sejati, Ki Rekso Jiwo sedang mempraktikkan cara umat Pahoman Sejati bersembahyang. (Foto: Widi RH Pradana. Grafis: Arif UTE)

"Jadi kitab yang kami gunakan sebagai pedoman adalah kitab teles, atau kitab tutur yang turun temurun karena kitab-kitab ajaran Budo Budi sudah dibawa semua," kata Ki Rekso Jiwo menggunakan bahasa Jawa.

Sebenarnya hanya ada enam inti ajaran Budo Budi yang diturunkan oleh para leluhur Pahoman Sejati. Enam ajaran itu di antaranya: *dadi menungso iku ojo mikir lan mbatin sing ala* (menjadi manusia itu jangan berpikir dan berniat buruk); *dadi menungso iku ojo metu micoro sing ala* (menjadi manusia itu jangan mengeluarkan perkataan yang buruk); *dadi menungso iku ojo duwe tumindak lan laku sing ala* (menjadi manusia itu jangan bertindak dan berperilaku yang buruk).

Sementara tiga ajaran lainnya hanyalah kebalikan dari tiga ajaran tersebut. Intinya menjadi manusia harus berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berperilaku yang baik.

"Jika sebuah perbuatan mengakibatkan kerusakan, pasti itu buruk. Sebaliknya, kalau dia menghasilkan keindahan, pasti itu baik. Tambang ini merusak atau memperindah Gunung

Merapi?" Ki Rekso Jiwa berkata dan bertanya.

Hari ini, dari ribuan jumlah penduduk yang menghuni sisi sungai Pabelan, hanya tersisa sekira 70 penganut Pahoman Sejati. Sedikit, tak membuat mereka ingin menjadi selain diri mereka. Mereka ingin terus menjadi pengikut teguh Budo Budi.

"Meski namanya ada Budo ini tidak mirip dengan Buddha, ini lebih dekat dengan ajaran-ajaran leluhur Jawa," terang Ki Rekso.

Dari ujaran Ki Rekso, bisa ditangkap bahwa Gunung Merapi bagi umat Pahoman Sejati adalah representasi konkret dari kehadiran Tuhan di muka bumi. Mereka lahir dalam dekapan Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia.

Ki Rekso berkata, bahkan nafas mereka ditarik dan dihembuskan dari udara yang dibuat oleh pepohonan Gunung Merapi. Air dan bahan pangan?

"Kabeh dikei Merapi," kata salah seorang tokoh Pahoman Sejati, Kikis Wantoro.

Ia adalah Ketua Padepokan Seni Budi Aji, sebuah sanggar seni yang didirikan para penganut Pahoman Sejati.,

Semua diberikan oleh Tuhan melalui Gunung Merapi

Intinya, Pahoman Sejati tak pernah lupa bahwa mereka dirawat dan dibesarkan oleh alam Gunung Merapi. Bahkan setelah dewasa Merapilah yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.

"Sejak zaman leluhur kami semua *utang* sama Gunung Merapi. Bagi Pahoman Sejati, Merapi adalah simbah yang merawat dan membesarkan kami. Jadi kalau ada yang menyakiti Merapi, sama saja menyakiti kami," Kikis Wantoro bercerita panjang.

Ia melanjutkan, sebenarnya tak ada larangan bagi umat Pahoman Sejati memanfaatkan apapun yang diberikan Merapi kepada mereka. Termasuk mengambil pasir dan batu di lereng

Merapi.

Kikis memahami, jika material-material itu memang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.

"Tapi ambilah secukupnya, karena apapun yang berlebihan pasti akan berujung pada bencana. Kalau sungai diobrak-abrik oleh alat berat sampai ikan gak bisa hidup di sana, itu apa benar? Tebing ambrol, semua yang punya nyawa gak bisa hidup di sungai, demi batu dan pasir, bener ora kuwi?" Kikis Wantoro menerangkan panjang tanpa ada nada kemarahan, tenang.

Sejak dulu, Merapi menurutnya telah memberikan apa yang dibutuhkan manusia lebih dari cukup.

Itu mengapa, orang Jawa tak pernah menyebut erupsi Merapi sebagai sebuah bencana, tapi 'Simbah lagi duwe gawe' (embah sedang punya hajat). Sebab, setelah erupsi, Merapi selalu memberikan apa yang dibutuhkan manusia di sekitarnya untuk hidup.



Tebing di Kali Pabelan yang longsor akibat aktivitas tambang si sekitarnya.
(Foto: Widi RH Pradana)

Apa yang diberikan Merapi itu menurut Kikis sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun ternyata masih banyak orang yang mengambil di luar haknya, seperti mengeruk tebing-tebing sungai yang mengakibatkan kerusakan.

Erosi, abrasi, lahan pertanian rusak. Semua yang memberi kehidupan bagi manusia, burung-burung, tanaman liar, kodok, kadal, belalang, ular, binatang dan tumbuhan yang belum sempat diberi nama, mati.

Banjir bandang dari hulu merapi, longsor, mata air mati, jadi bahaya yang mengintai sehari-hari warga Pahoman Sejati dan semua penghuni sisi sungai Pabelan, Magelang.

"Itu yang kami takutkan. Sebab jika bencana itu datang, korbannya adalah kami yang paling dekat, bukan mereka yang mencari keuntungan sendiri," ujarnya.

Tapi Pahoman Sejati tak pernah marah pada penambang yang merusak sungai Pabelan dan seluruh kehidupan di sana. Bahkan pada nyamuk yang menggigit tubuh kaum Pahoman Sejati, mereka dilarang untuk membunuhnya.

"Sebab nyamuk yang terbang, hinggap, dan mengisap darah kita itu semua adalah kodrat Tuhan. Semua atas izin dan perintah Tuhan. Jadi bagaimana kami bisa marah pada penambang?" kata Kikis.

Pahoman Sejati tak boleh marah. Pahoman Sejati, hormat pada nyamuk yang menggigit tubuh mereka. **

Sedulur Sikep: Kami Hidup Mandiri Tanpa Uluran Tangan

Oleh: Sabrina Mutiara Fitri

Gemerik suara air, bunyi kalung lonceng sapi, dan langkah kaki terdengar dari rumah Mbah Lasio yang berada di depan Pendopo Sedulur Sikep Karangpace, Desa Klopoduwur, Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Rumahnya hanya sepetak, berdinding kayu, beralas tanah. Hiasan foto-foto lawas menempel di dinding. Di rumah ini, Mbah Lasio sebagai sesepuh Sedulur Sikep (Samin) tinggal bersama Mbah Waini,istrinya.

Mereka biasa memulai rutinitas harian sejak pukul 04.00 WIB. Mbah Lasio mulai beranjak dari tempat tidur dan mengeluarkan sapinya satu per satu sapi miliknya dari kandang. Suara gemboran sapi bersahutan menyambut pagi.

Sedangkan Mbah Waini memulai aktivitas di dapur. Ia mencuci peralatan dapur yang masih kotor dan kemudian menyapu sudut-sudut ruangan hingga di halaman rumah.

"*Jam semene ya wis resik-resik* (Jam segini ya sudah bersih-bersih)," ucap Waini yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Dhok atau Mbah Wedhok, dengan logat Jawa.

Sembari menunggu matahari terbit, ia mempersiapkan bahan pangan untuk dimasak. Masyarakat Samin jarang pergi ke pasar untuk membeli bahan pangan pokok. Mereka memilih memanfaatkan hasil kekayaan alam di sekelilingnya.

Beras dari hasil mengolah lahan sawah dan berbagai jenis

tanaman di sekeliling rumah untuk lauk pauk. Ada pohon pepaya, pohon pisang, singkong, kacang-kacangan, dan lembayung.

Warga tidak merasa kekurangan dengan hasil alam yang mereka miliki. Mereka mengatasi keterbatasan dengan kreativitas dan inovasi.

"Masak menggunakan tanah liat. Daunnya diunyet dulu, rebus, lalu saring agar tidak pahit. Setelah air mendidih, daun dimasukkan ke panci. Kalau sudah empuk cuci bersih," jelas Siti, warga Desa Klopoduwur sambil menunjukkan kembang pepaya yang baru dipetiknya.

Masyarakat di Klopoduwur memilih membeli bahan pangan pendukung dari pedagang sayur keliling. Harga bahan pangan di pasar jauh lebih mahal. Mereka harus pandai mengatur pengeluaran.



Mbah Lasio, sesepuh Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora bersama keluarga di depan Pendopo Karangpace yang menjadi penanda Kampung Samin Klopoduwur. (Foto: Sabrina Mutiara Fitri)

"Mending beli dari pedagang keliling," ucap Siti.

Berdampingan dengan Alam

Selain mengurus sapi-sapi seperti Mbah Lasio, masyarakat Samin menghabiskan waktu di sawah dan ladang sebagai petani. Setiap pagi warga berduyun-duyun berangkat ke sawah. Mereka berjalan kaki dengan menggendong pikulan tetapi ada yang mengendarai motor lawas.

Mereka nampak guyup. Senyum lebar di setiap perjumpaan, memberi hormat dan bertegur sapa.

Para perempuan Samin tak segan melakukan aktivitas yang biasa laki-laki lakukan.

"Angon" sapi seperti yang dilakukan Mbah Waini yang bergegas menarik sapi-sapi dari pekarangan untuk masuk ke kandang lagi ketika sinar matahari mulai terasa panas di kulit.

Matahari perlahan mulai naik, tepat pukul 09.00 WIB. Menurutnya, sapi-sapi harus rajin dikeluarkan dari kandang untuk mendapatkan Vitamin D.

"Iseh akih penyakit sapi, kudu dede (Sapi berjemur setiap hari agar tidak mudah terserang penyakit)," ucap Waini.

Pun dengan Mak Tik, adik Mbah Waini ini biasa ngarit (mencari rumput) untuk memberi makan sapi peliharaannya. Setiap pagi pukul 07.00 WIB, ia berangkat "merumput" berbekal sabit, karung, dan jarik untuk menggendong rumput.

Mak Tik terbiasa ngarit sejak kecil. Ia sangat terampil mengayunkan sabit untuk memangkas rumput. Dalam waktu relatif cepat sudah mengumpulkan 2-3 karung rumput.

"Esuk 2 sak, mangke siang jam 2, 2 sak (Pagi 2 karung rumput, nanti siang jam 14.00 WIB ngarit 2 karung," terang Mak Tik.

Ia tak asal memangkas rumput. Mak Tik punya aturan main saat mengambil kekayaan alam di sekitar sawahnya.

Ini adalah kearifan lokal masyarakat Samin yang selalu izin

jika mengambil sesuatu dari alam. Tidak ada kalimat baku untuk minta izin tetapi mereka melakukannya setiap waktu.

"Macem-macem. Misale, Mi Bumi, iki gedhange ape tak kanggokno. Kedah izin kaleh bumi (Cara pengucapan bermacam-macam. Mi, Bumi, saya akan mengambil pohon pisang ini. Saya harus izin dengan bumi)," ucap Mak Tik.



Mak Tik, warga Desa klopoeduwr sejak kecil terbiasa mencari rumput setiap hari untuk memberi makan sapi peliharaannya. (Foto: Sabrina Mutiara Fitri)

Tak Berharap Bantuan

"Sing enom ning nduwur, Lur!"

Teriak Yono, putra Mbah Lasio kepada beberapa pemuda Desa Klopoeduwr yang *sambatan*. Di bawah terik matahari siang itu, warga tetap bersemangat menyelesaikan pemasangan atap rumah milik Yati dengan menggunakan sisa-sisa kayu yang tak terpakai.

Sambatan artinya gotong royong atau bekerja sama. Misalnya, ketika ada salah satu warga sedang membangun rumah, atap, atau jalan umum yang membutuhkan banyak

tenaga manusia.

Mereka tidak meminta imbalan. Warga ikhlas memberi tenaga dan waktu untuk meringankan beban warga yang memiliki hajat.

"Ngeneki bareng-bareng, gotong royong. Gak iso ngundang tukang (Kami kerja bersama gotong-royong, tidak mampu membayar tukang)," ujar Yati, pemilik hajat.

Yati mempersiapkan makanan untuk warga yang membantunya. Mereka akan makan bersama dengan hidangan sederhana setelah *sambatan* selesai.

Masyarakat Samin di Desa Klopoeduwr terbiasa mandiri dalam segala hal. Tidak hanya dalam mencari sumber pangan dan papan. Samin di Klopoeduwr tak pernah mengandalkan bantuan pemerintah.

Mbah Waini mengaku, sejak Pendopo Sedulur Sikep berdiri tahun 2010 lalu, Pemerintah Kabupaten Blora belum memberi dukungan materiil.

"Mbok satu tahun sekali mriki ningali mbahe. Aneh Pemerintah Blora niku, padahal ikon Blora. Mboten diparingi mboten nopo-nopo. Ikhlase kulo nggih saking nene moyang niku (Sebaiknya setahun sekali datang bertemu mbah. Pemerintah Blora itu aneh, padahal Samin itu ikon Blora. Tidak diberi, tidak apa-apa. Ikhlasnya saya juga dari leluhur)," keluh Mbah Waini.

Keluarga Mbah Waini harus menanggung biaya operasional Pendopo Sedulur Sikep dan pemeliharaan lingkungan sekitar. Termasuk harus menanggung hutang untuk membayar tagihan.

"Lampu disegel tahun 2010, mboten saget mbayar. Bayare katah, 300 ewu. Kulo utang mbah tuwek (Tahun 2010 listrik di segel, tidak mampu bayar tagihan Rp 300 ribu. Saya harus hutang kepada mbah tua)," ucap Waini.

Pembangunan jalan desa tak mendapat bantuan dari pemerintah. Sebelumnya, tidak ada jalan antar rumah warga Samin di Rukun Tetangga (RT) 1 di Desa Klopoeduwr. Warga

jadi sulit berkumpul dan melakukan aktivitas sosial.

Akhir Mei 2022, Mbah Lasio menginisiasi dan mengajak masyarakat untuk membangun jalan penghubung dari bebatuan.

"Respon masyarakat nggih seneng. Ajane pengen damel dalam tapi mboten gadah duwit. Angsal grosokan saking sanak sedulur 1, 2 rit (Warga sangat senang. Sebenarnya ingin buat jalan tapi tidak punya dana. Kami dapat bantuan material batu dari donatur dapat satu, dua truk)," tuturnya.

Menurut Mbah Lasio, jalan penghubung antar RT memudahkan warga Klopoduwur mencari penghidupan.

"Wong urip niku sing goleki dalam. Nek wis kepanggih dalam niku pados rezeki, pangan lantas sandang. Makane kudu di dandani (Orang hidup mencari jalan. Kalau sudah bertemu jalan, nanti menemukan rezeki, pangan dan sandang. Jalan harus baik)," ucap Mbah Lasio.

Samin Bukan Prioritas

Di wilayah Blora sebagian penganut ajaran Samin Surosentiko (Sedulur Sikep) bermukim di dua desa, yaitu Desa Klopoduwur dan Desa Sambong. Pemerintah Kabupaten Blora mengakui, pembangunan di sejumlah wilayah belum merata. Termasuk di kawasan pemukiman masyarakat penganut ajaran Samin Surosentiko di Desa Klopoduwur yang hidup mandiri.

Desa Klopoduwur letaknya tak jauh dari kota. Waktu tempuh berkenderaan dengan melintasi hutan jati hanya sekitar 17 menit. Akses jalan berlubang dan tanpa penerangan jalan. Lingkungan di Klpopoduwur masih sangat asri, persawahan hijau terbentang luas, ditambah pohon jati di sisi kanan kiri sepanjang jalan.

Kunto Aji, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora menyebut belum ada kesetaraan antar dua desa tempat masyarakat Samin bermukim. Ia mengaku, pihaknya belum pernah memberi bantuan materil ke Desa Klopoduwur.



Warga di Desa Klopoduwur "sambatan" memperbaiki atap rumah milik salah satu warga. Ini budaya bergotong royong yang terus terjaga di kawasan pemukiman masyarakat Samin penganut ajaran Samin Surosentiko. (Foto: Sabrina Mutiara Fitri)

"Ya, berproses dan berjalan sesuai prioritas. Sedulur sikep sama dengan warga lain di Blora dalam mengakses layanan informasi maupun pelayanan program pembangunan. Layanan BLT, BNPT, BPJS, KIS, KIP," jelas Kunto kepada Serat.id.

Dinporabudpar Blora pun berjanji melakukan langkah progresif untuk kesejahteraan masyarakat di desa Samin. Salah satunya membranding dua desa pemukiman masyarakat Samin menjadi desa wisata.

"Kita akan branding sebagai Desa Wisata Kampung Samin. Dengan inovasi dan kreativitas masyarakat sekitar bisa bergerak ke industri wisata," janji Kunto.

BAB 2

KISAH KEHIDUPAN TRANSGENDER

Jatuh Bangun Transpuan Yogyakarta Membuka Identitas Gender Saat Berekspresi

Yuwantoro Winduajie

Kamis, 30 Juni 2022

Hidup sebagai waria, transpuan masih dimarginalkan. Akses pekerjaan sangat diskriminatif. Paling banyak sebatas menjadi pengamen dan pekerja seks yang rentan diusik aparat.

Saat mengeskpresikan diri sebagai seniman dan penulis, transpuan pun masih tak aman dari perundungan, diskriminasi, dan pelecehan oleh publik. Tak sedikit yang berjuang tetap eksis, meskipun tetap membuka identitas diri sebagai transpuan.

Aku sudah dandan cantik... Sudah mirip Dewi Persik... Tapi mengapa sikapmu, masih takut kepadaku...

Petikan syair lagu berjudul "Dandan Ambyar" ciptaan Gendru Nugroho itu dinyanyikan Wik Wik Ambyar dengan kenes ketika mengamen di tengah hiruk pikuk kawasan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (2/6/2022) malam. Seperti syairnya, transpuan itu mengenakan wig pirang yang lurus dan panjang terurai.

Bulu matanya tak pernah absen dibuat lentik. Ujung kepalanya ditutup topi bucket putih yang tampak kontras dengan setelan hitam dan sneakers kuning yang dikenakan. Bahu kanannya berselempang bas betot yang dibuat ala kadarnya. Tangan kirinya menggenggam kecrekan dari kayu

dan setangkup logam.

"Ini senjataku untuk menghibur," kata Wik Wik Ambyar sambil menunjuk kedua alat musiknya kepada Tribun Jogja yang menemui malam itu.

Sudah dua dekade lebih, transpuan berusia 47 tahun itu menggantungkan hidupnya dengan mengamen. Ia biasa menyusuri kawasan Malioboro sekitar pukul 21.00 WIB hingga tengah malam. Berdandan maksimal dengan membawakan syair lagu jenaka yang mengundang gelak tawa adalah ciri khas pemilik nama Ike Irinda.



Aksi Wik-Wik Ambyar ketika mengamen di kawasan Malioboro. (Foto: Yuwantoro Winduajie)

Nama panggung Wik Wik Ambyar menjadi tenar berkat ulah seorang netizen yang tidak ia kenal, mengunggah video ngamennya ke jagat maya pada 2018. Cuplikan video itu berujung viral di YouTube. Banyak orang yang mencari keberadaannya. Wisatawan yang melintas pun mengajak foto bareng.

Di luar kesibukan mengamen, Ike kerap diundang tampil ke berbagai acara, baik di wilayah DIY maupun luar daerah. Tawaran endorse atau jasa promosi di media sosial pribadinya juga terus berdatangan.

Sejumlah artis ternama, seperti Charlie Van Houten, Ageng Kiwi, Tiara Marleen, dan Tri Suaka pun pernah mengajaknya berkolaborasi membuat konten di media sosial. Transpuan asal Surakarta itu menganggapnya sebagai berkah.

Kata "badak" dalam grup vokal waria yang dibentuk pada 2012 itu bukanlah sebutan untuk hewan bercula, melainkan singkatan dari benci mendadak.

Meskipun pembentukannya berawal dari kegemaran mereka bertiga menonton konser dangdut di daerah sejak belasan tahun lalu, nama "Trio Badak" muncul mendadak.

"Waktu ada acara, kami diajak nyanyi di panggung. Waktu ditanyain namanya apa, kami bilang Trio Badak. Ya sudah berlanjut sampai sekarang," kenang Diana saat ditemui Tribun Jogja di sebuah kafe di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (7/6/2022) malam.

Sejak itu, berbagai macam undangan pentas sudah disambangi. Mulai dari acara khitanan, hajatan, hingga pesta ulang tahun. Dan sempat vakum beberapa tahun karena fokus bersolo karier.

Malam itu, ketiganya berdandan dan kompak berpakaian serba merah yang tampak serasi. Mereka memesan lagu di kafe yang menyediakan panggung kecil untuk bernyanyi.

"Mbak, aku request Goyang Heboh ya," kata Ike kepada seorang pelayan kafe. Lagu yang dimaksud dipopulerkan pedangdut Nita Thalia.

Beberapa pengunjung yang mengenalnya menyapa hangat saat ketiganya berjoget penuh energi. Setidaknya dapat mengobati kerinduan mereka untuk manggung. Mengingat undangan manggung Trio Badak tak selalu datang saban hari.

"Kemarin Trio Badak aku bawa tampil ke Malang. Aku sendiri memang ada panggilan event di Malang. Tapi aku usulin ke panitia agar pakai trio. Pokoknya kalau ada even-even, aku usulkan ke panitia mau pakai trio. Kalau panitia oke, mereka ini aku bawa," jelas Ike.

Salah satu judul lagu yang dibocorkan Ike berjudul "Jangan Ganggu" yang pernah diciptakan penulis lagu asal Yogyakarta, almarhum Pras Virgo. Syair lagu itu dinilai Ike sangat mewakili diri mereka karena mengisahkan soal perjalanan hidup transpuan.

"Lagunya ya perjalanan hidup seorang yang begini (transpuan)," kata Ike.

Sepanjang bersolo karir sebagai Wik Wik Ambyar, Ike pun sudah merilis lagu berjudul Dandan Ambyar dan Jangan Geli ciptaan Gendru Nugraha.

Salah satu karya Gendru yang cukup populer adalah Ati Dudu Wesi yang pernah dibawakan sejumlah penyanyi ternama mulai dari Yeni Inka, Didi Kempot, dan Happy Asmara.

"Saya dibantu karena sesama seniman, saya berterima kasih sekali kepada mereka. Lagunya aku bawain waktu pentas, ngamen, atau sama trio," terang Ike.

Jessica, Amuba 'Membelah' menjadi Penulis

Di Kota Yogyakarta, transpuan muda berusia 29 tahun, Jessica Ayudya Lesmana dikenal aktif menulis dan berkesenian. Hampir enam bulan ini, Jessica juga bekerja di organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengarsipan seni visual, Visual Art Archive (IVAA) di Mergongsan, Yogyakarta.

Saat ini, Jessica fokus mengembangkan bakatnya dalam menulis. Pada 2020, dia mulai aktif menjadi kontributor di media online yang mengusung perspektif perempuan dan minoritas, Konde.co.

Ada 30 artikelnya sudah diterbitkan. Rencananya, kumpulan tulisan itu akan dibukukan. Selain itu, dia juga menulis cerpen, puisi, dan beragam isu ketubuhan.

Tulisan-tulisannya mengerucut pada isu minoritas seperti

perempuan, transgender, hingga seksualitas. Salah satu esai yang dibuatnya menyinggung kondisi transpuan yang terus mengalami praktik diskriminasi.

Kehidupan mereka tersingkirkan, termasuk ketika mencari pekerjaan formal. Imbasnya, pekerjaan wariapun identik hanya sebagai pengamen dan pekerja seks.

Dia juga pernah merangkum kata-kata umpanan yang kerap dilontarkan sebagian masyarakat kepada transpuan. Praktik perisakan memang masih akrab dialami transpuan yang tak disadari juga berdampak pada kesehatan mental mereka.

“Dengan nulis ada harapan untuk membangun empati dan kesadaran masyarakat soal kondisi transpuan. Karena mereka mengalami penindasan berlapis, dijadikan bahan tertawaan, dan olok-olokan,” terang Jessica yang tampil feminin dengan kaos tanpa lengan.



Personel Trio Badak, dari kiri: Mutiara Anzella, Wik Wik Ambyar, Diana Mariska saat bernyanyi dan berjodet di kafe karaoke di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DIY. (Foto: Yuwantoro Winduajie)



Penulis dan seniman, Jessica Ayudya Lesmana. (Foto: Yuwantoro Winduajie)

IVAA juga menyediakan ruang baginya untuk menulis. Dia manfaatkan kesempatan itu untuk mengarsipkan upaya pertahanan hidup kelompok transpuan di Yogyakarta melalui karya tulis.

Satu di antaranya ialah Mami Tata, transpuan separuh baya yang memiliki empat anak asuh. Juga Rully Mallay sebagai figur yang aktif memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar bagi transpuan.

Jessica menggambarkan pula strategi transpuan untuk bertahan hidup di tengah tekanan sosial dan stigma buruk yang menyertai.

“Aku menulis dari segudang pengalaman dan pengetahuanku dari membaca banyak referensi. Transgender juga berhak menulis,” tutur dia.

Sebelum menulis, Jessica pernah aktif berkesenian dengan membuat karya instalasi dan melakukan seni pertunjukan. Perjalanan berkeseniannya diawali saat dia bergabung menjadi

anggota grup vokal Amuba (Amukan Banci) yang dibentuk pada 2018. Seluruh personilnya adalah transpuan.

Media internasional, Vice Asia yang meliput langsung pada 2019 melabelinya sebagai vokal grup waria pertama di Indonesia.

Dari situ, namanya mulai dikenal, baik dari pemberitaan media dan konser-konser yang dijalani. Jessica berkesempatan untuk terus memperluas pergaulan dan menjalin komunikasi dengan orang di luar komunitasnya, termasuk dengan kurator dan para seniman.

Dua tahun kemudian, dia mengumumkan penguduran diri dari Amuba.

“Aku ingin mengembangkan diri lebih dalam ke kepenulisan yang butuh konsentrasi banyak banget,” kata penghobi semua jenis kesenian sejak kecil itu.

Pada 2021, Jessica menjadi aktor transgender dalam Bangkok International Performing Art Meeting. Pertunjukan itu terpaksa digelar secara daring akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda. Meski begitu, Jessica mengaku sangat menikmati proses yang dia jalani.

“(Project) Itu juga akan berlanjut, tapi masih dipikirin temanya apa untuk sekuelnya,” jelas Jessica.

Pada tahun yang sama, Jessica juga terlibat dalam Festival Kesenian Yogyakarta (FKY). Dia membuat karya instalasi dengan metode montase. Metode itu membuat karya seni tempel dengan mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber untuk menjadi susunan karya seni baru.

Jessica memaknai montase merupakan upaya adaptasi kelompok transgender di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam proses penyesuaian itu, transpuan juga kerap mengalami diskriminasi, perisakan, dan ketidakadilan.

“Jadi minoritas juga nggak salah kok, nggak semua harus ngikutin mayoritas. Yang penting ada nilai-nilai kemanusiaan yang diusung,” papar Jessica.

Tamarra, Bertahan di Jalur Seni

Tamarra tengah sibuk menggarap karya seni instalasi terbarunya saat ditemui Tribun Jogja di kediamannya yang juga difungsikan untuk tempat workshop di Kapanewon Purwomartani, Kabupaten Sleman, Rabu (1/6/2022).

Bentuknya serupa baju dengan bahan material seadanya. Transpuan berusia 32 tahun itu enggan mengungkapkan makna karya seninya ini karena belum dipamerkan kepada publik.

“Itu pakai material yang ada di rumah. Untuk pameran di ArtJog bulan Juli,” ungkap Tamarra.

Sembari membuat karya instalasi, Tamarra sesekali mengintip layar laptop di atas meja. Rupanya, mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2018 di Universitas Sanata Dharma itu juga disibukkan mengikuti kuliah daring.

“Kayaknya tahun depan aku off (berhenti berkesenian) dulu deh. Fokus skripsi,” terang Tamarra sambil memantengi layar laptop.

Transpuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat itu memutuskan pindah ke Yogyakarta pada 2008. Setelah belasan tahun menetap di Yogyakarta, sosok Tamarra dikenal sebagai seniman multidisiplin.

Dia kerap menciptakan karya seni instalasi di berbagai galeri seni dan melakukan pertunjukan performatif.

Ketenaran Tamarra sebagai seniman tak ujung-ujung datang. Dia belajar dan memahami proses kreatif seniman secara otodidak dalam waktu yang tak singkat. Ketertarikannya terhadap dunia seni berawal ketika Tamarra bertemu sekelompok seniman yang mengaggas Makcik Project pada 2012. Komunitas waria juga dilibatkan di dalamnya.

Proyek yang berlangsung lebih dari dua tahun itu menjembatani dirinya untuk bertemu dengan banyak seniman, kurator, maupun akademisi. Tamarra berkesempatan mengunjungi studio-studio seni di wilayah selatan Yogyakarta. Hasilnya

antara lain berupa seni pertunjukan, lukisan, juga instalasi.

"Awalnya kan hanya ngenyek (mengejek), apaan sih ini? Karena nggak tahu apa-apa," kenang Tamarra yang dulu dikenal dengan nama Tamara Pertamina.

Sejak saat itu, Tamarra bertekad mengubah jalan hidupnya dari seorang pengamen dan pekerja seks menjadi seorang seniman.

Penampilan pertama Tamarra adalah sebuah pertunjukan seni yang sebenarnya tak ia pahami. Pertunjukan yang berlangsung di sebelah Gedung Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada 2013 itu untuk merespons penebangan pohon di lingkungan kampus.

"Di situ nggak ngerti *performance art* itu apa karena aku cuma ikut-ikutan. Setelah dijalani, oh menarik juga ya ternyata," imbuh Tamarra.

Dia kian aktif berkesenian. Karya-karya Tamarra kebanyakan berbicara tentang kemanusiaan, gender, seksualitas, hingga sejarah keberadaan transgender di Indonesia.



Seniman performance, Tamarra. (Foto: Yuwantoro Winduajie)

Sekitar tahun 2013, Tamarra menginisiasi proyek berjudul "We Are Human" yang melibatkan komunitas anak jalanan dan waria ke dalam serangkaian kegiatan seperti workshop pengembangan diri hingga pertunjukkan.

Masih dalam rangkaian proyek tersebut, pada 2018 Tamarra meluncurkan grup vokal waria, Amuba. Dia dan Jessica menjadi salah dua personilnya.

Akhir September 2022, Tamarra terbang ke Turki untuk mengikuti biennale di negara Eurasia tersebut. Dia datang bersama sejumlah pelaku seni yang tergabung dalam Hyphen. Project kolektif itu digagas sejumlah seniman pada 2011 lalu.

Diolok-olok, Dilempar Sandal hingga Dilecehkan secara Seksual

Perjalanan Trio Badak tak sepenuhnya mulus. Saat tampil, Ike Irianda, Diana Mariska, dan Mutiara Anzella pernah mengalami perundungan dari penonton.

"Kami dibalangi (dilempari) macem-macem. Botol plastik, sandal, wadah botol kosong, semuanya yang ada. Meskipun ada omong-omongan dan perlakuan itu, kami cuek aja gitu," kenang Diana mengisahkan penampilan awal mereka di Kulon Progo.

Setelah punya jam terbang pun, celetukan kata "bencong" dan "banci" masih terdengar dari arah penonton. Dua kata itu kerap jadi bahan untuk mengolok-olok waria.

"Ada yang bisik-bisik eh bencong, teriak-teriak terus kabur," imbuh Tiara.

Perlakuan serupa juga dialami saat mereka menyambung hidup dengan mengamen di jalanan sebelum Trio Badak lahir. Diana dan Tiara biasa ikut Mami Ike – panggilan akrab keduanya untuk Ike Irianda – mengamen di kereta api pada tahun 2000.

Mereka menumpang kereta Fajar Utama dari Stasiun Wates, Yogyakarta ke Stasiun Pasar Senen di Jakarta.

"Ya sebetulnya kami *mlethek* (terbit)-nya karena ngamen. Kami ikut ngamen sama dia (Mami Ike). Kami pernah sampai ketiduran terus ditinggal (di kereta api oleh Mami Ike), kayak orang hilang" kenang Diana.

"Padahal aku *ora sangu blas* (tidak bawa uang) ke Jakarta," sambung Tiara sambil tertawa mengenang momen itu.

Mengamen di kereta api tak hanya menghadapi caci-petugas, tetapi juga harus bertaruh nyawa. Tak jarang pengamen harus terjun dari kereta api yang melaju kencang agar tak diciduk petugas. Meski begitu, ketiganya merasa beruntung karena belum satupun dari mereka yang pernah ditangkap.

"Kereta mulai jalan, kami lari buat ngejar. Kereta belum berhenti, kami loncat hindarin petugas," ucap Diana.

Pada tahun 2015, mereka terpaksa pindah lokasi mengamen karena PT Kereta Api Indonesia melarang keberadaan pengamen, pengemis, maupun pedagang asongan di lingkungan kereta api. Ike memilih mengamen di kawasan Malioboro dan dua rekannya bergeser ke Alun-Alun Wates.

Waktu terus bergulir, Diana dan Tiara mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai pengamen sejak pemerintah intensif mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Waria yang mengamen juga ikut kena imbas.

Sementara perundungan yang dialami Jessica berlangsung sejak di bawah umur. Sedari usia tiga tahun, Jessica merasa dirinya bukan laki-laki. Saat yang sama, dia juga tak pernah bisa benar-benar menjadi perempuan.

"Aku nggak mau dipakaiin baju laki-laki. Waktu TK kan pakai pecis, itu aku nggak mau, aku lempar. Dan aku merasa identitasku bukan ini," terang Jessica.

Namun upaya menampilkan secara jujur identitas gender yang dipilih membuat Jessica diusir orang tuanya pada usia 13 tahun. Dia kemudian diasuh neneknya di Semarang, Jawa Tengah hingga lulus dari bangku SMA.

Setelah beberapa tahun bekerja di tanah kelahirannya, Jessica mengadu nasib ke Yogyakarta pada tahun 2012. Alasannya sederhana, dia terbuai dengan semboyan "Jogja Berhati Nyaman". Dia yakin tempat itu akan membuatnya berkembang.

Tiba di sana, Jessica sempat menjadi pekerja seks karena akses pekerjaan terhadap transpuan amatlah terbatas. Meski dianggap rendah oleh masyarakat, bagi Jessica, pekerja seks tetaplah manusia dan warga negara yang berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Pekerjaan itu juga menawarkan kesetaraan.

"Pelacur mampu memperlakukan tamu mereka setara, baik dari kalangan pejabat sampai tukang becak, hitam-putih warna kulit. Secara moralitas, mereka bisa memperlakukan manusia sebagaimana adanya," kata Jessica.

Saat berkecimpung di dunia seni pun, perundungan itu masih mengusiknya. Jessica mengalami pelecehan seksual saat Amuba tampil dalam acara musik underground di Jakarta.

Malam itu, Amuba pentas di urutan paling akhir. Penonton yang mayoritas laki-laki tiba-tiba naik ke panggung saat keempat personilnya tampil.

Jessica sempat diraba anggota tubuhnya oleh beberapa penonton di sana. Salah satu alasan itu yang menguatkan Jessica hengkang dari grup musik yang ditekuninya selama dua tahun, lalu berfokus sebagai penulis.

Meski menjadi penulis, Jessica tetap eksis di dunia seni. Dia berpartisipasi dalam beberapa pameran dan proyek kolaborasi dengan sejumlah seniman lokal maupun internasional. Prosesnya tak mudah. Jessica sempat merasa diremehkan karena tak memiliki latar belakang pendidikan seni sebagaimana mayoritas pelaku seni lainnya.

"Seniman, kurator, atau orang-orang yang berkegiatan seni kan banyak banget. Lalu tiba-tiba ada waria. Itu kan mulainya nggak dari nol lagi, tapi minus," ucap Jessica.

Tetap Bertahan dengan Identitas Transpuan

Sebagai transpuan, Ike Irianda sangat menikmati kehidupannya menjadi pengamen dan penyanyi. Dia tak menampik masih menemui perlakuan tak mengenakkan yang menyasar waria. Namun dengan konsisten berkesenian, Ike meyakini, masyarakat akan pelan-pelan menerima. Harapannya kelak, dia bisa bebas mengekspresikan diri sebagai seorang waria.

"Bahkan kalau pentas sekarang kayak artis besar, dielukan. Aku memang punya jiwa perempuan, nggak mau terikat dan dikurung-kurung," kata Ike.

Dengan konsisten berkesenian, tak hanya memperluas ruang penerimaan, transpuan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Ike mencantohkan, dia bersama sejumlah seniman lain pernah berpartisipasi dalam konser penggalangan dana merespons bencana kekeringan di Kulon Progo serta pandemi Covid-19 awal 2020 lalu.

"Dulu bisa bagi-bagi 1.500 masker untuk orang di jalanan. Aku bersyukur sekali waktu pandemi tetap dapat job lewat endorse. Kalau ada kelebihan, aku biasa berbagi dengan yang butuh," ujar Ike.

Ike tak ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai pengamen.

"Saya masih tetap ngamen karena saya dibesarkan dengan ngamen. Saya juga nggak mau ninggalin nama saya yang dikenal dari ngamen," tegas Ike.

Sementara perilaku diskriminatif dan perundungan yang pernah dialami, diyakini Diana karena masyarakat belum bisa menerima ekspresi seni dari transpuan. Meski sakit hati, Diana bertekad tetap berkesenian tanpa meninggalkan identitas gender yang dipilihnya.

"Siapa yang nggak sakit kalau digituin (dirundung). Tapi kami memang kayak begini. Meskipun mereka sampai ngelempar pakai botol, nyatanya setelah kami sabar-sabar, lambat laun mereka juga bisa menerima," sambung Diana.

Dia berharap kelahiran Trio Badak bisa menjadikannya

seorang bintang besar. Lantaran panggung hiburan tak hanya dimiliki perempuan dan laki-laki saja.

Pilihan Diana terjun di dunia seni terinspirasi jejak duo pesinden transpuan, Mimin dan Apri. Dulu keduanya biasa pentas bersama dalang kondang asal Yogyakarta, almarhum Ki Seno Nugroho.

Sedangkan bagi Tiara, tampil di atas panggung bukanlah sebatas hiburan. Melainkan jadi wadah baginya untuk terus berekspresi sembari menyalurkan kegemarannya merias wajah, bergoyang, dan bernyanyi dari panggung ke panggung.

"Kalau jiwa seni kan nggak bisa hilang. Meski kami punya usaha, kami tetap senang tampil," kata Tiara.

Kini Tiara memiliki bisnis sampingan berjualan busana muslim. Sedangkan Diana disibukkan mengelola warung kelontong kecil milik komunitas Warkop, Waria Kulon Progo. Namun keduanya tetap menantikan momen untuk pentas kembali bersama Trio Badak.

Kepiawaiannya menulis dan berkesenian pun, tak ingin membuat Jessica menghilangkan jati dirinya sebagai transpuan.

"Aku adalah seorang transgender yang menulis dan berkesenian. Perkara orang mau berpikir apa tentang aku, ya itu urusannya dia," tukas Jessica.

Kesempatan yang pernah dimiliki untuk bergabung dengan Amuba pun dianggapnya sebagai sebuah hak istimewa. Sebab hingga saat ini masih banyak transpuan yang belum sepenuhnya bebas mengekspresikan diri. Kondisi itu tak lepas dari anggapan, bahwa waria merupakan masalah sosial yang harus diberantas.

"Di Yogyakarta, rata-rata teman-teman transgender terjebak menjadi pekerja seks dan pengamen. Tapi yang lebih luas lagi juga begitu, karena nggak ada wadah dan ruang untuk mereka," ucap dia.

Jessica meyakini, di luar sana masih banyak transgender berbakat yang kehilangan kesempatan untuk tampil dan

berkarya. Suara-suara mereka seolah tenggelam di tengah berbagai macam persoalan sosial yang menyelimuti mereka.

"Transgender punya hak untuk berkesenian. Kami ingin dilihat dan didengar," jelasnya.

Bagi Tamarra, dunia seni menawarkan banyak kesempatan kelompok transgender untuk berkecimpung di dalamnya. Mengingat masih segelintir transpuan yang mendalami bidang itu. Selama berkesenian, Tamarra tak merasakan adanya praktik diskriminasi meskipun transpuan menjadi kelompok minoritas di sana.

"Malahan kalau dalam kesenian lebih banyak *opportunity* (kesempatan) nya. Kan karena nggak banyak waria yang jadi seniman. Buatku nggak ada diskriminasi sama sekali, malah banyak kesempatannya," kata Tamarra.

Alasan Tamarra untuk terus bertahan di dunia seni cukup sederhana, yakni menyalurkan hasratnya untuk terus berkarya sembari merefleksikan pengalaman pribadi dan peristiwa sosial yang terjadi di sekelilingnya.

Proses berkesenian juga menawarkan kebebasan. Seniman bebas mengeksplorasi kemampuannya tanpa memikirkan adanya batasan-batasan, seperti identitas maupun gender.

"Seni adalah media untuk berbicara. Lewat seni, kami bebas ngomongin apa saja. Kayak nggak ada batasnya," terang Tamarra.

Melalui proyek "We Are Human" yang pernah digagasnya dulu, dia ingin mengajak kelompok transpuan terlibat dalam pergaulan yang lebih luas. Mengingat kehidupan waria masih termarjinalkan. Mereka seolah diasingkan oleh masyarakat sehingga memilih hidup di dalam komunitas yang homogen.

"Aku sadar ruang lingkup pergaulannya cuma di situ-situ saja atau dengan komunitasnya sendiri. Nggak pernah ada di luar. Terus aku merasa, penting juga ya menarik teman-teman waria keluar dari zona nyaman ke zona lain untuk berbaur dengan masyarakat umumnya," ucap Tamarra.

Saat ini, Tamarra mampu membangun sebuah rumah di kawasan Watu Lumbung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang diprioritaskan menjadi tempat singgah para transpuan. Mereka diperkenankan tinggal menetap di rumah itu dan bersama-sama mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

"Semoga ada yang ngoleksi (membeli) karyaku lagi, jadi bisa segera nambah bangunan lagi. Kalau bangunannya punya beberapa kan seru, bisa memfasilitasi banyak teman yang butuh tempat 'menyeipi,'" imbuh Tamarra.

Belum Ada Program Khusus Transpuan

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengaku belum ada program kegiatan yang secara khusus dibuat untuk mewadahi kelompok minoritas, termasuk transgender untuk berkespresi dan berkesenian.

Meski begitu, transgender yang aktif di ranah seni tetap bisa dilibatkan dalam program yang sudah ada.

"Kalau secara khusus belum. Khusus itu maksudnya nama program kegiatan. Tapi kalau secara substansi sangat bisa kami sinergikan bareng dengan program lain. Kebudayaan kan hak semua orang," terang Dian saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, (6/6/2022).

Dian mencontohkan, pada 2021 lalu Disbud DIY menyalurkan hibah seni yang menyasar seniman-seniman lokal. Program itu merespons pandemi Covid-19 yang membuat seniman kehilangan mata pencaharian. Disbud pun memberi bantuan keuangan dan kesempatan kepada seniman untuk tampil secara daring di kanal YouTube Disbud DIY.

Hanya saja, tidak ada seniman transpuan yang mencoba mengirim proposal untuk mendapat hibah tersebut. Dian juga menjamin tidak ada perlakuan diskriminatif kepada kelompok tertentu dalam proses seleksi proposal.

"Ya kapan-kapan kalau ada yang kerso (mau) main ke dinas,

kemudian kami diskusikan kalau ada semacam paguyuban, komunitas, atau apapun. Nggak masalah," katanya.

Pada 2022 ini, program hibah seni rencananya bakal dilanjutkan meski pandemi Covid-19 sudah melandai. Namun pihaknya masih menyiapkan pola pelayanan dan sistem pendaftaran yang sesuai. Kepada seniman yang ingin mendapat hibah tersebut diperkenankan mengirim proposal ke Kantor Disbud DIY nantinya.

"Misal ada keinginan ya sudah kirim saja proposal ke dinas. Nanti mesti akan kami tanggapi," janji Dian.

Tokoh Transpuan Terus Bermunculan

Sosiolog sekaligus Ketua Gaya Nusantara, Dede Oetomo mengatakan adanya tekanan sosial terhadap kelompok transgender, tak lantas membuat eksistensi mereka tergerus. Saat ini justru terus bermunculan tokoh-tokoh transgender yang hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Dede mencontohkan sosok dokter transpuan pertama Alegra Wolter dan Hendrikus Kelan yang dikenal sebagai pejabat publik transpuan.

"Memang keadaan tidak sempurna dan masih terjadi kekerasan. Tapi ya komunitas transpuan, transpria, dan lainnya juga terus bermunculan, eksis, dan berusaha bangkit," kata Dede saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (18/6/2022).

Selain itu ada banyak transpuan yang berupaya menunjukkan bakat dan kreativitasnya dengan berkesenian. Terlebih seni dapat menjadi medium bagi kelompok minoritas untuk menampilkan identitas yang dipilih, termasuk membuka ruang-ruang interaksi kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan.

Bagi Dede, mengamen pun dapat dikategorikan sebagai praktik berkesenian. Mengamen merupakan salah satu strategi waria untuk mencari nafkah hingga tampil dihadapan publik.

"Memang masih ada transpuan yang sembunyi-sembunyi menutupi diri. Ada yang tidak berkesenian karena memang

nggak mampu atau karena definisi keseniannya yang terbatas. Mengamen itu sebenarnya bisa dianggap berkesenian," jelas Dede. Hingga saat ini, kelompok transgender masih dihadapkan dengan berbagai macam persoalan sosial seperti menjadi bahan lelucon hingga mengalami kekerasan fisik dan verbal. Dia berpendapat, hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia belum menerima keberadaan gender di luar laki-laki dan perempuan.

"Masyarakat kebanyakan tidak mau melihat kenyataan, bahwa gender nggak hanya dua. Itu karena konservatisme agama dan paham sekuler modernitas yang ketinggalan zaman hanya mengakui dua gender," terang Dede.

Pemikiran itu patut disayangkan, mengingat banyak produk kebudayaan Nusantara yang telah mengakui keberagaman ekspresi gender. Sebut saja kesenian ludruk yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Jawa Timur di mana penari ludruk biasanya seorang waria.

"Ludruk kini sudah tergerus. Abad 18 juga ada Tari Bedhya di Keraton Ngayogyakarta yang ditarikan remaja laki-laki yang didandani perempuan," imbuh Dede.

Sementara Kandidat PhD dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM, Khanis Suvianis menambahkan, di era reformasi ini negara masih menempatkan transpuan sebagai masalah sosial.

Seiring kemunculan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatagorikan waria sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam perjalannya, pemerintah kemudian mengganti penyebutan PMKS menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam hal ini, negara pun berperan melanggengkan stigma negatif terhadap transpuan sehingga mereka selalu diidentikkan dengan pengemis, pengamen, dan pekerja seks yang membutuhkan uluran tangan pemerintah dan butuh penanganan.

"Artinya, secara norma aturan mereka (transgender) dianggap masuk katagori yang bermasalah dan membutuhkan uluran. Tapi sebenarnya UU ini bias dengan waria di pinggir jalan. Seolah-olah semua waria itu pengamen dan pekerja seks di pinggir jalan," kata Khanis.

Kabar-Kabur Vaksin Covid-19, Waria Kulon Progo Sempat Menolak karena Takut Mati

Oleh: Ahmad Mustaqim

Dimuat di situs medcom.id, 4 Juli 2022

Majoritas waria Kulon Progo sudah mendapat vaksi Covid-19, tanpa terkendala kepemilikan KTP. Persoalannya, sosialisasi yang lamban membuat waria sempat menolak vaksinasi karena termakan informasi menyesatkan.

Bunyi musik dangdut berdentum dari toko kelontong di sudut Jalan Tentara Pelajar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat malam, 10 Juni 2022. Iramanya menemani sejumlah waria yang bergabung dalam komunitas Waria Kulon Progo alias Warkop yang dibentuk pada 2011. Mereka tengah bercengkerama, menyanyi, dan berjoget.

Sejenak, mereka melupakan virus SARS-CoV-2 yang masih memburu orang-orang yang berkerumun sejak dua tahun lalu. Jangankan virusnya, vaksin Covid-19 pun sempat membuat waria ketakutan.

"Kabar itukan macam-macam, berseliweran. Habis disuntik vaksin katanya bisa mati, kan jadi takut," kata Adelia, 10 Juni 2022

Adelia adalah salah satu transpuan berusia 50 tahun yang berjoget dan menyanyi di warung kelontong itu. Ini adalah tempat berkumpulnya anggota Warkop.

Para transpuan atau waria memang harus berjuang untuk mendapat suntikan vaksin Covid-19, baik itu dosis pertama, kedua, dan ketiga atau *booster*. Di sisi lain, kabar tidak pasti soal dampak setelah mendapat vaksin sempat membuat mereka merasa ragu.

Pada awalnya, informasi seputar vaksin Covid-19 memang masih simpang siur. Beragam informasi yang menyesatkan bertebaran. Vaksin berisiko membuat nyawa melayang, bisa bikin sakit, merusak sel darah merah, dan sebagainya.

Kabar yang tak kalah heboh, yang disuntikkan ke dalam tubuh bukan hanya cairan vaksin, tetapi juga microchip yang bisa mengontrol warga seumur hidup. Gara-gara itu, Eko pun sempat menolak vaksinasi.

“Nggak berani (vaksin). Takut kalau habis disuntik vaksin kenapa-kenapa. Takut mati,” imbuhan Eko.

Rasa takut mati menjadi alasan terkuat waria Warkop menolak vaksinasi. Eko menengarai, perbincangan dalam kelompok Warkop menunjukkan vaksin Covid-19 seolah menakutkan.



Waria Kulon Progo tengah bernyanyi dan bercengkrama di depan toko kelontong yang menjadi tempat berkumpul sehari-hari. (Foto: Ahmad Mustaqim)



Waria Kulon Progo (Warkop) tengah berjoget di depan toko kelontong yang jadi lokasi berkumpul sehari-hari. (Foto Ahmad Mustaqim)

Dampak kabar menyesatkan itu tak hanya membuat anggota Warkop, seperti Nanda (31 tahun) memilih tidak divaksin Covid-19. Warkop juga sempat enggan mengusahakan vaksin bagi anggotanya yang berjumlah 12 orang itu.

“Karena informasi itu, kami (anggota Warkop) tak berani vaksin. Terus ya tidak mau usaha dapat vaksin,” ujarnya di Kulon Progo, Jumat, 10 Juni 2022.

Jemput Bola demi Informasi

Simpang siur informasi kian menambah kebingungan dan ketakutan. Yanti Rosita, seorang transpuan berumur 51 tahun mengatakan situasi ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi langsung tentang vaksin Covid-19 kepada kelompok waria. Sementara serangan Covid-19 kian mengkhawatirkan dan mengakibatkan angka kematian sangat tinggi pada pertengahan 2021.

Akhirnya, anggota Warkop secara personal mulai mencari tahu mengenai vaksin Covid-19 melalui berbagai sumber

dan cara. Adelia mencoba berkomunikasi dengan teman di kampungnya di Dusun Dumpoh, Kebonrejo, Kecamatan Temon. Ia juga berselancar di internet.

Beragam media elektronik mewartakan. Upaya sama juga dilakukan Nanda yang mencari informasi dari media elektronik dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo. Dari situ, Dinkes berkomunikasi dengan Koordinator Warkop, Diana untuk membahas kapan dan di mana sosialisasi bagi anggota Warkop.

"Biasanya di warung makan atau di tempat yang kami sepakati. Tapi memang tidak semua (anggota Warkop) mengikuti sosialisasi karena ada acara lain," kata Diana, 48 tahun.

Informasi yang gamblang membuat para anggota Warkop menyadari arti penting vaksin Covid-19. Mereka yang menolak karena takut, mulai berubah pikiran. Imbauan vaksinasi pun mereka terima sejak pertengahan 2021.

Nanda lantas ikut vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Syarat vaksin cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rata-rata anggota Warkop adalah penduduk Kulon Progo dan sudah memiliki KTP.

"Saya akhirnya vaksin pada 5 Agustus (2021) dan 28 Agustus (2021). Tapi saya belum vaksin dosis ketiga," katanya.

Adelia juga memberanikan diri ikut vaksinasi di desa tempat tinggalnya. Dosis pertama pada 19 Agustus 2021 dan kedua, 16 September 2021. Ketakutan akan mati usai vaksin pun tak terbukti.

"Kejadian ikutan pascaimunisasi (Kipi) juga tidak," ujarnya.

Yanti Rosita juga mantap ikut vaksinasi. Bahkan dia sudah mendapatkan vaksin ketiga alias booster.

"Baru dapat Kipi waktu vaksinasi ketiga. Nyeri di bagian bekas suntikan," katanya.

Nanda mengatakan anggota Warkop mendapat vaksin di lokasi yang berbeda-beda. Ada yang di rumah sakit, di kampungnya, dan di Dinas Kebudayaan Kulon Progo yang memfasilitasi pelaku seni dan budaya.



Waria di Yogyakarta tengah antri vaksinasi Covid-19. (Foto: Dok Waria Crisis Center)

"Vaksinasi sesuai dengan lokasi yang mudah diakses. Kalau ada yang belum vaksin bisa langsung datang ke RSUD Wates," imbuhan Nanda.

Sampai saat ini Nanda belum mendapat vaksin *booster* karena sibuk. Ada dua anggota warkop yang belum vaksin karena alasan Kesehatan, salah satunya Diana. Ia menunda vaksin karena memiliki penyakit penyerta usai melakukan cek laboratorium sebulan lalu.

"Sudah diberi obat sama dokter dan baru dapat surat layak vaksin 8 Juni 2022. Tapi belum tahu kapan saya mau vaksin," ucap Diana.

Informasi vaksinasi juga diperoleh melalui grup media sosial Whatsapp. Saat itu, Warkop dipersilakan mendata anggotanya yang belum vaksin agar bisa mengakses vaksin Covid-19 sesuai jadwal yang tersedia.

"Itu di grup pasar (grup sesama pedagang) *ngandhani* (memberi tahu) bisa ikut vaksin di Kantor Pos, atau Kodim.



Waria di Yogyakarta sedang mengikuti vaksinasi Covid-19 bersama masyarakat lain pada 2021. (Foto: Dok Waria Crisis Center)

Ada juga tawaran vaksin dari Iwayo (Ikatan Waria Yogyakarta)," ujar pemilik toko kelontong ini.

Lantaran dianggap cukup melek informasi tentang vaksinasi Covid-19, Adelia diminta ikut mengurus vaksinasi di kampungnya. Sebagai anggota Karangtaruna, ia bertugas mendata dan membantu lansia mendapat vaksin.

Saat mendata, Adelia juga memberikan penjelasan tentang pentingnya vaksinasi tersebut. Ia juga mengatur teknis keberangkatan lansia ke lokasi vaksinasi.

"Kalau kasih informasi ke lansia itu harus pelan dan sabar. Kalau sudah paham baru ditanya, mau divaksin kapan. Baru kami catat dan menyesuaikan vaksinasi di desa," ujarnya.

"Kalau ada pendamping berarti tinggal kami jelaskan kalau vaksinasi cukup bawa kartu identitas KTP. Kalau tidak ada pendamping, ya saya bantu menjemput," tambahnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari keterlibatannya mengurus vaksinasi di kampung digunakan Adelia memberikan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi kepada teman-temannya di Warkop.

"Ya sambil ngobrol saat kumpul-kumpul. Akhirnya banyak anggota Warkop yang mau vaksin," katanya.

Sosialisasi Baru Sekali

Sejauh ini, kekhawatiran waria anggota Warkop soal vaksin tak tertangkap pemegang kebijakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Pihak Dinkes mengklaim jajarannya sudah melakukan penyuluhan tentang pentingnya vaksin Covid-19 untuk waria.

"Penyuluhan menjadi sisipan di antara sosialisasi tentang Odha (orang dengan HIV dan Aids)," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Rina Nuryati, 15 Juni 2022.

Sementara sosialisasi itu dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Acara dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan waria.

"Untuk waria biasanya malam hari. Kami janjian dengan koordinatornya, kapan mereka kumpul," imbuh Rina.

Sementara penyuluhan dengan materi tentang pentingnya vaksin Covid-19 dilakukan sekitar Agustus 2021. Pelaksanaan vaksin dilakukan setelah sosialisasi tersebut. Diakui Rina, waria adalah salah satu kelompok minoritas yang menjadi sasaran vaksinasi. Dan ada jalur khusus yang diberikan untuk kelompok tersebut agar mendapat layanan vaksinasi dosis pertama dan kedua.

"Mereka kami fasilitasi untuk mendapat jadwal tersendiri. Mereka bareng teman-temannya biar lebih semangat buat vaksin," kata Rina.

Di sisi lain, Rina mengakui belum ada penyuluhan pentingnya vaksin Covid-19 dosis ketiga khusus waria. Lantaran pihaknya masih berfokus pada vaksinasi untuk lansia yang membutuhkan

banyak waktu karena dilakukan dari rumah ke rumah. Meski demikian, Rina menyebut tetap mengupayakan agar kelompok waria bisa mendapat vaksin Covid-19 dosis satu hingga tiga.

"Kalau ada kesempatan, kami memonitor lewat ketua kelompoknya. Kami fasilitasi kelompok terdekat yang mereka suka. Milih di mana (lokasi vaksin), kami fasilitasi," tutur Rina.

Bahu-membahu Sosialisasi dan Memfasilitasi Vaksin

Koordinator Waria Crisis Centre Yogyakarta, Rully Mallay mengatakan kabar hoaks tentang vaksin Covid-19 juga dialami waria di Kota Yogyakarta. Bahkan ada anggota Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) yang menolak vaksin lanjutan meski sudah mendapatkan vaksin dosis pertama.

"Alasan penolakan karena khawatir kejadian pascaimunisasi (Kipi) bisa mengganggu aktivitasnya," kata Rully melalui telepon, 26 Juni 2022.

Rully mengungkapkan WCC melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan pentingnya vaksinasi Covid-19. Upaya itu dilakukan dengan memberikan informasi melalui grup media sosial Whatsapp hingga sosialisasi luring. Sosialisasi itu telah dimulai sekitar Mei-Juni 2021.

"Kami juga mengundang anggota Warkop untuk sosialisasi itu. Tapi tidak ada yang hadir. Informasi yang kami dapat karena di sana sudah mendapat info dan vaksin di kampungnya," kata Rully.

Upaya-upaya itu membawa hasil. Beberapa waria yang semula menolak vaksinasi, akhirnya mau vaksin. Bahkan hingga dosis kedua. Salah satu poin yang disampaikan dalam sosialisasi vaksin adalah syarat menunjukkan bukti (telah mengikuti) vaksin untuk mengakses layanan publik.

Bukti vaksin bisa ditunjukkan dengan menggunakan handphone atau menunjukkan kartu vaksin. Selain itu juga informasi, bahwa vaksinasi Covid-19 penting untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap virus.



Salah seorang waria di Yogyakarta saat vaksinasi Covid-19. (Foto: Dokumentasi Waria Crisis Centre)

"Penjelasan ini penting karena banyak hoaks ya," ujar Rully.

Sejauh ini, proses vaksinasi untuk anggota Warkop tidak terlalu sulit. Selama ini, anggota Warkop hidup membaur bersama dengan keluarga di kampung. Situasi itu membuat para anggota Warkop bisa mengikuti vaksin di lingkungan masyarakat.

"Kami kemarin mengupayakan vaksinasi untuk waria se-DIY. Kalau ada anggota Warkop yang belum vaksin, juga kami tawari. Ternyata mereka sudah dapat vaksin di sana," ucap Rully.

Berdasarkan data Waria Crisis Centre, sebanyak 151 orang waria sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua dari total 183 waria di DIY. Sementara, hampir 100 waria sudah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster. Ada 32

waria yang belum mendapat vaksin karena terkendala masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan paru, dan ginjal.

Sampai saat ini, lanjut Rully, vaksin booster untuk kelompok waria bisa diakses di Dinas Kesehatan DIY dan Puskesmas Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Sementara vaksinasi khusus waria tak bisa digelar mengingat dalam satu hari harus bisa menghabiskan 1.000 dosis vaksin.

Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia, ada 14 waria di DIY terjangkiti virus ini. Dua belas waria meninggal dunia dan 11 di antaranya karena ada penyakit penyerta.

Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Pusat Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Witriani mengatakan partisipasi waria dalam penanganan Covid-19 menjadi hal positif dalam upaya waria bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Meski belum semua lapisan masyarakat menerima keberadaan mereka, waria memiliki hak yang sama.

"Waria banyak mendapat diskriminasi, penolakan, stigma. Ini jadi pendidikan masyarakat terhadap orang yang memilih berbeda," kata Witriani saat dihubungi melalui telepon, 14 Juni 2022.

Diskriminasi juga tampak dari belum dijadikannya waria sebagai sasaran prioritas dari program-program pemerintah. Tak terkecuali soal vaksinasi Covid-19. Alasannya, kata Witriani, lantaran kelompok minoritas ini masih dianggap 'tidak normal' atas pilihan gendernya.

Ia menegaskan masyarakat secara umum masih butuh edukasi untuk menerima keberadaan waria. Di sisi lain, negara juga harus memberikan ruang bagi kelompok-kelompok tertentu, tak terkecuali waria.

"Meskipun waria, mereka juga warga negara. Mereka harus diakui di mata negara dan hukum," ujarnya.

Para Waria Pencari Tuhan: Kisah Kelahiran Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan, Yogyakarta

Oleh: Eka Widhi Artanti

Dimuat di situs portaljogja.com, 1 Juli 2022

Dua tahun lalu, tepatnya 2020, Rini Kaleng, seorang waria yang menjadi pengamen sedang menyisir jalanan di kawasan Demangan, Kota Yogyakarta. Di depan toko emas, Kuda Mas, ia mampir dan bernyanyi.

Sorang perempuan pemilik toko memberikan uang dan dibalas Rini dengan ucapan terima kasih serta sederet doa.

"Terima kasih, Bu. Semoga Tuhan Yesus memberkati," ucap waria yang usianya berkisar 40-an tahun itu.

Pemilik toko Kuda Mas, Ratna Setianingsih yang juga seorang rohaniawan Kristen itu terkejut. Ia merasa tersentuh dan ingin berkenalan lebih jauh dengan pengamen waria yang ternyata juga pemeluk Kristen itu.

"Ada kehausan rohani dalam diri Rini. Apalagi dia mengungkapkan keinginannya mempelajari Alkitab lebih dalam," kata Ratna saat ditemui di tokonya, 7 Juni 2022.

Ratna menyambut baik keinginan Rini dan mau membantu. Dia membimbing Rini belajar Alkitab dan firman-firman Tuhan sebulan sekali di kamar kos Rini selama satu tahun.



Ratna Setianingsih saat memimpin ibadah di persekutuan doa Jalan Terang Kasih Tuhan, 10 Juni 2022. (Foto: Eka Widhi Artanti)

Setelah sering bertemu, Rini memberitahu Ratna, bahwa banyak kawan waria Kristen yang juga ingin memperoleh bimbingan agama seperti dirinya. Gayung bersambut, Rini menawarkan diri menjadi pembimbing para waria Kristen.

"Terus saya bilang asal mereka mau sungguh-sungguh, ya kenapa tidak. Karena kami mau sama-sama melakukan kegiatan rohani," ujar Ratna.

Kemudian Rini mengenalkan Ratna kepada pendiri Pondok Pesantren Waria Al Fatah sekaligus Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo), Shinta Ratri. Rini menjadi jembatan antarkeduanya.

"Bu Shinta juga merasa (pertemuan) itu seperti doa dia yang dijawab. Dia ngomong kalau yang (waria) muslim sudah ada yang membina, kalau yang (waria) Nasrani tidak ada yang membina," sambung Ratna.

Apalagi jauh sebelumnya pernah ada waria Kristen yang hidup sebatang kara tinggal di Ponpes Al Fatah dan sekaligus

rumah Shinta. Saat waria itu meninggal dunia, Shinta dan teman-temannya bingung mengurus jenazah sesuai tuntunan Kristen.

Waktu itu belum ada pihak gereja atau kantor wilayah agama yang bekerja sama dengan komunitas waria. Shinta juga tidak punya kenalan pemuka agama Kristen sehingga jenazahnya dimakamkan dengan menggunakan tata-cara syariat Islam.

Usai mendengar cerita ini, Shinta dan Ratna sama-sama menyesal. Bagi Ratna, ini menjadi salah satu alasan kuat baginya mau membimbing teman-teman waria Kristen.

"Penyesalan ada di hati Bu Shinta, hingga saya diperkenalkan dengannya dan itu benar-benar dirasa jawaban atas doanya. Akhirnya dia memberi kesempatan kepada saya untuk membina kerohanian para domba-domba waria Kristen itu," ujar Ratna.

Pertemuan Shinta dan Ratna membuat hasil. Persekutuan doa untuk waria yang beragama Kristen mulai dirintis.

Rini membantu membuka pintu akses bagi teman-teman waria Kristen untuk lebih bebas mengekspresikan keyakinannya dan beribadah tanpa rasa khawatir. Persekutuan doa bernama "Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan" resmi berdiri pada April 2021.

Shinta Ratri yang memberi nama dan menyusun jadwal kegiatan persekutuan doa, yaitu setiap Jumat pekan pertama dan Jumat pekan ketiga. Persekutuan doa waria yang menjadi kelompok ibadah dan pembelajaran Alkitab ini berlangsung di ruang pertemuan Hotel Horarios di Jalan Gowongan Kidul, Kota Yogyakarta.

Saat ini, jumlah jemaat waria berkisar 25 sampai 30 orang. Sejak Hari Raya Natal 2021, persekutuan ini dibuka untuk jemaat Kristen lainnya, jumlah jemaat nonwaria mencapai 25 orang.

Untuk menjalankan kegiatannya, persekutuan doa ini mengandalkan donasi kotak pelayanan yang disediakan

pengurus persekutuan doa. Jemaat yang datang memberikan donasi seikhlasnya. Ratna dan pengurus lainnya melakukan pelayanan tanpa meminta imbalan apa pun. Persekutuan doa ini juga tidak mendapatkan bantuan apapun dari Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Cibirian yang Berbuah Dukungan

Sebelum persekutuan doa waria dibentuk, Rini dan waria Kristen lainnya mengaku tak merasa hawatir beribadah di gereja umumnya. Mereka juga tidak mendapatkan diskriminasi dari jemaat lain saat beribadah.

Hanya saja terkadang mereka kurang nyaman saat beribadah di gereja karena penampilan mereka yang berbeda sehingga menjadi sorotan jemaat lain. Lantaran itu pula, Rini dan kawan-kawannya memilih lebih sering membaca Alkitab di kediaman masing-masing.

"Gak ada kendala lainnya. Kalau yang Kristen kan baca Alkitab aja di rumah udah selesai," ujar Rini Kaleng saat ditemui selepas ibadah di Hotel Horaios Jogja, 10 Juni 2022.

Sementara salah satu waria jemaat persekutuan doa, Anox Lola mengaku mendapatkan tekanan dari keluarganya. Keluarganya bersikap tidak peduli dan sering mengabaikannya karena dianggap menyimpang dengan identitasnya sebagai seorang waria.

Pilihannya sebagai waria tidak serta merta diterima keluarga Anox Lola. Dia merasa tidak ada yang bisa diandalkan lagi selain Tuhan Yesus yang dimilikinya.

"Sekarang saya banyak doa, banyak sabar. Karena keluarga pada diem semua sama saya. Orangtua gak ada semua, jadi saya hidup seperti sebatang kara. Cuma Tuhan Yesus yang saya punya," ucap waria usia 30-an tahun itu kepada PortalYogya.com pada 13 Juni 2022.

Kini setelah ada Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan, Anox Lola mengaku lega, tenang, dan nyaman.



Persekutuan Doa Junaedi Salat Ministry dari Jakarta meramaikan kegiatan bersama kelompok Persekutuan Doa Waria Jalan Terang kasih Tuhan dan Iwayo, 10 Juni 2022. (Foto: Eka Widhi Artanti)

Anox yang biasanya lebih sering beribadah di rumah dibandingkan di gereja, kini menjadi salah satu anggota persekutuan doa waria dan rajin datang setiap dua kali sebulan. Orang-orang menerima kehadirannya dan ia merasa dihargai meskipun sebagai waria.

Pada awalnya, Ratna mendapat banyak cibirian dari orang-orang sekitarnya. Mereka menganggap waria sebagai sosok yang tidak penting dan memiliki kelakuan dan kehidupan yang tidak baik.

Pelayanan yang Ratna lakukan dianggap sia-sia karena waria dikenal dengan stigma sulit diatur dan hidup semaunya sendiri.

"Hidup menyalahi kodrat yang telah Tuhan berikan," kata mereka sebagaimana dituturkan Ratna.

Ratna memilih mengabaikan cibirian yang datang dari orang-orang yang menilai waria dari *casing* atau penampilan

luarnya saja. Dia tetap menjadi pembimbing waria sekaligus rohaniawan di Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan hingga saat ini.

"Saya punya keyakinan meskipun casing kami beraneka ragam, tetapi Tuhan tidak melihat casing. Tuhan melihat ketulusan hati," terangnya.

Kini cibir yang dulu sering dialamatkan kepada Ratna berubah menjadi puji. Setiap orang memberikan rasa hormat setelah mendengar kisahnya bersama sejumlah waria dalam merintis persekutuan doa waria.

Sempat Berkolaborasi dengan Kampus

Sebelum ada persekutuan doa bagi waria Kristen, Rini Kaleng pernah mengikuti persekutuan doa yang dibentuk Pendeta Hendri Wijayatsih dan difasilitasi oleh Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Persekutuan doa ini berlangsung sejak tahun 2018 dan berhenti awal 2020 karena pemerintah mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah muncul pandemi Covid-19.

Hendri merupakan dosen pengampu mata kuliah Pendampingan LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, intersek, dan Queer) di UKDW. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa untuk mengurangi stigma negatif terhadap kelompok minoritas ini.

"Jadi mengajak mahasiswa mengambil jarak kritis atas kecenderungan homophobic dan kepatuhan tanpa syarat pada dogma gereja yang mendiskriminasikan LGBTIQ," terang Hendri kepada PortalYogya.com, 17 Juni 2022.

Hendri menjelaskan dogma gereja dinilai mendiskriminasi LGBTIQ karena agama Kristen hanya mengakui manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di luar itu, dianggap menyeleweng ajaran agama. Dalam tradisi gereja Kristen disebutkan homoseksual itu tidak baik.

Seusai mengikuti mata kuliah ini, Hendri berharap mahasiswa

bisa menjadi teman bagi komunitas LGBTIQ dan keluarganya. Mereka diharapkan tidak menghakimi dan bersikap diskriminatif karena akan memperberat beban komunitas ini dan keluarganya.

"Untuk mendukung pencapaian mata kuliah ini, mahasiswa perlu bertemu dan berinteraksi langsung dengan komunitas waria," tambahnya.

Kemudian Hendri menjalin komunikasi dengan PLUSH dan Iwayo. Dari pertemuan itu, Shinta Ratri menyatakan waria Kristen membutuhkan penguatan rohani. Selanjutnya, Hendri merundingkannya dengan pihak UKDW dan ternyata disetujui.

Persekutuan doa bagi waria Kristen yang difasilitasi UKDW dibentuk melalui nota kesepahaman (MOU) dengan Iwayo. Lokasi ibadah menempati kapel di lantai 3 UKDW.

"Ibadahnya difasilitasi UKDW sebulan sekali," kata Shinta Ratri di Pondok Pesantren Waria Al Fatah, 1 Juni 2022.

Rini Kaleng adalah salah satu jemaat persekutuan doa yang difasilitasi UKDW. Lantaran terhenti karena pandemi, Shinta mendirikan persekutuan doa sendiri bersama Ratna Setianingsih. Pihak UKDW tidak keberatan saat diberi tahu.

"Kami bilang, sekarang sudah punya persekutuan doa sendiri dengan kawan-kawan dari gereja. Oh ya gak papa, mereka malah seneng," kata Shinta.

Sementara Koordinator Waria Crisis Center, Rully Malay menilai Persekutuan Doa Waria Jalan Terang Kasih Tuhan seperti oase di tengah situasi intoleransi. Padahal waria memiliki hak yang sama dan dijamin UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rully melanjutkan, Yogyakarta adalah tuan rumah bagi berkumpulnya para ahli hukum dan hak asasi manusia pada 6-9 November 2006 yang melahirkan Yogyakarta Principles. Isinya adalah prinsip-prinsip penerapan hukum HAM internasional terkait orientasi seksual dan identitas gender. Namun hak-hak para waria di Yogyakarta sendiri masih sering dicederai.

"Secara faktual, tidak ada aktualisasinya dalam kehidupan

kami. Yogyakarta sebagai tempat lahirnya Yogyakarta Principles justru tidak ada semangat untuk menjaga kebebasan keyakinan di tengah keberagaman," ujar Rully.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, lahirlah Waria Crisis Center pada 23 Agustus 2019. Tujuannya untuk memberikan ruang aman bagi waria yang takut dan mendapat tekanan karena beribadah sesuai keyakinannya. Dukungan terhadap persekutuan doa waria turut disampaikan oleh Elizabeth Junaedi Salat dari Persekutuan Doa Junaedi Salat Ministry dari Jakarta.



Anggota persekutuan doa Jalan Terang Kasih Tuhan saat beribadah pada 10 Juni 2022. (Foto: Eka Widhi Artanti)

Bersama timnya, Junaedi menjadi tamu nonwaria dalam aktivitas ibadah persekutuan doa waria, Jumat, 10 Juni 2022 lalu. Mereka melakukan ibadah bersama di sana.

Para jemaat waria maupun nonwaria menyanyikan lagu religi bersama di depan mimbar. Mereka turut menari bersama. Shinta Ratri dan Ketua Iwayo saat ini, Ayu Kusuma turut datang

mengikuti dan mendampingi waria yang sedang beribadah.

"Untuk itu terus semangat. Kalau ada persekutuan dua bulan sekali datang ya. Itu firman tidak akan sia-sia. Pasti jadi berkat bagi bapak ibu saudara. Persekutuan doa ini diberkati Tuhan, luar biasa," seru Elizabeth di sela-sela ibadah saat itu.***



Derita Transgender di Dunia Online

Oleh: Nuriyah Hanik Fatikhah

Dimuat di situs ekspresionline.com, 3 July 2022

Ekspresionline.com—Wajah Febby Gracia tampak segar dengan polesan gincu merah dan blush on di pipinya. Bulu matanya lentik dan rambutnya terurai panjang.

Waria berusia 40 tahun itu duduk termenung di bangku salon sambil sesekali membuka ponselnya. Setelan kaos dan celana jin di tubuhnya membuat ia terlihat tinggi dan langsing.

Febby bekerja di suatu salon di daerah Semarang Barat, Kalibanteng dan di dunia prostitusi. Siang sampai sore hari ia bekerja di salon. Setiap hari pelanggannya yang datang bisa 2-5 orang dan bahkan ada kalanya nihil.

Hari itu, Minggu (3/06/2022) hingga pukul 21.00 WIB, belum ada pelanggan yang mengajak berkencan. Dia bolak balik mengecek notifikasi di aplikasi Me Chat dan akun Facebooknya untuk menunggu pelanggan. Biasanya dalam satu hari, Febby mendapat pelanggan satu sampai dua orang tetapi juga bisa tidak ada sama sekali.

Sambil menunggu pelanggan, ia membuka kisah pahitnya di dunia online. Nada suaranya meninggi saat menceritakan pesan-pesan di media sosial yang melecehkan dan mengolok-olok seksualitasnya.

Febby sangat kesal. Wajahnya yang penuh riasan semakin merah.

Kejadian yang sering dialaminya adalah penyalahgunaan identitas. Ada orang membuat akun atas nama Febby yang dilengkapi dengan foto wajahnya dan nomor kontak teleponnya.

"Kebanyakan gara-gara nego harga atau aku gak mau ngelayani, terus dia sakit hati dan bikin akun atas namaku dan pakai fotoku," terangnya.

Apa yang dialami Febby adalah suatu bentuk kekerasan yang disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dikutip dari Buku Panduan KBGO yang diterbitkan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), KBGO merupakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi untuk menyerang dan melecehkan korban atas dasar gender dan seksualitas.

Febby menjelaskan tarif layanan prostitusinya adalah

Rp200.000. Namun seringkali pelanggan menawarnya hingga separuh harga. Sesuatu yang tidak bisa diterimanya.

Puncaknya terjadi tahun 2019 lalu, lebih dari dua kali akun palsu atas dirinya muncul di jagad maya. Akibatnya, Febby kerap menerima pesan dari nomor-nomor asing yang tak dikenalnya.

"Tiba-tiba banyak nomor baru ngechat dan bilang kami sudah sepakat sama harga dan waktu, padahal aku gak tau apa-apa. Ujungnya banyak yang marah-marah sama aku," ujarnya.

Ada juga pelaku yang menggunakan akun palsu atas nama Febby untuk minta pulsa dan uang. Ia tahu karena ada salah satu pelanggannya yang pernah menjadi korban.

Bila ada akun palsu atas namanya, Febby mencoba menghubunginya tetapi biasanya akun itu segera menghilang. Beberapa hari kemudian muncul akun palsunya lagi. Pola ini bisa berulang beberapa kali sehingga Febby berpikir pelakunya adalah orang yang sama.

Tentu kejadian ini membuatnya sangat terganggu, ia sering mendapatkan caciannya bahkan ancaman. Ia khawatir nama baiknya hancur lantaran akun-akun palsu yang mengatasnamakan dirinya digunakan untuk menipu, minta pulsa, atau uang.

"Aku sangat terganggu, bayangin tiba-tiba ada yang chat terus marah-marah ke aku. Padahal aku gak tahu apa-apa, sampai kesel sendiri kadang-kadang tuh," jelasnya sambil tersenyum getir.

Kelompok minoritas gay, biseksual, transgender, interseks dan queer (LGBTIQ) sering mengalami diskriminasi baik di dunia nyata maupun dunia online. Kekerasan yang mereka alami itu jarang bisa diselesaikan secara hukum. Padahal mereka adalah warga negara biasa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Ria Ardana, seorang waria kelahiran 13 Oktober 1984 juga sering mendapat kekerasan di dunia online. Saat ini, ia sedang

magang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang selama hampir dua tahun.

Hari itu, Minggu (29/05/2022) di kediaman kepala Yayasan Persatuan Waria Semarang (Perwaris), Ria tidak merias di wajahnya. Ia hanya mengikat ke belakang rambut panjangnya.

Ia mengalami *cyber bullying* lantaran memberikan komentar terhadap warganet atau berita-berita di media massa yang memojokkan kelompok LGBTIQ.

"Aku kadang masih bisa nahan, tapi kadang-kadang kebawa emosi kalau komenannya udah kelewat," ujarnya dengan geram.

Kejadian terbaru terjadi pada Mei saat podcast milik Deddy Corbuzier mengangkat isu LGBTIQ yang mengundang pro-kontra di dunia maya. Ria nimbrung dengan menjelaskan identitas gender dan orientasi seksual itu tidak hanya perempuan dan laki-laki serta heteroseksual saja.



Febby Grasia, penyintas KBGO yang bekerja di salon dan dunia prostitusi. (Foto: Nuriyah Hanik Fatikhah)

Gender hanya konstruksi sosial dan LGBTIQ layak hidup seperti manusia lainnya. Namun, komentar Ria ini mendapat banyak serangan dari warganet.

"Dia [salah seorang warganet] bilang di kolom komentar dengan kata-kata 'Oh, ternyata gara-gara dia komplotan kaum sana, dasar bencong', 'Mati aja lu bencong', 'Kaum perusak bumi', 'Inget neraka noh', 'Kembali ke jalan yang bener, dasar benci', dan masih banyak lagi," terang Ria.

Bahkan ia mengaku sampai mendapat pesan lewat *direct message* (DM) dengan kata-kata serupa. Ria marah, namun dia harus menahannya karena percuma menanggapi orang-orang tersebut.

Cyber bullying yang dialami Ria berdampak cukup besar terhadap dirinya. Ia mengaku tidak mau membaca berita-berita media massa atau cuitan di media sosial soal LGBTIQ agar tidak terbawa amarah.

"Kalau kadang gak sengaja membaca, rasanya pengen balas dan ngasih tahu kalau kita itu ya sama kayak mereka, berhak hidup layak dan tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi, se bisa mungkin aku hanya bales orang yang mau diajak diskusi sehat aja, gak *judgement* dan cuma bertujuan bully," jelasnya.

Bagi Ria, dunia online menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Padahal lingkungan kerja dan sosial di Semarang sudah menjadi tempat yang cukup aman.

Maya Lathifa juga mengalami kekerasan di dunia online. Dengan suara yang terdengar tenang, ia ceritakan pengalamannya itu lewat telepon suara pada Selasa (21/06/2022).

Ia pernah mendapat ancaman pembunuhan lewat chat. Saat itu di tahun 2017, tiada angin tiada hujan, tiba-tiba Maya mendapat makian "macam-macam" melalui Facebook.

Padahal waktu itu dia sedang tidak mengunggah status apapun kecuali fotonya. Maya juga tidak sedang bermasalah dengan seseorang. Dia juga mengaku tidak sedang nimbrung di

komentar-komentar apapun yang membahas soal isu LGBTIQ.

"Aku gak merasa habis melakukan sesuatu yang berhubungan soal gender ya, tapi tiba-tiba ada orang chat mau membunuhku dan mau bakar aku," ujarnya.

"Aku masih inget dia bilang 'bencong lknat', 'Kamu dan kelompokmu itu halal dibunuh', 'Aku akan bakar kamu'. Gak tau salahku apa kok aku dikayak gituin," tambahnya.

Maya yang bekerja sebagai pengacara, tentu saja paham mengenai hukum. Dia tahu apa yang dialaminya termasuk bentuk ancaman yang dapat diproses melalui hukum.

Ketika ia mengatakan profesinya adalah pengacara yang disertai bukti foto-foto wisudanya, pelaku merasa ketakutan. Akhirnya pelaku kelimpungan dan mengajak Maya bertemu langsung untuk minta maaf. Ia juga mohon agar kasusnya tidak dibawa ke ranah hukum. Bahkan pelaku juga menawarkan kompensasi agar kasus pengancaman itu tidak dibawa ke jalur hukum.

"Aku meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, aku hanya khilaf dan iseng saja," kata Maya menirukan permohonan maaf si pelaku.

Tidak hanya sekali Maya mengalami ancaman di dunia online. Awalnya, seseorang mengajaknya berkenalan lewat Facebook. Ketika Maya mengaku seorang waria, orang itu langsung memaki-makinya hingga mengancam membunuhnya.

"Awalnya dia manis banget karena tahunya aku perempuan. Setelah aku ngomong kalau aku waria, dia langsung maki-maki aku, 'waria', 'mati aja lo!', 'aku bunuh kamu kalau ketemu', kayak gitu chatnya," jelas Maya.

Karena pelaku menggunakan akun asli yang mencantumkan tempat kerjanya, Maya mengatakan akan menuntut dan menemui pelaku di tempat kerja. Awalnya pelaku tambah marah dan balik mengancam. Tetapi setelah Maya mengatakan dirinya seorang pengacara, pelaku ketakutan dan memohon maaf.

Kedua kasus yang dialami Maya tidak pernah sampai ke

jalur hukum karena kedua pelaku telah meminta maaf. Bagi Maya yang penting pelaku meminta maaf dan menunjukkan itikad baik tidak mengulangi perbuatannya lagi.

"Ya, karena aku pengacara. Misal temen-temen lain yang bukan pengacara dan ngalamin kasus kayak gitu, pasti ketakutan. Pelaku juga gak bakal takut buat ngulangin perbuatannya lagi," tambah Maya.



Ria Ardana, penyintas KBGO dengan kasus cyber bullying. Waktu itu ia sedang magang di LBH Semarang. (Foto: Nuriyah Hanik Fatikhah)

Kepala Perwaris, Silvy Mutiari mengatakan anggota-anggotanya, termasuk Ria dan Maya sering mengalami kasus kekerasan di dunia online. Sayangnya, Perwaris belum mendata kasus-kasus yang dialami anggotanya secara rinci.

"Selama ini ada pertemuan rutin. Nah, temen-temen [di situ] sharing pengalamannya. Kalau misal butuh bantuan, kita siap bantu," ujar Silvy.

Dari semua kasus KBGO yang dialami anggota Perwaris belum ada yang sampai ke ranah hukum. Alasanya, seperti pelaku sudah minta maaf dan khawatir jika lapor ke polisi,

akan ada pasal yang malah menjadi bumerang bagi korban.

"Aku gak mau melaporkan kasusku ke polisi, ya males aja. Kayaknya ribet dan setahu kira pake UU ITE ya? Takutnya malah balik jerat kita? Pada beberapa kasus, malah dikatakan pencemaran nama baik" ungkap Ria.

Silvy mengerti sebenarnya kasus KBGO perlu mendapat perhatian serius karena mengganggu keamanan para waria yang menjadi korban. Dia juga menjelaskan kelompok waria rentan mengalami diskriminasi di dunia nyata dan jagad online.

Masih banyak masyarakat yang perspektifnya keliru soal LGBTIQ menjadi salah satu sebabnya. Pemberitaan di media massa juga masih sering memberikan stigma buruk terhadap LGBTIQ.

Namun, dia mengakui Perwaris belum mendata semua kasus dan melaporkan ke kepolisian. Mengenai bantuan hukum, Perwaris sudah berjejaring dan bekerja sama dengan LBH Semarang dan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA).

Kondisi Regulasi KBGO di Indonesia

Berangkat dari pengalaman menjadi penyintas KBGO, seorang aktivis bernama Dhyta Caturani, menggagas komunitas Task Force, sebuah kolektif yang menerima aduan kasus KBGO. Ia menggagas komunitas tersebut pada 2010, berawal dari pengalamannya mendapat ancaman pemerkosaan melalui Facebook.

Sejak tanggal 22 Maret 2021 hingga 23 Februari 2022, Task Force telah menerima 170 aduan. Tetapi karena ada beberapa kasus yang diadukan lebih dari satu kali, total kasus adalah 163. Domisili korban tersebar di seluruh Indonesia, tetapi paling banyak di Jawa Barat (43 kasus), DKI Jakarta (35 kasus), Jawa Timur (22 kasus), Banten (13 kasus), sedangkan Yogyakarta dan Jawa Tengah (9 kasus).

Kasus paling banyak adalah sextortion atau pemerasan agar korban mau melakukan tindakan seksual sesuai keinginan

pelaku, ada 91 aduan. Selanjutnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan (70 aduan), pemerasan (17 aduan), peretasan dan doxing (12 aduan), dan impersonasi akun (16 aduan). Selain itu, ada kasus pengunitan secara online, pengungkapan identitas gender dan orientasi seksual, *cyber grooming*, serta kasus penyadapan.



Dokumentasi saat penulis melakukan wawancara di rumah Kepala Yayasan Persatuan Waria Semarang atau Perwaris, Silvy Mutiari. (Foto: Nuriyah Hanik Fatikhah)

Sedangkan aduan KBGO yang dihimpun SAFEnet dalam periode tahun 2021-2022, ada 904. Tahun 2021 tercatat 621 kasus dan sampai Juni 2022, terdapat 283 kasus.

SAFEnet mencatat KBGO yang terjadi pada kelompok transgender ada 2 kasus. Penyebaran identitas dan pemerasan (tahun 2021) dan 1 kasus penyebaran konten intim nonkonsensual (tahun 2022).

Mayoritas korban yang tercatat pada aduan Task Force dan SAFEnet adalah perempuan. Namun, Eni Puji Utami dari Task Force mengatakan tidak dipungkiri kelompok minoritas seperti LGBTIQ juga rentan mengalami kekerasan di dunia online.

"Kasus yang tercatat [di Task Force] belum tentu adalah jumlah kasus yang sebenarnya [yang dialami korban]. Karena banyak yang gak tau harus lapor ke mana atau mereka belum menyadari apa yang dialaminya adalah kekerasan," jelas Eni, Minggu (26/06/2022).

Sugiyono dari SAFEnet sepakat dengan Eni, ia berpendapat kasus yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari yang dilaporkan. Begitu pula dengan kasus KBGO yang terjadi pada kelompok LGBTIQ.

"Aku yakin pasti kasus yang terjadi lebih banyak dari yang dilaporkan. Data yang dihimpun SAFEnet itu baru dari 26 Provinsi. Pasti masih ada kasus yang korban gak tau mau melapor ke mana," ujarnya, Kamis (30/06/2022).

Sementara itu, Eni mengatakan kasus yang diterima Task Force belum ada yang berlanjut ke kepolisian. Alasanya, regulasi yang mengatur soal KBGO ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru saja disahkan.

"Karena belum ada aturan turunannya, jadi di kepolisian itu beberapa kasus gak bisa diproses," jelasnya.

"Terus kalau pakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE] tidak semua kasus bisa masuk. Selain itu UU ITE, masih dirasa bermasalah. Misal, dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual, korban malah bisa kena pasal pornografi," tambahnya.

Selain itu, Eni menjelaskan penyintas juga akan kewalahan karena proses hukum di kepolisian yang lama. Tidak jarang pula respons kepolisian dinilai tidak solutif, seperti menyeruh penyintas mengganti nomor, alih-alih melacak pelaku kekerasan.

Sugiono menjelaskan kasus KBGO jarang sekali yang sampai ke jalur hukum. Hanya ada 6 kasus yang berkasnya sampai ke pengadilan, lainnya selesai melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi.

"Kalau ke jalur hukum, banyak polisi yang belum berperspektif

[menjadi] korban, jadi akhirnya malah menyulitkan korban," ujarnya.

Ahli hukum dari firma Hukum Sukirtnasari Chritina Wulandari (SCW), Anastasia Sukirtnasari atau Kiki menjelaskan penyelesaian kasus KBGO melalui jalur hukum memang rumit dan susah. Apalagi ketika UU TPKS belum disahkan.

"Penyelesaian kasus KBGO yang aku tangani memakan waktu dua tahun," terang Kiki.

Sekarang kasus KBGO bisa ditangani dengan UU TPKS. Kelebihannya, landasan hukum ini mengatur bahwa saksi korban adalah saksi. Dalam undang-undang sebelumnya seperti UU KUHP, kasus kekerasan seksual bisa diproses jika minimal ada dua saksi.

"Namun, ya implementasi UU TPKS masih perlu dikawal terus karena baru saja disahkan. Belum ada kasus KBGO yang saya tangani setelah UU TPKS disahkan, jadi belum tahu implementasinya bagaimana. Kasus yang saya tangani waktu itu masih memakai UU ITE," jelas Kiki.

Ia mengatakan ketika korban melaporkan kasus KBGO ke kepolisian, ia harus memiliki bukti yang cukup agar laporannya diterima. Pembuktian kasus KBGO juga cukup sulit karena harus menggandeng ahli teknologi informasi (TI). Tidak jarang pencarian bukti juga mengalami kendala karena kurangnya alat.

"Kalau tidak bawa bukti yang cukup, polisi pasti tidak mau menerima kasusnya. Padahal seharusnya itu jadi tugas polisi ya, tapi ya kita tahu sendiri banyak polisi yang belum punya perspektif korban," tambahnya.

Febby, Ria, dan Maya sepakat kasus KBGO yang berdampak serius terhadap korban harus bisa diselesaikan secara hukum. Apalagi bagi kelompok LGBTIQ yang masih rentan mengalaminya.

"Aku pengen hidup tanpa diskriminasi baik di dunia nyata dan online. Kami layak mendapatkan hak-hak kami sebagai manusia pada umumnya," pungkas Ria.

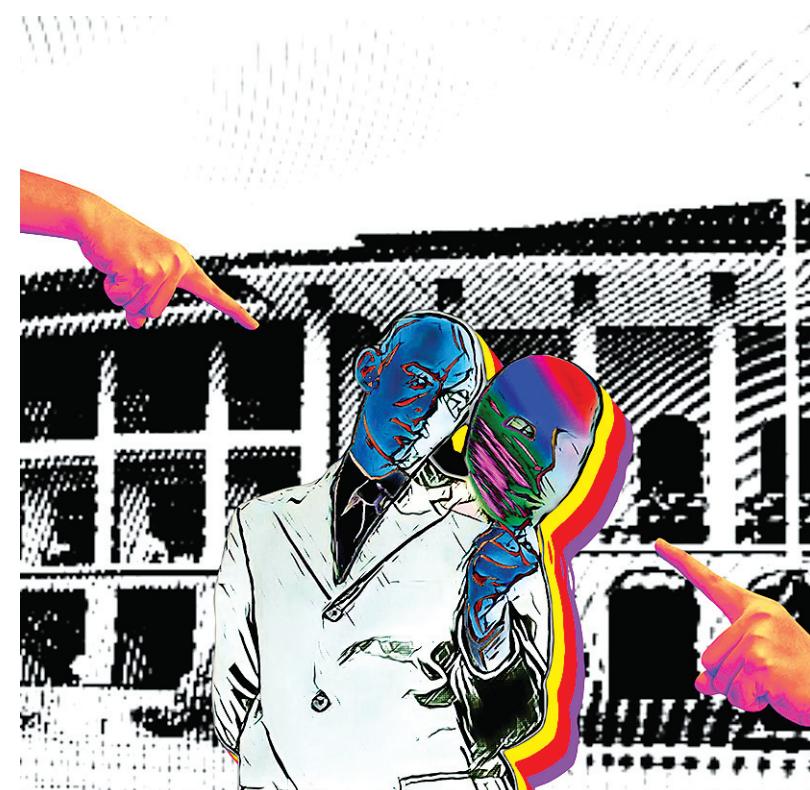
INSTITUSI PENDIDIKAN

Katanya Inklusif, Ternyata Homophobic

Oleh: Michelle Gabriela Momole

Dimuat di situs bpmpijar.com, 19 Juli 2022

"Selepas lulus SMA, serasa ada kebebasan baru yang dijanjikan dalam dunia perkuliahan," ujar Tama ketika kembali mengingat masa itu.



Kalimat tersebut mengembalikan ingatannya belasan tahun silam, ketika dirinya menjadi mahasiswa baru di salah satu fakultas sosial humaniora Universitas Gadjah Mada (UGM). Tama ingat betul perjuangannya masuk ke perguruan tinggi itu tidak mudah. Ia harus membayar biaya pendaftaran kuliah dengan menggunakan uang tabungannya sendiri.

Awalnya, Tama tidak diizinkan untuk kuliah jauh dari kampung halamannya di Malang. Namun, ia bertekad tetap kuliah di UGM dan rela menyisihkan uang jajannya untuk biaya pendaftaran kuliah.

Tekad Tama ini tidak semata-mata didasari ingin masuk perguruan tinggi ternama itu. Tetapi juga karena dorongan dari bayang-bayang memori menakutkan masa remajanya, ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Saat itu, Tama sedang menghadapi pergulatan batin terkait pilihan identitas biner antara laki-laki dan perempuan biologis.

"Kok aku beda, ya?"

"Kenapa aku gak suka tampil feminim, ya?"

"Kenapa aku tidak tertarik dengan laki-laki, ya?"

Tama tumbuh di lingkungan yang mengamini pandangan heteronormativitas. Ini pandangan yang mengasumsikan biner gender (hanya ada dua jenis kelamin, laki dan perempuan yang berbeda dan berlawanan) dan bahwa hubungan seksual, serta perkawinan normal adalah antara orang-orang dari lawan jenis. Pandangan ini melibatkan penyelarasan jenis kelamin biologis, seksualitas, ekspresi gender, identitas gender, dan peran gender.

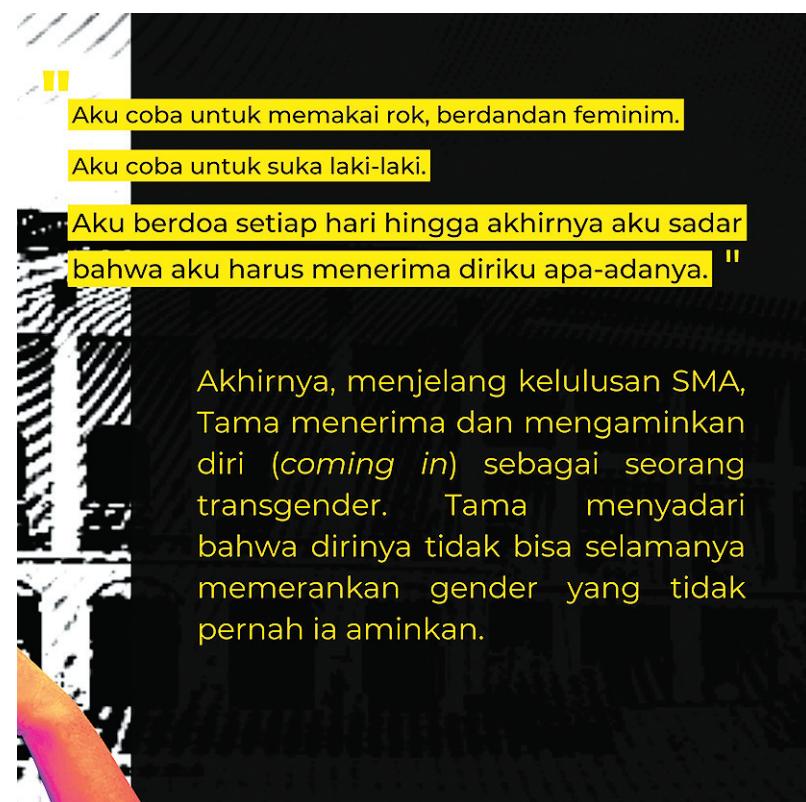
Menurut pandangan ini, ketika Tama terlahir sebagai perempuan biologis, maka ia harus berpenampilan feminim dan memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, begitu pula sebaliknya. Pandangan ini sotak menimbulkan berbagai pertanyaan terkait identitas diri dalam benaknya karena

bertolak belakang dengan keinginan batinnya.

Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Pertanyaan-pertanyaan itu seakan terkubur ketika seisi sekolah digegerkan oleh kabar seorang guru yang menjalin hubungan asmara sesama jenis. Kabar itu langsung menjadi pergunjingan panas seisi sekolah.

Semua pandangan buruk mengarah kepada guru itu, ejekan dan caciannya tidak luput darinya. Hal itu membuat Tama menimbun pertanyaan-pertanyaan terkait identitas diri dalam benaknya.

"Oh, jadi begitu perlakuan mereka ketika melihat orang yang 'beda'?"



Kejadian itu diperparah dengan nasib buruk yang menghampiri guru tersebut. Karena menjalin asmara sesama jenis, guru yang bersangkutan dimutasi ke daerah terpencil oleh yayasan tempat Tama bersekolah.

Kabar itu semakin membuatnya cemas. Ia takut jika sewaktu-waktu nasib buruk juga menghampiri dirinya. Oleh karena itu, Tama berusaha menjadi ‘sama’ seperti teman-teman perempuannya hingga masuk Sekolah Menengah Atas (SMA)

“Aku takut,” ucapnya mengingat kejadian itu.

Namun, selayaknya bom waktu, pergulatan batin dan pertanyaan terkait identitas diri tidak bisa selamanya ia timbul. Sekuat apapun Tama berusaha membohongi dirinya sendiri, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tetap mengusik pikirannya.

“Aku coba untuk memakai rok, berdandan feminim.”

“Aku coba untuk suka laki-laki.”

“Aku berdoa setiap hari hingga akhirnya aku sadar bahwa aku harus menerima diriku apa-adanya,” ucapnya lirih.

Akhirnya, menjelang kelulusan SMA, Tama menerima dan mengaminkan diri (*coming in*) sebagai seorang transgender. Ia menyadari dirinya tidak bisa selamanya memerankan gender yang tidak pernah ia inginkan.

Perjalanan dan pergulatan batin Tama menerima identitas gendernya tidak mudah. Ia harus keluar dari konstruksi gender heteronormatif dan dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang tidak ramah terhadap LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer) dan memori menakutkan masa SMP.

Inilah yang mendasari tekad Tama kuliah di UGM. Dengan pergi jauh dari kampung halamannya, ia berharap dapat diterima dan menempuh pendidikan dengan rasa aman dan nyaman.

Namun, harapan tersebut ternyata tinggal harapan. Setelah diterima sebagai mahasiswa baru pada tahun 2007, Tama

menghadapi perlakuan buruk dari dosen dan temannya karena ekspresi gendernya tidak sesuai dengan norma biner heteronormatif.

“Setiap hari aku menjadi bahan olokohan oleh teman maupun dosen,” ucapnya.

Pada tahun pertama kuliah, dosen memanggil satu per satu mahasiswa untuk mencatat kehadiran. Saat itulah dosen dan seisi kelas meledek ekspresi gender Tama.

“Kamu itu laki-laki atau perempuan?” tanya dosen itu dengan nada meledek.

Pertanyaan tersebut direspon oleh suara tawa terkekeh-kekeh dari seisi kelas. Nama Tama seakan sengaja dipanggil berulang kali untuk dijadikan bahan bercandaan.

“Namaku sengaja dipanggil terus dan dijadikan bahan candaan oleh dosen dan teman sekelas,” jelasnya.

Lontaran-lontaran semacam itu, tidak hanya dialami dalam ruang kelas. Ketika mengurus Kartu Rencana Studi (KRS) ke bagian akademik fakultasnya, lontaran semacam itu juga ia terima.

“Koe ki lanang po wedok?”

“Nek wedok kok koyo ngono?” ucap petugas itu dengan gelak tawa.

Perlakuan dan lontaran semacam itu terkesan sepele bagi kaum cisgender, tetapi bagi Tama perlakukan itu seakan membunuhnya secara perlahan.

“Perlakuan itu jauh lebih diskriminatif karena merenggut rasa aman dan membunuhku perlahan,” jelasnya.

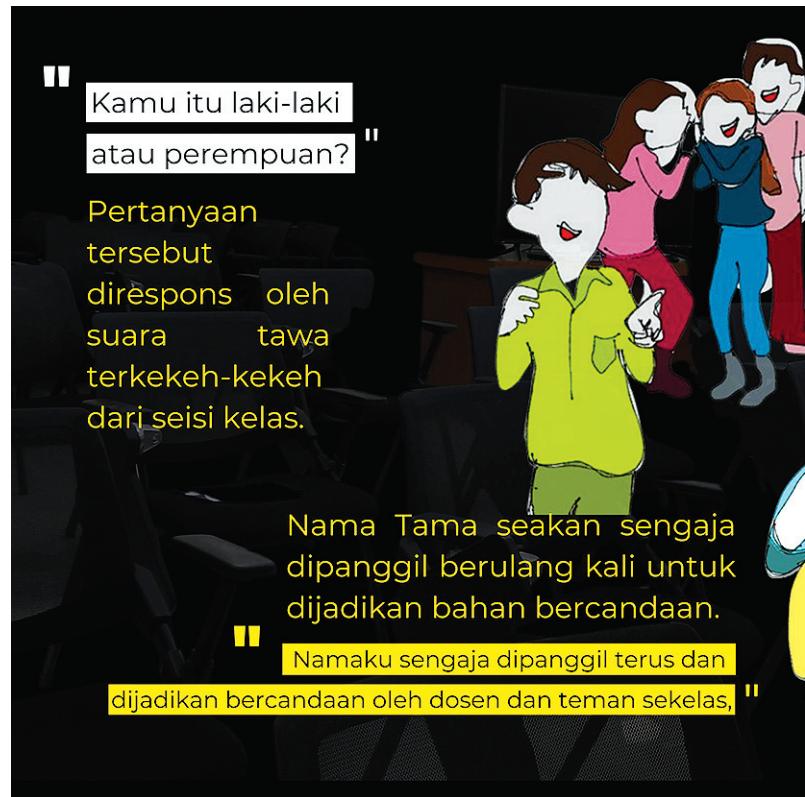
Ia juga menceritakan dirinya terhambat untuk berorganisasi di kampus. Saat itu, dominasi kelompok kanan konservatif sangat kuat dan membuat posisinya semakin terhimpit.

“Aku jadi tidak punya teman di kampus.”

“Aku tidak hanya terdepak dari ruang-ruang kelas, tetapi juga dari organisasi-organisasi di kampus,” lanjutnya.

Perlakuan buruk yang ia alami terus-menerus mengganggu

kesehariannya dalam menempuh pendidikan. Situasi ini semakin diperparah dengan keluarga yang tidak bisa menerima identitas gendernya.



Tama menceritakan, ketika masa libur panjang selepas ujian akhir semester dua, dia pulang ke kampungnya di Malang. Waktu itu, kedua orangtuanya bertanya tentang identitas gendernya.

Malam itu terasa begitu panjang bagi Tama. Kedua orangtuanya yang tidak biasa berbincang, tiba-tiba mengajak duduk bersama di ruang keluarga. Suasana seketika senyap, saat mereka bertanya soal orientasi seksual Tama.

"Kamu pacaran dengan perempuan?" tanya orang tuanya.

Tama pun terdiam sesaat, sempat terlintas dalam pikirannya untuk mengelak. Namun, hal itu ia tepis, "Jika orangtuaku harus tahu, maka ini waktunya."

Tama mengakui itu benar dan menjelaskan dirinya adalah seorang transgender. Mendengar itu, dua orangtuanya menangis histeris dan menyuruh Tama segera bertobat.

"Aku cukup sedih mendengar respon mereka."

Setelah kejadian malam itu, ia dilarang kembali ke Yogyakarta. Larangan tersebut membuat Tama harus kabur dari rumah untuk melanjutkan kuliah di UGM. Kemarahan orangtuanya malam itu, menyebabkan ia tidak dibiayai kuliah lagi.

Waktu itu, peraturan UGM belum memperbolehkan Tama cuti karena masih semester tiga. Alhasil, ia harus bekerja keras, mengais rupiah guna membayar biaya kuliah. Meskipun sudah bekerja, biaya kuliah masa itu masih terlalu mahal baginya.

"Saat semester tiga dan empat aku hanya mampu membayar biaya semesteran dan mengambil 2 SKS (Satuan Kredit Semester) supaya aku tetap terdaftar sebagai mahasiswa," jelasnya.

Selama satu tahun, Tama hanya membayar 2 SKS tanpa mengikuti kegiatan perkuliahan. Keterbatasan ekonomi membuat ia harus bekerja lebih keras agar dapat melanjutkan kuliah.

Tahun 2010, ia dapat kembali kuliah dengan hasil jerih payahnya sendiri. Tetapi ia ternyata harus menghadapi kondisi buruk lagi. Lingkungan kampus yang ditinggalkannya selama setahun ternyata masih sama. Pada hari pertama masuk kelas, Tama mendapat olok-an, sama seperti dahulu.

"Aku justru semakin diolok-olok karena ekspresi genderku semakin mencolok."

"Aku harus menghadapi perlakuan itu berulang kali dan itu sangat menyakitkan," lanjutnya.

Perlakuan buruk yang terus-menerus ini membuatnya tidak

aman untuk melanjutkan pendidikan di UGM. Waktu itu dosen sering mengeluarkan candaan bernada homophobic di dalam kelas.

"Bercandaan seperti itu membuat kami, LGBTIQ, merasa tidak aman di situ," tambahnya.

Akhirnya, ia memutuskan tidak melanjutkan pendidikan di UGM pada tahun 2011.

"Aku sudah capek diperlakukan seperti itu, perlakuan itu membuatku tidak nyaman dan menghambat proses belajarku," ucapnya sambil menghela nafas.

Sekitar tahun 2014/2015 Tama drop out (DO) dari fakultasnya karena tidak menyelesaikan masa studi. Padahal dalam ranah akademik, ia tidak mengalami kendala. Bahkan Indeks Prestasi Kumulatif Tama mencapai 3,80/4,00 pada tahun pertama kuliah.

Dikeluarkan dari kampus dan tidak mengantongi gelar sarjana tentu berdampak bagi keberlangsungan karirnya. Peluang memperoleh pekerjaan menjadi sangat terbatas karena ia belum mendapat gelar sarjana.

"Sekarang aku bekerja di NGO (non governmental organization) bidang hak asasi manusia, tetapi aku sering terbentur persyaratan administrasi ketika mengajukan diri menjadi konsultan," jelasnya.

Menghina seseorang karena ekspresi gendernya nonheteronormatif dapat mempengaruhi masa depan seseorang, sebagaimana dialami Tama. Menurutnya, institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang menggaungkan inklusivitas, seharusnya menghapuskan segala lapis penindasan yang menghambat seseorang untuk mengakses pendidikan.

"Jika prinsipnya semua orang berhak mengakses pendidikan, seharusnya semua penghalang juga ditiadakan. Misal, stigma dan diskriminasi terhadap LGBTIQ."

"Toh, seksualitas seseorang tidak berkorelasi dengan kemampuan akademiknya," sambungnya.



Diskriminasi Terus Berlanjut

Buku Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi terhadap LGBTIQ yang diterbitkan oleh Arus Pelangi menyebutkan perundungan (bullying) menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap LGBTIQ dalam lingkup institusi pendidikan.

Diskriminasi sendiri diartikan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU HAM sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Hasil riset yang dilakukan oleh Timo Duile, dosen dan peneliti di Institut Studi Oriental dan Asia, Universitas Bonn, Jerman, menunjukkan setidaknya ada 18 kasus diskriminasi terhadap LGBTIQ di lingkup perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015-2021. Bentuk diskriminasi ini, antara lain wacana pemberhentian staf dan mahasiswa yang menjadi bagian dari LGBTIQ, demo terhadap mahasiswa anti LGBTIQ yang juga didukung kampus, serta pembubaran diskusi akademik dengan tema terkait hak komunitas LGBTIQ.

Riset di atas menunjukkan beberapa perguruan tinggi terbaik Indonesia versi Quacquarelli Symonds World University Ranking juga turut melakukan tindak diskriminasi terhadap LGBTIQ. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada tanggal 22 Oktober 2016, Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII) UGM membatalkan diskusi tentang komunitas Himpunan Mahasiswa Gay (HIMAG). Diskusi ini dibatalkan setelah panitia berkomunikasi dengan pihak forum komunikasi dan rektorat UGM. Kepala Departemen Penalaran UKM UPII UGM, Wahyu Nurbandini mengatakan diskusi tersebut dibatalkan karena dianggap kontroversial.

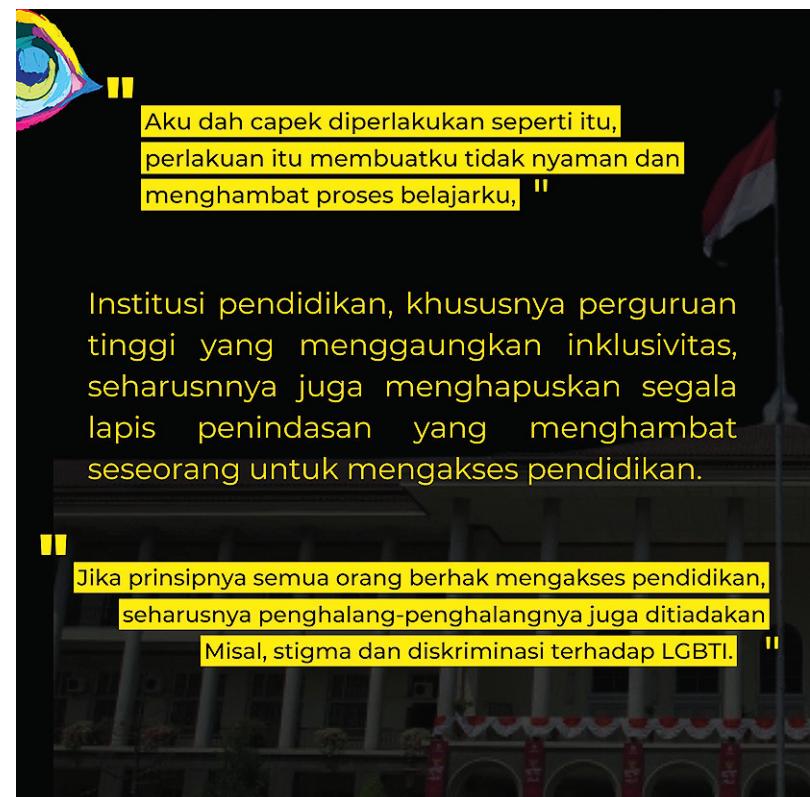
Dikutip dari rappler.com, Kepala Bidang Humas dan Protokoler UGM Iva Ariani menyatakan diskusi tersebut tidak mendapatkan izin. UGM juga tidak mengenal organisasi yang mengatasnamakan kaum gay atau LGBTIQ dalam struktur organisasi kemahasiswaan.

Dalam tanggapannya, Wahyu menyatakan kegiatan ini adalah diskusi ilmiah yang merupakan bagian dari program kerja UPII, yakni diskusi mingguan. Selain itu, Wahyu juga menegaskan HIMAG memang bukan komunitas yang mengatasnamakan UGM.

Selepas pembatalan diskusi UPII, organisasi People Like Us Satu Hati (PLUSH) mendapat laporan terkait tindak intimidasi yang dialami oleh seorang mahasiswa UGM yang saat itu menjadi anggota HIMAG. Mahasiswa tersebut melaporkan kepada PLUSH, dirinya diancam oleh seorang dosen karena ekspresi genderanya nonheteronormatif.

"Kamu kalau mau lulus, gak usah aneh-aneh," ucap dosen tersebut.

Intimidasi tersebut suntak membuat geger seluruh anggota HIMAG. Akhirnya, pengurus HIMAG memutuskan tidak meneruskan kasus ini dan menonaktifkan grup mereka karena ancaman dari pihak eksternal.



Menurut penjelasan PLUSH, HIMAG bukan organisasi yang aktif dan mengatasnamakan kampus. HIMAG sendiri merupakan ruang aman bagi teman-teman LGBTIQ dan anggotanya tidak terbatas hanya mahasiswa UGM. Namun, akibat dari intimidasi tersebut, ruang aman bagi teman-teman HIMAG dibrangus.

Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Dina Kariodimedjo menyatakan pihaknya tidak tahu apakah tindak intimidasi yang dialami oleh salah seorang anggota HIMAG itu terjadi secara sistemik atau sebatas dorongan pribadi dari keyakinan pribadi dosen tersebut.

"Apakah tindakan itu merupakan respon UGM atau upaya pribadi dari seorang oknum dosen, saya tidak bisa mengkonfirmasinya," ucapnya.

Ia menegaskan, prinsipnya UGM menghormati dan menghargai semua manusia dengan segala perbedaannya. UGM juga berpegang pada statutnya, undang-undang, dan norma-norma sosial yang ada.

Kampus Melanggengkan Diskriminasi

Pipin Jamson, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM, menyatakan diskriminasi terhadap LBGTIQ dalam lingkup institusi perguruan tinggi dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Hampir di seluruh Indonesia, institusi perguruan tinggi menggunakan pola penyerangan secara individu terhadap LBGTIQ.

"Institusi perguruan tinggi melakukan diskriminasi kepada LBGTIQ dengan cara membatasi ekspresi, stigma buruk, dan pernyataan publik oleh pejabat kampus," ungkapnya.

Terkait stigma buruk, Pipin menjelaskan diskriminasi itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membatasi individu maupun kelompok LBGTIQ menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

"Seseorang yang tidak sesuai dengan heteronormatif langsung dianggap tidak pantas menjadi *civitas academica*.

Hal ini sangat problematik ketika orientasi seksual seseorang dianggap sebagai patologi," jelas Pipin.

Ia juga menjelaskan perundungan terhadap individu LBGTIQ adalah bentuk diskriminasi. Pasalnya perundungan (bullying) tersebut secara spesifik menyasar orientasi seksual dan ekspresi gender seseorang.

institusi perguruan tinggi menggunakan pola-pola penyerangan secara individu terhadap LBGTI yang berlaku jamak di perguruan tinggi hampir seluruh Indonesia.

"
Institusi perguruan tinggi melakukan
diskriminasi kepada LBGTI dengan cara
pembatasan ekspresi, stigma buruk,
dan pernyataan publik oleh pejabat kampus"

"
Bullying yang menukik tajam ke urusan
SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity
and expression and Sex Characteristics)
seseorang adalah diskriminasi."

"Bullying yang menukik tajam ke urusan SOGIE-SC (sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics) seseorang adalah diskriminasi."

Ia menggambarkan diskriminasi terhadap LBGTIQ di UGM tahun 2016. Mulai dari pelarangan diskusi hingga spanduk

tolak LGBTIQ yang terpampang di masjid kampus UGM. Dampaknya LGBTIQ yang sedang menempuh pendidikan di UGM seakan tercekit dari hulu hingga hilir.

"Ini membuat siapapun yang menjadi bagian dari LGBTIQ merasa tidak aman untuk menempuh pendidikan," ucapnya.

Situasi waktu itu, seperti dikutip detiknews.com, jadi makin buruk saat Rektor UGM, Panut Mulyono melarang kelompok LGBTQ berkegiatan secara resmi di kampus.

"Secara moral kita mengarahkan, kemudian kegiatan terkait dengan itu (LGBTIQ) tidak boleh ada di kampus secara resmi, secara terbuka begitu," tegas Panut.

Menanggapi hal tersebut, Pipin menegaskan pernyataan publik yang disampaikan oleh pejabat kampus, mempertegas diskriminasi yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi terhadap LGBTIQ.

"Pernyataan itu sendiri sudah menjadi bentuk diskriminasi, sebab pernyataan seorang pejabat kampus merupakan cerminan posisi politik mereka," jawab Pipin.

Riset yang dilakukan oleh Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia) menemukan ada 18 kasus ujaran kebencian dari Desember 2015 hingga April 2017 yang dilontarkan pejabat tinggi kampus melalui pernyataan-pernyataan yang menstigmatisasi LGBTIQ di lingkungan pendidikan tinggi.

Hal ini berdampak meningkatkan prasanga yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan mempengaruhi pandangan akademisi muda terkait isu keragaman. SGRC Indonesia menyatakan pernyataan-pernyataan demikian juga berdampak buruk pada penerimaan diri remaja dan muda dewasa yang teridentifikasi sebagai LGBTIQ.

Diskriminasi yang terus-menerus dilakukan oleh institusi perguruan tinggi terhadap LGBTIQ, secara tidak langsung dapat membatasi karir. Ini dialami oleh Tama.

"Melanggengkan diskriminasi terhadap LGBTIQ sama saja

membatasi opsi-opsi pengambangan diri dan karir secara profesional seorang manusia," tegas Pipin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan diskriminasi terhadap LGBTIQ di banyak perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga dosen.

Menurut temuannya, Pipin mengungkapkan seorang yang melela (*coming out*) ke publik sebagai seorang LGBTIQ bahkan tidak diterima sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi.

"Padahal secara administratif, dia lolos. Dia juga mempublikasi hasil penelitian yang bagus, tetapi hanya karena cara berpakaian yang nonheteronormatif lalu tidak lolos," jelas Pipin.

Diskriminasi terus-menerus yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi terhadap LGBTI, secara tidak langsung dapat membatasi karir, seperti yang dialami oleh Tama.

"Melanggengkan diskriminasi terhadap LGBTI sama saja membatasi opsi-opsi pengambangan diri dan karir secara profesional seorang manusia"

Pipin menegaskan bahwa nilai yang harus dipegang oleh institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi adalah nilai kemanusiaan.

"Jika kita berbicara tentang kemanusiaan, apakah nilai kemanusiaan didasarkan pada tolak ukur norma heteronormatif?"

Institusi perguruan tinggi yang melanggengkan diskriminasi terhadap LGBTIQ, menurut Pipin, tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang homophobic. Ketika sistem masyarakatnya homophobic dan diskriminatif, maka institusi perguruan tinggi juga turut mempraktekkan hal tersebut.

"Baik masyarakat dan institusi perguruan tinggi, keduanya saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain," ujarnya.

Padahal ketika suatu institusi perguruan tinggi mengejar World University Ranking, maka salah satu indikator pentingnya adalah menjadi kampus yang humanis.

"Untuk menjadi kampus yang humanis dilakukan dengan menerapkan kebijakan nondiskriminatif. Hal ini bertolak belakang dengan praktik diskriminatif terjadi di institusi perguruan tinggi," tambahnya

Menurutnya, institusi perguruan tinggi seharusnya tidak hanya bicara tentang nama baik, tetapi juga mengusahakan transformasi masyarakat yang adil dan berperspektif kemanusiaan terlepas dari apapun identitas gendernya.

"Ketika perguruan tinggi memiliki perspektif kemunusiaan: *humanity about all, about identity across everything*, maka seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap LGBTIQ bahkan dalam lingkup perguruan tinggi yang berbasis agama sekalipun."

SGRC Indonesia juga menyampaikan perguruan tinggi sebagaimana namanya seharusnya menghasilkan pemikir-pemikir ulung yang berpikiran terbuka dan mampu mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh.

Pipin menegaskan nilai yang harus dipegang oleh institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi adalah nilai kemanusiaan. "Jika kita berbicara tentang kemanusiaan, apakah nilai kemanusiaan didasarkan pada tolak ukur norma heteronormatif?"

Kini, Tama bekerja di salah satu NGO yang bergerak di bidang HAM dengan fokus terhadap isu LGBTIQ. Memori

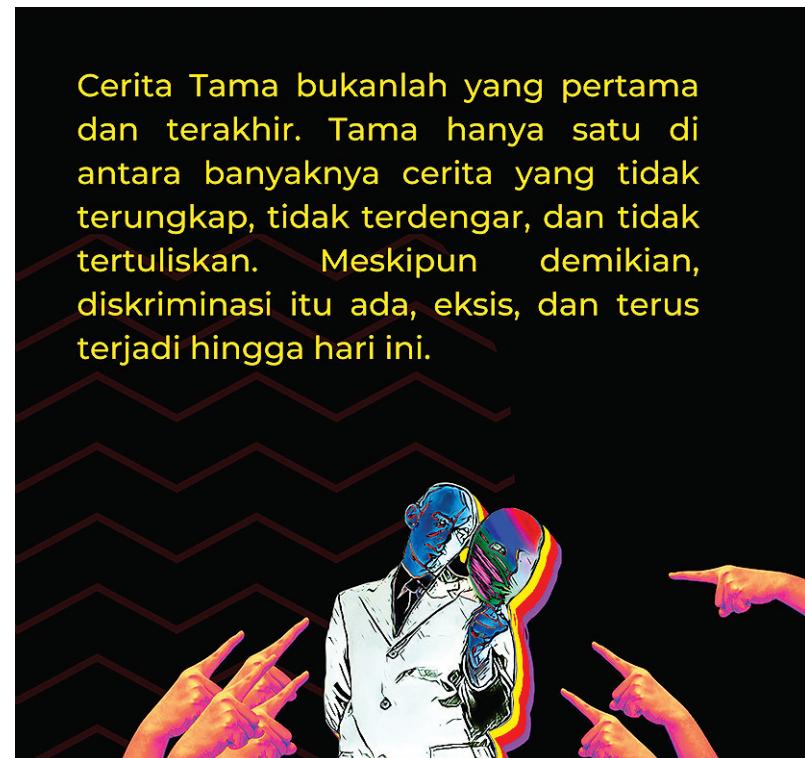
pahitnya pada masa lalu membakar semangatnya untuk terus bergerak mengadvokasi dan mengupayakan kesetaraan bagi teman-teman LGBTIQ.

"Aku berpesan untuk teman-teman LGBTIQ di luar sana, jangan pernah merasa sendiri. Kita tidak salah dengan identitas gender dan orientasi seksual kita."

Ia juga berharap suatu hari nanti, dirinya tidak lagi mendengar kabar seorang manusia yang dipersekusi dan didiskriminasi atas dasar identitas gendernya.

Cerita Tama bukanlah yang pertama dan terakhir. Ia hanya satu di antara banyaknya cerita yang tidak terungkap, tidak terdengar, dan tidak tertuliskan. Diskriminasi itu ada, eksis, dan terus terjadi hingga hari ini.

Cerita Tama bukanlah yang pertama dan terakhir. Tama hanya satu di antara banyaknya cerita yang tidak terungkap, tidak terdengar, dan tidak tertuliskan. Meskipun demikian, diskriminasi itu ada, eksis, dan terus terjadi hingga hari ini.



BAB 3

KISAH KELOMPOK MINORITAS DI ACEH

BOM WAKTU INTOLERANSI DI ACEH SINGKIL

Larangan Pendirian Gereja Berbalut Aturan Qanun

Oleh: Mawa Kresna (jurnalis Project Multatuli)

Dimuat di Project Multatuli, 30 September 2022

BOAS TUMANGGER bolak-balik protes soal bau durian yang tak kunjung hilang dari mobil. Semalam mobilnya itu dipinjam untuk mengangkut durian.



Sisa bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Suka Makmur yang dibakar kelompok orang yang menamakan diri Gerakan Peduli Aceh Singkil. Oktober 2015 (Foto: Mawa Kresna)

"Ah bau durian ini, nggak hilang-hilang," katanya dengan dialek khas Batak yang kental. "Kek mana lah *ngilangin* baunya," katanya, sembari membuka kaca jendela lebih lebar.

Belakangan Boas sering sial jika berurusan dengan mobil. Beberapa hari sebelumnya, spion kiri mobilnya patah ditabrak entah siapa, saat parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Saat itu, ia sedang mengajak dua dari delapan anaknya belanja. Perjalanan dari rumahnya di Sanggaberu, Aceh Singkil, ke Medan kira-kira butuh waktu tujuh jam.

Sayangnya tidak ada CCTV di area itu, petugas keamanan pun cenderung tak mau tahu.

"Siapa yang bertanggung jawab ini, Pak?" katanya pada petugas keamanan.

Petugas keamanan memberikan jawaban yang berbelit-belit. Intinya penanggung jawab tidak ada di tempat, dan mereka hanya bisa membantu dengan mengelem spion agar bisa dipakai pulang ke Sanggaberu.

Boas tak terima. Ia mendesak petugas keamanan menghubungi komandan keamanan dan pengelola parkir. Alih-alih meminta maaf, Boas malah disodori Rp2 juta sebagai uang damai dan ganti rugi. Perlakuan itu justru membuatnya naik pitam.

Seandainya pengelola parkir mau menemuinya, meminta maaf, dan memperbaiki spionnya, ia tidak akan membuat urusan ini jadi panjang.

"Ini bukan cari-cari masalah. Sudah banyak masalahku."

Sepulang dari Medan dengan spion yang akhirnya ia perbaiki sendiri, ia masih belum juga mendapat kabar apapun dari pengelola parkir.

"Kalau perlu saya ke Medan cuma mengurus ini saja bakal saya lakukan, biayanya pasti lebih mahal dari beli spion baru. Kalau waktu itu mereka bertanggung jawab dengan baik, *ngasih* Rp150 ribu buat beli spion bekas gantinya pun saya nggak masalah. Tapi ini lah..."

Boas tak pernah menyadari ada yang berubah dari dirinya, sampai kejadian dengan spion itu. Ia mengakui, ada bagian dalam dirinya yang berapi-api jika mendapat perlakuan tidak adil, terutama dari orang atau kelompok yang punya kuasa. Hal sepele pun akan ia perpanjang demi mendapat keadilan.

"Mungkin ini dampak peristiwa Oktober 2015 yang tidak pernah saya sadari. Mungkin saya haus dengan rasa keadilan, sesuatu yang mungkin tidak bisa dapatkan di sini, lalu saya lampiaskan ke hal yang lain," ujarnya.

Peristiwa 13 Oktober 2015 yang disebut Boas itu merujuk pada pembongkaran dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Saat itu ratusan orang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil menggelar aksi penolakan terhadap gereja-gereja yang tidak berizin. Aksi itu berujung pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Suka Makmur dan bentrok di Dangguran. Seorang massa aksi meninggal dalam bentrok itu.

Peristiwa tersebut berdampak panjang dan semakin mempersempit izin pendirian gereja. Setahun setelah kejadian, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Qanun ini berlandaskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam Qanun memuat kewajiban tambahan dalam mendirikan rumah ibadah, yakni mendapatkan persetujuan dari 110 orang warga yang bukan pengguna rumah ibadah. Pasal tersebut tidak berlaku untuk pendirian rumah ibadah umat Islam.

Sejak Qanun berlaku, pendirian gereja di Aceh Singkil semakin tak ada harapan.

Umat Kristiani di Sanggaberu berusaha memupuk harapan

yang nyaris pupus. Harapan itu bernaung pada bangunan semi permanen dengan atap seng dan tiang besi yang kini difungsikan sebagai tempat ibadah Minggu oleh jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Sanggaberu. Lokasinya ada di seberang rumah Boas, di antara kebun sawit dan pemakaman warga Kristen.

Sementara bangunan gereja yang sebelumnya ada sudah rata dengan tanah, hanya pondasi yang masih terlihat di balik semak-semak ilalang.



"Di situlah kami ibadah. Lihat itu atapnya. Tadinya di dalam kebun sawit, itu yang pakai terpal," ujar Boas.

Kondisi beberapa gereja lain di Aceh Singkil nyaris serupa. Gereja HKI Suka Makmur misalnya, setelah dibakar massa, warga jemaat mendirikan bangunan semi permanen untuk ibadah hari Minggu. Sepintas bentuk bangunan semi permanen itu lebih mirip tenda untuk acara hajatan ketimbang tempat untuk beribadah.

Sejak peristiwa itu, Boas bersama Forcidas (Forum Cinta Damai Aceh Singkil) mengupayakan berbagai cara agar warga Kristen di Aceh Singkil bisa mendirikan gereja dan beribadah dengan nyaman. Selain itu, yang terpenting, meredam konflik

supaya tidak terjadi lagi peristiwa Oktober 2015.

Peluru Nyasar dan Vonis Janggal

PAGI ITU, kabar pembakaran gereja HKI di Suka Makmur sudah sampai ke telinga warga Kristen di Dangguran. Dengan segera mereka membuat barikade di depan jalan masuk kampung, menghadang massa intoleran agar tidak membakar gereja yang ada di dalam kampung.

Wahid, salah seorang warga, sudah bersiap. Ia membawa senapan angin yang biasanya dipakai untuk berburu babi hutan. Senjata itu mirip dengan senapan angin pada umumnya, namun memiliki peluru yang sedikit lebih besar. Ia berjaga di antara pepohonan, di kiri dan kanan tanjakan pertama menuju Dangguran, bersama beberapa orang lainnya yang juga memiliki senapan angin.

Wahid dan kawan-kawannya berencana nekat. Jika massa berhasil menjebol barikade warga, maka tembakan akan dilepaskan.

"Orang itu sudah membakar gereja di Suka Makmur, nggak mungkin kami biarkan membakar gereja kami juga," kata Wahid.

Begitu massa tiba, bentrok langsung tak terhindarkan. Wahid lepaskan beberapa tembakan beberapa arah, namun, meleset karena jarak tembak terlalu jauh. Maksimal senapan angin itu hanya bisa membidik dengan akurat pada jarak 50 meter, sementara jarak posisi Wahid berdiri ke lautan massa lebih jauh dari itu.

Di tengah ricuh itu, tiba-tiba seseorang tumbang. Massa mundur. Kabar yang beredar, orang yang tumbang itu kena tembak pada bagian kepala tetapi belakangan diketahui ia tertembak di bagian dada. Samsul, nama orang tertembak itu, meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit.

Penembakan tersebut membuat suasana Dangguran mendadak mencekam. Polisi agresif mencari pelaku penembakan. Setelah

beberapa orang diciduk dan diminta keterangan, Wahid kena diciduk. Polisi menuding Wahid sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Samsul.

Wahid tak yakin Samsul tewas karena pelurunya, meski ia sadar telah melepaskan tembakan. Kala itu Wahid memilih untuk mengorbankan dirinya, ketimbang lebih banyak lagi warga yang digaruk polisi. Ia akhirnya mengaku bahwa ia satu-satunya yang melepaskan tembakan saat bentrok terjadi.

Pengakuan itu berujung pada vonis 6 tahun dipotong masa tahanan. Selama proses persidangan, tak ada barang bukti dan saksi yang dihadirkan. Ketiadaan itu menimbulkan kejanggalan. Kuasa hukum Wahid, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan vonis itu berdasarkan prasangka bukan fakta.

"Saya yakin bukan saya, di pengadilan tidak ada bukti peluru tidak ada saksi yang bilang saya yang menembak korban. Ini jadi cuma prasangka, karena saya membawa senjata dan menembak, bukan berarti saya yang menyebabkan kematian itu," ujar Wahid.

Saat vonis dijatuhan, istri Wahid tengah hamil anak ketiga. Kondisi itu membuat Wahid benar-benar frustrasi di dalam penjara. Pikiran dan hati bergejolak, resah, merasa bersalah, karena pada saat keluarganya membutuhkan kehadirannya, ia justru tak berdaya di dalam penjara. Semestinya ia menjadi kepala keluarga, menafkahi istri dan anaknya, memastikan anak ketiganya lahir dengan sehat dan selamat.

Hal lain yang mengiris hatinya adalah momen ketika istri dan anaknya datang menjenguk ke penjara. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan pada anak-anaknya yang masih kecil. Ia dan istri bersepakat mengatakan penjara bukan tempat tinggal para pesakitan.

"Bapak ada kerja di sini, nanti kalau sudah selesai kerja pulang ke rumah. Ini cari duit biar bisa beli mainan," kata Wahid.

Kebohongan itu tidak bisa bertahan lama untuk anak keduanya. Oleh teman-temannya, ia diledek sebagai anak pencuri karena bapaknya ditangkap polisi. "Kata kawan-kawanku, bapak mencuri ya, makanya ditangkap polisi?"

Pertanyaan itu membuat dada Wahid sesak. Tangisannya pecah seketika setelah keluarganya pulang ke rumah.

Kepuluan itu terkadang membuat ia ingin mati saja. Dalam doa-doanya saat melewati malam-malam yang panjang di dalam sel, ia mengucap harap agar Tuhan mencabut nyawanya. "Saat itu saya merasa sedang benar-benar diuji oleh Tuhan. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, sampai saya keluar dari penjara dan sekarang masih hidup," ujarnya.

Tuhan sepertinya memang punya rencana. Di dalam penjara Wahid mendapatkan kesempatan untuk bekerja membenahi kelistrikan di dalam penjara. Sebelum dipenjara, Wahid memang bekerja sebagai teknisi PLN. Urusan kelistrikan adalah makanan dia sehari-hari. Kecakapannya itu membuatnya dekat dengan sejumlah sipir dan juga kepala lapas. Di situ ia mendapat upah yang bisa diberikan ke sang istri.

Meski demikian, pergulatan batinnya tidak pernah berhenti. Tiap malam sering merenung. Sampai suatu hari, pelaku pembakaran gereja dijebloskan dalam penjara juga. Ia berpikir ini adalah saat yang tepat untuk balas dendam. Sebagai narapidana yang sudah lebih lama dan punya banyak kawan di dalam sel, mudah saja bagi Wahid untuk menghajar para pembakar gereja itu. Namun, ia memutuskan sebaliknya.

"Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk mendendam. Karena itu saya nggak sedikit pun mencolek badan mereka. Justru saya bilang ke mereka, '*Saya sudah memaafkan kalian. Saya juga pastikan kalian aman di sini.*'"

Setelah peristiwa itu Wahid merasa plong. Hatinya lebih lega.

Banyak Advokasi, Kurang Makan Nasi

BOAS tak bisa benar-benar tidur dengan nyenyak setelah

peristiwa itu. Nyaris setiap hari, ia berjibaku mengurus masalah pendirian gereja. Masalah itu selalu nyantol di kepalanya, sampai pada satu titik, ia tak sadar nyaris melupakan keluarga.

Sebelum peristiwa Oktober 2015, Boas bisa dibilang orang sukses. Ia adalah pemasok yang menguasai distribusi semen di Aceh Singkil. Hidupnya enak, urusan uang untuk menghidupi istri dan delapan anaknya terjamin. Ia bisa beli mobil dan punya lahan sawit meski tak seberapa luas.

Kini hidupnya nyaris berbalik 180 derajat.

Dedikasi mengawal kasus intoleransi dan pelarangan pendirian gereja membuat urusan ekonomi keluarga jadi terabaikan. Tak jarang pula ia harus keluar uang dari kantong pribadi untuk urusan advokasi.

Kini ia tak punya pekerjaan yang tetap. Jual beli mobil, budidaya bibit tanaman dilakoni. Apapun peluang bisnis untuk menghasilkan uang ia lakukan sejauh tidak bertentangan dengan kata hatinya.

Salah satu sumber penghasilan berasal dari warung kelontong di depan rumahnya.



"Kalau dibilang kondisinya, dulu abang nggak pernah mikir besok ada beras nggak buat makan, sekarang sudah mulai mikirin itu," katanya.

Dalam banyak kesempatan, Boas ingin meninggalkan urusan itu dan fokus pada keluarga. Tapi itu tidak pernah benar-benar ia lakukan. Semakin ia ingin berhenti melakukan advokasi, justru semakin keras guncangan dalam batinnya. Ia pun meminta pengertian istri dan anak-anaknya terhadap panggilan hatinya itu.

Kondisi ekonomi keluarga turut membikin Boas merasa gagal menjadi orangtua yang baik. Setelah lulus SMA, ketiga anak tertuanya tidak bisa lanjut kuliah karena saat itu ekonomi keluarga sedang terpuruk. Karena itu, untuk anak keempatnya, Boas berusaha mati-matian agar bisa kuliah.

"Saya merasa bersalah karena tiga anak saya tidak bisa lanjut kuliah. Satu orang sekarang menganggur, dua orang lainnya kerja, cuma lulusan SMA. Sekarang yang keempat baru bisa kuliah di Medan," ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, advokasi yang ia lakukan bersama Forcidas selalu berujung pada kebuntuan.



Boas Tumanger. (Foto: Mawa Kresna)

"Warga pun sudah mulai jemu. Kalau tanya ke saya, apa perkembangan, belum ada jawaban apa-apa, masih sama. Kami pun bingung bagaimana menjelaskan ke warga," kata Boas.

"Kalau dibilang capek, ya capek. Bertahun-tahun kita usaha, tapi pemerintah sepertinya tutup telinga. Kalau dibilang orang, 'udah pindah aja dari Singkil', nggak bisa, ini juga tanah leluhur kami. Turun-temurun sudah di sini," katanya melanjutkan.

Hidup yang Dipertaruhkan Pasca Pembakaran Gereja di Aceh Singkil

NAMA ASLI Wahid adalah Hotma Uli Natanael Tumanger. Tapi, sejak berumur satu hari, ia sudah dipanggil Wahid, sebagai bentuk penghormatan bagi mantri yang membantu proses kelahirannya. Wahid, sang mantri, saat itu menjadi satu-satunya juru rawat di wilayah Dangguran.

"Jadilah dipanggil Wahid sampai sekarang sudah punya anak, umur sudah 35 tahun, karena mantri yang membantu lahiran itu," kata Wahid.

Nama Wahid identik dengan orang Islam. Kata Wahid diambil dari bahasa Arab yang berarti satu atau esa. Salah satu orang terkenal di Indonesia yang namanya juga menggunakan "Wahid" adalah Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, presiden ke-4 Indonesia dan sekaligus figur toleransi.

Penghormatan dengan memberikan nama panggilan yang identik dengan Islam menunjukkan bahwa jauh sebelum konflik pelarangan rumah ibadah mencuat dan membesar, warga yang beragama Islam dan Kristen sudah hidup berdampingan dengan baik.

Jika dirunut lebih jauh ke belakang, warga Aceh Singkil merupakan orang Batak Pakpak yang dulunya penganut agama lokal, Parmalim sebelum Kristen dan Islam masuk.

Perlahan, beberapa orang Pakpak mulai memeluk agama Kristen dan Islam. Mereka yang memeluk Islam umumnya berada di kawasan pesisir pantai dan sungai, sedangkan pemeluk Kristen ada di daerah perbukitan. Maka tak heran jika dalam satu marga, ada anggota yang beragama Islam dan Kristen. Bahkan ada juga yang salah satu anggota keluarganya seorang ustaz, satu lainnya pendeta.

Pascaperistiwa tujuh tahun silam itu, hubungan kekerabatan marga sebetulnya masih kuat. Tetapi, warga tidak pernah lagi berbincang soal pendirian gereja. Semacam ada kesepakatan tidak tertulis untuk tidak membicarakan hal itu dengan kerabat yang berbeda agama.

"Kami tidak ada masalah dengan kerabat yang berbeda agama, tapi kami memang jarang, mungkin tidak pernah membicara izin gereja," kata Boas.

Kondisi tersebut juga diakui oleh Ustaz Umma Abidin dari Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah, yang sekaligus perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di sana.

Menurutnya, sehari-hari, warga antaragama di Aceh Singkil hidup dalam kerukunan. Ia melihat hubungan kekerabatan marga-marga menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan ketentraman, termasuk dalam menyelesaikan konflik soal pendirian gereja.

Dalam pikirannya, masalah di Aceh Singkil bisa dibicarakan oleh tetua masing-masing marga. "Pertama, kita buat kesepakatan dulu, ini kita mau damai atau gimana? Kalau sudah sepakat damai, apa yang harus dilakukan? Dialog ini sangat mungkin terjadi dan dilakukan. Tapi kalau pendekatannya menggunakan Qanun tentu bakal mentok lagi," ujarnya.

"Saya pernah duduk satu forum dengan Pak Boas, beliau bilang, jangan untuk meminta dukungan pendirian gereja, diganti dengan tidak keberatan ada pendirian gereja saja mereka tidak mau," sambungnya.

Fuadi Mardhatillah dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh turut bersepakat. Ia bilang, perpecahan di antara warga Aceh Singkil hanya muncul ketika berurusan dengan agama.

"Apa soalnya? Dari beberapa riset yang saya baca, orang itu ingin mati sebagai orang beragama, bukan orang beradat. Karena itu ada yang sudah berani memberikan rekomendasi, tapi kemudian ada ancaman kalau meninggal tidak akan disalatkan, nggak berani mereka," kata Fuadi.

Sejak awal, KontraS Aceh melihat masalah di Aceh Singkil tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Menurut Fuadi, mereka melihat ada celah di mana konflik ini bisa diselesaikan dengan cara dialog. Dialog ini diharapkan bisa melahirkan kesepakatan baru dengan mengesampingkan Qanun No.4 Tahun 2016.

Qanun Tidak Relevan

Ustaz Umma Abidin berpendapat belum ada landasan hukum yang sahih bagi umat Islam untuk menolak, mendukung, atau tidak terlibat sama sekali dalam urusan pendirian rumah ibadah umat agama lain.

Oleh karenanya, Qanun Nomor 4 menjadi tidak relevan jika ternyata ada hukum yang melarang umat Islam memberikan dukungan terhadap pendirian umat agama lain. Abidin merujuk pada pasal dalam Qanun yang mensyaratkan pendirian rumah ibadah harus mendapat dukungan dari sedikitnya 110 masyarakat yang berbeda agama.

"Sejauh ini saya lihat tidak ada fatwa yang melarang dari MUI atau MPUA. Kalau hipotesis saya terbukti, ada larangan memberikan dukungan, maka sebaiknya dihapus saja itu pasal soal 110 dukungan. Disertasi saya itu nanti bisa dijadikan bahan untuk *judicial review*," katanya.

Hingga kini, Abidin masih tak habis pikir dengan tragedi 13 Oktober 2015 itu.

k yang busuk menempa akan tanaman.

INGAT!

• kita memasukkan anak ke pondok untuk di DIDIK bukan untuk

sering di KUNJUNGI,
hal itu akan mengganggu pikirannya,
dia agar bisa fokus belajar dan mandiri

CEKUP kita doakan saja
sebagai penambah energi mereka,
arena mereka adalah santri penerus
dakwahnya para Nabi.



Ustaz Umma Abidin dari Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah yang sekaligus perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Singkil. (Foto: Mawa Kresna)

Malam sebelum peristiwa, ia banyak mendapat telepon dari alumni Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah. Para alumni bertanya, apakah mereka harus ikut turun dalam aksi penolakan pendirian gereja di Singkil?

Ustaz Umma Abidin tegas mengatakan, "Tidak perlu! Ngapain kita ikut-ikut. Nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Gereja itu kan nggak salah apa-apa, kenapa dibakar?"

Sikap bernaung serupa juga diambil oleh Ustaz Khalidin dari Pesantren Darul Hasanah di Singkil. Saat kabar rencana aksi itu menyebar luas di kalangan santri, ia meminta para santri untuk tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut.

"Kami sudah bilang, jangan ada yang ikut," katanya.

Sayangnya ia kecolongan. Beberapa santri diam-diam menyelinap keluar pondok dan ikut dalam aksi itu. Buntutnya, ia harus menjemput santrinya itu saat diamankan di Polres Singkil.

Sikap kelompok Islam moderat seperti yang disampaikan

oleh Abidin dan Khalidin tidak banyak mendapatkan panggung. Selama ini, sikap umat Islam terkait pendirian gereja di Aceh Singkil cenderung keras dan radikal. Padahal jika dilihat, sikap itu hanya datang dari segelintir orang yang lantang bicara.

Dalam banyak pemberitaan di media, suara tentang toleransi antarumat beragama yang sejuk di Aceh Singkil nyaris tidak terekam. Ustaz Umma Abidin menyadari hal tersebut.

"Media ini juga suka sama yang keras-keras itu, enak sekali menggorengnya. Tapi kalau saya bicara soal toleransi tidak ada gaungnya. Pimpinan kami di Darul Muta'allimin itu paling moderat. Kalau berdiri gereja banyak, apa masalahnya?"

Meski tidak terlihat di permukaan, bukan berarti tokoh agama yang moderat tidak berbuat apa-apa melihat kondisi di Aceh Singkil. Di dalam pesantren-pesantren yang dimiliki tokoh moderat (sebagian besar dari Nahdlatul Ulama) mereka memberikan pendidikan soal toleransi. Tujuannya agar konflik yang terjadi di Aceh Singkil tidak boleh diwariskan ke generasi muda.

Desa Dangguran tidak banyak berubah sejak bentrokan pecah. Jalan menuju perkampungan dan kebun sawit yang dulunya sempat dicor, kini sudah hancur. Kawat-kawat besar dalam cor-coran mencuat dan kerap membikin ban sepeda motor milik warga bocor. Warga tidak ingat persis kapan jalan itu terakhir diperbaiki.

Kurmat Ngole Berutu, salah seorang warga Dangguran, mengatakan Desa Dangguran seperti dikucilkan. Semisalnya perbaikan jalan ini. Sejak lama, ia sudah mengusulkan ke desa supaya ada perbaikan jalan, namun, tidak pernah tembus.

Ia mengawal usulan perbaikan jalan itu dari musrenbang. Entah mengapa, usulan itu hilang ketika sampai di level kabupaten. Ia pernah menanyakan alasannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Singkil. Bukan jawaban yang didapat malah pertanyaan yang tidak substansial.



Anak-anak Desa Dangguran memegang poster seruan minta bantuan ke Presiden Jokowi setelah permintaan perbaikan jalan tidak direspon pemerintah dan wakil rakyat setempat. Jalan menuju perkampungan dan kebun sawit itu sempat dicor tetapi kini sudah hancur. (Foto: Mawa Kresna)

"Mereka tanya, '*Dangguran yang tempat kerusuhan itu?*'" kata Kurmat menirukan ucapan salah seorang anggota DPRK.

Buat Kurmat, stigma Dangguran tempat kerusuhan sangat mengganggu.

Rusaknya jalan menuju kampung Dangguran dan kebun sawit milik warga berdampak pada ekonomi. Kata Kurmat, harga sawit dari milik warga Dangguran juga jadi lebih murah sekitar Rp200 dibanding harga di tempat lain.

"Sopir-sopir truk itu malas masuk ke sini kalau jalan rusak parah. Mereka mau masuk tapi harga sawit lebih murah. Ini kan berdampak ke ekonomi warga yang mengandalkan hidup dari kebun sawit," katanya.

Wahid kembali ke Dangguran pada 2020, setelah lepas dari penjara. Meski telah kembali dengan keluarga dan kerabat, hidupnya belum tenang. Ia dihantui rasa takut sebagai bekas

narapidana kasus pembunuhan.

Mendapat pekerjaan yang layak menjadi sulit. "SKCK saja sudah ada catatan, gimana cari kerja?" katanya.

Karena itu ia memutuskan bekerja di luar negeri. Dengan berbekal uang sekadarnya, ia merantau ke Malaysia. Namun tak sampai tiga bulan di Malaysia, sebuah kabar datang. Ia dapat tawaran beasiswa melanjutkan kuliah di jurusan teologi dari salah satu lembaga.

Ia merasa kabar itu sebagai balasan doa-doanya selama di tahanan. Kala itu, ia membuat nazar akan menjadi pelayan Tuhan jika berhasil melalui masa-masa sulit di balik jeruji.

Kini Wahid tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologia (STT) Abdi Sabda di Medan. Ia juga memboyong anak danistrinya. Meski tidak besar, beasiswa yang didapatnya itu turut menanggung biaya hidup keluarga.

"Bayar kontrakan, sekolah anak, les, uang jajan anak, buat makan sehari-hari, ya dicukup-cukupilah, harus pintar mengatur," katanya.

Walau masih terseok-seok, Wahid mensyukuri hidupnya sekarang. Ia mulai bisa melihat masa depan yang lebih baik. Kelak, jika ia sudah lulus dari kuliah dan menjadi pendeta, ia ingin pulang ke Aceh Singkil dan melayani warga Kristen di sana.

"Saya ingin kembali Singkil, bagaimana pun juga itu tanah kelahiran saya, keluarga besar saya ada di sana. Saya ingin dipakai Tuhan untuk hal baik di Singkil," tutur Wahid.

Meski masih terasa samar untuk mendapatkan kedamaian di Singkil, Boas tetap meyakini apa yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Ia sadar betul, ada bom waktu yang bisa meledak di Singkil jika konflik pendirian rumah ibadah ini tidak segera diakhiri.

Menjelang tahun politik 2024, ia menengarai politisasi agama berpotensi kembali mencuat.

"Ini bom waktu. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama," katanya.

Fuadi juga berpendapat demikian, langkah terdekat yang harus segera dilakukan adalah mengkampanyekan penolakan politisasi agama dalam gelaran politik 2024. "Saya pikir ini penting sekali, kita harus besepakat di Aceh Singkil ini menolak politisasi agama, karena ini bakal memicu masalah lagi."

Politisasi agama dalam gelaran politik terbukti berhasil membuat masyarakat terpecah. Pada 2014, pertarungan politik antara Jokowi dan Prabowo berdampak pada polarisasi. Kondisi semakin keruh ketika Pilkada DKI Jakarta pada 2017, yang turut membuat isu agama semakin kental. Hal serupa kembali terulang pada Pilpres 2019.

Iklim politik nasional tersebut berdampak besar pada konstelasi politik di daerah. Jika politisasi agama kembali terulang pada 2024, semakin banyak hidup kelompok minoritas dan kedamaian yang dipertaruhkan di Aceh Singkil.

Boas tak sanggup membayangkan jika itu terjadi.

"Kami berpikir tentang masa depan anak-anak kami. Kalau tidak ada gereja, lalu gimana anak-anak kami belajar agama? Di sekolah nggak ada pelajaran agama Kristen. Apa pemerintah memang menghendaki anak-anak kami nantinya jadi tidak beragama? Apa artinya Pancasila sila pertama kalau begitu?"

Kelompok Salafi di Aceh Barat Tak Boleh Beribadah di Masjid Milik Sendiri

Oleh: Yuwantoro

(Jurnalis Tribun Jogja)

Sejak pukul 10.30, beberapa orang sudah memadati ruang tunggu Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (8/9/2022).



Jemaat mengikuti ibadah salat Maghrib secara berjamaah di Masjid Jabir Al-Ka'biy, Jumat (9/9/2022). (Foto: Yuwantoro Wisnuajie)

Majoritas memelihara janggut, mengenakan baju koko, celana panjang yang tidak sampai ke ujung mata kaki, dan peci yang menutupi bagian atas kepala.

Mereka itu adalah jemaat Masjid Jabir Al-Ka'biy yang dikenal sebagai milik kelompok Salafi. Jarak masjid ini sekira 3 kilometer dari PN Meulaboh di pusat Kota Meulaboh. Tepatnya, di ruas Jalan Sentosa, Desa Drien Rampak, Kabupaten Aceh Barat.

Mereka datang ke pengadilan untuk menyaksikan sidang gugatan yang dilayangkan pengurus Masjid Jabir Al-Ka'biy kepada pemerintah. Pengurus masjid menggugat Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Bupati Aceh Barat Nomor 300/75/2022 pada tanggal 26 Januari 2022 yang berisi larangan untuk beribadah salat Jumat dan pengajian di Masjid Jabir Al-Ka'biy.

Munculnya larangan itu tak lepas dari hasil muzakarah besar para ulama di kawasan pantai barat selatan Aceh, Maret 2022. Pertemuan itu menelurkan sejumlah rekomendasi, seperti meminta para bupati dan wali kota barat selatan Aceh untuk melarang penyebaran ajaran agama dan pemahaman yang bertentangan dengan fatwa dan tausiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, seperti Salafi Wahabi, Syiah, dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mematuhi rekomendasi ulama ini sehingga berujung pada pelarangan aktivitas ibadah di Masjid Jabir Al-Ka'biy. Masjid ini dituduh sebagai tempat penyebaran ajaran Wahabi Salafi atau Salafus Salih yang divonis sebagai ajaran sesat oleh mayoritas ulama.

"Sudah enam bulan kami tidak mengadakan Jumatan. Masjid ini mau direbut dan didukung bupati," kata Musa.

Musa adalah salah seorang jemaat Masjid Jabir Al-Ka'biy yang tengah menunggu sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Musa adalah salah satu anggota pengajian sunnah yang menginisiasi pembangunan Masjid Jabir.



Suasana di depan Masjid Jabir Al-Ka'biy menjelang ibadah salat Ashar berjamaah, Jumat (9/9/2022). (Foto: Yuwantoro Wisnuajie)

Dakwah dalam pengajian sunnah merujuk pemikiran atau tafsir para ustaz Salafi yang mengajak masyarakat untuk berpegang pada Alquran dan hadis. Gerakan ini ingin memurnikan kembali ajaran Islam seperti pada masa tiga generasi awal Muslim. Maksudnya adalah masa para sahabat, tabiin (orang Islam yang masih menjumpai sahabat nabi tapi tidak pernah bertemu nabi), dan tabiut tabiin (orang-orang yang sepergaulan dengan para tabiin).

"Dulu hanya belasan yang ikut kajian, tapi terus bertambah. Setelah semakin banyak, masjid ini diambil alih sama pemerintah," ucapnya.

Dia mengenang, sepekan setelah surat larangan itu keluar, aparat dari unsur gabungan rutin melakukan penjagaan tiap hari Jumat. Mereka berjaga di pekarangan sisi utara dan selatan masjid untuk menutup akses masuk ke masjid.

Ketegangan antara petugas dan jemaat dikabarkan sempat

terjadi, namun tak menimbulkan keributan. Pihak pengurus masjid dan petugas di lapangan sempat melakukan mediasi mengingat banyak jemaat yang tetap ingin melakukan ibadah salat Jumat. Namun petugas tetap kukuh melarang karena masjid ini diklaim tak memiliki legalitas untuk melangsungkan ibadah salat Jumat.

Bahkan penjagaan justru rutin dilakukan hingga satu bulan lamanya. Pengurus masjid memilih mengalah dan mematuhi keinginan pemerintah.

"Pagi jam 8, mereka sudah datang," terangnya.

Petugas berhenti berjaga setelah pengurus masjid melayangkan gugatan hukum kepada Bupati Aceh Barat, pada 31 Maret 2022 setelah mediasi antara dua belah pihak tak menemui titik terang. Pengadilan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan sidang pertama dimulai pada 14 April 2022.

Selain melarang salat Jumat, pemerintah desa atau gampong bersama Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Barat juga berupaya mengambil alih Masjid Jabir Al-Ka'biy. Mereka mempunyai rencana menggelar pengajian dengan mengundang sejumlah ulama serta unsur dari MPU di masjid itu tanpa meminta izin Yayasan Hadyur Rasul selaku pengurus masjid.

Jemaat pun melakukan perlawanan dengan menggembok dan merantai dua pintu pagar serta masjid sebelum kegiatan dimulai. Penutupan akses itu berhasil menggagalkan agenda pengajian itu.

"Mereka buat pengajian di dalam menghadirkan ustaz mereka. Tidak (menggelar pengajian) lagi mereka, setelah masjid kami gembok," kenangnya sembari terkekeh

Tetapi pemerintah gampong setempat juga dilaporkan karena ikut menggembok pintu masuk masjid yang sudah dirantai itu. Kemudian mereka langsung meninggalkan area.

Perayaan Maulid Nabi

Konflik antara masjid dengan pemerintah setempat sebenarnya

telah terjadi sejak awal pendirian masjid sekitar tahun 2009. Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Jabir Al-Ka'biy, Kamarlis mengatakan kala itu pemerintah desa rutin menggelar peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi di halaman masjid tanpa seizin pengurus.

Penganut Salafi seperti diketahui memang tidak melaksanakan zikir Maulid Nabi Muhammad karena dianggap bidah atau perbuatan yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah dan sahabatnya. Mereka juga tidak menggelar tahlilan, yasinan serta berselawat secara berjemaah.

"Kawan-kawan di sini yang sudah mengenal sunnah pasti tidak melakukan hal-hal tadi karena bidah, termasuk yang dianggap ritual masalah (perayaan) Maulid," kata Kamarlis di Masjid Jabir Al-Ka'biy, Sabtu (10/9/2022).

Kamarlis meyakini perbedaan ini membuat pemerintah dan sebagian masyarakat resah. Kemudian mereka beberapa kali mencoba mengambil alih masjid, misalnya dengan cara menggelar pengajian secara sepikah.

Peringatan Maulid Nabi rutin digelar hingga tahun 2012 atau dihentikan setelah pengurus masjid melakukan perlawanan.

Sebelumnya, jemaat memang membiarkan pengajian yang digelar pemerintah gampong. Karmalis mengatakan kala itu pengurus masjid memang tidak mengetahui soal status kepemilikan Masjid Jabir.

Karmalis mengisahkan, kabarnya ajaran Salafi dibawa oleh beberapa ulama dari Yayasan Syeikh Eid yang datang ke Aceh setelah bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Kerajaan Qatar mendanai Yayasan ini untuk memberi bantuan kemanusiaan dan membangun kembali fasilitas publik termasuk rumah ibadah.

Singkat cerita, pemuka agama dari Yayasan Syeikh Eid menjalin hubungan dengan ustaz di Aceh Barat dan menawarkan bantuan pembangunan masjid untuk jadi markas dakwah kelompok Salafi di Kabupaten Aceh Barat. Masjid Jabir Al-

Ka'biy akhirnya mulai dibangun di atas tanah wakaf pada tahun 2006. Hak pengelolaan tanah wakaf ini masih di tangan Yayasan Syeikh Eid.



Sejumlah umat Muslim bersiap melaksanakan ibadah salat Maghrib di Masjid Jabir Al-Ka'biy, Jumat (9/9/2022). (Foto: Yuwantoro Wisnuajie)

"Jadi masjid baru dibangun tahun 2006, dan mulai digunakan tahun 2007-2008. Setelah digunakan memang belum ramai, baru lima hingga tiga orang jemaat, paling banyak 10 orang," kenangnya.

Ketika aktivitas pengajian dan peribadatan makin meningkat, jemaat berinisiatif mendirikan Yayasan Hadyur Rasul di tahun 2015. Kantornya berada di samping masjid.

Awalnya, yayasan ini hanya dijadikan sebagai payung hukum untuk memayungi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masjid. Tetapi tahun 2019, pengurus Yayasan Hadyur Rasul mengajukan permohonan kepada nazir wakaf Syeikh Eid di Jakarta agar diberi hak pengeloaan tanah wakaf beserta seluru asset di atasnya kepada Yayasan Hadyur Rasul.



Suasana persidangan perkara perbuatan melawan hukum yang dilayangkan pengurus masjid kepada bupati dan sejumlah pejabat Aceh Barat di Pengadilan Negeri Meulaboh, Kamis (8/9/2022) (Foto: Yuwantoro Wisnuajie)

Meski Masjid Jabir Al-Ka'biy secara penuh sudah berada di bawah Yayasan Hadyur Rasul, upaya pemerintah menekan jemaat masjid tidak surut. Hingga puncaknya, bupati melarang ibadah salat Jumat dan pengajian di masjid tersebut.

Menggugat Bupati Aceh Barat

Penasihat hukum internal Masjid Jabir Al-Ka'biy, Nauval Sahih mengatakan, gugatan perdata perbuatan melawan hukum dilayangkan kepada sejumlah pejabat Kabupaten Aceh Barat. Mulai dari Bupati Aceh Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, hingga mantan Penjabat Keuchik Gampong, Drien Rampak.

"Masing-masing pihak punya tindakan melawan hukum

yang berbeda-beda. Jadi memang harus kita gugat karena punya tindakan sendiri-sendiri," katanya di Kota Banda Aceh, Rabu (7/9/2022).

Bupati Aceh Barat digugat karena mengeluarkan surat pemberitahuan terkait larangan penyelenggaraan ibadah salat Jumat dan pengajian di Masjid Jabir Al-Ka'biy. Kebijakan ini dianggap inkonstitusional karena mengusik hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan.

Nauval juga menyoroti surat keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat yang menjadi salah satu dasar terbitnya surat larangan. Surat keputusan itu dinilai tidak sah karena dari sembilan unsur Forkopimda, hanya lima yang membubuhkan tanda tangan.

Mereka yang menandatangai itu adalah Bupati Aceh Barat, Ketua MPU Aceh Barat, Ketua Majelis Adat Aceh Barat, Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh, dan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh. Sedangkan yang tidak membubuhkan tanda tangan adalah Ketua DPRD Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Dandim 0105 Aceh Barat, dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

"Jadi kalau dikatakan itu surat Forkopimda yang sah, itu dipertanyakan. Terserah kalau bupati mau menggunakan itu (surat keputusan Forkopimda) sebagai dasar," ujarnya.

Dalam persidangan, pemerintah mengklaim ada lebih dari 300 penduduk Desa Drien Rampak yang resah dengan aktivitas di Masjid Jabir Al-Ka'biy. Namun surat yang dibuat tahun 2021 dan menyatakan keresahan penduduk Desa Drien Rampak tidak bisa ditampilkan di meja hijau oleh pihak tergugat.

"Malah kita juga punya petisi dukungan, ada ratusan orang mendukung kita. Di lapangan juga tidak ada penolakan dari masyarakat," tambahnya.

Nauval meragukan keberadaan surat tanda keresahan warga itu. Ia mengatakan sebagian dari masyarakat sekitar justru ada yang salat di masjid Jabir Al-Ka'biy.

Salah seorang warga Drien Rampak, Ubay (66) mengaku

kerap beribadah di Masjid Jabir Al-Ka'biy itu sejak tahun 2006. Rumahnya berjarak sekitar 300 meter dari masjid.

"Masyarakat mana (yang menolak)? Saya kan tetangga di sini, saya malah senang mencari ilmu (kajian), apanya yang salah," ujarnya.

Sejak ibadah salat Jumat di Masjid Jabir dilarang, pria paruh baya ini melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid An-Nur di Desa Rundenga, Kecamatan, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Warga Drien Rampak lainnya, Taufiq (33) mengaku tidak begitu mengetahui aktivitas di masjid itu. Dia hanya mengetahui petugas Satpol PP sempat rutin melakukan penjagaan tiap Jumat beberapa bulan lalu.

Ia juga tak mengetahui mengapa pemerintah melarang pelaksanaan salat Jumat di masjid itu dan mengklaim jemaat di Masjid Jabir menyesatkan warga setempat.

"Baik-baik, orangnya, ramah. Nggak ada kayaknya yang disesatkan," terangnya.

Reduksi Qanun

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Barat tak luput dari gugatan lantaran diduga mengekang hak beragama dan berkeyakinan masyarakat. Di hadapan media, Kadis DSI Aceh Barat pernah membuat pernyataan yang mempersoalkan aktivitas peribadatan di Masjid Jabir.

Dia menganggap kajian yang rutin digelar tidak sesuai dengan ketentuan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bahkan DSI Aceh Barat memaksa menggelar pengajian rutin di Masjid Jabir Al-Ka'biy sebagai upaya menyatukan pemahaman masyarakat terkait penerapan ajaran Islam di wilayah tersebut.

"Intinya dia mempersoalkan aktivitas ibadah di Masjid Jabir, karena masjid jabir dianggap berbeda. Jadi hanya karena menurut dia berbeda dengan masyarakat setempat kemudian dia menganggap aktivitas itu tidak boleh ada," terangnya.



Spanduk berisi maklumat dari kuasa hukum Yayasan Hadyur Rasul yang ditempelkan di area Masjid Jabir Al-Ka'biiy. (Foto: Yuwantoro Wisnuajie)

Menurut Nauval, sikap pemerintah itu dianggap mereduksi Peraturan Daerah atau Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang sebenarnya sudah luwes mengatur soal amalan umat Islam. Dalam regulasi ini, pemerintah Aceh mengatur pelaksanaan ibadah Islam dengan memprioritaskan mazhab Syafi'i.

Namun ibadah yang dilakukan di luar mazhab Syafi'I dibolehkan. Sepanjang itu masih dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah, dan ketentraman umat Islam.

"Qanun itu mengakomodir tidak hanya mazhab Syafi'i tapi mazhab lain. Qanun tentang pokok syariat Islam itu sudah sangat luws mengatur. Tetapi Kepala Dinas justru mereduksi Qanun dengan melarang kita," tandasnya.

Lebih lanjut, Nauval mengatakan, kajian di Masjid Jabir Al-Ka'biiy bukan pengajian Salafi Wahabi sebagaimana disebutkan

dalam surat bupati. Kajiannya sesuai akidah Ahlussunnah Wal Jamaah atau paham yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

"Kita dilarang hanya karena berbeda dengan masyarakat setempat. Padahal pelarangan itu seharusnya basisnya bukan perbedaan tapi kesesuaian dengan regulasi, aturan Qanun, dan sebagainya," tandasnya.

Alih-alih disebut masjid, tempat ibadah tersebut masih dikategorikan sebagai musala oleh pemerintah karena tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang dikelola Kementerian Agama. Hal itu turut dijadikan dasar oleh bupati untuk melarang pelaksanaan salat Jumat.

Pengurus masjid sebenarnya telah berupaya melengkapi urusan administrasi terkait penetapan status tempat ibadah. Namun perubahan status musala menjadi masjid terkendala karena tidak mendapat rekomendasi dari MPU Aceh Barat.

"Upaya kita itu mentok karena MPU mempersulit karena memang ada beberapa rekomendasi dari MPU sendiri tidak mau mengeluarkan itu. Bisa dikatakan MPU itu menjegal," terangnya.

Meski demikian, lanjutnya, status dalam SIMAS tidak menjadi penentu apakah tempat ibadah tersebut diperbolehkan menggelar salat Jumat.

Nauval juga mengamati ada sejumlah tempat ibadah berstatus musala di Meulaboh yang menggelar salat Jumat namun tak dilarang oleh pemerintah.

"Karena cukup banyak tempat ibadah di Meulaboh dia tidak terdata sebagai masjid statusnya masih musala bahkan tidak masuk dalam SIMAS dia menyelenggarakan salat Jumat dan tidak dilarang," terangnya.

Selain itu, kata Nauval, SIMAS merupakan aplikasi yang dibuat untuk mendata masjid dan musala di seluruh Indonesia. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran bantuan dari pemerintah.

"SIMAS hanya untuk pendataan saja apakah tempat ibadah mau memperoleh bantuan dari pemerintah. Tetapi secara fakta di lapangan itu tidak menentukan boleh atau tidak tempat ibadah menjalankan salat Jumat," sambungnya.

Bupati Aceh Barat Dinyatakan Bersalah

Langkah pengurus masjid untuk melayangkan gugatan berbau manis. Setelah melalui 153 hari masa sidang, majelis hakim menolak eksepsi seluruh tergugat.

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Hadyur Rasul, Akbarul Fajri mengatakan majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan perbuatan tergugat I, yakni Bupati Aceh Barat yang melarang pelaksanaan salat Jumat di Masjid atau Musala Jabir Al-Ka'biy adalah perbuatan melawan hukum. Begitu pula dengan perbuatan tergugat II, yakni Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat yang menerjunkan petugas untuk menghadang para jemaat yang ingin melaksanakan salat Jumat.

"Perbuatan tergugat II yang melarang dan menghalangi jemaat atau masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid atau Musala Jabir Al-Ka'biy sebagai perbuatan melawan hukum," terang Akbar.

Majelis hakim kemudian memerintahkan Bupati Aceh Barat untuk menjamin dan melindungi jemaat atau pihak Masjid atau Musala Jabir Al-Ka'biy agar dapat melaksanakan berbagai peribadatan atau kegiatan keagamaan, seperti salat Jumat. Sedangkan Kepala Satpol PP diperintahkan menarik seluruh anggotanya yang ditugaskan melarang dan menghalangi pelaksanaan salat Jumat.

Perbuatan Bupati Aceh Barat dan tergugat III, yakni Penjabat Keuchik Gampong, Drien Rampak yang berupaya mengambil alih kepengurusan Masjid atau Musala Jabir Al-Ka'biy juga dinyatakan majelis hakim sebagai perbuatan melawan hukum. Termasuk soal menggembok pagar dan pintu masuk masjid.

Perbuatan tergugat I, III, dan IV yakni Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat yang memaksakan agenda pengajian rutin Pemkab Aceh Barat di Masjid atau Musala Jabir Al-Ka'biy tanpa izin dari pengurus Masjid Al-Ka'biy dan Yayasan Hadyur Rasul adalah perbuatan melawan hukum.

"Hakim menyatakan perbuatan Tergugat IV yang memaksakan penyeragaman paham keagamaan atau pelaksanaan ibadah kepada pihak Masjid atau Musala Jabir Al Ka'biy sebagai perbuatan melawan hukum," lanjutnya.

Dalam putusan itu, majelis hakim juga memutuskan Yayasan Hadyur Rasul adalah pihak yang sah sebagai pemegang hak pengelolaan atas Masjid Jabir Al-Ka'biy. Pada akhir putusannya, majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Kota Santri Samalanga, Bak Api dalam Sekam

Oleh: Pito Agustin Rudiana

SUDAH DITUTUP.

Keterangan itu terbaca pada peta Google Map ketika penulis berselancar mencari lokasi Masjid At Taqwa Muhammadiyah di Gampong (Desa) Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sementara penjelasan di lajur kanan ditulis dengan tinta merah: Tutup permanen.



Kondisi tiang-tiang tapak Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, 9 September 2022. (Foto Pito Agustin Rudiana)

Bukankah masjid itu tengah dibangun? Penulis tiba di sana, Jumat, 9 September 2022 menjelang waktu salat Jum'at. Tak ada bangunan masjid

megah seperti foto di Google Map. Hanya ada 25 tiang balok beton tumbuh di lahan seluas 2.513 meter persegi. Dinding-dinding pondasi itu menghitam ditumbuhi lumut, pangkalnya beralaskan rumput. Gundukan material pasir menipis. Di sela-sela tumpukan material batu, tumbuh rumput liar. Rangka kayu yang dipasang mengelilingi lokasi balok beton juga ditumbuhi tanaman menjalar.

Cikal bakal bangunan masjid itu mangkrak.

Tak ada papan nama yang menjelaskan Masjid Muhammadiyah Samalanga tengah dibangun. Yang ada, dua baliho besar di tepi jalan masuk ke lokasi masjid tapi berisi imbauan Muspida Bireuen kepada panitia pembangunan masjid untuk tidak melanjutkan pembangunan pada akhir Agustus 2022 lalu. Sedangkan baliho kedua bertuliskan, "Damai Itu Indah," yang diapit logo Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda Aceh dan Komando Resor Militer (Korem) 011/Liliwangsa yang membawahi Komando Distrik Militer (Kodim) 0111/Bireuen.

Tak ada suasana hiruk pikuk buruh bangunan sedang bekerjadi sana. Sepi.

"Menunggu. Lihat kondisi dulu," kata Ketua Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah Samalanga, Teungku (Tgk) M. Yahya Arsyad singkat.

Sikap hati-hati Yahya bukan tanpa alasan. Sehari sebelumnya, 8 September 2022, Penjabat Bupati Aulia Sofyan telah menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bireuen. Rapat digelar usai terjadi insiden lagi di area masjid, 6 September 2022. Papan nama bertuliskan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Samalanga, dirobohkan massa.

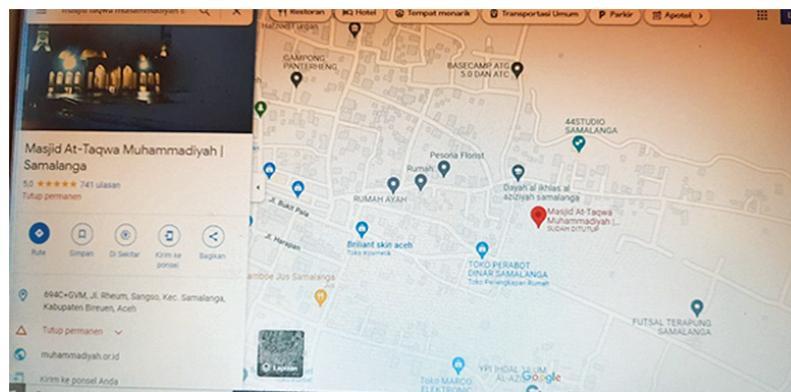
Menurut warga Sangso yang jadi saksi mata, perobohan plang selisih 30 menit usai dipasang. Semen cor pada pangkal tiang besi masih basah. Para pengurus PCM Samalanga sudah meninggalkan lokasi ketika 20-an orang datang.

"Yang menggoyang-goyang papan dua orang, lainnya menunggu," katanya.

Ia kebetulan tengah melintas. Sembari duduk di atas sepeda motor, ia menyaksikan perobohan itu. Niat mereka dengan telepon pintarnya diurungkan saat melihat puluhan orang bergerombol di ujung jalan yang menuju ke area masjid.

"Takut dikeroyok," tukasnya.

Yahya langsung melaporkan kasus itu ke Polres Bireuen. Dua hari kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mengundang pertemuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor 330/334/IX/2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Masjid Taqwa Samalanga di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga. Aulia Sofyan membacakannya jelang pertemuan usai.



Peta lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Google Map. (Foto Pito Agustin Rudiana)

Pertama, sebelum ada musyawarah mediasi, tidak ada pembangunan apapun di lokasi pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Kedua, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga akan dikaji kembali secara menyeluruh dan komprehensif. Ketiga, setiap pelaksanaan pembangunan mesjid tidak boleh mengganggu ketertiban/kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Keempat, Samalanga merupakan wilayah yang sangat homogen, setiap

pembangunan mesjid harus menjaga, menghormati norma-norma, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Samalanga, serta mendengarkan pendapat/saran dari tokoh-tokoh ulama setempat.

"Kalau tetap dilakukan, silakan Polres mengambil tindakan hukum dan pasang *police line*," kata Aulia Sofyan yang ditirukan Yahya yang hadir dalam pertemuan itu.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen, Athaillah A. Latief yang juga hadir dalam pertemuan itu mempertanyakan empat poin yang multiinterpretatif. Seperti poin keempat yang menyebut, "Samalanga merupakan wilayah yang sangat homogen."

"Apa maksudnya homogen? Aswaja (Ahl Sunnah wal Jama'ah) semua? Nggak juga. Pesantren semua? Nggak juga, ada Muhammadiyah di situ. Jadi itu sangat multiinterpretatif," tegasnya.

Ia mengasumsikan, karena homogen, membangun apapun di Samalanga mesti mempertimbangkan ulama-ulama setempat. Padahal Pasal 19 Qanun atau Perda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah tidak memuat ketentuan-ketentuan untuk pendirian masjid. Termasuk tidak perlu izin pihak manapun kecuali tempat ibadah nonmuslim.

"Homogen itu dominasi. Padahal ada minoritas juga," kata Athaillah.

Belakangan, 21 September 2022, berita acara itu dicetak pada baliho jumbo ukuran 4 x 3 meter dan dipasang di area masjid. Lengkap dengan tanda tangan dan stempel atas nama Bupati Bireuen, Ketua DPRK Bireuen, Kapolres Bireuen, Dandim 0111/Bireuen, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.

"Itu yang pasang saya," aku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bireuen, Mukhtaruddin saat dikonfirmasi penulis melalui telepon, 29 September 2022.

Pembangunan masjid itu menyimpan persoalan tak kunjung

usai sejak 2015. Orang-orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Santri Samalanga menolaknya. Lahan dan segala benda di atasnya menjadi saksi bisu rentetan aksi penolakan itu, sisa-sisanya masih kasat mata.

Ada pembakaran papan cetak pondasi tiang induk dan balai untuk istirahat pada 17 Oktober 2017. Penghadangan jalan masuk area masjid dengan lima batu jumbo pada 29 Maret 2018, 26 September 2018, dan 23 Agustus 2019. Pembongkaran papan-papan cetak tiang yang telah terpasang serta pengambilan material kayu dan besi oleh Satuan Polisi Pamong Praja – Wilaytul Hisbah (Satpol PP-WH) Bireuen pada 12 Mei 2022.

Melanjutkan pembangunan masjid secara diam-diam, tak dipungkiri Athaillah juga riskan memancing keributan. Tiap kali ada kegiatan di lahan masjid selalu menuai kedatangan massa atau aparat Satpol PP-WH. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para pihak, tapi tanpa solusi konkret yang disepakati bersama. Begitu terus berulang-ulang.

“Masjid ini diawasi. Ada kegiatan sedikit, ada yang datang,” kata seorang ibu anggota Aisyiyah Samalanga yang enggan disebut namanya.

Waktu itu ada sekira 10 perempuan dan pengurus lain tengah berkumpul di balai yang ada di area masjid jelang siang itu.

Dahulu, panitia terpaksa mendatangkan material bangunan dari Bireuen. Lantaran penjual material di Samalanga tak berani mengantar bahan-bahan bangunan ke area masjid. Padahal jarak Bireuen-Sangso berkisar 45 kilometer atau sekitar satu jam perjalanan dengan mobil.

Tindakan pembakaran tiang pondasi calon masjid hingga perobohan papan nama itu kian menguatkan dugaan pengurus PCM Samalanga terkait alasan penolakan massa.

“Soal lambang matahari (Muhammadiyah),” ucap Yahya yang juga Ketua PCM Samalanga itu. ***



Ibu-ibu Aisyiyah Samalanga berfoto di depan papan nama PC Muhammadiyah di lokasi bakal masjid, 9 september 2022. (Foto Pito Agustin Rudiana)

Mengapa Masjid Muhammadiyah Didirikan di Samalanga?

Muhammadiyah bukan pendatang baru di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan dokumen Ringkasan *Fact Finding* Kasus Perselisihan Pembangunan Rumah Ibadah di Sangso, Samalanga, Kabupaten Bireuen 2017 yang dihimpun Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat (Puslitbang Bimas) Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, Muhamarram Marzuki pada Desember 2017 menyebutkan, Muhammadiyah hadir di Kecamatan Samalanga sejak 1930-an.

Bahkan sejak 1950-an, masyarakat Muhammadiyah mendirikan masjid di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Samalanga. Masjid tanpa label Muhammadiyah itu diberi nama Masjid Besar Kecamatan Samalanga yang disebut juga Masjid Besar Samalanga atau Masjid Jami’ Samalanga.

“Itu tanah wakaf juga. Ayah saya adalah salah satu yang mewakafkan,” kata kader Muhammadiyah dari Sangso, Wahyudi saat ditemui penulis, 9 September 2022.

Pada 1950-an itu, imeum chiek atau imeum syik -- imam masjid tingkat mukim – Masjid Besar Samalanga, almarhum

Teungku Haji Ahmad Ma'un adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga. Ia juga menjadi imum gampong atau imum meunasah (mushala) Sangso. Basis Muhammadiyah sempat ada di beberapa desa di Samalanga, termasuk Sangso, Pantee Rheng, Melik, dan Keude Aceh.

"Saya dibesarkan di rumah beliau (Ahmad Ma'un). Mengaji di tempat beliau," kenang Ketua Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, Yahya Arsyad, 77 tahun saat ditemui di kediamannya, Desa Sangso.

Putra asli Sangso ini juga salah satu murid kepercayaan Ahmad Ma'un. Saat acara pernikahan, Yahya diminta menjadi naib atau penghulu apabila gurunya berhalangan. Ia juga diminta menjadi imam salat Tarawih.

"Karena kepercayaan beliau besar kepada saya, masyarakat menghargai saya," kata Yahya.

Ahmad Ma'un adalah tokoh yang amanah sehingga dihormati. Tak terkecuali para tokoh dayah (pesantren) kharismatik di Samalanga, seperti Pimpinan Dayah Ummul Ayman, Tgk H. Nuruzzahri Yahya yang dikenal dengan panggilan Waled Nu Samalanga.

"Beliau (Waled Nu) banyak minta bantu kepada guru saya. Soal anak yatim, kalau sudah kepepet datang kepada orang Muhammadiyah ini," tambahnya.

Mayoritas masyarakat Samalanga adalah masyarakat dayah tradisional yang menyebut diri sebagai kalangan Ahl Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang bermazhab Syafi'i. Namun bukan berarti dayah ini identik dengan Nahdlatul Ulama (NU), meskipun ulama-ulama tradisional itu merupakan pengurus NU. Di Samalanga, NU sebatas organisasi.

Jumlah dayah di Samalanga lebih banyak ketimbang di kecamatan lain di Bireuen, bahkan kabupaten lain di Aceh. Setidaknya ada 10 dayah besar. Dayah-dayah itu menyebarkan santri-santrinya ke seluruh Bireuen, juga se-Aceh. Kemudian para alumni mendirikan dayah-dayah di berbagai daerah

Selain Waled Nu, tokoh dayah dan Aswaja lainnya adalah Pimpinan Dayah Ma'hadal U'lum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga (Mudi Mesra), Abu Syekh Hasanoel Basri HG alias Abu Mudi.

"Hampir semua santri di Bireuen itu alumni Dayah Mudi Mesra. Makanya (Samalanga) disebut Kota Santri," jelas Athaillah. Waled Nu juga alumni Dayah Mudi Mesra.

Awalnya, hubungan Muhammadiyah sebagai minoritas dengan Aswaja sebagai mayoritas harmonis. Termasuk saat beribadah di masjid, jamaah Muhammadiyah dan Aswaja salat bersama, meskipun ada beberapa khilafiyah atau perbedaan pendapat soal fikih.

Tapi jamaah dan ulama tak diambil pusing. Semisal, salat Tarawih ala Muhammadiyah sebanyak 8 raka'at dan Aswaja, 20 raka'at. Praktik di masjid, jamaah Muhammadiyah dan Aswaja melakukan bergantian sesuai keyakinan masing-masing.

"Kadang kami usul kepada teungku imum (imeum chiek), tahun ini 20 rakaat, tahun depan 8 rakaat. Boleh. Nggak ribu-ribut," kenang Yahya.

Pascakonflik Aceh pada 2000-an, kondisi berubah. Ada pemilihan takmir di masjid tersebut usai imam mukim meninggal dunia. Yang terpilih adalah kalangan Aswaja dan tidak melibatkan orang-orang Muhammadiyah seperti sebelumnya.

"Masjid-masjid di Aceh jadi rebutan (Aswaja) setelah efaria kemenangan GAM dulu," kata Ketua PDM Bireuen, Athaillah A. Latief di kediamannya di Bireuen, 8 September 2022.

Pengelolaan Masjid Baiturrahman Banda Aceh juga jadi rebutan.

Muharam Marzuki menuliskan, semula orang-orang Muhammadiyah mengikuti (keinginan Aswaja) demi kebaikan. Lama-kelamaan, kutbah yang disampaikan, seperti khotbah Jum'at, mulai sering menyerang dengan menyindir ajaran Muhammadiyah.

"Khotbahnya menyudutkan kami, menjelek-jelekkan di

Sangso. Lama-lama nggak tahan," aku Yahya.

Untuk salat Jumat, orang-orang Muhammadiyah menyebar ke masjid desa tetangga yang pengurusnya orang Muhammadiyah meskipun itu bukan masjid Muhammadiyah. Seperti Masjid Teungku Di Rheum di Desa Rheum Barat, Kecamatan Simpang Mamplam, sekira dua kilometer dari Sangso.

Ada keyakinan jamaah Aswaja, salah satu syarat sahnya salat Jum'at harus diselenggarakan di masjid, bukan meunasah. Jamaahnya adalah orang-orang mukimin, yakni orang-orang yang bermukim di daerah tersebut dan tidak boleh di luar mukim. Ini yang jadi alasan desa-desa di Aceh dikelompokkan menjadi mukim, yakni kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa desa dan dipimpin imuem mukim. Seperti Sangso, Pantee Rheng, Keude Aceh, dan Melik berada dalam satu mukim.

Masjid mukim di sana adalah Masjid Besar Samalanga di Keude Aceh, jaraknya sekira satu kilometer dari Sangso. Menurut Aswaja, jamaah dari empat desa itu semestinya salat Jumat di Masjid Besar Samalanga.

Sedangkan meunasah dibangun di tiap-tiap desa. Yahya dipilih warga menjadi imam Meunasah Sangso sejak 2019 untuk kurun waktu empat tahun. Ia mengelola Meunasah Sangso secara Muhammadiyah. Ia memimpin jamaah di meunasah, khususnya untuk salat fardhu lima waktu dan salat Tarawih saat Ramadan.

"Nggak ada yang menolak dan jamaah nggak ribut," kata Ketua PCM Samalanga dua periode ini.

Untuk kenyamanan pula, salat hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha juga digelar di sana. Awalnya, polisi sempat mendatangi meunasah.

"Saya bilang, (polisi) jangan ganggu. Secara syariat (salat hari raya) bisa (di meunasah). Akhirnya aman," kata Yahya.

Meunasah juga digunakan untuk pengajian ibu-ibu. Namun pengajian ibu-ibu Muhammadiyah dan Aswaja tak jadi satu.

Tidak adanya penolakan terhadap Yahya sebagai pengurus Muhammadiyah menjadi imam Meunasah Sangso ada alasannya. Lantaran 60 persen masyarakat Sangso memilihnya menjadi imam.

Soal ini, Yahya punya cerita. Menjadi imam meunasah bukan perkara mudah di Samalanga. Imam dipilih melalui mekanisme pemungutan suara seperti pemilu. Ada foto para calon yang dipajang dan ada bilik suara tempat pencoblosan kartu suara.

"Kalau di Sangso diperketat. Pakai tes kemampuan tertulis. Maunya biar saya jangan lewat," kata Yahya.

Mengingat dua calon imam tak semuanya Aswaja, tetapi ada dari Muhammadiyah, aturan dibuat atas dasar kearifan lokal. Pengujinya adalah tim dari Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan, dan kabupaten.

Soal-soal yang diujikan sengaja dipersulit. Ada lima soal yang harus dijawab dalam bentuk esai yang isinya menggambarkan pengetahuan seorang imam dalam menyelesaikan kasus.

"Kalau nggak menjawab, (rival calon imam) bisa (lulus). Tapi karena saya serius, nggak mungkin menang dia," katanya.

Hasil seleksi tertulis menentukan calon yang lolos dipilih. Penilaian dilakukan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Samalanga.

"Kalau saya dianggap nggak lulus, akan protes. Saya mau minta kertas lagi. Itu sudah rencana," kenang Yahya, lalu tertawa.

Usai dinyatakan lulus, masuk tahap pemungutan suara. Tahap terakhir ini, suara Yahya unggul.

"Artinya, mereka setuju Ustad Yahya menjadi imam kampung," sambung Athaillah.

Hasil pemilihan imam meunasah Sangso itu menjadi parameter bahwa masyarakat di sana mendukung Muhammadiyah.

"Nggak perlu tanya satu per satu. Cukup melihat dari persetujuan mereka dengan tokoh itu. Tokoh kan pimpinan,"

jelasnya lagi.

Imam meunasah Sangso sebelumnya juga dari Muhammadiyah, yakni bendahara PCM Samalanga. Kemudian Keuchik Sangso mengundang calon imam dari luar Sangso dan menyuruh imam dari Muhammadiyah mundur.

"Terjadi perubahan drastis di meunasah karena aturan ibadahnya dibuat sama seperti masjid lain," katanya.

Sebelumnya, tak ada pemungutan suara untuk menentukan imam syik maupun imam meunasah. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang mengatur soal imam syik dan imam meunasah pun hanya menyebut pemilihan dilakukan secara musyawarah.



Ketua PCM Samalanga, Teungku Yahya Arsyad di balai pengajiannya, 9 September 2022. (Foto Pito Agustin Rudiana)

Tak semua desa menerapkan aturan pemilihan imam dengan jalan voting. Biasanya cukup musyawarah mufakat saja. Landasan memilih imam cukup berdasar pada ketokohan, pengaruh, pemahaman agama, dan kewibawaan.

Tak hanya urusan salat Jumat, situasi menjelang Ramadan juga memanas. Anak-anak mereka dirundung anak-anak Aswaja lain yang menyangsikan keabsahan salat Tarawihnya.

*Kamu salat di meunasah 8 rakaat, di masjid 20 rakaat.
Lebih banyak pahala 20 rakaat.*

Mamak kamu salat di mana? Kalau di meunasah, rugi salatnya.

Kamu Wahabi. Kamu aliran sesat.

Saat pulang, anak-anak mengadu kepada orangtuanya. Bahkan ada yang menyebut, mamak Wahabi, bapak Wahabi.

"Itu sesama temannya. Entah dipengaruhi orangtuanya, nggak tahu kami. Anak-anak kan nggak tahu arti Wahabi. Asal ngomong," keluh seorang ibu anggota Aisyiyah, sebut saja Wati.

Yahya termasuk cukup sering dicap dengan sebutan Wahabi.

"Asalkan (orang) Muhammadiyah, itu (disebut) Wahabi. Dan saya ketua (PCM Muhammadiyah), ada di Sangso (tempat masjid Muhammadiyah dibangun)," kata Yahya.

Selama proses pembangunan masjid yang tertunda-tunda, Yahya sering dapat ancaman. Ia pernah dihujat anak-anak muda kampung.

"Sebut saya anjing, macam-macam. Di FB dipampang gambar saya. Itu sebelum bangun masjid," ungkap Yahya.

Ia lapor ke Polres Bireuen. Pelaku tak diproses, tapi hujatan mereda.

"Sekarang kalau jumpa (anak-anak muda itu), ya biasa-biasa," kata Yahya.

Laki-laki sepuh itu juga pernah diancam akan dibunuh. Soal ini, Yahya memilih tak melaporkan ke polisi. Ia sudah menebak polisi tidak akan bertindak serius seperti harapannya.

Ia mencoba menganggap ancaman itu biasa saja. Namun Yahya tetap mengantisipasinya. Tiap berangkat ke meunasah untuk memimpin salat subuh maupun isya', dia selalu mengajak menantunya agar menemaninya.

"Dulu, saya takut, sekarang tidak lagi. Itu bukan urusan kami. Itu urusan Allah," kata Yahya tegas.

Ketegangan-ketegangan itu kerap berulang. Hingga suatu

hari, Athaillah mengisi pengajian di meunasah yang membahas persoalan ketidaknyamanan beribadah. Prinsipnya, beribadah itu menyembah Sang Khalik, sehingga harus dilaksanakan secara aman dan nyaman. Perlu solusi untuk mengatasi persoalan di sana.

"Cari tanah, kita beli. Kita bikin masjid sendiri," usulnya.

Selama ini Muhammadiyah tak punya masjid di sana. Masjid-masjid pemerintah dikuasai Aswaja.

"Selain dayah, nggak boleh masuk. Dulu egaliter. Sekarang sudah dikooptasi semua," imbuhan Athaillah.

Pemilihan lokasi di Sangso bukan tanpa alasan. Mengingat Sangso bukanlah desa pesantren. Hanya ada 1 dayah dan 3 balai pengajian di sana. Balai pengajian adalah semacam lembaga informal untuk masyarakat belajar mengaji. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dari tiga balai pengajian, dua di antaranya dikelola Aswaja, satu lagi dikelola Yahya.

Dua balai pengajian itu bermurid 15-20 orang, tetapi yang dikelola Yahya punya murid 120 orang dari TK hingga SMA dengan 9 guru. Mereka belajar mengaji setiap hari, kecuali Jumat dan Minggu.

"Ini bukti masyarakat mendukung balai pengajian yang dikelola orang Muhammadiyah," kata Yahya.

Ia tak mempersoalkan pemerintah tak memberikan bantuan dana untuk balai pengajiannya. Dana bantuan pemerintah biasa dikurangkan untuk balai pengajian dan dayah yang dikelola Aswaja.

Balai pengajian yang sederhana terletak di halaman depan rumahnya. Berupa bangunan panggung dari kayu dengan ukiran khas Aceh. Ada beberapa meja kecil untuk mengaji.

Selain itu, Sangso adalah salah satu basis Muhammadiyah di Samalanga. Perbandingan jumlah pengikut Muhammadiyah, baik anggota dan simpatisannya dengan Aswaja berkisar 50:50.

Di desa lain yang satu mukim dengan Sangso, seperti Pante

Rheng dan Keude Aceh juga memiliki banyak simpatisan Muhammadiyah. Atas alasan itu pula, Muhammadiyah membangun masjid di satu mukim tersebut.



Pengurus Muhammadiyah Samalanga berdiri di samping tiang induk masjid yang papan cetaknya dibakar massa pada 2017. Foto Pito Agustin R.

"Kami bangun masjid di basis kami, bukan di basis mereka," kata Athaillah.

Salah satu tujuan pendirian masjid Muhammadiyah adalah untuk mengurangi tindakan saling menjelekkan satu sama lain karena persoalan khilafiyah. Semisal, mencap bid'ah, sesat, dan sebagainya. Sekaligus untuk menghilangkan sikap-sikap intoleransi yang sudah lama terlanjur terbangun.

Jamaah juga bisa memilih untuk salat di masjid mana. Bagi yang ingin salat Tarawih 8 rakaat maupun 20 rakaat sudah ada tempatnya.

Selain itu, bila Muhammadiyah punya masjid atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, tak ada lagi gejolak karena ada perebutan pengurus dengan Aswaja. Hal ini terjadi di Masjid Besar Samalanga maupun Meunasah Sangso.

"Ini masjid milik Muhammadiyah, pihak lain jangan mengganggu. Tapi peruntukan masjid bukan hanya untuk Muhammadiyah, tapi masyarakat," tegas Athaillah. ***

Sudah Empat Bupati, Masjid Tak Kunjung Berdiri

Dalam rentang tujuh tahun (2015-2022), bupati Bireuen sudah berganti tiga kali, mulai zaman Ruslan M. Daud (2012-2017), almarhum Saifannur (2017-2020), Muzakkar A. Gani (2020-2022), hingga penjabat penggantinya, Aulia Sofyan (2022-2024). Sejauh ini baru ada 25 tiang tapak masjid yang terbangun, belum ada lantai masjid, apalagi atapnya. Pembangunannya mengalami banyak tantangan. Masa depan pembangunan Masjid At Taqwa Muhammadiyah Samalanga kian buram.

"Ibarat sampai kiamat, masjid itu sulit terbangun di sana," ucap Athaillah pesimis.

Tahun 2015

Pengurus Muhammadiyah dan masyarakat sepakat membangun Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga pada 25 Juni 2015. Mereka membeli lahan kosong yang ditawarkan warga Sangso, Ali Syamsuddin seluas 2.513 meter persegi secara wakaf tunai.

Dalam setahun, terkumpul Rp631,250 juta, hasil sumbangan masyarakat Samalanga dan luar Samalanga, seperti Sangso, Pante Rheng, Melik, Kandang, Gampong Baro, Kuta Blang, Blang Mangat, Rheum Timur, dan Rheum Barat. Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Samalanga dan PDM Bireuen menilai sumbangan masyarakat ini adalah bentuk dukungan terhadap Muhammadiyah.

"Itu menunjukkan (desa-desa itu) masih basis Muhammadiyah. Makanya kami bangun masjid di Sangso," kata Athaillah.

Siang itu, setiba di ruang Universitas Muhammadiyah Mahakarya (Ummah) di Bireuen, 8 September 2022, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah Samalanga, Teungku M. Yahya Arsyad mengeluarkan sejumlah dokumen dari kantong plastik. Bersama Athaillah, ia baru saja menghadiri undangan dari Aulia Sofyan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bireuen. Agendanya, menyelesaikan

permasalahan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga. Dokumen-dokumen itu pula yang disampaikan Yahya dalam rapat.

Di atas secarik kertas bergaris, Yahya menulis garis besar koronologi yang runtut. Tulisannya kecil, miring, rapi, dan terbaca. Salah satu poinnya, harga tanah untuk masjid Rp650 juta dan dibayar lunas pada 31 Juli 2016. Sebelumnya, bayar uang muka Rp150 juta pada 15 Juli 2015. Setahun sebelum dilunasi, 31 Juli 2015, panitia menggelar rapat dengan perangkat desa untuk mengurus sertifikat tanah.

Namun Keuchiek (kepala desa) Sangso almarhum Affifuddin menolak membubuhkan tanda tangan akta wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Sertifikat wakaf tak bisa diproses. Lantaran pembelian tanah atas sumbangan masyarakat dilakukan secara tunai, kemudian dibuat sertifikat hibah melalui notaris sehingga tak perlu melalui keuchiek dan camat.

"Yang penting ada sertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah," kata Athaillah.

Hingga kini, biaya pembangunan yang telah dikeluarkan Rp430 juta. Per 31 Agustus 2022, sisa dana Rp362.022.115 ditambah 200 sak semen.

"Sampai hari ini, panitia bersih dari utang," kata Yahya.

Soal dana pembelian lahan dan pembangunan masjid pun sempat dipertanyakan. Ada yang menuding, dana itu diperoleh dari sumbangan Israel. Muhammadiyah itu kawan dekat Israel, Yahudi. Alasan orang-orang yang mengembuskan isu, pembelian lahan secara tunai dan pendanaan lancar.

"Saya bilang nggak ada sepeser pun (dari Israel). Apakah kami nggak sanggup bangun?" tukas Yahya.

Tahun 2016

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masjid dimulai pada 10 Mei 2016. Panitia menyiapkan persyaratan mengacu pada Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor

9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Lalu mengumpulkan syarat minimal 90 daftar nama dan KTP jamaah masjid dan dukungan minimal 60 orang yang disahkan kepala desa. Kemudian minta rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Bireuen dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bireuen.

Air kolam mulai beriak. Keuchik Sangso, almarhum Afifuddin menolak permohonan rekomendasi dari panitia, 10 Mei 2016. Pertimbangannya, warga Sangso masih melaksanakan salat Jumat di Masjid Besar Samalanga.

"Warga Sangso khususnya dan Samalanga umumnya adalah penganut Ahl Sunnah wal Jama'ah (Aswaja)," tulis Afifuddin.

Pertimbangan lainnya untuk mencegah konflik masyarakat saat menjalankan ibadah, terutama salat Jumat, dan menghormati pendapat para ulama, cendikiawan, dan tokoh masyarakat yang telah menolak secara tertulis. Surat itu ditembuskan kepada aparat pemerintah di Samalanga, meliputi Muspika, Kepala KUA, Ketua Majelis Pertimbangan Ulama (MPU), dan Imam Masjid Besar Samalanga.

"KTP sudah terpenuhi, bahkan melebihi. Tapi rekomendasi tak keluar," kata Athaillah.

Rupanya, sehari sebelumnya, orang-orang atas nama tokoh dan masyarakat Samalanga membuat surat penolakan pendirian Masjid Muhammadiyah di Sangso. Surat 18 Mei 2016 itu dilampiri 38 tanda tangan, isinya melarang Keuchik Sangso mengeluarkan rekomendasi karena pendirian masjid itu tanpa musyawarah dengan tokoh dan masyarakat di pemukiman setempat.

Lantaran persyaratan belum lengkap, Camat Samalanga Jamaluddin juga menolak mengeluarkan rekomendasi, 29

Juni 2016.

Di tengah kebuntuan, lahirlah Qanun Aceh alias Peraturan Daerah Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Pasal 19 dari Qanun yang diundangkan pada 29 Juli 2016 itu meniadakan rekomendasi sebagai syarat pendirian masjid di Aceh.

Menyambut aturan baru khusus Aceh itu, musyawarah digelar dengan perangkat desa Sangso, 31 Juli 2016. Ada keuchik, sekretaris desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, juga imam meunasah.

"Tak ada keputusan," kata Yahya.

Berpegang pada Qanun Aceh itu, panitia tetap mengajukan proses IMB ke Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sembari menunggu, aktivitas di tanah wakaf dimulai. Warga gotong royong membersihkan lahan bersemak, membuat tangul, jalan menuju area masjid, dan membangun balai untuk istirahat.

Tahun 2017

Setahun kemudian, Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Bireuen mengeluarkan IMB Nomor 63 Tahun 2017 pada 13 Juni 2017. Isinya melegalkan pembangunan masjid dua lantai dengan luas bangunan 1.367 meter persegi. Kementerian Agama Bireuen menindaklanjuti dengan membuat arah kiblat di lokasi pada 25 Juli 2017.

"Sampai tahap ini, tak ada gerakan masyarakat yang menentang pembangunan masjid," kata Yahya.

Namun Agustus 2017, 'angin ribut' mulai bertiup. Panitia, pengurus PCM Samalanga, dan pengurus PDM Bireuen tengah merembug rencana penandatangan prasasti penanda pembangunan tiga masjid Muhammadiyah dimulai. Yaitu, masjid di Kecamatan Juli, di Kabupaten Bireuen, lalu Samalanga. Mereka memutuskan mengundang mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2014-2015 yang juga mantan Ketua

Umum PP Muhammadiyah (2005-2015), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin pada 31 Agustus 2017.

Rupanya, kabar itu membuat Samalanga bergejolak. Rapat-rapat penolakan bersama masyarakat dihimpun di Masjid Kandang, Samalanga.

"Sejak itu bergejolak, tak pernah putus. Naik turun naik turun," kata Athaillah.

Pada 12 Agustus 2017, surat-surat desakan dikirimkan kepada Bupati Bireuen almarhum Saifannur untuk membatalkan rencana pembangunan masjid itu. Pertama, surat dari Pimpinan Dayah Ma'hadal U'lum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga (Mudi Mesra) Abu Syekh Hasanoel Basri HG alias Abu Mudi. Sosok ini adalah salah satu tokoh ulama di Bireuen yang disebut masyarakat sebagai ulama kharismatik.

Abu Mudi menengarai suasana damai dan kondusif terusik dengan ide pembangunan masjid di Sangso yang berada di kawasan Masjid Besar Samalanga.

"Pembangunan masjid tandingan ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan umat," tulis Abu Mudi.

Kedua, surat dari Imum Syik Masjid Besar Samalanga, Teungku Abdul Hanan Yahya. Ketiga, surat penolakan 44 dari 46 keuchik (kepala desa) di Samalanga. Dua keuchik yang tidak ikut tanda tangan penolakan adalah Kheucik Pante Rheng dan Lhok Seumira. Keempat, surat atas nama masyarakat dan tokoh Samalanga yang berlampirkan 461 tanda tangan.

Penulis melihat lampiran tanda tangan itu ditulis dengan bentuk huruf yang sama dan tanda tangannya terkesan asal-asalan. Tak ada penyebutan Masjid Muhammadiyah dalam surat-surat itu. Diganti istilah "masjid tandingan" yang dinilai akan memecah belah umat.

Surat yang dilayangkan, ditindaklanjuti pertemuan para pengirim surat dengan bupati pada 14 Agustus 2017. Poin tuntutannya sama.

Enam hari menjelang kedatangan Din Syamsuddin, ada

selebaran gelap di warung-warung kopi. Judulnya, Seruan Bersama Aksi Penolakan Pembangunan Masjid Tandingan yang mengajak masyarakat ikut aksi di lokasi pembangunan masjid pada pukul 14.00.

Aparat polisi berjaga di area masjid. Ratusan massa yang datang, dihalau. Mereka diarahkan menuju ke Masjid Besar Samalanga untuk istighotsah.

"Polisi pakai semprotan air (maksudnya *water canon*)," kata seorang ibu dari Aisyiyah Samalanga yang menolak disebut namanya.

Meskipun tak ada bentrokan fisik, massa sempat membuat coretan-coretan bernada intimidatif. WAHABI RAMJADAH PALEH DARI ANEK BUEI SDR ASEEE YAHUDI (Wahabi anak haram jadah dari anak babi saudara anjing Yahudi). Coretan itu ditemukan di dinding Meunasah Sangso, tempat Yahya menjadi imamnya.

Ada juga pemasangan spanduk besar di gerbang masuk Sangso. SAMALANGA KOTA SANTRI. GERAKAN MASYARAKAT KOTA SANTRI SAMALANGA MENOLAK, RENCANA PEMBANGUNAN MESJID TANDINGAN DI DESA SANGSO KARENA DAPAT MEMICU KONFLIK DAN PERPECAHAN UMMAT.

Kota santri itu pun memanas.

Din Syamsuddin tiba di Bireuen, 31 Agustus 2017. Panitia berharap Din bisa datang ke Sangso untuk mendinginkan situasi yang panas. Namun massa demonstrasi menolak sehingga penandatanganan prasasti dimulainya pembangunan tiga masjid Muhammadiyah dipusatkan di Masjid At Taqwa Muhammadiyah, Bireuen.

Keinginan Din bertemu Abu Mudi kandas dengan alasan Abu Mudi sibuk.

Di tengah penolakan, akhirnya IMB terbit pada 13 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bireuen Nomor 63 Tahun 2017. Sertifikat wakaf tunai atas nama Persyarikatan

Muhammadiyah juga sudah di tangan. Tak ada alasan bagi panitia untuk tidak memulai pembangunan masjid.

Satu tiang induk atau tiang utama di sisi tengah ukuran 0,60 x 0,60 x 4 meter dibangun pada 17 Oktober 2017. Tiba-tiba rombongan Camat, Kapolsek, dan Koramil Samalanga datang meminta penghentian pembangunan. Satu pondasi induk dan balai kayu sudah berdiri.

Hari itu juga, isu ratusan massa akan datang ke lokasi masjid merebak. Pukul 20.00, massa benar-benar datang. Mereka membakar papan cetak atau mal yang masih melekat pada tiang induk. Bangunan balai pun ludes dilalap api. Rekaman video api yang menjilat-jilat malam itu diunggah melalui akun YouTube, Andre Nd.

Yahya tak sempat melihat peristiwa. Ia mendapat informasi dari warga.

"Ustad, tiangnya dibakar," kata warga.

"Nggak apa-apalah," jawab Yahya.

Esok hari, ia melakukan pengecekan. Tiang induk tak rusak.

Esok hari, 18 Oktober 2017, bupati mempertemukan panitia dengan pihak penolak. Bupati menyusun rancangan keputusan. Pertama, panitia diminta menghentikan pembangunan masjid hingga ada kesepakatan bersama. Kedua, apabila ingin melanjutkan pembangunan, panitia diminta musyawarah dengan kheucik, perangkat desa, imum syik, camat, dan muspika Samalanga.

"Kami tolak. Kami minta hanya satu, kami legal karena ada izin membangun," tegas Athaillah.

Pihak Muhammadiyah mempersilakan para penolak menempuh jalur hukum terkait upaya pembatalan IMB. Pertemuan bubar tanpa ada keputusan.

Yahya melaporkan pembakaran tersebut ke Polres Bireuen. Saksi-saksi telah diminta keterangan tetapi tindak lanjutnya menguap hingga hari ini.



Dua baliho dan batu-batu gajah di pintu masuk menuju lokasi bakal Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga, 9 September 2022. Foto Pito Agustin R.

Tahun 2018

Proses pembangunan yang terhenti sekitar tiga bulan itu dilanjutkan pada 7 Februari 2018. Lagi-lagi pihak pemerintah mendesak agar dihentikan. Esoknya, 8 Februari 2018, Polres Bireuen berjaga di Samalanga. Mereka mendirikan tenda panjang di halaman kantor kecamatan. Ratusan massa penolak kembali berdemonstrasi di kantor kecamatan.

Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Bireuen mengeluarkan surat pertimbangan, 21 Maret 2018. Isinya sama, meminta penghentian pembangunan demi menjaga keamanan dan ketertiban.

"Minoritas harus mengikuti mayoritas sebagai bentuk kearifan lokal," tulis Ketua MPU Bireuen, Teungku Nazaruddin.

Sepekan kemudian, pembangunan masjid dilanjutkan lagi pada 28 Maret 2018. Lagi-lagi dihentikan setelah Camat dan Muspika Samalanga, serta Forkopimda Bireuen rapat sore hari. Salah satu rekomendasinya, bupati akan mengeluarkan surat keputusan (SK).

Tindakan intimidatif massa penolak pembangunan masjid kembali terjadi esok hari, 29 Maret 2018. Ada dua batu ukuran

jumbo yang dibawa menggunakan *backhoe* dan diletakkan di tengah jalan menuju lokasi pembangunan masjid. Batu-batu yang oleh warga disebut sebagai batu gajah itu menyebabkan mobil pengangkut material bangunan tak bisa masuk.

Tanggal 5 April 2018, imam Masjid Besar Samalanga bersama Ketua MPU Bireuen menggalang imum-imum mukim untuk menolak masjid Muhammadiyah. Mereka berkumpul di Kantor Kecamatan Samalanga.

Pada 24 Juni 2018, panitia kembali melanjutkan pembangunan masjid. Hari kedua, 25 Juni 2018 malam, massa kembali datang berdemonstrasi, baik di lokasi masjid maupun di kantor kecamatan. Hasil rapat singkat, panitia pembangunan masjid diminta bertemu dua ulama kharismatik Samalanga, Abu Mudi dan Waled Nu. Esoknya, pembangunan dihentikan polisi.

Panitia bertemu Waled Nu dan Abu Mudi di dayah masing-masing pada 15 Juli 2018. Waled Nu meminta pembangunan ditunda dulu sebelum ada kesepakatan.

“Saya tidak menyuruh dan tidak melarang,” kata Waled Nu. Pertemuan dengan Abu Mudi diharapkan menelurkan solusi. Namun Abu Mudi enggan menanggapi.

“Masalah pembangunan masjid itu urusan bupati,” tukasnya singkat.

Pertemuan dengan kedua ulama itu kembali digelar pada 29 Juli 2018 tetapi Abu Mudi absen karena sibuk. Kali ini Ketua PDM Bireuen, Athaillah A. Latief juga ikut. Waled Nu meminta bersabar. Ia juga mengusulkan mencari lokasi baru pembangunan masjid, yaitu di Rheum Barat. Lokasi ini masuk Kecamatan Simpang Mamplam, jaraknya sekitar dua kilometer dari Sangso.

Tak ingin berhenti lama, panitia mulai beraktivitas pada 10 September 2018. Bersama warga, mereka menggeser dua batu gajah dari tengah jalan ke pinggir.

Pada 25 September 2018, lima tiang pondasi berhasil

didirikan. Tetapi sehari kemudian, usai maghrib, panitia kembali dapat kiriman dua batu gajah. Kali ini, ukurannya lebih besar dan dua batu gajah yang sudah di pinggir jalan kembali digeser ke tengah.

Selebaran ajakan bagi semua masyarakat Samalanga dan sekitarnya untuk menolak pembangunan masjid kembali disebar. Massa demonstrasi lagi di kecamatan.

Panitia dan warga bergotong royong menggulingkan satu batu gajah ke seberang jalan pada 3 November 2018. Batu berhasil dipinggirkan dengan ditarik tali tambang.

Tanggal 8 November 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bireuen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penundaan IMB selama satu tahun. Panitia dilarang membangun masjid selama setahun itu. Keputusan dicabut apabila ada kesepakatan damai antara panitia dengan masyarakat.

Surat keputusan itu diambil atas pertimbangan konflik sosial yang terjadi usai IMB dikeluarkan. Selain itu ada surat-surat penolakan dari imum syik dan para keuchiek, dan surat pemintaan pembekuan IMB dari Ketua MPU Bireuen Nomor 164 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Tahun 2019

Tak tinggal diam, Muhammadiyah akhirnya mengambil jalur hukum. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bireuen ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan ditolak, salah satu pertimbangan hakim karena hanya menunda satu tahun, bukan mencabut IMB, 21 Mei 2019.

Hasil banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Medan, 3 September 2019 menguatkan putusan PTUN Banda Aceh. Kasasi dilayangkan ke Mahkamah Agung tetapi putusannya menolak permohonan kasasi karena pendaftarannya lewat

batas waktu 14 hari, 19 Maret 2019.

"Istilahnya NO. Tak bisa memutuskan karena melewati batas waktu. Inkraftnya di PT (Medan)," terang Athaillah.

Dalam hukum, putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang menyatakan gugatan tak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Pihak Muhammadiyah menerima konsideran tersebut. Namun mempertanyakan tidak adanya upaya Pemkab Bireuen melakukan mediasi dalam waktu satu tahun itu sebagaimana isi SK.

Pada 18 Agustus 2019, panitia bersama 30 orang meminggaikan sisa tiga batu gajah. Lima hari kemudian, dua batu gajah baru dikirim lagi. Panitia pantang menyerah, mereka melaporkan kasus itu ke Polres Bireuen tapi tak pernah ditindaklanjuti.

Tahun 2020

Hampir setahun tak ada kegiatan pembangunan masjid. Akhirnya, batu-batu gajah itu disingkirkan ke tepi, 15 Agustus 2020. Kali ini dengan bantuan *backhoe* pada 18.30. Namun pukul 20.30, sopir *backhoe* dipanggil polisi. Ia diperintahkan mengembalikan posisi batu-batu gajah itu seperti semula.

Yahya menduga polisi berpihak kepada para penolak. Mereka juga ingin masjid itu tak terbangun.

Panitia menemui Bupati Bireuen, Muzakkar A. Ghani setelah masa penundaan IMB berakhir tanggal 8 November 2020. Mereka meminta bupati memediasi pertemuan panitia dengan para penolak.

"Coba bangun selain masjid dulu," pinta Muzakkar dalam pertemuan dengan panitia pada 30 November 2020.

Bagi panitia, saran itu bukan tak mungkin bisa disepakati. Asalkan ada pertemuan dengan para penolak yang difasilitasi bupati.

"Karena yang menolak itu siapa, nggak jelas. Masyarakat, masyarakat yang mana?" tanya Athaillah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Bireuen, Mukhtaruddin menjelaskan, pelaku penolakan adalah masyarakat Samalanga yang homogen. Istilahnya sama-sama Aswaja.

Ia mengaku tak tahu siapa yang mengkoordinir massa penolak tersebut karena belum pernah berhadapan langsung dengan mereka. Terkait dugaan keterlibatan tokoh-tokoh ulama di Samalanga, Mukhtaruddin enggan menjawab tegas.

"Kita nggak usah mereka-reka. Mohon maaf, nggak bisa mereka-reka," kata Mukhtaruddin.



Air PDAM yang telah disalurkan setahun lalu selama proses pembangunan masjid yang terkatung-katung, 9 September 2022. (Foto: Pito Agustin Rudiana)

Tahun 2021

Hilang lagi masa satu tahun. Panitia secara resmi mengirim surat permohonan mediasi kepada bupati, 15 Desember 2020. Surat didisposisikan kepada Dinas Syariat Islam Bireuen pada 12 Januari 2021. Dari dinas itu, surat 'dilempar' ke Camat Samalanga.

Tanggal 16 Februari 2021, panitia bersama sekitar 30 orang warga bergotong royong menggeser tiga batu gajah yang tersisa ke tepian. Mereka juga memperbaiki tiang-tiang pancang pondasi yang roboh.

Satu jam kemudian, pukul 09.00, rombongan aparat keamanan

datang, ada camat, polsek, dan Koramil Samalanga, juga Polres Bireuen. Suasana tegang dan berakhir dengan pembubaran aktivitas di masjid siang harinya.

Persoalan yang hanya berkutat di Samalanga dan Bireuen, mendorong panitia berkirim surat kepada pejabat tingkat provinsi, 22 Februari 2021. Isinya mohon pertimbangan kepada Gubernur Aceh, Kodam Aceh, Kapolda Aceh, juga Kanwil Kemenag Aceh terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Hasilnya, camat menggelar mediasi, 5 Maret 2021. Hadir dalam pertemuan itu, Dinas Syariat Bireuen, Kesbangpol Bireuen, Polres Bireuen, Muspika, panitia pembangunan masjid, PCM, dan PDM yang berjumlah lima orang. Mediasi itu sekedar menghimpun pendapat-pendapat dari perwakilan yang hadir. Kemudian disampaikan kepada bupati untuk diambil keputusan

"Tiga orang disebut mewakili Aswaja. Tapi orang-orangnya bukan harapan kami," kata Athaillah.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bireuen kembali menerbitkan SK II tentang Penundaan IMB tertanggal 16 Maret 2021. Bedanya, jika SK sebelumnya ditunda satu tahun, SK terbaru tak ada batas waktu penundaan. Hanya disebut hingga dicapai kesepakatan damai antara panitia dengan masyarakat Samalanga.

"Masyarakat yang mana? Sangat sumir SK itu," keluh Athaillah.

Bahkan SK itu memunculkan presepsi yang berbeda. Ada yang mengartikan tidak diperbolehkan lagi melanjutkan pembangunan masjid di sana selamanya. Sementara isi SK hanya menyebut pembangunan ditunda, bukan mencabut IMB.

Upaya lain yang dilakukan Muhammadiyah adalah mengadukan kasus tersebut kepada Kanwil Kemenkumham Aceh dan Ombudsman Perwakilan Aceh, 22 April 2021, serta Komnas HAM Aceh, 6 Mei 2021. Lembaga terakhir ini meminta ada pihak yang memediasi antara panitia dengan pihak penolak.

Tahun 2022

Lantaran tak ada kejelasan setelah terbitnya SK itu, pembangunan masjid dilanjutkan pada 10 Mei 2022. Tiang-tiang baru didirikan. Kali ini, panitia tidak mengerahkan banyak warga untuk gotong royong tetapi hanya tiga orang tukang.

"Kalau ramai-ramai, nanti ada ribut lagi. Khawatir nggak bisa mencegah hal-hal tak diinginkan," kata Yahya.

Tiang-tiang masjid kembali dibangun. Esok hari, Camat Samalanga berkirim surat meminta pembangunan ditunda lagi. Aparat Satpol PP-WH membongkar papan-papan untuk mencetak cor semen tiang-tiang masjid itu, 12 Mei 2022. Panitia tercengang dengan ulah aparat pemerintah itu.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun," seruan itu silih berganti. Beberapa panitia meneteskan air mata. Tak terkecuali, Yahya.

Rombongan Satpol PP-WH itu tak peduli. Mereka memasukkan papan-papan cetak beserta besi-besi rangka bangunan ke atas truk Pol PP. Mengangkutnya ke kantor kecamatan. Kini, bukan massa yang melawan, melainkan pemerintah sendiri.

"Mereka masuk dan mengambil barang tanpa surat perintah. Itu bisa masuk kategori pencurian," kata Athaillah.

Pihak Muhammadiyah bisa menggunggatnya lewat PTUN. Sementara Mukhtaruddin berdalih, langkah Satpol PP-WH adalah untuk mencegah timbulnya hal-hal tak diinginkan, seperti massa yang marah.

Tambahan dua tiang masjid didirikan pada 6 September 2022. Total ada 25 tiang telah berhasil berdiri tegak. Panitia memasang papan nama bertuliskan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga di jalan masuk ke area masjid. Plang itu menjadi penanda, lahan itu milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pemasangan plang juga telah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang datang ke Bireuen, 3 September 2022. Ia menghadiri pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya (Ummah) Bireuen, Muharrir Asy'ary yang juga Ketua Pengurus Wilayah

Muhammadiyah (PWM) Aceh.

"Beliau setuju. Untuk menunjukkan ini asset Muhammadiyah di bawah PCM, bukan personal," papar Athaillah.

Tetapi, massa merobohkan dan membuang papan nama itu ke tambak yang mengapit jalan menuju area masjid, Selasa siang, 6 September 2022. Sementara 20-an massa yang menunggu di ujung jalan bersorak.

Drama belum usai. Beberapa personil Satpol PP-WH datang memungut papan nama itu dari tambak. Lalu megeletakkan begitu saja ke tanah.

Usai mereka pergi, panitia mengambil dan menyandarkannya pada pohon kurma agar besinya tak berkarat. Yahya tak habis pikir, dari mana massa dan Satpol PP-WH itu tahu soal pendirian plang.

"Seolah ada kerja sama (antara pencabut plang dengan Satpol PP). Kami dirikan jam setengah sebelas, dirobohkan jam sebelas lima belas," papar Yahya.

Ia melaporkan pencabutan plang itu ke Polres Bireuen. Seorang intel Polsek Samalanga sempat datang ketika besi plang dicor semen. Tiga tiang juga telah dibangun hari itu. Ia tak melarang dan bersikap ramah. Alasan datang hanya ingin mengetahui suasana lapangan untuk mengantisipasi bentrokan.

"Tiap kali kami bekerja, dia selalu datang. Banyak info yang mereka terima," ungkap Yahya.

Pernah suatu hari, pekerja bangunan selesai membangun tiang pondasi pukul 12.00. Intel polisi itu menelepon Yahya yang sedang di lokasi masjid untuk memberitahukan soal kedatangan 20 orang.

"Pak, ini ada suasana nggak enak sedikit. Coba ustaz pulang saja bersama tukang," kata intel itu.

Sore harinya, ada rapat di meunasah Sangso yang dihadiri Kapolsek Bireuen dan Komandan Kodim. Yahya menyampaikan peralatan tukang masih berserakan di lapangan. Sementara

massa menunggu di jalan masuk.

"Ayuk, kita ambil," berangkatlah yang ada di meunasah ke lokasi untuk mengambil alat-alat pertukangan. Lalu menyimpannya ke dalam gudang. Tanpa ada bentrokan.

Setelah perobohan papan nama, Penjabat Bupati Bireuen Aulia Sofyan mengundang para pihak untuk bertemu pada 8 September 2022. Forkopimda Bireuen, kepala-kepala dinas, Camat Samalanga, Keuchik Sangso, panitia dan pengurus Muhammadiyah, juga perwakilan Aswaja hadir dalam pertemuan itu.

Athaillah menengarai empat poin yang disebut dalam berita acara rapat, bukan hasil pertemuan itu. Itu sudah dibuat sebelum rapat dan Aulia hanya menyampaikan poin-poin kesimpulan yang cenderung menyudutkan Muhammadiyah.

"Tak ada relevansi dengan yang kami sampaikan. Mungkin relevan dengan yang menolak," imbuh Athaillah lagi.

Kemudian empat poin itu dicetak dalam baliho besar dan dipasang di lokasi masjid, 29 September 2022. PDM Bireuen mengajukan surat keberatan kepada Bupati Bireuen atas pemasangan baliho di lahan milik Muhammadiyah itu, 29 September 2022.



Masjid Taqwa Juli, Masjid Muhammadiyah juga pernah ditolak massa pada 2016. (Foto: Pito Agustin Rudiana)

"Pemasangan baliho itu tanpa izin dan musyawarah dengan pihak Muhammadiyah," tegasnya.

Surat keberatan itu memuat dua poin. Pertama, secara hukum, tidak ada larangan mendirikan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Sangso baik dalam undang-undang maupun Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, pemasangan baliho tanpa izin dan musyawarah ini dinilai tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum.

"Kami minta Bupati mencabut kembali amaran yang dipasang di tanah milik Muhammadiyah itu," kata Athaillah. ***

Masjid Lain juga Ditolak di Samalanga

"Di Bireuen, mendirikan Masjid Muhammadiyah itu sulit," ujar Ketua PDM Bireuen, Athaillah A. Lathief memulai perbincangan dengan penulis di rumahnya, 8 September 2022.

Beberapa kali, handphone di tangan dokter spesialis kandungan itu berdering. Athaillah menyampaikan arahan tindakan medis kepada seseorang di seberang telepon.

Pengurus PDM Bireuen mendirikan Masjid Muhammadiyah pertama di pusat kota tahun 2008. Pendirian masjid merupakan bentuk amal usaha Muhammadiyah, selain sekolah dan perguruan tinggi. Masjid Taqwa Muhammadiyah Bireuen adalah amal usaha pertama PDM Bireuen.

"Karena masjid adalah pusat dakwah dan kegiatan Muhammadiyah. Masyarakat minta itu (masjid)," kata pemilik Rumah Sakit Telaga Bunda Bireuen itu.

Pembangunan berjalan mulus tanpa riak. Kebetulan Bupati Bireuen (2007-2012), almarhum Teungku Nurdin Abdulrahman juga Wakil Ketua PDM Bireuen. Izin pendirian masjid langsung diberikan.

"Kalau bupatinya bukan Muhammadiyah, pasti kondisinya akan sama (ditolak)," kata Athaillah.

Berbeda ketika masjid kedua dibangun di Kecamatan Juli pada 2016 karena jamaah Musala Muhammad sudah meluber.

Perlu masjid yang lebih besar yang dibangun di lahan, sekitar 30 meter dari musala.

Aturan IMB tempat ibadah di Aceh masih mengacu pada Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006. Bedanya, pengajuan rekomendasi Masjid Muhammadiyah Samalanga terhenti di tangan Keuchik Sangso, sedangkan rekomendasi Masjid Muhammadiyah Juli terhenti di Kementerian Agama Bireuen.

Alasan penolakan Masjid Muhammadiyah Juli berdasarkan Surat Nomor Kid.01.12/HM.01/676/2016 tertanggal 17 Februari 2016, Masjid Muhammadiyah adalah masjid kelompok, bukan Ahl Sunnah Wal Jamaah. Masjid itu ditengarai akan menimbulkan perpecahan hingga pertumpahan darah.

Puncaknya saat jamaah Muhammadiyah akan melaksanakan salat Maghrib di Musala Muhammad. Tiba-tiba massa datang merebut mikrofon untuk mengambil-alih prosesi salat. Takmir dan jamaah mempertahankan hingga terjadi perkelahian. Batu-batu dilemparkan massa. Empat orang jamaah terluka dan lapor polisi. Kasus ini sampai ke Pengadilan Negeri Bireuen, tapi pelaku hanya dijatuhi hukuman percobaan.

"Kasus (penolakan) Masjid Muhammadiyah pertama itu di Juli," ucap dokter yang pernah bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito dan memimpin tim dokter saat penanganan tsunami Aceh.

Akhirnya, Masjid Muhammadiyah Juli dibangun. Meskipun sudah dapat digunakan untuk beribadah, tetapi saat ini masih tahap penyelesaian bangunan.

Isu penolakan juga sempat dihembuskan ketika Masjid Muhammadiyah di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen akan dibangun. Pembangunannya berbarengan dengan Masjid Muhammadiyah Juli. Sempat juga diwarnai demonstrasi.

"Tapi nggak berhasil. Karena masyarakat di sana tidak melakukan penolakan," ungkap Athaillah.

Rupanya tak hanya Masjid Muhammadiyah saja yang ditolak di Samalanga. Masjid yang dikelola Aswaja juga tak luput dari penolakan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bireuen, Mukhtaruddin mengungkapkan, salah satu anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, Teungku M. Ba'asyir pernah menggagas pendirian satu masjid di kampungnya, di Cot Mane, Kecamatan Samalanga.

Saat pondasi hampir selesai dibuat, timbul reaksi masyarakat. Alasannya, sudah ada masjid di dekatnya dan belum penuh jamaahnya.

M.Ba'asyir juga sedang mengkaji kasus penolakan pendirian masjid kampung di Samalanga. Lantaran masyarakat menolak, proses pembangunan dihentikan. Kasus ini tak sampai ke Pemkab Bireuen.

"Kearifan lokal masyarakat Samalanga ya seperti itu. Kami menghindari kejadian yang tak kami harapkan terjadi," kata Mukhtaruddin.

Kasus lain yang sempat mencuat adalah Masjid Jama'thul Thulab di Kompleks Pesantren Thautiatut Thulab Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Jelang salat Jum'at, 5 April 2013, sekitar 20 orang masuk ke masjid. Mereka mengambil mimbar masjid dan membuangnya ke rawa-rawa. Khatib Jumat terpaksa menggunakan kursi plastik saat menyampaikan kutbah.

Alasan massa, karena masjid itu didirikan di dalam komplek dayah. Salat Jum'at di sana dinilai tidak sah karena ada masjid mukim yang ada di sana.

"Padahal pesantren Abu Arongan itu sudah lama juga," kata Mukhtaruddin.

Sejumlah pimpinan dayah, termasuk Waled Nu bertemu. Mereka memutuskan salat Jum'at di sana sah sebagai masjid dayah.

Mukhtaruddin menduga, pelarangan pendirian masjid-masjid itu karena berdekatan lokasinya dengan masjid lama. Sementara

masjid lama belum penuh kapasitas jamaahnya. Sebelum masjid baru dibangun, semua jamaah dalam satu mukim, temasuk yang berbeda mazhab, seperti Muhammadiyah juga salat di masjid itu.

Apakah ada kekhawatiran jumlah jamaah di masjid lama akan berkurang?

"Ya...itu nggak kami dalami sampai situ," ucap Mukhtaruddin pelan.

Menurut, Athaillah, alasan-alasan yang disampaikan tersebut tak logis.

"Bayangkan jamaah empat gampong (dalam satu mukim) salat di masjid mukim. Masak nggak penuh?" tanyanya.

Apabila masjid tak penuh, menurut Athaillah ada dua kemungkinan. Banyak jamaah di mukim itu yang tidak salat Juma'at atau salat Jum'at di masjid lain.

Sementara Muhammadiyah tak mewajibkan jamaah empat desa dari satu mukim itu salat di masjid tersebut.

"(Salat Jumat harus di masjid mukim) Itu pemahaman (zaman) dulu. Di mana-mana kan sudah nggak ada lagi. Jadi masjid jangan dimonopoli," tegas Athaillah.

Sebelumnya, MPU punya aturan tentang mukim, jarak, dan syarat penambahan masjid.

"Hari ini di Aceh, mana ada (aturan itu)? Satu kampung bisa dua masjid. Dalam jarak dekat sudah ada masjid," papar Athaillah.

Ia menduga para pihak yang menolak menggunakan aturan-aturan lama untuk menjustifikasi persoalan saat ini. Pertama, karena masjid belum penuh, salat Jum'at harus di satu masjid dalam satu mukim, dan jarak antarmasjid sangat dekat. Membangun masjid baru sama dengan membangun perpecahan. Dengan kata lain, masjid baru itu adalah masjid dhirar alias bertujuan untuk memecah-belah umat.

"Maka Nabi menyuruh membakarnya, merusaknya. Itu jadi justifikasi untuk melarang masjid ini," kata Athaillah.

Ia menduga pemikiran itu berdasarkan keinginan kalangan Aswaja. Ia meminta pihak-pihak yang menolak itu mengemukakan alasan secara jujur.

Pengikut Muhammadiyah juga disebut sebagai Wahabi. Tudingan ini menurut Athaillah juga bisa dibongkar pemahamannya.

Namun sampai saat ini, intoleransi tak terselesaikan karena saling menutupi dengan tameng-tameng yang tak jelas. Kemudian tak mau dialog. Sementara di belakang, mereka membangun pemikiran yang memojokkan.

Padahal amal usaha lain dari Muhammadiyah, seperti sekolah, rumah sakit, dan perguruan tinggi di Bireuen dan Samalanga tak mendapat penolakan. Kasus penolakan sejauh ini hanya soal pembangunan masjid.

"Muhammadiyah (bangun masjid) ibarat memasukkan harimau di sana," kata Athaillah, lalu tertawa. ***



Samalanga, Kota Santri, 9 September 2022. (Foto: Pito Agustin Rudiana)

Dominasi di Kota Santri

Hari Juma't adalah hari besar umat Islam dan hari libur

buat para santri. Suasana itu terasa sekali di Kota Santri, Samalanga. Usai salat Jumat, dayah-dayah (pesantren) di sana penuh sesak orang. Orangtua atau keluarga santri-santriwati datang untuk mengajak mereka mencari hiburan ke luar dayah.

Aneka mobil dan kendaraan bermotor lalu lalang menjemput mereka dan memenuhi jalan desa. Apalagi satu deret jalan itu berjejer lebih dari satu dayah.

Pemandangan sama juga terjadi di Dayah Ummul Ayman di Gampong Puteh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, 9 September 2022. Saking sesaknya, mobil yang penulis tumpangi susah masuk ke halaman dayah untuk mencari ruang parkir yang kosong.

Istilah pesantren di Jawa mempunyai sebutan lain di Aceh, yakni dayah. Orang-orang yang belajar di pesantren disebut santri, tetapi di Aceh disebut murid. Meskipun belakangan istilah santri sudah akrab di sana.

"Dulunya, santri itu disebut aneuk meudagang," kata Tgk H. Nuruzzahri Yahya, 71 tahun.

Artinya, orang yang merantau atau orang yang mondok. Namun sekarang istilah itu berubah makna menjadi terkait aktivitas bisnis, yakni orang yang berdagang.

Sebutan Bireuen sebagai Kota Santri disematkan Bupati Bireuen, Muzzakar A. Ghani saat peringatan Hari Santri 2020. Pasalnya, jumlah dayah di Bireuen bertambah banyak dibanding kabupaten lain. Ada 2-3 pesantren besar di Bireuen yang kemudian beranak-pinak karena jumlah santri yang besar.

Meski demikian, Waled Nu menegaskan sebutan Kota Santri sebenarnya disematkan untuk Samalanga, salah satu kecamatan di Bireuen. Masyarakatnya didominasi kalangan Ahl Sunnah wal Jama'ah (Aswaja), bahkan diklaim hingga 99 persen.

Jumlah dayah di Samalanga lebih banyak ketimbang kecamatan lain di Bireuen, bahkan di Aceh. Jumlah dayah paling banyak di permukimannya mencapai tiga dayah dengan

total santri berkisar 12 ribu orang. Dayah yang dipimpin Waled Nu memiliki tingkat SMP sampai perguruan tinggi dengan jumlah santri sekitar 3.000-3.500.

"Samalanga itu kota santri. Kalau Bireuen itu kota kabupaten santri," kata Waled NU yang ditetapkan menjadi Rais Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh (2020-2025).



Pimpinan Dayah Ummul Ayman, Tgk H. Nuruzzahri Yahya, 9 September 2022.
(Foto: Pito Agustin Rudiana)

Santri-santri di dayah milik Waled Nu berasal dari berbagai daerah di Aceh, juga Medan. Bahkan ada yang dari Malaysia dan Senegal. Sementara cabang dayahnya ada ratusan di berbagai daerah, seperti Aceh, Riau, Jawa, juga di Malaysia.

"Yang dari Senegal ini kuliah di Syiah Kuala (Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh), terus belajar agama di sini," ujar Waled Nu.

Lantaran santrinya berasal dari berbagai negara, tak menutup kemungkinan juga dengan beragam mazhab. Semisal santri dari Tajikistan bermazhab Hanafi, santri Senegal bermazhab

Maliki, sementara ajaran di dayahnya bermazhab Syafi'i.

"Aswajalah kami. Tapi nggak ada banyak perbedaan (dengan mazhab lain). Bisa nyambung meski sedikit-sedikit," katanya.

Apabila menerima perbedaan, mengapa pembangunan Masjid Muhammadiyah ditolak di Kota Santri?

Waled Nu membantah masyarakat sulit menerima mazhab di luar Syafi'i. Bahkan di Samalanga tak ada masjid dengan label Nahdlatul Ulama (NU) meskipun ada masyarakat NU di sana.

"Tapi kok Muhammadiyah yang mau mendirikan masjid? Nggak enak dong!" tukas Waled Nu.

Menurut dia, penolakan terjadi karena sebelum mendirikan masjid, pihak Muhammadiyah tidak berkomunikasi dengan pihak mereka terlebih dahulu. Tak ada komunikasi, tak ada musyawarah.

"Nggak ada musyawarah dengan kami. Tahu-tahu sudah berdiri. Waduh! Salah mereka sendiri. Masalahnya *misscommunication*," katanya.

Padahal para tokoh dayah menganggap Muhammadiyah adalah rekan sejawat. Tak ada persoalan antar mereka. Namun dengan kasus tersebut, hubungan menjadi tak enak.

Pendamping Waled Nu, Teungku Faisal Rizal menambahkan, informasi awal yang diperolehnya, lahan wakaf itu akan dibangun semacam surau atau sekolah hafalan Qur'an.

"Tiba-tiba muncul masjid. Nggak ada omong. Makanya ribut itu cerita," kata Faisal yang pernah menjadi Penjabat Imum Mukim Kemukiman Masjid Besar Samalanga pada 2020.

Mereka menolak pendirian masjid Muhammadiyah karena masjid harus didirikan atas nama desa dan masyarakat. Bukan atas nama kelompok atau organisasi, seperti Muhammadiyah.

"Kalau (atas nama) masyarakat, oke, silakan. Jadi jangan dibelah-belah," kata Waled Nu.

Kedua, memastikan penambahan masjid benar-benar telah dibutuhkan. Masjid Besar Samalanga di mukim itu dinilai

belum penuh dengan jamaah ketika salat Jumat.

"Kalau masjid induk sudah penuh, mungkin bisa jadi alasan (bangun masjid). Dan ini belum ada komunikasi. Tiba-tiba muncul. Merdoelah (meledaklah)," timpal Faisal.



Suasana di Dayah Ummul Ayman, Samalanga, 9 September 2022. Foto Pito Agustin R.

Waled Nu juga menengarai masyarakat Samalanga masih asing dengan Muhammadiyah. Tak ada masjid Muhammadiyah sebelumnya di sana. Sementara banyak orang NU di sana, tetapi tak ada masjid NU.

"Orang alergi mendengar (Muhammadiyah). Itu masalahnya, makanya *misscommunication*," kata Waled Nu.

Ia juga membantah masyarakat Aswaja telah membuat jamaah Muhammadiyah tak nyaman beribadah sehingga membangun masjid sendiri.

"Nggak ada dong! Nggak pernah ada larangan ibadah di sini," tukas Waled Nu.

Penyebutan jamaah Muhammadiyah sebagai Wahabi, menurut Waled Nu karena orang-orang Muhammadiyah sendiri.

"Nggak ada itu merasa salat tak nyaman. Nggak pernah diganggu. Itu (ajaran Muhammadiyah) kan ajaran Wahabi, ya karena mereka sendiri," tukas Waled Nu.

Ia mencontohkan, orang-orang Muhammadiyah ada yang dipersilahkan salat di Masjid Teungku Di Rheum. Salat delapan rakaat juga boleh. Tidak tahlilan pun tak masalah. Selama ini, masyarakat tetap rukun.

"Masalahnya masjid Muhammadiyah ini," kata Waled Nu.

Dulu, penghapusan nama Muhammadiyah pada nama masjid bisa menjadi solusi. Namun saat ini, tawaran solusi itu sudah tak memungkinkan lagi. Putusan pengadilan telah *inkracht*. Bahkan sekedar pemasangan plang Muhammadiyah tetap jadi masalah. Ia enggan diajak pihak Muhammadiyah bertemu.

"Nasi sudah jadi bubur. Sudah nggak bisa lagi. Sudah bentrok-bentrokan jadi nggak enak," kilahnya.

Ia memastikan ciri khas kota santri terkait syariat akan tetap dipertahankan. Meskipun tak sama dengan kota-kota lain di Aceh.

"Orang sudah tahu. Kalau Samalanga ya, pikir-pikirlah. Kota keramat. Kota istimewa karena santrinya," kata Waled Nu tertawa.

Ia mencontohkan, tak ada hiburan musik di Samalanga, seperti hajatan yang menggelar organ tunggal. Penggunaan rebana ada yang pakai dan tidak. Waled Nu menyandingkan Samalanga dengan Bali.

"Kan mengutamakan kearifan lokal. Di sana ada Nyepi, di sini ada puasa, misalnya. Bagaimana bisa manyantri masyarakat dalam akidah dan budaya," paparnya.

Aceh adalah daerah syari'at. Samalanga adalah kota santri. Bireuen adalah kota kabupaten santri karena banyak pesantren ketimbang kabupaten lain. Juga banyak tokoh ulama di sana.

"Makanya Banda Aceh nanti jadi provinsi santri," imbuah Waled Nu.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga, Teungku Yahya Arsyad tak mempersoalkan gelar Samalanga Kota Santri. Malah senang banyak dayah, banyak orang mengaji. Persoalannya, ada hegemoni yang diciptakan di sana.

"Pelaksanaan syariat Islam diutamakan sunnah versi mereka. Kalau ada yang berbeda, mereka nggak toleran. Harus seperti mereka. Itu yang kami nggak cocok," papar Yahya. ***



Masjid Besar Samalanga, 9 September 2022. (Foto: Pito Agustin Rudiana)

Yaa Allah, Siapkan Masjid Kami

Ketua PDM Bireuen, Athaillah A. Latief menghitung setidaknya sudah 16 kali dilakukan pertemuan para pihak. Baik yang diinisiasi pihak Muhammadiyah maupun Pemerintah Kabupaten Bireuen. Namun tak pernah menelurkan solusi konkret.

"Progresnya akan di situ-situ terus. Nggak ada sikap. Pendekatan apa yang akan ditempuh bupati?" tanyanya.

Dalam setiap hasil pertemuan, Muhammadiyah acapkali dipojokkan. Lokasi Masjid Muhammadiyah Samalanga berdekatan dengan Masjid Besar Samalanga yang berada satu mukim. Pembangunan masjid harus ditunda karena belum ada persetujuan dari masyarakat, ulama, dan tokoh masyarakat. Pembangunan masjid dikhawatirkan menimbulkan konflik dan perpecahan.

"Kalau bupati menyelesaikan masalah dengan pendekatan klaim kearifan lokal, hanya mengakomodir kepentingan dayah saja. Bupati salah langkah," tegas Athaillah.

Ia akan memilih langkah hukum sebagai upaya yang tepat.

Sejumlah jalan tengah sempat ditawarkan beberapa pihak penolak maupun pemerintah untuk meredam konflik. Seperti usulan Bupati Bireuen sebelumnya, Muzzakar A. Ghani agar lokasi lahan tersebut digunakan untuk membangun sekolah saja.

Kemudian Waled Nu usul untuk memindahkan lokasi pembangunan masjid ke kecamatan lain. Ada juga usulan, masjid boleh dibangun, asalkan bukan untuk salat Jum'at.

Pihak Muhammadiyah menolak. Pertama, lahan yang dibeli dari sumbangan masyarakat itu diamanahkan kepada PCM Samalanga untuk pendirian masjid dengan status tanah wakaf. Tak mungkin mengubahnya untuk pendirian sekolah atau pindah ke lokasi lain.

"Jadi (PCM Muhammadiyah) yang menerima amanah wakaf nggak berani mengubahnya," tegas Athaillah.

Apabila lahan digunakan untuk pembangunan sekolah, Athaillah sangsi nanti tak ada penolakan. Salah satu buktinya ketika ada plang bertuliskan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga juga dicabut.

"Pemasangan plang itu jadi *test case*. Kami nggak tahu sebenarnya yang ditolak itu masjid atau apa," ujar Athaillah.

Ada tawaran juga dari anggota DPRK Bireuen dari daerah pemilihan Samalanga, M. Ja'far.

"Duduk dulu dengan masyarakat Samalanga. Nanti kalau masjid (Masjid Besar Samalanga) itu tak cukup lagi (menampung jamaah), baru kita bangun masjid," kata Ja'far saat bertemu Athaillah dalam pertemuan pada 8 September 2022.

Athaillah tegas menolak alasan itu.

"Nggak bisa. Orang nggak bisa disuruh beli di satu warung. Itu monopoli. Itu namanya mengabaikan masyarakat. Nggak heterogen. Nggak bisa masyarakat satu pikiran seperti dia," tegas Athaillah.

Label Muhammadiyah yang dinilai sensitif di Samalanga sempat diusulkan untuk dihapus dari nama masjid. Usulan

itu pernah dikemukakan dalam pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banda Aceh.

Muhammadiyah secara internal, tak keberatan apabila hanya menyematkan nama Masjid At Taqwa saja. Mengingat nama masjid At Taqwa di Aceh identik dengan masjid Muhammadiyah. Apabila itu bisa jadi solusi, pihak Muhammadiyah punya persyaratan.

"Jangan kemudian diganti kepemilikannya (dari Muhammadiyah menjadi Aswaja)," tambah Athaillah.

Berkaca pada beberapa pengalaman, kepengurusan takmir masjid dipilih oleh masyarakat setempat. Tak menutup kemungkinan proses pemilihan bisa dipolitisasi dan jatuh ke tangan orang-orang Aswaja.

Lantas, jika label Muhammadiyah dihilangkan, maka akankah masalah selesai?

"Tidak juga," tukas Athaillah.



Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Athaillah A. Latief, 8 September 2022. (Foto: Pito Agustin Rudiana)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Bireuen, Mukhtaruddin juga menengarai persoalan nama Muhammadiyah jadi inti masalah. Ia mencontohkan, Masjid Muhammadiyah Juli bisa dibangun karena namanya menjadi Masjid At-Taqwa Juli. Begitu juga Masjid Taqwa Gandapura yang diduga dikelola Muhammadiyah.

"Rata-rata Masjid At Taqwa milik Muhammadiyah, ya," kata Mukhtar.

Namun Mukhtaruddin tak bisa memastikan penghilangan nama Muhammadiyah bisa jadi solusi. Pemikiran masyarakat tak bisa diukur satu per satu. Pertimbangan Pemkab Bireuen hanya soal ada potensi ketidaknyamanan dan gangguan keamanan yang bakal timbul.

"Karena yang bukan masjid Muhammadiyah juga pernah ditolak di Samalanga," ungkap Muktaruddin.

PDM Bireuen dan PCM Samalanga telah mendiskusikan soal penolakan pembangunan masjid dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Haedar sempat menanyakan kepada panitia terkait implikasi pembangunan masjid. Athaillah mengaku tak tahu persis. Namun ia menduga apabila masjid dibangun akan terjadi perubahan sosial di Samalanga. Gerakan dakwah Muhammadiyah akan merombak banyak kebiasaan yang terjadi di sana.

"Itu dugaan-dugaan kami (soal alasan penolakan sebenarnya)," kata Athaillah.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional di Samalanga yang dimaksud dinilai Athaillah tidak dipahami masyarakat Muhammadiyah.

"Pengaruh pada sosial ekonomi, pasti. Kalau ekonomi pasti ada pihak-pihak yang terganggu. Saya kira itu yang paling mendasar kalau jujur kami bilang," ungkap Athaillah.

Apabila asumsi itu benar, menurut Athaillah, masyarakat tradisional Samalanga tak perlu khawatir. Muhammadiyah hadir untuk mencerahkan melalui dakwah, bukan menentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah bertumbuh di sana. Apabila

kebiasaan itu masih dilakukan, berarti pemahaman masyarakat masih seperti itu.

"Kalau tidak (dilakukan), berarti pemikiran masyarakat sudah maju. Jadi jangan berkutat (pada alasan-alasan) seperti itu (yang digaungkan pihak penolak) sehingga masyarakat jumut pemikirannya," papar Athaillah.

Untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya dan mencari solusi, pihak Muhammadiyah minta dipertemukan dengan para penolak. Apabila tak boleh membangun saat ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada penjelasannya sampai kapan ditunda.

"Berarti setelah (penundaan) itu, sudah boleh (bangun masjid)," katanya.

Dari belasan kali pertemuan yang telah dilakukan, Athaillah menilai selama ini pihak penolak yang dihadirkan tidak punya kompetensi. Bukan pihak penolak seperti yang diharapkan.

Lantas siapakah pihak penolak yang seharusnya dihadirkan?

"Abu Mudi (Pimpinan Dayah Ma'hadal U'lum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga (Mudi Mesra) Abu Syekh Hasanoel Basri HG alias Abu Mudi)," tegas Athaillah saat dihubungi penulis, 7 Oktober 2022.

Alasannya, pertama, Abu Mudi adalah tokoh masyarakat dan ulama kharismatik yang turut membuat surat penolakan pembangunan masjid. Kedua, meskipun ada surat-surat penolakan dari pihak lain, seperti imam Masjid Besar Samalanga, dan lainnya, Abu Mudi dianggap sebagai tokoh sentral.

"Karena Abu Mudi dianggap menjadi pelindungnya. Pihak pema menjadi enggan dan sungkan berlawanan dengan beliau," kata Athaillah.

Sedangkan pihak yang menjadi mediator, menurut Athaillah adalah tokoh berpengaruh yang tidak merasa sungkan dengan tokoh sentral di Samalanga. Kalau orang Samalanga pasti sungkan dengan Abu Mudi.

Athaillah mengaku punya hubungan darah dengan ulama-

ulama dayah tradisional yang berpengaruh itu. Ia berharap Pemerintah Bireuen menjadi mediator dengan menghadirkan para pihak, bukan minta Muhammadiyah untuk jemput bola merampungkan persoalan.

"Tolonglah Pak Bupati, sebagai pejabat. Ajaklah kami, ajaklah mereka. Jangan kami yang berinisiatif mengajak. Saya ini anak keciliah," ucapnya.

Ia mengusulkan ada tokoh dari Banda Aceh atau orang yang tak bersentuhan dengan tokoh sentral Samalanga. Setidaknya tokoh ini jujur dan bisa membuat alasan penolakan pendirian masjid tersebut terungkap. Bahkan bila mungkin, Menteri Agama yang datang menengahi.

"Beliau ini orang yang sangat dihormati dan tak kenal siapa Abu Mudi, jadi nggak ada beban," imbuh Athaillah.

Sedangkan pihak-pihak yang bertemu dalam perundingan mestinya adalah para petingginya agar bisa melakukan pembicaraan yang substantif untuk menyelesaikan akar masalahnya. Tak menutup kemungkinan perilaku Muhammadiyah selama ini membuat masyarakat tidak berkenan.

"Kami akan memperbaiki diri atas masukan para petingginya (yang diundang). Kalau yang di level bawah ini, mainnya pokoke," terangnya.

Namun hingga tulisan ini rampung, pertemuan yang diharapkan tak kunjung terjadi.

Waled Nu menjelaskan, mendirikan masjid di Samalanga ada prosesnya. Selain tidak mengatasnamakan kelompok, juga perlu musyawarah dengan desa-desa dalam satu mukim. Mereka yang akan mempertimbangkan perlu tidaknya masjid baru.

"Kan masyarakat nggak cuma Muhammadiyah saja. Ada kearifan lokal," katanya.

Ia tak menutup kelak kondisi bisa berubah, masjid bisa dibangun. Hanya saja, ia minta persoalan ini tak perlu dibicarakan dulu saat ini karena masih panas. Langkah

pertama, mengajak musyawarah masyarakat empat desa dalam satu mukim juga belum dilakukan.

Kondisi memanas karena kegiatan pembangunan dilanjutkan lagi setelah putusan pengadilan yang menyatakan menolak gugatan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Bireuen melalui Satpol PP-WH juga telah melarang dengan dasar putusan pengadilan, baik PTUN Banda Aceh maupun Medan.

Bagi Waled Nu, putusan pengadilan itu diartikan pembangunan mesti dihentikan, bukan lagi ditunda. Apabila proses pembangunan tetap dilanjutkan, Waled Nu angkat tangan jika terjadi gejolak lagi.

Ia menegaskan persoalan itu sudah mentok. Bola ada di tangan Muhammadiyah dan Pemkab Bireuen. Ia terkesan menutup pintu dialog karena sudah terlanjur tak enak hati.

"Payah itu. Angkat batang terendamlah (maksudnya, berat). Lebih baik tenang-tenang saja, jangan usik-usik. Colling down dulu," katanya.

Mukhtaruddin membenarkan pembangunan masjid diminta tidak dilanjutkan dulu karena sudah ada putusan hukumnya. pemkab juga belum ada rencana mengkaji IMB yang sudah keluar. Masih sebatas akan meminta penjelasan dari pihak dinas yang telah mengeluarkan izin.

Ia juga menyatakan tidak tahu soal tak ada syarat rekomendasi yang harus dipenuhi panitia pembangunan masjid berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2016. Pihaknya masih berpedoman pada syarat dalam Peraturan Bersama Menteri Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Pihak pemerintah, lanjut Mukhtaruddin, sebenarnya tak mempersoalkan pembangunan masjid tersebut asalkan untuk kebaikan. Apalagi prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja, beberapa pihak menyatakan pembangunan masjid itu akan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Itu yang harus jadi pertimbangan kami. Meskipun IMB sudah dikeluarkan dan pengadilan sudah ada putusan," imbuhnya.

Selama ini, dialog sudah sering dilakukan. Mukhtaruddin menegaskan persoalannya, poin awal soal keharusan memberitahukan rencana pembangunan masjid kepada kepala desa dan masyarakat tak dilakukan. Karena harus ada rekomendasi masyarakat sekitar.

Mukhtar memastikan pemkab akan melakukan mediasi tetapi belum jelas kapan waktunya. Sementara langkah ke depan tetap mengacu pada hasil rapat tersebut.

Setelah pertemuan 8 September 2022, pihak Muhammadiyah memutuskan untuk menunda pembangunan masjid selama tiga bulan. Sembari menunggu respon Pemkab Bireuen karena pihak Muhammadiyah telah melayangkan surat keberatan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan turun ke Samalanga.

"Ini tanah wakaf milik Muhammadiyah untuk dibangun masjid. Kalau wakaf harus dilakukan," kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Muarrir Asy'ary saat ditemui penulis di Kampus Ummah Bireuen, 8 September 2022.

Pihaknya terus mengupayakan agar bisa bertemu dengan pihak-pihak berkompeten yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Ibu-ibu Aisyiyah Samalanga juga berharap besar. Mereka tak habis pikir, mengapa setiap upaya membangun masjid selalu dihalangi.

"Kami kepingin kali yaa Allah, siapkan masjid kami," seru mereka, beberapa di antaranya mengangkat kedua tangannya.

BAB 4

KISAH MARAPU DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Tak Putus Dirundung Diskriminasi, Kisah Pelajar Marapu di Sumba Timur

Oleh: Rizka Nur Laily M

(Jurnalis merdeka.com)

Angin malam yang berembus cukup kencang dari padang sabana tidak membuat kami kedinginan.

Kami sedang menikmati malam di rumah panggung beratap alang-alang kering di Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sambil menunggu makan malam dihidangkan di rumah tanpa dinding itu, kami berbincang dengan Jekson, seorang pelajar pemeluk Marapu



Pembelajaran soal Marapu di SMAN 1 Rindi Umalulu. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

Di rumah bambu yang jadi pusat kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Sabana Sumba, Jekson menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan guru agama Kristen saat duduk di SMPN 1 Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Pasalnya, ia tak pernah membawa Buku Mingguan yang menjadi bukti ia ikut ibadah Minggu di gereja,

Jekson sudah lulus SMA, Juni 2022 lalu. Tetapi ia masih ingat berbagai macam hukuman yang diterima dari sang guru. Berdiri satu kaki dengan tangan menarik daun telinga di muka kelas hingga berjalan menggunakan lutut pernah ia lakoni.

“Paling parah itu jalan pakai lutut, sampai berdarah. Memutar dari meja guru di depan sampai kursi murid di belakang,” ujarnya, Senin (22/8/2022) malam.

Ia menolak pergi ibadah Minggu ke gereja lantaran bukan penganut agama Kristen. Seperti orang tuanya, Jekson mengimani Marapu. Dalam aturan hukum di Indonesia, Marapu masuk dalam kategori Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Wakil Ketua Badan Pengurus Marapu (BPM) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Remi menemui kami pada malam pertama kami di Sumba yang indah itu, Minggu (21-8-2022). Di Desa Prailiu (tidak jauh dari Waingapu) di mana ia tinggal, masih banyak rumah tradisional Sumba dan makam khas Sumba hasil peninggalan budaya megalit.

Pria yang masih keturunan bangsawan itu menjelaskan Marapu adalah kepercayaan asli atau agama lokal warga Sumba sejak ribuan tahun lalu. Sebagaimana agama dan kepercayaan lain, Marapu mengimani keberadaan Tuhan.

“Marapu artinya roh leluhur, menjadi jembatan penghubung antara Tuhan dengan manusia, seperti galah untuk memetik buah,” ujarnya.

Ajaran Marapu menyatakan mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan, hanya sebutannya saja. Ada banyak sebutannya, seperti *Na Pandanyura Ngara – Na Pandapiaka Tamu* (Yang

Tidak Disebutkan Gelarnya dan Yang Tidak Dikatakan Namanya).

Saat ritual di tempat yang dianggap suci (bisa batu, tonggak kayu, atau pohon besar), mereka menyampaikan doa kepada roh leluhur agar disampaikan kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan menyampaikan pesan melalui roh leluhur kepada umat Marapu. Pesan itu akan dibaca pemimpin ritual melalui medium hati binatang ternak atau usus ayam yang dikorbankan.

Tidak semua pohon dan batu bisa menjadi tempat ritual, ada syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi. Biasanya, tempat-tempat ritual Marapu merupakan peninggalan leluhur.

Kisah Jekson

Jekson bukan satu-satunya pelajar pemeluk Marapu yang menerima hukuman. Ada tiga pelajar lain yang juga jadi sasaran amarah guru agama Kristen di SMPN 1 Umalulu saat itu.

Para pelajar pemeluk Marapu ini terpaksa mengikuti pelajaran agama Kristen lantaran diwajibkan pihak sekolah memilih salah satu agama resmi yang diakui negara. Kristen sendiri adalah agama mayoritas di Sumba Timur.

Seperti diketahui, ada enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan Marapu sebagai agama lokal atau agama leluhur belum diakui oleh negara.

Empat pelajar itu enggan pergi ke gereja setiap hari Minggu lantaran mereka tidak mengimani agama Kristen. Mereka juga tidak mau pura-pura agar terbebas dari hukuman guru agama di sekolah.

Padahal, setiap pekan saat pelajaran agama Kristen tiba, sang guru menanyakan dan mengecek Buku Mingguan milik para pelajar. Barang siapa tidak bisa menunjukkan tanda tangan pendeta bukti yang bersangkutan menghadiri ibadah minggu, ia akan diganjar hukuman.

"Ada teman-teman yang sengaja contek itu tanda tangan di buku, supaya tidak kena hukum guru," tutur Jekson.

Jekson mengatakan tindakan semena-mena guru itu tidak jadi masalah serius bagi keluarganya. Kedua orang tuanya tahu ia dipaksa mengikuti pelajaran agama Kristen di sekolah.

"Tapi mau bagaimana lagi. Itu sudah aturan sekolah, orang tua saya juga tidak berani protes," katanya.

Akhirnya, sepekan sekali selama menempuh pendidikan menengah pertama sejak tahun pelajaran 2016/2017, Jekson memilih menjalani hukuman dari guru alih-alih mengorbankan keyakinannya sebagai pemeluk Marapu.

"Orang tua saya Marapu. Saya lahir sudah dilakukan ritual, hingga kini keyakinan saya tetap Marapu," kata Jekson tegas.

Di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di wilayah pedesaan, masyarakat masih menganggap guru sebagai "dewa" yang boleh bertindak apa saja terhadap anak didiknya. Koordinator LSM Sabana Sumba, Rambu Dai Mami (Amy) menceritakan pernah dirundung masyarakat lantaran ia melaporkan guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak didiknya.

"Istilah di ujung rotan ada emas, guru kencing berdiri murid kencing berlari, masih berlaku di masyarakat kami," ujarnya.

September 2022 ini, Jekson diterima menjadi mahasiswa Program Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang. Ini adalah jurusan yang mencetak para guru atau penyuluhan agama lokal, agama leluhur yang dalam aturan hukum di Indonesia disebut sebagai penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Kenangan Jekson saat dihukum gurunya itu tentu tidak akan pernah hilang. Ia sendiri punya cita-cita menjadi guru atau penyuluhan Marapu di tanah kelahirannya.

Taat Aturan Sekolah, Korbankan Keyakinan

Ilvia, Ernin, dan Sindi adalah tiga pelajar penghayat

kepercayaan Marapu di SMAN 1 Rindi, Umalulu. Berbeda dengan Jekson, saat duduk di bangku SD dan SMP, mereka memilih taat pada aturan sekolah, yaitu ikut pelajaran agama yang resmi diakui negara.

"Iktu saja karena memang harus pilih itu salah satu agama," ujar Sindi yang kini duduk di bangku kelas X MIPA.

Orang tua Sindi, Ilvia, dan Ernin tidak mempermasalahkan pihak sekolah yang memaksa buah hatinya mengikuti pelajaran agama yang berbeda dengan keyakinan mereka.

"Kita orang Marapu sama saja dengan orang Kristen, hanya beda cara beribadah. Tidak jadi masalah kami di sekolah belajar agama Kristen, orangtua tidak larang karena di rumah tetap Marapu," imbuh Sindi saat ditemui di Ruang Kepala Sekolah SMAN 1 Rindi Umalulu, Senin (22/8/2022).

Rambu Amy mengatakan para orangtua mengizinkan anak-anaknya memilih pelajaran agama di sekolah agar bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Apapun keputusan pihak sekolah harus ditaati meskipun mencederai hak dasar anaknya sebagai manusia.



Ama Nggia, orangtua dari pelajar penghayat Marapu yang menuntut agar anaknya mendapat pelajaran Marapu. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

"Kalau tidak ikut pelajaran agama Kristen, tidak ada nilai agama, otomatis tidak naik kelas," ungkapnya.

Saya menemui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMPN 1 Umalulu, I Nyoman Sudendera. Ia tak menampik fakta setiap peserta didik wajib mengikuti pelajaran salah satu agama resmi.

"Tidak ada guru kepercayaan, mau tidak mau kami harapkan anak yang masuk ikut salah satu agama," tuturnya, Senin siang (22/8/2022).

Saat mendaftarkan masuk ke SMPN 1 Umalulu, calon pelajar diminta menuliskan keyakinannya dalam formulir pendaftaran. Pada tahun pelajaran 2022/2023, ada 20 pelajar baru yang memeluk Marapu. Secara keseluruhan, ada sekitar 60 orang yang memeluk Marapu dari total 294 pelajar.

"Kami beri tahu siswa dan orangtuanya kalau belum ada guru pendidikan kepercayaan. Di sini mayoritas Kristen Protestan, ya kami sarankan ikut pelajaran agama itu. Di rumah terserah, yang penting di sekolah harus ikut salah satu pelajaran agama," ungkap Nyoman.

Saya bertemu Kepala Bidang Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, Marten Luter Umbu Lapu di Aula Dinas Pendidikan Sumba Timur, Selasa (23/8/2022). Ia menjelaskan mengapa masih jarang ada guru atau penyuluhan Marapu di Sumba Timur.

Ada keterbatasan anggaran untuk merekrut tenaga pendidik, keterbatasan calon tenaga pendidik, dan letak sekolah yang terpencil dan sulit dijangkau. Hingga kini ada 256 sekolah dasar yang tersebar di 22 kecamatan yang belum menerapkan pendidikan penghayat.

Dengan kondisi seperti itu, Marten tak menampik fakta selama ini para pelajar pemeluk Marapu 'dipaksa' mengikuti salah satu pelajaran agama resmi. Tetapi mereka tetap tercatat sebagai siswa pemeluk Marapu di Data Pokok Pendidikan (Dapodik),



Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. (Foto: Rizka Nur Laily Muallifa)

"Kalau tidak ada gurunya, berarti peserta didik mengikuti salah satu agama resmi," ujarnya.

Tetapi ada perkembangan yang menggembirakan. Marten mengatakan Bimtek Dirjen KMA baru saja merekrut guru penyuluhan kepercayaan. Mulai Senin (29/8/2022), ada enam SD yang menyelenggarakan pendidikan penghayat.

Enam sekolah dasar yang ditunjuk menjadi model itu berdasarkan pertimbangan yang memiliki pelajar pemeluk Marapu dan jarak kediaman tenaga pendidik ke sekolah. Alhasil, mayoritas sekolah dasar itu berada di kota dan daerah yang akses jalannya terjangkau, yakni di Kecamatan Kota Waingape, Umalulu, Kanatang, dan Kahaungu Eti.

Sementara itu, para pelajar pemeluk Marapu di 18 kecamatan lain masih harus bersabar sampai waktu tidak tentu agar haknya terpenuhi. Apakah harus menunggu Jekson lulus kuliah dari Untag, Semarang?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan pendidikan

harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 12 ayat 1 (a) menegaskan setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Kemudian, Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan menyebut peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME berhak memperoleh layanan pendidikan kepercayaan sesuai hak-hak peserta didik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peraturan di atas menunjukkan negara telah hadir dan berpihak pada peserta didik penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai keyakinannya. Namun, implementasi di tingkat daerah masih jauh panggang dari api.

Penyelenggaraan yang "Ambyar"

Di ruang kerjanya, Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu, Benyamin Nimrod Sutalo menuturkan sejak tahun 2019 sekolah telah berupaya memenuhi hak para pelajar Marapu, Senin (22/8/2022). Waktu itu yang menjadi kepala sekolah adalah Bernard.

Sayang, satu tahun kemudian ia pindah tugas ke sekolah lain. Pengantinya, Junianty berpendapat pendidikan agama Marapu di SMAN 1 Rindi Umalulu tidak bisa dilaksanakan karena penyuluhnya tidak bergelar sarjana. Ibu Kahii Ata Minya yang menjadi penyuluhan Marapu hanya tamatan SMA.

"Itu tidak ada di sini, sulit cari orang Marapu yang sarjana. Akhirnya buntu, siswa pemeluk Marapu terkatung-katung," jelasnya.

Pada semester ganjil 2021/2022, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (KMA) Kemendikbud Ristek menugaskan seorang penyuluhan kepercayaan di SMAN 1 Rindi Umalulu. Sayang, penunjukan itu terkesan asal-asalan.

Guru ini tidak memiliki kualifikasi pengetahuan tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Ia juga belum pernah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) khusus yang diselenggarakan Direktorat KMA.

Dalam praktiknya, guru penyuluh itu juga jarang masuk ke kelas. Buntutnya, para pelajar Marapu di SMAN 1 Rindi mengaku tidak puas.

“Guru jarang masuk. Kalau masuk kasih tugas mencatat,” tutur Ilvia, pelajar penghayat kepercayaan Marapu kelas XI MIPA.

Ilvia dan teman-temannya sesama pemeluk Marapu di SMAN 1 Rindi Umalulu juga tidak memiliki buku pegangan pembelajaran. Akibatnya pengetahuan yang mereka peroleh dari sekolah belum cukup.

“Buku hanya satu untuk guru, siswa mencatat,” ujar Ernin, pelajar Marapu lainnya.

Ilvia dan Ernin mengungkapkan, selain soal Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam konteks universal, mereka ingin belajar sejarah dan ritual Marapu. Begitu pula dengan Sindi yang mempunyai harapan sama.

“Baru saat duduk di SMA ada guru Marapu. Senang jika dijelaskan sejarah Marapu seperti apa karena selama ini tidak tahu,” ujar dia.

Beruntung kondisi mulai membaik. Tahun ajaran 2022/2023 yang dimulai Agustus 2022 adalah lembaran baru pelayanan pendidikan bagi pelajar Marapu di SMAN 1 Rindi. Kahii Ata Minya diminta kembali mengajar di sekolah itu.

Usai acara persiapan pelaksanaan pendidikan kepercayaan di Kabupaten Sumba Timur di Aula Dinas Pendidikan, saya bertemu Project Manager Program Lii Marapu, Anton Jawamara. Salah satu konsen Lii Marapu adalah mempercepat terselenggaranya layanan pendidikan bagi para pelajar Marapu di sekolah.

Anton menuturkan, para pelajar pemeluk Marapu menghadapi situasi pendidikan yang darurat. Seharusnya penyuluh pendidikan

Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tidak dikenai aturan yang sama dengan guru lainnya.

“Undang-Undang Dasar menyebutkan pelajar berhak mendapat pelajaran agama dari guru yang seagama. Dalam konteks pendidikan penghayat, kita dihadapkan pada Undang-Undang tentang Guru, bahwa guru harus S1. Ini tidak ada di Marapu,” ungkapnya, Selasa (23/8/2022).

Terlebih sejak Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 disahkan enam tahun silam hingga kini belum ada sarjana yang memiliki kualifikasi sebagai lulusan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Program studi untuk menghasilkan guru berkualifikasi itu baru ada satu di Indonesia, yakni di Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Jawa Tengah. Jurusan ini pertama kali menerima mahasiswa baru pada 2021 lalu.

Jika bersikeras mengacu pada UU tentang guru dan dosen, hak pelajar penghayat mendapat pendidikan agama sesuai keyakinannya tentu tak bisa terpenuhi.

Peran Banyak Pihak

Anton Jawamara yang juga Koordinator Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation) menuturkan, penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sudah lama mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, ketika negara sudah mengakui eksistensinya, layanan pendidikan bagi para pelajar Marapu di Kabupaten Sumba Timur belum berjalan.

“Meskipun sudah diakui, sekarang penghayat kepercayaan seolah jadi makhluk terekclusi, mereka mengalami diskriminasi berlapis. Sudah minoritas, mendapat stigma negatif sesat, kafir. Padahal mereka percaya Tuhan itu ada,” ungkap pria yang akrab disapa Anjar itu.

Atas dasar itulah, Konsorsium Marungga Foundation dan Sumba Integrated Development (SID) merancang program Lii

Marapu untuk mendorong para pemeluk Marapu di Kabupaten Sumba Timur lebih berdaya. Kerja sama antara perancang program Lii Marapu dengan masyarakat pemeluk Marapu dan tokoh-tokoh masyarakat setempat mulai berubah baik.

Salah satu hasilnya, Direktorat KMA Kemendikbud Ristek melalui Surat Keputusan Direktur KMA Nomor 1345/F2/KB.07.08/2022 menunjuk 13 penyuluhan kepercayaan di Kabupaten Sumba Timur, Agustus 2022. Mereka bertugas di 13 institusi pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA di Kabupaten Sumba Timur.

Tetapi pihak sekolah juga memiliki peran yang besar untuk mewujudkan layanan pendidikan bagi para pelajar Marapu. SMAN 1 Rindi Umalulu bisa menjadi contoh bagi sekolah lain.

Kepala sekolah bergerak aktif mencari tahu dan mengupayakan terselenggaranya layanan pendidikan Marapu di sekolahnya. Pihak sekolah juga memberikan imbalan tambahan bagi penyuluhan kepercayaan.

"Saya ambil kebijakan menggunakan uang sumbangan komite sekolah untuk diberikan kepada penyuluhan kepercayaan. Kami hitung Rp 25 ribu per jam, sepekan ada dua jam pelajaran seperti pelajaran agama lain," ungkap Nimrod.

Nimrod mengupayakan layanan pendidikan Marapu di SMAN 1 Rindi Umalulu karena ia ingin menaati aturan pemerintah yang sudah mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Pemerintah juga mewajibkan sekolah memenuhi hak pendidikan pelajar penghayat mendapat pelajaran agama sesuai keyakinannya.

"Walaupun saya tidak beragama seperti mereka, tapi saya ingin mereka punya kebebasan menerima pelajaran kepercayaan," katanya.

Senin siang (22/8/2022) adalah hari pertama Kahii kembali mengajar setelah mendapat penolakan dari kepala sekolah pada 2020 silam karena tak bergelar sarjana. Saya beruntung bisa mengikuti Kahii mengajar soal Marapu di SMAN 1 Rindi

Umalulu.

Pembelajaran soal Marapu tidak dilakukan di ruang kelas karena jumlah pelajar penghayat Marapu jauh lebih sedikit dibanding pemeluk agama lain. Kahii dan delapan pelajar penghayat kelas XII yang seluruhnya laki-laki menempati ruang aula sekolah.

"Kita penghayat kepercayaan punya salam nasional, rahayu. Kalau berdoa cukup dengan heningkan kepala, kita punya hati tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujar Kahii di hadapan para pelajar pemeluk Marapu.

Usai mengajar, Kahii mengaku lega bisa mendidik para pelajar Marapu. Ia menempuh jalan sekira 17 kilometer dengan sebagian jalan berbatu dari rumahnya di Desa Lairuru Kecamatan Umalulu menuju SMAN 1 Rindi Umalulu di Kelurahan Watuhadang.

Hingga saat ini, SMAN 1 Rindi Umalulu masih jadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Sumba Timur yang sudah memberikan layanan pendidikan agama bagi para pelajar Marapu. Di sekolah itu, ada 50 pelajar Marapu dari total 1.083 pelajar.

Perjuangan Belum Berakhir

Sementara itu para pelajar pemeluk Marapu di SMPN 1 Umalulu masih belum beruntung. Mereka belum mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinannya.

Wakasek Bidang Kesiswaan SMPN 1 Umalulu, I Nyoman Sudendera menyatakan, mayoritas orang tua pelajar penghayat Marapu di sekolah itu tak menyatakan keberatan anaknya mengikuti pelajaran agama lain.

Padahal Nggia Marapeti, orang tua salah satu pelajar pemeluk Marapu di SMPN 1 Umalulu mengaku keberatan. Ia tidak rela anaknya dipaksa ikut pelajaran agama yang berbeda dari keyakinannya.

"Anak saya masuk SMP tahun 2021. Saya dekati guru

SMP, kenapa sudah diakui ini kepercayaan tapi kamu suruh pilih lagi (pelajaran agama lain). Kecuali pemerintah belum mengakui itu beda lagi cerita," tegas Ama Nggia, sapaan akrabnya.

Tetapi ia tidak mendapat jawaban yang memuaskan hati dari sekolah. Beberapa bulan kemudian Ama Nggia nekat menemui Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing di kantornya di Kota Waingapu, 21 Februari 2022. Khristofel menemui langsung Ama Nggia.

Ia menyerahkan surat yang berisi keluhan soal anaknya yang tidak mendapat layanan pendidikan Marapu. Kepada Khristofel, ia juga minta agar Pemda Kabupaten Sumba Timur memperhatikan hak-hak para pelajar Marapu di Sumba Timur.

"Kalau tidak ada tenaga pengajar, kosongkan saja nilai agama di sekolah. Biar kami tetap kasih belajar berdoa di rumah," demikian bunyi poin pertama surat permohonan Ama Nggia kepada Bupati Sumba Timur.

Setelah ditunggu, Khristofel ternyata tidak segera menyelesaikan keluhan Ama Nggia. Padahal Khristofel adalah orang yang menjadi saksi ahli dalam *judicial review* UU Administrasi dan Kependudukan yang diajukan para pemeluk agama lokal tahun 2016 lalu. Proses hukum ini memutuskan negara harus mengakui Kepercayaan Terhadap Tuhan YME atau agama lokal.

"Dia bilang nanti selang dua minggu akan ditindaklanjuti suratnya. Dua minggu kemudian saya pergi lagi ke kantornya tapi tidak ketemu karena dia pergi ke Jakarta. Dua bulan kemudian (saya) pergi ke kantornya tapi tidak ketemu sampai sekarang," tuturnya, Selasa (23/8/2022).

Ama Nggia yang bekerja sebagai petani itu bersikeras memperjuangkan hak anaknya mendapat pendidikan Marapu karena pemeluk agama dan penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sama di mata hukum.

"Saya hanya mau meluruskan, tidak boleh ada paksaan karena kita sama dilindungi Undang-Undang," katanya.

Ia mengingatkan ada toleransi antaragama. Kalau si anak sendiri senang masuk agama tertentu itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau si anak masih tetap memeluk Marapu ya tidak boleh dipaksa ikut pelajaran agama lain

Hingga pekan ketiga Agustus 2022, Ama Nggia tidak kunjung mendapat tanggapan dari Bupati Sumba Timur. Di sisi lain, sang buah hati dan puluhan anak penghayat kepercayaan Marapu di SMPN 1 Umalulu masih diwajibkan memilih salah satu pelajaran agama di sekolah.

Itu artinya pelanggaran hak atas pendidikan masih terjadi. Para pelajar pemeluk Marapu tak putus dirundung diskriminasi.

Potret Diskriminasi terhadap Pemeluk Marapu di Sumba Timur

Oleh: Sirojul Khafid

(Jurnalis Harian Jogja)

Hamana Gara Limu, seorang penduduk Desa Watupuda singgah di rumah perempuan pembela warga Marapu, Rambu Dai Mami (Amy) di Desa Kawangu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Pria berusia 30 tahun itu menceritakan para pemeluk agama lokal atau agama leluhur, Marapu di desanya.

Kopi Sumba yang hitam dan panas menemaninya percakapan kami yang duduk di atas balai-balai rumah panggung beratap rumbia.

"Misal tidak ada sosialisasi bahwa penghayat kepercayaan sudah diakui negara, mungkin semua masyarakat Desa Watupuda sudah Kristen semua."

"Habis sudah yang menganut kepercayaan leluhur Marapu."

Dahulu semua masyarakat Desa Watupuda seperti di wilayah Sumba lainnya adalah pemeluk Marapu. Tetapi karena sejak dahulu tidak diakui sebagai suatu agama dan ada diskriminasi, jumlah pemeluk Marapu terus menurun.

Kini di Desa Watupuda pemeluk Marapu hanya tinggal 210 orang dari total 417 penduduk.

Hamana mengatakan masyarakat Desa Watupuda baru memperjuangkan identitasnya sebagai pemeluk Marapu pada tahun 2022. Padahal negara telah mengakui kepercayaan

atau agama lokal, termasuk di dalamnya Marapu sejak tahun 2017.

Betapa lambatnya informasi sampai ke Sumba Timur!

Marapu adalah agama lokal atau agama leluhur yang dipeluk masyarakat di Pulau Sumba sejak dahulu kala. Di Indonesia, Marapu dimasukkan dalam "kotak" Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

Marapu sendiri artinya roh leluhur. Ajaran agama leluhur ini meyakini hubungan manusia dengan Tuhan perlu perantara, yaitu roh leluhur. Semua keinginan manusia disampaikan dalam bentuk doa dalam suatu ritual kepada leluhur.

Kemudian roh leluhur menyampaikan kepada Tuhan yang namanya tidak boleh disebut. Sebagai balasan, Tuhan menyampaikan pesannya kepada umat Marapu melalui roh leluhur.

Roh Leluhur menyampaikan pesan itu dalam bentuk tanda-tanda pada hati dari binatang atau usus dari ayam yang dikorbankan dalam ritual itu. Hanya pemimpin ritual yang bisa membaca tanda-tanda ini. Setelah membaca, pemimpin ritual menyampaikan kepada umat Marapu.

Ya, pemeluk Marapu hanya boleh menyebutkan sebutan dari Tuhan saja. Ada banyak sebutan bagi Tuhan. Salah satunya adalah *Na Mawulu Tanga Mata Kalindi Uru – Na Mahangatu Ri Wihi Ri Lima* (Yang Membentuk Alis Mata dan Batang Hidung. Yang Menyayat Tulang Kaki dan Tulang Tangan).

Di Indonesia, perjalanan para pemeluk agama lokal memang lekat dengan diskriminasi dari negara. Pasalnya, pemerintah tidak mengakui agama lokal sehingga para pemeluknya dipaksa memilih salah satu dari enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan belakangan ditambah Khonghucu.

Waktu itu, dibawah pemerintah Presiden Soeharto yang otoriter, tidak ada yang berani melawan kebijakan ini. Bagi mayoritas pemeluk agama lokal, tak ada pilihan lain kecuali tunduk kepada pemerintah.

Tetapi kenyataannya mereka masih menjalankan keyakinan asli mereka. Pencantuman salah satu agama resmi di KTP hanya formalitas saja agar bisa mengakses berbagai layanan dari negara, seperti Akta Kelahiran.

Diskriminasi terhadap Marapu

Warga pemeluk Marapu juga tidak luput dari diskriminasi ini. Mereka terpaksa mencantumkan agama Kristen atau Katolik pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Pernikahan. Kristen dan Katolik merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Sumba Timur.

Ndamung Kilimandu, seorang warga Desa Watuhadang masih ingat pengalamannya harus memilih salah satu agama resmi. Ia memilih Kristen dalam KTP-nya.

"Saat perekaman KTP, kalau tidak memilih agama, tidak keluar KTP-nya," katanya.

Hamana menguatkan kesaksian Ndamung. Ia mengatakan waktu itu orang Sumba Timur memang tidak bisa menyebutkan identitasnya sebagai pemeluk Marapu.

"Apalagi waktu itu sedang gencar-gencarnya penginjilan. Pernah ada orang yang dekati bapak saya untuk dijadikan Kristen, itu sekitar tahun 1990-an," ujarnya.

Ia masih ingat identitas anak-anak di Sumba juga "dihilangkan paksa". Saat masuk Sekolah Dasar (SD), mereka wajib memeluk agama resmi negara. Jika memilih Nasrani, harus memiliki surat baptis.

"Dulu, jika ingin sekolah tidak boleh menjadi Marapu, kalau sekolah harus pilih agama resmi," tambahnya.

Tahun 2000, saat Hamana masuk SD, dia bingung ketika diminta memilih agama. Hamana bertanya pada orangtua tempat dia tinggal selama sekolah (bukan rumah orangtua kandung di desa). Ia juga melihat cara teman lain berdoa.

Karena mayoritas warga Sumba sudah beralih menjadi Kristen, Hamana juga memilih Kristen. Dia dibaptis untuk

mendapat surat keterangan anak pemeluk Kristen. Surat itu yang harus diserahkan pada pihak sekolah.

Beberapa anak sedikit 'beruntung'. Mereka bisa mendapatkan surat keterangan Kristen tanpa perlu dibaptis. Sehingga ada istilah Kristen tanpa baptis di Sumba Timur.

Saat ini, Hamana tetap bertahan menjadi Kristen. Terlebih, istri adalah seorang guru agama Kristen. Sedangkan orangtuanya tetap memeluk Marapu.

Apa yang terjadi bila seorang pelajar menolak memilih agama resmi dan tetap mempertahankan kepercayaan Marapu di sekolah? Kisah Jekson bisa memberikan gambaran.

Saat masuk SD, Jekson juga diminta memilih salah satu agama resmi. Dia berhasil mendapat surat keterangan Kristen meski tidak dibaptis.

Persoalan muncul saat ia duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Umalulu, Sumba Timur. Sepekan sekali saat ada pelajaran agama Kristen, ia harus menyerahkan Buku Mingguan yang menjadi bukti dia ikut ibadah Minggu di gereja.

Lantaran masih memeluk Marapu, Jekson tidak pernah pergi ke gereja. Buku Mingguannya kosong dan tidak pernah dibawa ke sekolah.

Sebenarnya Jekson bisa memalsukan tanda tangan pendeta dalam Buku Mingguan itu, seperti beberapa teman lain agar bebas hukuman. Tapi dia memilih tidak berbohong dan tidak mau protes atas hukuman yang diterimanya.

Hukuman dari guru agama pun menghampiri dirinya. Seorang guru pernah menamparnya, ia bilang kalau tidak ikut agama Kristen tidak ada nilai di pelajaran agama, artinya ia bisa tidak naik kelas.

Selama duduk di kelas 7 dan 8 Jekson pernah mendapatkan berbagai jenis hukuman. Hukuman yang paling sakit, berjalan keliling kelas dengan lutut.

"Lutut saya sampai luka. Itu dilihat semua anak di kelas," kenangnya.

Baru saat ia duduk di kelas 9 SMP, hukumannya berhenti. Itu tahun 2017 saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa penghayat kepercayaan itu setara dengan agama.

Kini dia sudah lulus Sekolah Menengah Atas. Jekson berhasil mendapat beasiswa dan kuliah di Program Studi Pendidikan Kepercayaan, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Jawa Tengah



Ndamung Kilimandu di Kantor Kelurahan Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur, Senin (22/8/2022). (Foto: Sirojul Khafid)

Reformasi

Situasi mulai berubah setelah Soeharto mundur dan Indonesia memasuki fase reformasi atau liberalisasi politik. Pelan-pelan, para pemeluk agama lokal mulai diakui hak-haknya oleh negara.

Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), mereka

boleh mengosongkan atau diberi tanda strip pada kolom Agama di KTP. Tidak ada lagi paksaan bagi pemeluk agama lokal untuk mengisi kolom Agama dalam KTP dengan satu agama resmi yang dipilih.

Tetapi ini masih diskriminatif. Dengan tanda strip pada kolom agama, mereka bisa dianggap tidak beragama sehingga sulit mendapat pekerjaan.

Gerakan membela kelompok pemeluk agama lokal terus bergulir pada jaman reformasi. Bahkan semakin kuat dan ikut melanda Sumba Timur.

Kala itu, Safriyanti Ina Dapadeda masih menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Timur. Dia ingat betul, Kepala Disdukcapil Sumba Timur, Khristofel Praing merasa resah karena tidak bisa mencatatkan Marapu di dokumen kependudukan maupun catatan sipil.

Sebagai contoh, mengisi kolom agama dalam Akta Pernikahan harus mengacu pada agama resmi yang diakui di Indonesia. Sementara Marapu dan banyak agama leluhur belum diakui oleh negara.

"Beliau (Khristofel) itu Kristen, tapi tidak membeda-bedakan. Setiap penduduk punya hak yang sama. Beliau merasa terpanggil," kata Safriyanti di Kantor Disdukcapil Sumba Timur, Rabu (24/8/2022).

"Menurut beliau, semua penduduk punya hak sama dalam kepemilikan dokumen, salah satunya Marapu," tambahnya.

Dengan keyakinan itu, Khristofel memberanikan diri menjadi saksi ahli dalam uji materi UU Adminduk di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006. Pemohon uji materi ini adalah Nggay Mehang Tana (Marapu dari Sumba Timur), Pagar Demanra Sirait (Parmalim dari Sumatera Utara), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak dari Sumatera Utara), dan Carlim (Sapta Darma dari Jawa Tengah).

Pada 18 Oktober 2017, MK melalui putusan No. 97/PPU-

XIV/2016, mengabulkan gugatan ini dan memberikan putusan yang menggembirakan.

Dalam KTP milik penghayat kepercayaan, kolom agama diganti dengan kepercayaan dan isinya adalah Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Putusan MK ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Satu kemenangan berhasil diraih. Tercantumnya Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada kolom Kepercayaan di KTP mempunyai arti mendalam. Ini menjadi bukti, negara mengakui penghayat kepercayaan yang dalam istilah yang lebih progresif disebut sebagai agama leluhur atau agama lokal.



Kepala Disdukcapil Sumba Timur, Safriyanti Ina Dapadeda di ruang kerjanya di Kantor Disdukcapil Sumba Timur, Hambala, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (24/8/2022). (Foto: Sirojul Khafid)

Satu Tanda Tangan Perlu Puluhan Kilometer

Tahun 2017, setelah negara mengakui agama lokal, Disdukcapil

Sumba Timur mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Disdukcapil Sumba Timur, Safriyanti mengatakan sosialisasi dilakukan dari tingkat desa sampai kecamatan.

Sosialisasi dilakukan baik melalui media massa dan tatap muka langsung. Untuk yang terakhir ini, tantangan utamanya adalah luas wilayah dan jarak antardesa yang jauh.

"Pelayanan pencatatan kepercayaan juga sudah mulai dilakukan pada tahun 2017," kata Safriyanti.

Namun warga Desa Watupuda baru berbondong-bondong mengubah identitas di KTP maupun KK menjadi Marapu pada tahun 2022. Hamana yang juga menjabat sebagai Bendahara Desa Watupuda mengatakan sosialisasi baru masif pada tahun itu.

Sebelumnya, mungkin pernah ada sosialisasi, tapi hanya sekali. Hamana menganggap sosialisasi di desa tidak bisa hanya sekali atau dua kali, tapi perlu berkali-kali agar masyarakat paham dan yakin.

"Bawa penghayat kepercayaan sudah diakui negara baru kami dengar tahun 2022 ini," katanya.

Sosialisasi dengan skala yang masif ini baru berlangsung sejak ada proyek Lii Marapu. Ini adalah proyek tentang penguatan ajaran Marapu yang didanai oleh Voice Global dari Belanda. Lembaga swadaya masyarakat yang terlibat yaitu Konsorsium Sumba Integrated Development (SID), Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation), dan lembaga lainnya, termasuk Sabana Sumba.

Ketua Komunitas Solidaritas Bersama untuk Tanah Sumba (Sabana Sumba), Rambu Dai Mami (Amy), mengatakan sosialisasi kepercayaan Marapu memang sudah berlangsung sejak 2017. Namun saat itu belum masif, hanya sekali di beberapa desa.

"Pada 2022, ada proyek Lii Marapu, akhirnya sosialisasi di desa-desa semakin kuat. Kami sampaikan Marapu sudah ada betul (sudah diakui)," kata Rambu Amy.

Pembentukan Badan Pengurus Marapu (BPM) tingkat kabupaten dan kecamatan diperluas hingga tingkat desa ini. Dampak positifnya, semakin banyak warga Marapu yang mengubah identitas agama di KTP, KK, maupun Akta Pernikahan.

Pengubahan pada KTP bisa langsung dilakukan di Kantor Disdukcapil atau saat ada layanan jemput bola dari Disdukcapil di desa atau kecamatan. Sedangkan untuk membuat atau mengubah Akta Pernikahan perlu ada surat keterangan dari BPM tingkat Kabupaten.

Wakil Ketua BPM Kabupaten Sumba Timur, Umbu Remi, mengatakan untuk mendapat surat keterangan pernikahan Marapu, perlu ada tanda tangan dari Ketua Pengurus Tingkat Kabupaten, Sekretaris Tingkat Kabupaten, Ketua Pengurus Tingkat Kecamatan, dan Pemuka Penghayat di tingkat kecamatan. .

Tantangannya, pemeluk Marapu yang mau menikah itu perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendatangi mereka karena rumahnya berjauhan. Sebagai gambaran, ketua pengurus BPM di ujung Timur, sekretaris di Barat, sementara pemuka penghayat di Selatan, jaraknya bisa puluhan kilometer.

Untuk menanggulangi hal itu, dibuatkan perkawinan massal. "Di Sumba Timur, pengubahan identitas Marapu sudah berjalan sejak 2017, sudah ada perkawinan massal," kata Umbu Remi.

Yang dimaksud dengan perkawinan massal adalah mengubah identitas di akta pernikahan secara massal. Mereka sebelumnya beragama Kristen, diubah menjadi Marapu. Sedangkan pernikahan secara adat, kebanyakan sudah berjalan bertahun-tahun lalu.

Pernikahan massal ini cukup membantu warga Marapu lantaran tidak perlu menyambangi pengurus satu per satu. Semua pihak yang berwenang memberi tanda tangan berkumpul di satu tempat.

Ndamung Kilimandu adalah salah seorang yang beruntung bisa ikut pernikahan massal itu. Ia sudah menikah secara adat tahun 1994 tetapi baru mengubah Akta Pernikahan dari Kristen ke Marapu beberapa tahun lalu.

Tidak semua orang seberuntung Ndamung yang bisa mengubah Akta Pernikahan saat ada pernikahan massal. Jarak Desa Watuhadang ke rumah seorang pengurus BPM bisa puluhan kilometer, itu membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit.

Belum lagi "biaya tanda tangan" di tingkat kabupaten sebesar Rp 50.000. Akibatnya, banyak warga masyarakat memilih tidak mengubah Akta Pernikahan karena tidak memiliki uang cukup. Umbu Remi mengatakan pungutan ditarik karena BPM tidak memiliki dana operasional. Dana ini dibagi untuk BPM tingkat kebupaten dan kecamatan untuk membeli alat tulis, kertas, dan sebagainya.

"Misal mereka enggak ngasih uang, kami juga enggak bisa maksa. Ini lebih ke sukarela meski sudah ada kesepakatan. Kalau ditanya saldo saat ini ada berapa, tidak ada," katanya.

Sedangkan Sekretaris Desa Watuhadang, Domis Yanus Hanggawalia pernah mengajukan saran ke Disdukcapil agar tidak terlalu banyak orang yang harus dimintai tanda tangan. Ia tidak tahu siapa yang punya kewenangan terkait kebijakan itu.

Tetapi urusan mengeluarkan surat nikah adat dari BPM, adalah kebijakan internal organisasi itu, Dinas tidak ikut campur. Disdukcapil hanya menerima surat yang sudah memiliki tanda tangan dan cap resmi dari BPM tingkat Kabupaten.

"Sejauh ini belum pernah diskusi dengan Badan Pengurus Marapu," katanya.

Kepala Disdukcapil Sumba Timur, Safriyanti, mengatakan saat hendak menikah, pasangan suami-istri itu mengurus akta pernikahan yang menyatakan yang bersangkutan adalah pemeluk Marapu. Kemudian pasangan ini mendapat tujuh dokumen sekaligus.

"Dokumen ini berupa Akta Pernikahan, tiga KK untuk keluarga baru dan orangtua masing-masing, serta KTP kedua pasangan yang agamanya sudah disesuaikan dengan yang ada di Akta Pernikahan," kata Safriyanti.

Menanti Surat Keterangan Pemuka Penghayat Tiba

Alur yang panjang ini sebenarnya bisa dipotong. Umbu Remi mengatakan ini adalah sistem lama. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Adminduk, sebenarnya hanya perlu tanda tangan dari pemuka penghayat saja yang sudah memiliki surat keterangan dari Kementerian Kebudayaan.

Pemuka penghayat berada di tingkat kecamatan. Dari 22 kecamatan di Sumba Timur, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki BPM. Dari 19 kecamatan yang sudah memiliki pengurus, baru 10 kecamatan yang pengurusnya sudah dikukuhkan.



Suasana Kantor Disdukcapil Sumba Timur, Hambala, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (24/8/2022). (Foto: Sirojul Khafid)

"Pengennya bisa mengajukan surat keterangan penghayat kepercayaan dari 22 kecamatan secara serentak," ujarnya.

Tetapi ia berpendapat sebenarnya bisa diajukan dari kecamatan yang sudah memiliki BPM. Umbu Remi berharap tahun depan bisa diajukan.

Sejauh ini, Disdukcapil Sumba Timur sudah menerbitkan 757 akta pernikahan dengan keterangan Marapu dalam

kolom kepercayaan. Data per Juni 2022, dari 256.931 jiwa penduduk Sumba Timur, ada sebanyak 16.271 jiwa yang memeluk Marapu.

Safriyanti mengatakan penghayat Marapu yang sudah memiliki KTP dengan keterangan Kepercayaan Terhaap Tuhan YME ada 11.891 jiwa. Hingga kini belum semua pemeluk Marapu yang mengubah KTP-nya.

Apapun agamanya, tetap Marapu ritualnya

Walaupun banyak warga Sumba Timur yang sudah memeluk Katolik atau Kristen, mereka tetap menjalankan ritual Marapu. Marapu adalah sistem kepercayaan yang berkelindan dengan adat. Contohnya, Riyanto Hidayat, seorang warga Desa Watuhadang yang akan menikah. Walaupun agamanya Kristen, ia akan melaksanakan pernikahan dengan adat Marapu. Artinya dia perlu menyiapkan belis (mahar) berupa ternak kepada pihak perempuan serta ritual-ritual pelengkapnya.

Sedangkan pihak perempuan akan memberikan kain tenun dan sarung dengan jumlah yang sama dengan belis yang dia terima.

"Meski saat ini sudah Kristen, nanti nikahnya tetap pakai adat Marapu," kata Riyanto yang berusia 27 tahun.

Hamana yang beragama Kristen juga tetap mengikuti ritual-ritual Marapu. Secara garis besar, ritual Marapu bisa dilakukan untuk hajat pribadi ataupun komunal. Hajat pribadi seperti berdoa untuk keselamatan kelahiran, usia kandungan, sampai pengakuan dosa.

Untuk hajat komunal bisa berupa ritual tahunan untuk kesejahteraan ternak peliharaan di setiap kabihu (sejenis marga). Bisa juga doa seperti meminta hujan dan lainnya.

"Kami tidak anti [ritual], budaya tetap jalan terus. Untuk iman itu pribadi kita masing-masing saja, rata-rata [masyarakat di Sumba Timur] tetap jalankan adat dan ritual Marapu," kata Hamana.

Nestapa Warga Marapu yang Tak Bisa Ritual di Katuada Njara Lagi

Oleh: Bambang Muryanto

Hapu Tarambiha, seorang pemeluk agama lokal, Marapu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama beberapa warga Desa Patawang mengunjungi tempat ritual untuk *hamayang* (berdoa) di padang sabana.

Tiga pohon besar, jenis kapuk hutan dan kesambi tumbuh saling berkelindan di lokasi ritual itu. Sebongkah batu kapur ditanam di dekat pokok batang pohon-pohon itu sebagai tempat meletakkan sesaji.

Saya mengikuti mereka karena ingin tahu bagaimana kondisi tempat ritual itu. Informasi yang saya terima menyatakan tempat ritual bernama *Katuada Njara Yuara Ahu* itu rusak karena ada pembangunan embung di dekatnya. Secara administratif, *katuada* atau tempat ritual bagi warga Sumba pemeluk Marapu ini berada di Desa Patawang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hapu dan seorang rekannya, Umbu Lumari mengenakan celana pendek dan kain Sumba yang melilit pinggang mereka. Tiara, kain tenun khas sumba (*kambala*) juga menghiasi kepala mereka. Begitulah penampilan sehari-hari para pria dari Masyarakat Adat Sumba yang tinggal di Pulau Sumba.

Pulau Sumba seluas 11.000 kilometer persegi itu terbentuk dari batuan kapur, berhawa panas, tempat sabana luas membentang, dan berbukit-bukit. Di sini, para wanitanya

adalah seniman-seniman pembuat kain tenun yang indah sekali. Kain tenun dengan pewarna alam ini digunakan untuk kelengkapan busana adat dan berbagai macam upacara ritual.



Hapu Tarambiha (kiri) dan Umbu Lumari (kanan) sedang menyingkirkan dedaunan kering di tempat ritual, Katuada Njara di Desa Petawang yang rusak akibat pembangunan embung di lokasi itu oleh PT Muria Sumba Manis (MSM). Tumpukan tanah yang dibuang di sekitar tempat ritual itu menyebabkan Katuada Njara selalu tergenang air bila hujan turun. (Foto: Bambang Muryanto)

Dengan tangannya, Hapu dan Umbu Lumari menyingkirkan daun-daun kering yang berserakan di lokasi ritual itu. Kemudian Hapu mengambil sirih dan pinang dari kantongnya dan meletakkannya di atas batu kapur.

"Untuk para leluhur," ujarnya, Senin (22/8).

Masyarakat Sumba, baik laki-laki dan perempuan mempunyai kebiasaan mengunyah sirih. Mereka selalu menghidangkan sirih dan pinang kepada tamu yang bertandang ke rumah. Begitu cara mereka menghormati tamu.

Saat bertandang ke rumah warga, saya juga mengunyah sirih. Bila tuan rumah menyodorkan sirih dan pinang serta menggelar tikar daun pandan, itu tanda tuan rumah bisa menerima tamu yang datang. Kopi juga selalu dihidangkan

untuk menemani obrolan.

"Jadi Bang, kalau kita bertamu, kita harus mengunyah sirih pinang," ujar Arnold yang menemani saya liputan di Sumba Timur.

Dalam setiap upacara adat dan ritual Marapu, sirih dan pinang juga harus ada. Bila sedang langka, harga sirih dan pinang bisa melambung dan lebih mahal dari beras.

Hapu duduk, melipat kaki dan menyandarkan punggungnya ke batang pohon kesambi yang melindungi kami dari sengatan panas matahari. Ia menjelaskan fungsi *Katuada Njara* yang sudah berusia ratusan tahun. Bahasa Indonesianya patah-patah.

"Ini tempat orang Marapu memohon kepada Sang Pencipta agar hewan ternak bisa beranak pinak," ujarnya.

Marapu sendiri artinya roh nenek moyang. Ini adalah nama agama lokal yang diwariskan nenek moyang warga Sumba sejak dahulu. Di Indonesia, Marapu masuk dalam rumpun Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang selalu mendapat perlakuan diskriminatif dari negara.

Dalam ritual, roh nenek moyang memiliki kedudukan penting karena menjadi perantara dalam komunikasi timbal balik antara warga Marapu dan Sang Pencipta. Ajaran Marapu yang diturunkan secara lisan itu menyatakan manusia tidak bisa berkomunikasi langsung kepada Sang Maha Pencipta. Bahkan namanya saja tidak boleh disebutkan, hanya ciri-cirinya, seperti *Na Mawulu Tau Na Majii Tau* (Yang Membuat Manusia dan Yang Membentuk Manusia, Pencipta Manusia).¹

Selanjutnya, *Na Mawulu Tau Na Majii Tau* menyampaikan pesannya kepada umat Marapu melalui roh nenek moyang. Pesan itu dituangkan dalam tanda-tanda pada hati hewan ternak atau usus (khusus ayam) yang dikorbankan. *Amaboku hamayang* atau pemimpin ritual yang membacakan tanda-tanda itu kepada umat Marapu, apakah pesan baik atau buruk.

"Di *Katuada Njara*, kami harus membawa sesaji, ayam

berbulu putih, kambing hitam yang pinggangnya berbulu putih, dan potongan emas," ungkapnya.

Sambil bercerita, ia mengunyah pinang yang berubah menjadi merah ketika buah sirih dan kapur hasil gerusan rumah kerang masuk ke mulutnya. Beberapa orang dari Desa Patawang yang ikut ke *Katuada Njara*, menimpali cerita yang disampaikan Hapu.

Ritual di *Katuada Njara* dilakukan setiap Oktober dan selalu diikuti banyak warga dari berbagai *kabihu* atau marga. Dimulai dengan ritual di *Katuada Mananga* di muara sungai, selanjutnya mereka berjalan kaki menuju *Katuada Njara* yang berjarak beberapa kilometer. Setelah selesai, mereka pulang dan melanjutkan ritual di rumah besar di desa.

Sayang, kini warga Marapu tidak bisa lagi melakukan ritual di *Katuada Njara*. Tempat ritual itu rusak dan "tidak suci" lagi karena menjadi tempat pembuangan tanah hasil kerukan dari embung yang dibangun di dekatnya. Di situ sebuah bangunan untuk menaungi pompa air juga dibangun.

Ruang di sekitar lokasi ritual yang seharusnya lapang menjadi sempit. Bila hujan, air menggenangi *Katuanda Njara* karena aliran air terhambat oleh gundukan tanah di sekitarnya. Potongan emas kecil yang disimpan di dalam tanah, dekat dengan pokok batang pohon kesambi sudah raib diambil orang.

Selain itu, pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar tempat ritual sudah hilang karena ditebangi. Masyarakat setempat juga sudah tidak bisa masuk ke lokasi *Katuanda Njara* karena padang sabana di mana situs itu berada sudah dipagari.

"Terakhir, kami melakukan ritual pada tahun 2019," ujar Hapu.

Umbu Lumari yang duduk tak jauh dari Hapu menambahkan, setelah tidak ada ritual adat, banyak hewan ternak yang kena penyakit dan mati. Masyarakat juga tidak bisa lagi melepaskan hewan ternak mereka di padang sabana di sekitar

Katuanda Njara karena telah dipagari.

"Banyak yang harus menjual ternaknya karena sudah tidak bisa menggembalakan lagi di sabana. Tinggal sedikit saja dan diikat di rumah," ujarnya.

Hewan ternak dan sabana adalah penopang kebudayaan warga pemeluk Marapu di Sumba. Selain untuk korban dalam ritual, hewan ternak juga digunakan sebagai *belis* atau mahar dalam perkawinan. Dalam upacara kematian, daging hewan ternak dibutuhkan untuk menjamu para pelayat.

Hewan ternak juga dikorbankan untuk bekal bagi arwah orang meninggal dan tinggal di alam Marapu. Melalui layar telepon seluler milik seorang youtuber dari Sumba Timur, Adi Cornelius, saya sempat melihat seekor kuda ditebas lehernya tepat setelah jenazah seorang warga Desa Palindi masuk ke liang lahat.

"Untuk tunggangan arwah orang yang meninggal di alam sana," ujarnya.

Sedangkan sabana adalah "kendang besar" lengkap dengan makanannya (rumput) yang disediakan gratis oleh alam. Tanpa sabana, warga Sumba niscaya tidak bisa memiliki banyak hewan ternak yang dibutuhkan untuk keperluan adat dan ritual. Mereka tidak mampu menyediakan kandang dan mencari makan untuk hewan ternak dalam jumlah besar.

Saat matahari mulai muncul di ufuk timur yang membuat langit berwarna keemasan, hewan ternak seperti kuda, kerbau, dan sapi mulai menjelajahi padang sabana untuk merumput. Kawan burung jalak mulai berkicau, terbang dan hinggap di tubuh kawan ternak itu untuk memulung kutunya.

PT MSM

Siapa yang merusak *Katuanda Njara*, situs tempat warga pemeluk Marapu melakukan *hamayang* itu? Warga sepakat menuduh PT Muria Sumba Manis (MSM) sebagai pelakunya. Ini adalah sebuah perusahaan yang membuka perkebunan

tebu dan pabrik gula di Sumba Timur.

Berdasarkan Akta Notaris No.35 yang dikeluarkan Kantor Notaris Darmawan Tjoa di Jakarta, PT MSM didirikan oleh Direktur PT Hartono Plantation Indonesia (Djarum Grup), William Djajamiharja pada 17 November 2014. Kantor pusat PT MSM berada Kudus, Jawa Tengah.²

Namun liputan majalah Tempo, 26 September 2020, mengabarkan kelompok Wings Group juga mempunyai saham sebesar 25% dalam PT MSM.³

Sejak 2015, pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan izin prinsip kepada PT MSM untuk membuka pabrik gula di Desa Wanga. Sabana seluas 41 ribu hektar yang tersebar di enam kecamatan juga diizinkan jadi perkebunan tebu lengkap dengan sarana transportasinya. Enam kecamatan itu adalah Umalulu, Rindi, Kahaungu Eti, Pahunga Lodu, Wulla Waijelu, dan Pandawai.

"Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan tebu itu semua adalah milik masyarakat adat," ujar Rambu Dai Mami (Amy), seorang perempuan aktivis dari Komunitas Solidaritas Bersama untuk Tanah Sumba (Sabana Sumba).

Kehadiran PT MSM di tanah Sumba yang gersang itu adalah bagian dari rencana pemerintah mencapai swasembada gula pada tahun 2024. Selain intensifikasi, pemerintah melakukan ekstensifikasi dengan membuka perkebunan tebu baru di luar Pulau Jawa, seperti di Kabupaten Sumba Timur.

Usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, 20 Juni 2022 lalu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan setiap tahun, kebutuhan gula pasir (kristal) untuk konsumsi mencapai 3,2 juta ton dan industri membutuhkan 4,1 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 2,3 juta ton.⁴

"Bapak Presiden memerintahkan agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan, berarti ada 850 ribu untuk dipersiapkan," ujarnya.

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula milik PT MSM dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, April 2018 silam.⁵ Kini sebuah pabrik besar dengan tembok bercat putih, beratap warna hijau, dan cerobong asap yang tinggi sudah berdiri megah di Desa Wanga.

Letaknya di selatan jalan raya antara Kota Waingapu-Kecamatan Melolo. Kehadirannya tampak mencolok di padang sabana yang berwarna coklat karena terpanggang panas matahari musim kemarau. Pada siang hari, suhu udara di sabana bisa mencapai 34 derajad Celsius.



Pabrik Gula yang dibangun PT Muria Sumba Manis (MSM) di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Pabrik ini tampak mencolok karena berada di tengah sabana. (Foto: Bambang Muryanto)

Dokumen Adendum Analisa Dampak Lingkungan Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (Andal, RKL, dan RPL) PT MSM, menyatakan pabrik gula ini mampu menggiling 18.000 ton tebu per hari. Pada Agustus 2022, pabrik ini melakukan uji coba penggilingan dan memproduksi gula kristal.⁶

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur gembira dengan kedatangan investor-investor yang mau menanamkan modal di wilayahnya. Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora yang berkuasa dua periode pada 2010-2015 dan 2015-2020 mengatakan kehadiran investor ini bisa membuka peluang kerja untuk waktu yang lama bagi masyarakat.⁷

Kepada media massa, ia pernah mengatakan PT MSM adalah investor yang menanamkan investasi paling besar, nilainya mencapai Rp1 trilyun. Perusahaan ini juga memberikan pekerjaan kepada lebih dari 2000 orang.⁸

Sayang, kehadiran PT MSM mendapat penolakan dari Masyarakat Adat. Tetapi prosesnya berjalan terus karena mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Tomi Umbu Pura, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur, mengatakan saat memulai bisnisnya di Sumba Timur, PT MSM kurang partisipatif. Anggota Masyarakat Adat Umalulu ini mengatakan PT MSM lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah.

Namun demikian, Tomi mengakui PT MSM melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ayahnya salah satu yang hadir dalam sosialisasi itu.

"Tetapi tanda tangan kehadiran diklaim sebagai tanda persetujuan memberikan tanah," ujarnya.

Tomi juga mengatakan ada sebagian anggota Masyarakat Adat Sumba yang dengan suka rela menyerahkan tanahnya. Saat PT MSM melakukan uji coba giling tebu pertama kali, perusahaan menggelar ritual Marapu, *hamayang*. Beberapa tokoh Marapu hadir menyaksikan upacara itu, salah satunya, Umbu Maramba Hau.⁹

Di rumahnya di Desa Kawangu, Rambu Amy, satu-satunya perempuan aktivis yang menolak pengambilalihan tanah oleh PT MSM di Kecamatan Umalulu menjelaskan cara lainnya. Pemerintah mendekati tokoh-tokoh adat tertentu agar

menyerahkan tanah ulayat kepada PT MSM.¹⁰

"Itu sebenarnya biasa terjadi, tokoh adat memberikan tanah untuk kepentingan umum seperti untuk sekolah atau kantor pemerintah. Masyarakat tidak ada yang protes, tetapi kali ini ternyata banyak Masyarakat Adat yang protes," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri menganggap tanah ulayat yang dipakai PT MSM itu adalah tanah tidak produktif. Bupati Gidion mengatakan sejak tanah itu diciptakan Tuhan, tidak ada yang menggunakannya.¹¹

Pernyataan ini menyulut kemarahan Masyarakat Adat Sumba, mereka mendatangi kantor Gidion. Akhirnya, Gidion mencabut pernyataannya dan minta maaf kepada warga Sumba.¹²

Di Desa Patawang, tanah ulayat juga berpindah kepada PT MSM. Baron Kapenga Tana, warga Desa Patawang kaget melihat *Katuanda Njara* sudah rusak. Waktu itu ia baru saja datang dari Bali, tahun 2016. Hatinya sedih.

Hingga sekarang, ia tidak tahu siapa yang memberikan tanah di desanya kepada PT MSM. Padahal secara adat tanah di desa itu milik marga atau *Kabihu Luku Walu* dan Lamuru. Ibunya berasal dari *kabihu Luku Walu*.

"Lahan tanah diambil tanpa lewat kami," ujarnya.

Ia sudah mempertanyakan perusakan itu kepada PT MSM, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Bahkan pembangunan embung di dekat *Katuanda Njara* terus berlanjut.

Karena tidak mendapat jawaban, ia dan warga Patawang, antara lain Hapu Tarambira berusaha menghentikan proses pembangunan di tanah ulayat mereka. Warga juga melaporkan perusakan *Katuanda Njara* kepada Polisi Resor (Polres) Sumba Timur.¹³

"Tetapi polisi justru mengatakan laporan kami kurang bukti," ujarnya.

Saya berupaya melakukan konfirmasi beberapa kali terhadap Humas PT MSM, Julius Palilu. Beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah mengapa terjadi konflik dan mengapa

PT MSM tetap membangun embung di lokasi *Katuanda Njara* padahal sudah ditolak warga. Tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan saya melalui pesan WhatsApp. Panggilan telepon juga tidak diangkatnya.

Tetapi Corporate Communication PT MSM, Dumaria Panjaitan pernah mengatakan kepada Majalah Tempo, bahwa seluruh kebijakan operasional perusahaan sudah sesuai aturan.

"MSM sangat menjunjung tinggi operasional perkebunan yang menghormati keseimbangan alam, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta menghormati nilai-nilai luhur budaya serta hak-hak Masyarakat Adat Sumba Timur," tulis Dumaria.¹⁴

Sedangkan Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing yang berkuasa sejak Februari 2021 itu mengatakan secara legal formal masuknya PT MSM ke Sumba Timur bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ia mengakui konflik antara PT MSM dengan Masyarakat Adat masih terjadi. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Penyelesaian harus melibatkan para Tokoh Marapu dan PT MSM, duduk bersama dan dicarikan solusinya," ujar Khristofel yang dihubungi melalui telepon, Selasa (11/10).

Hapu, Baron dan dua orang lainnya bernasib apes. Setelah membongkar tenda jaga milik PT MSM, mereka justru dilaporkan kepada polisi dan dituduh melakukan perusakan (kekerasan terhadap barang). Hapu mengatakan ia dan warga membongkar tenda yang berada di sekitar *Katuanda Njara* karena pendiriannya tidak izin kepada mereka sebagai pemilik tanah adat.

"Padahal, sebelum membongkar tenda, kita sudah izin. Setelah dibongkar, kita melipatnya dengan baik," tambahnya.

Tuduhan perusakan itu berlanjut ke meja hijau. Majelis hakim memvonis Hapu dan dua orang lainnya, yaitu Baron dan Retang Hadambiva dengan hukuman penjara enam bulan yang dijalani mulai September 2020 hingga Maret 2021.¹⁵

Baron mengatakan ia sempat sakit di penjara karena

soal makanan di penjara yang “aduhai”. Tetapi ia mengaku menikmatinya karena makan dengan biaya dari negara dan dijaga 24 jam penuh.

“Kapan lagi kita akan menikmati fasilitas dari negara,” ujarnya sambil tersenyum.

Pengalaman mendekam di penjara tidak membuat pemuda ini surut dalam melawan. Ia menginginkan seluruh tanah adat dikembalikan dan ada negosiasi ulang antara Masyarakat Adat dengan PT MSM.

Baron mengatakan ia tidak menolak kehadiran PT MSM karena warga juga membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS).¹⁶



Kawanan hewan ternak kuda milik warga sedang mencari makan di Sabana di Desa Kawango, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Sabana adalah kandang alam luas yang disediakan oleh alam sehingga warga Sumba Timur bisa memiliki ternak yang banyak. Ternak adalah poros kehidupan dalam kebudayaan di Sumba Timur. (Foto: Bambang Muryanto)

“Nanti kita atur bersama, mana sabana yang bisa untuk perkebunan dan mana yang untuk menggembala ternak,” tambahnya.

Konflik lahan seperti di Sumba Timur ini adalah salah satu dari berbagai konflik agraria akibat dari derap pembangunan yang justru merugikan masyarakat kecil. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan angka yang fluktuatif tetapi ada tren jumlahnya terus meningkat setidaknya sejak tahun 2010. Jika pada 2010 ada sekira seratusan konflik maka pada tahun 2019 ada lebih dari 200 kasus.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2021 ada 2007 kasus.¹⁸

Rekomendasi

Saat berbincang-bicang di pondok yang berada di belakang rumahnya, Rambu Amy sering bercerita tentang aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dari Jakarta yang membantu perjuangan warga Marapu melawan PT MSM. Angin sabana yang dingin menjadi saksi masyarakat Marapu sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan Haris itu.

Awal mula keterlibatan Haris dengan perjuangan Masyarakat Adat Marapu bisa dikatakan terjadi secara tidak sengaja. Pertengahan tahun 2018, Direktur Eksekutif Lokataru Law and Human Right Office itu sedang menjadi pembicara seminar di beberapa kabupaten di Pulau Sumba.

Saat berada di Kabupaten Sumba Timur, ia diminta mengisi diskusi dengan masyarakat adat di suatu desa. Diskusi baru berjalan 30 menit saat ia menerima informasi ada perselisihan antara masyarakat adat dengan PT MSM di Umalulu.

“Akhirnya diskusi dihentikan dan kita menuju ke suatu puncak bukit dan benar di sana hampir saja terjadi gesekan antara masyarakat adat dan karyawan PT MSM,” ujar Haris melalui sambungan telepon.

Peristiwa yang dimaksud Haris itu adalah saat masyarakat adat di Umalulu memblokade jalan masuk menuju lokasi

perkebunan tebu. Masyarakat adat Praing Umalulu, seperti dikatakan Tomi memang menolak kehadiran PT MSM yang mengambil tanah ulayat atau adat mereka

Setelah tiba di lokasi, Haris melakukan mediasi agar kekerasan tidak terjadi. Kepada kedua belah pihak, ia mengatakan konflik ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah. Sore itu juga, Haris mengusulkan agar pihak-pihak yang berkonflik datang ke rumah Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora untuk mencari solusi.

"Kita datang ke Bupati tetapi dia kabur, akhirnya kita ditemui Wakil Bupati (Umbu Lili Pekuwali) yang rumahnya di sebelah rumah bupati," ujarnya.

Pertemuan sore itu berakhir dengan janji Wakil Bupati yang akan mencari solusinya.

Keesokan harinya, ada perwakilan masyarakat adat menemui Haris. Mereka minta mantan Direktur Kontras itu mau menjadi penasehat hukum Masyarakat Adat Marapu melawan PT MSM. Haris menyanggupi permintaan ini, ia tidak minta bayaran profesional tetapi mereka harus menyediakan tiket pesawat dan akomodasi bila ia dan timnya ke Sumba Timur. Kedua belah pihak sepakat.

Sebelum pandemi Covid-19 meluas, Haris sering datang ke Sumba Timur untuk mengumpulkan berbagai bukti. Bahkan sempat tinggal di sana selama satu bulan penuh.

Selama di Sumba Timur, ia berupaya mendaftarkan tanah masyarakat adat ke Pemda Sumba Timur tetapi tidak mendapat respon positif. Haris juga mendampingi 41 anggota Masyarakat Adat yang dikriminalisasi. Tetapi hanya tiga yang masuk ke pengadilan, yaitu Hapu Tarambiha dan dua orang rekan sekampungnya.

"Perusakan itu sebenarnya tidak terbukti di pengadilan," ujar Haris.

Hasil investigasi Lokataru yang dilakukan dari Januari hingga Maret 2019 menemukan ada lima pelanggaran hak

asasi manusia yang dilakukan PT MSM terhadap warga Marapu. Lima pelanggaran itu adalah di bidang agama dan kebudayaan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertanahan, dan pemidanaan (kriminalisasi).

"Sebagai imbas dari pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan situs adat dan peribadatan bagi Masyarakat Adat yang menganut keyakinan Marapu menjadi masalah yang dihadapi Masyarakat Adat di Sumba Timur," demikian bunyi pers rilis yang dikeluarkan Lokataru.¹⁹

Untuk memperkuat perjuangannya, perwakilan Masyarakat Adat Sumba itu datang ke Jakarta untuk audiensi ke beberapa lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya, Juli 2019. Haris mengatakan kedatangan warga Marapu ke Jakarta ini untuk mengais keadilan karena pemerintah Kabupaten Sumba Timur tidak kunjung menyelesaikan masalah warganya itu.

Dengan mengenakan pakaian khas Sumba, mereka sempat mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menyuarkan soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan PT MSM.²⁰

Setelah kasus ini bergaung di Jakarta, pemerintah pusat bereaksi dan menurunkan timnya ke lapangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan rekomendasi.

Kemendikbud mengeluarkan surat nomor 384/E.E4/k8/2019, perihal Himbauan terkait Dampak Investasi PT MSM Yang Melanggar Hak-hak Peribadatan dan Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Penghayat Kepercayaan Marapu di Kabupaten Sumba Timur. Isi surat ini mendesak Bupati Sumba Timur segera menindaklanjuti (memperbaiki) beberapa kerusakan pada situs dan kebudayaan milik Masyarakat Adat Sumba Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pemajuan Kebudayaan.²¹ Adapun kerusakan itu terjadi di situs ritual adat *Katuanda Njara Yuara Ahu* di Desa Patawang, hutan Lai Ruaka yang dimanfaatkan Masyarakat Adat Sumba Timur sebagai sumber pewarna alami bagi kain tenun khas Sumba, dan hutan Bulla yang dimanfaatkan sebagai bahan utama pembangunan rumah adat.

Namun hingga Februari 2020, rekomendasi yang dikeluarkan Kemendikbud RI belum dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Lokataru sempat mengeluarkan himbauan agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti Bupati Sumba Timur.²²

Seruan ini seperti orang berteriak di padang sabana yang sepi. Bupati Sumba Timur dan jajarannya tetap tidak menindaklanjutinya. Saat saya, Hapu Tarambiha dan warga Marapu lainnya datang ke *Katuanda Njara*, Senin (22/8/2022) kondisinya masih rusak dan tidak ada perbaikan.

Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing punya alasan mengapa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum memperbaiki *Katuanda Njara*. Ia mengatakan pemerintah pusat tidak bisa secara sepahk minta kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk menyelesaikan sendiri

Bagi warga Marapu, Khristofel adalah orang yang tidak asing lagi. Ia adalah saksi ahli dalam judicial review UU Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan para pemeluk agama lokal (2016). Waktu itu ia adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur.

Hasilnya, MK memutuskan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Hak-hak sipil para penghayat kepercayaan, seperti Marapu pun diakui dan wajib dilayani oleh negara.

“Mereka (pemerintah pusat) harus datang ke sini, membuat konsultasi bagaimana cara penyelesaiannya,” ujarnya.

Khristofel mengingatkan perusahaan multinasional itu masuk ke Sumba Timur dengan sepengetahuan pemerintah pusat.

Kehadirannya di Sumba Timur bukan demi kepentingan pemerintah daerah semata tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu gula sebagai kepentingan nasional.

“Kalau hanya pemerintah daerah Sumba Timur saja pasti butuh waktu lama untuk menyelesaiannya,” tambahnya.



Kebun tebu milik PT Muria Sumba Manis di Desa Patawang. Ribuan hektar sabana diubah menjadi perkebunan tebu sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi swasembada gula. Foto: Bambang Muryanto

Nasib Marapu

Saat tinggal di rumah Rambu Amy, saya berjumpa beberapa remaja Marapu yang sedang berproses untuk masuk pada Program Studi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus (Untag), Semarang. Selain mereka, ada remaja pria yang mencari perlindungan karena dipaksa menikah. Seorang perempuan dengan gangguan jiwa akibat kekerasan seksual yang dialami saat bekerja di Malaysia juga sering mampir untuk makan atau tidur.

Para remaja Marapu itu tinggal di rumah Rambu Amy yang berjarak sekira 15 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Sumba

Timur, Waingapu agar mudah mendapat sinyal. Waktu itu, mereka sedang menunggu tes wawancara secara online untuk mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar bisa kuliah di Untag Semarang.

Untag Semarang adalah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang membuka jurusan Program Studi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus (Untag), Semarang. Jurusan ini baru dibuka tahun 2021 lalu dan lulusannya diharapkan akan menjadi guru atau penyuluhan bagi murid-murid penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia.

Di desa mereka, sinyal sering sulit dijangkau sedangkan pengumuman dikirimkan lewat internet. Beberapa dari mereka tidak mempunyai telepon seluler. Berkumpul bersama teman yang punya gadget jadi pilihan agar bisa mengetahui bila ada pengumuman.

Setiap malam, kami dan para remaja Marapu itu tidur dalam satu balai-balai, berselimut tebal untuk menghalau dinginnya angin sabana. Suara ringkik kuda yang diikat tak jauh dari pondok, menemani kami melewati malam yang sunyi.

Rabu dini hari (24/8), saya terbangun karena Rambu Amy berteriak membangunkan para remaja Marapu itu. Ia baru tahu, lima remaja Marapu itu harus mengikuti tes wawancara secara online pada Rabu pagi. Seharusnya ada enam, tapi satu orang mengalami kendala administrasi sehingga belum bisa ikut tes.

"Hai, kalian besok pagi ada ujian wawancara, bangun pagi ya," teriaknya lantang dari pintu belakang rumah.

Pagi itu, Rambu Amy pusing tujuh keliling karena proses wawancara harus menggunakan laptop. Lima remaja Marapu itu tidak ada yang memiliki lap top.

"Saya sangat stress menghadapi anak-anak yang akan ujian online ini," ujar Rambu.

Beruntung, teman-teman Rambu Amy ada yang mau

meminjamkan laptop, ia mendapat tiga laptop pinjaman. Dua lagi pinjam dari dua kawan jurnalis, Rizka dan Siro yang datang bersama saya ke Sumba Timur.

Agar proses wawancara tidak terkendala sinyal, Rambu Amy minta izin kepada pengelola Yayasan Uma Monung agar para remaja Marapu itu bisa menjalani tes di gedung milik yayasan keagamaan ini. Gedung yang memiliki wifi ini terletak hanya beberapa kilometer dari rumah Rambu Amy.

Beberapa hari kemudian, saat saya sudah di Surakarta, sebuah pesan Whatsapp dari Rambu Amy masuk ke telepon seluler saya. Bunyinya, "Selamat pagi teman-teman semua. Puji Tuhan, anak-anak Marapu, 5 orang lolos tes wawancara dan diterima sebagai mahasiswa di Untag. Terima kasih untuk setiap bentuk dukungan."

Perasaan gembira dan terharu menyergap hati saya. Saya membalas, "Puji Tuhan."

Rambu Amy yang gigih membela hak-hak warga Marapu pasti berbahagia sekali. Lima remaja Marapu itu, Anisa, Adi, Jekson, Kristo, Frengki, dan Amos itu sedang mengukir sejarah. Mereka adalah generasi pertama pemeluk Marapu yang bisa kuliah supaya bisa menjadi guru Marapu di sekolah-sekolah di Pulau Sumba.

Keberhasilan lima remaja Marapu itu adalah buah dari perjuangan panjang masyarakat sipil dalam membela hak para pemeluk agama lokal (penghayat kepercayaan). Sejak jaman penjajahan Belanda, penghayat kepercayaan (agama lokal) di seluruh Indonesia, termasuk Marapu mulai mengalami diskriminasi yang terus berlangsung hingga masa kemerdekaan. Salah satu bentuknya, anak-anak dari keluarga penghayat kepercayaan tidak bisa mendapat pelajaran agama di sekolah yang sesuai dengan keyakinannya.

Dalam pendidikan, momentumnya adalah saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan pada tanggal 1 Agustus 2016 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Aturan ini menjamin siswa pemeluk agama lokal atau penghayat kepercayaan berhak mendapat pelajaran agama sesuai keyakinannya.

Namun hingga peraturan itu keluar, murid-murid sekolah di Sumba Timur yang memeluk Marapu belum bisa mendapat layanan Pendidikan agama sesuai agama yang dipeluknya. Kendalanya, tidak ada guru untuk bidang ini yang menyandang gelar sarjana sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sedangkan penyuluhan yang mendapatkan sertifikasi dari pemerintah juga masih sedikit sekali.

Karena belum ada gurunya, mereka diminta mengikuti pelajaran salah satu agama yang diakui negara. Ini menjadi salah satu sebab jumlah warga pemeluk Marapu terus menurun karena banyak yang kemudian beralih ke agama lain.

Franki Maramba Jawa, salah seorang remaja yang lolos kuliah ke Untag Semarang itu merasa khawatir dengan budaya Marapu yang mulai punah. Ini yang mendorongnya ingin kuliah di Semarang.

"Saya ingin menghidupkan lagi budaya Marapu," ujarnya mantap.

Saat Franki dan empat temannya menuntut ilmu di Semarang untuk memperpanjang nafas sejarah Marapu, sabana mereka mengalami ancaman. Ada tren alih fungsi sabana untuk mendukung berbagai kepentingan pembangunan atau peningkatan pendapatan ekonomi seperti menjadi lahan kebun tebu.

Antropolog dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y.Argo Twikromo yang pernah meneliti dan tinggal cukup lama di Sumba Timur mengatakan sabana adalah lokasi penting untuk menggembala ternak. Ternak adalah poros kehidupan orang Sumba. Jika ternak sulit didapat karena sabana menghilang, maka harga ternak yang dibutuhkan dalam upacara ritual bisa mahal sekali dan tidak terbeli oleh warga Marapu

"Benar, jika sabana hilang bisa muncul bencana kebudayaan," ujar doctor jebolan Universiteit Nijmegen, Belanda itu.

Argo yang menulis disertasi berjudul "Elite Lokal dan Perampasan Modernitas: Kasus di Sumba Timur" (terjemahan) mengatakan ia sebenarnya merasa kasihan dengan PT MSM yang sekarang menjadi tertuduh. Padahal, perusahaan itu bisa masuk ke Sumba Timur karena peran para elit lokal, seperti elit pemerintah atau masyarakat adat.

Ia berharap para elit lokal ini lebih berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan. Harus diperhatikan benar, mana sabana yang bisa untuk beralih fungsi dan mana yang harus dipertahankan untuk ternak masyarakat Sumba.

"Ya harus selektif dan tata ruangnya tidak untuk kemajuan saja. Tetapi juga bisa mendukung keberlanjutan masyarakat lokal," tambahnya.

Bupati Khristofel sepakat dengan usulan dari Argo. Siapapun bupatinya, sabana harus tetap lestari sebagai tempat penggembalaan ternak.

Sementara itu Hapu Tarambiha masih berharap *Katuada Njara* bisa segera diperbaiki. Ia sendiri bertekad akan terus mempertahankan sabana karena itu adalah warisan dari para leluhurnya.

"Tidak apa-apa, saya mati (dalam perjuangan). Mati di tanah leluhur sendiri," ujarnya sambil mengunyah sirih.

Referensi

- 1 Purwadi Soeriadiredja, Laporan Penelitian Tatanan Hidup Orang Sumba (Studi Etnografis di Sumba Timur), Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana (2016).
- 2 Lihat juga dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/21/201441326/grup-djarum-memulai-pembangan-pabrik-gula-di-sumba-timur-ntt>
- 3 <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161528/begini-konflik-penghayat-marapu-dengan-perusahaan-milik-orang-terkaya-di-indonesia?usefree=true>
- 4 https://setneg.go.id/baca/index/presiden_minta_jajarannya_siapkan_kebutuhan_gula_nasional
- 5 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/21/201441326/grup-djarum-memulai-pembangan-pabrik-gula-di-sumba-timur-ntt>
- 6 <https://www.waingapu.com/persiapkan-udi-coba-giling-tebu-produksi-gula-pt-msm-gelar-ritual-hamayang-marapu/#gsc.tab=0>
- 7 <https://roolnews.id/pemkab-sumba-timur-komit-buka-ruang-bagi-investasi.php>
- 8 <https://kupang.tribunnews.com/2017/12/15/pemkab-sumba-timur-rugi-jika-investasi-ptmsm-bubar>
- 9 <https://www.waingapu.com/persiapkan-udi-coba-giling-tebu-produksi-gula-pt-msm-gelar-ritual-hamayang-marapu/#gsc.tab=0>
- 10 Retang Maramba Djawa dan Ananias Ryoan Philip Jacob dari Program Studi Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana dalam laporan penelitian berjudul "Pembangunan Pabrik Tebu di Kabupaten Sumba Timur (Studi Gerakan Sosial Masyarakat Adat terkait Penolakan Pabrik Tebu di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur" mene-
- mukan dalam sosialisasi pemerintah hanya memberi tahu tokoh-tokoh tertentu saja sedangkan tanah yang digunakan oleh PT MSM adalah milik seluruh kabihu atau marga. Jurnal Politicon, Jurnal Program Studi Ilmu Politik, Vol X No.1 April 2021.
- 11 <https://kupang.tribunnews.com/2018/11/19/bupati-sumba-timur-tanah-yang-diinvestasi-pt-msm-sejak-tuhan-ciptakan-tak-ada-yang-digunakan?page=all>.
- 12 <https://radarntt.co/news/2019/didepan-masyarakat-adat-dan-anggota-dprd-bupati-sumba-timur-mencabut-pernyataannya/>
- 13 [https://lokataru.id/siaran-pers-diskriminasi-polres-sumba-timur-dalam-penegakan-hukum-terhadap-masyarakat-adat/. Lihat juga https://www.urbannews.id/2019/05/16/penyidik-polres-sumba-timur-abai-kan-laporan-masyarakat-adat-soal-dugaan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-oleh-pt-msm-2/?amp=1](https://lokataru.id/siaran-pers-diskriminasi-polres-sumba-timur-dalam-penegakan-hukum-terhadap-masyarakat-adat/)
- 14 <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161528/begini-konflik-penghayat-marapu-dengan-perusahaan-milik-orang-terkaya-di-indonesia?usefree=true>
- 15 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hapu+tara-mbiha&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=
- 16 <https://sumsel.inews.id/berita/10-provinsi-termiskin-di-indonesia-nomor-9-banyak-tambang-dan-perkebunan>
- 17 <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-indonesia-2010-2019-1582192899>
- 18 <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>
- 19 <https://lokataru.com/siaran-pers-pelanggaran-hukum-dan-ham-oleh-pt-muria-sumba-manis/>
- 20 <http://indonesiasatu.co/detail/tolak-pelanggaran-ham-oleh-pt-msm--masyarakat-adat-sumba-timur-gelar-aksi-di-istana-negara>
- 21 <https://www.savanaparadise.com/lokataru-desak-bupati-sumba-timur-laksanakan-imbauan-klhk-ri-dan-kementerian-dikbud-ri/>
- 22 <https://lokataru.com/press-release-bupati-sumba-timur-harus-segera-laksanakan-imbauan-klhk-ri-dan-kementerian-dikbud-ri/>

PENULIS

Adil Al Hasan



Lahir di Kota Mitra, Magetan, Jawa Timur, pada 20 November 1999. Sekarang pria yang akrab disapa Adil ini menjadi Koordinator Badan Pekerja Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional Periode 2022/2023.

Sebelumnya, Adil juga pernah menjadi Pemimpin Redaksi di Lembaga Pers Mahasiswa POROS dan Koordinator Advokasi dan Jaringan Kerja di PPMI Dewan Kota Yogyakarta. Selain itu, Adil juga pernah menerima fellowship program Jurnalisme Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, United States Agency for International Development (USAID), dan Internews; Fellowship Jurnalisme Keberagaman dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Friedrich Nauman Foundation Jerman di Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Fellowship From Noise to Voice - Building Citizen Awareness on the Growing Agrarian Conflicts In Yogyakarta and its Adjacent Region dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Yayasan Kurawal, dan Open Society Foundation (OSF); Holistik Safety Training for Indonesia Journalist, Activists, and Social Communicators yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan SAFE IREX; dan Training of Trainer (ToT) Kemanan Digital untuk Jurnalis Warga dan Pers Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Konsorsium Jurnalisme Aman (Tifa Foundation, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Human Rights Working Group (HRWG)) yang didukung oleh Kingdom of the Netherlands.

Ahmad Mustaqim



Lahir di Blora, 16 Februari 1991. Alumnus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sarjanawiyata Tamanasiswa (UST) ini menjadi jurnalis di media arus utama sejak 2014 sampai sekarang. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Sedang berjuang menyelesaikan S2 di PBSI Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ia juga sedang belajar beternak ayam.

Atikah Nurul Ummah



Kelahiran 6 Agustus 2001. Saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Aktif menulis dan wara-wiri di Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Suka.

Eka Widhi Artanti



Lahir di Ngawi pada 25 Juli 1999. Jurnalis telah menjadi cita-citanya semenjak duduk dibangku SMA, untuk itu ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial yang berfokus pada broadcasting dan jurnalistik. Pengalaman organisasi di kampus sebagai anggota Lembaga Pers Mahasiswa dan sekretaris di Komunitas Fotografi. Kini ia bekerja di salah satu portal berita online di Yogyakarta.

Halimatus Sakdiyah E.M biasa dipanggil Elly.

Lahir di Bangkalan, 01 Juli 2001. Ia merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Selama kuliah, ia tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) RHETOR. Ia aktif meliput isu-isu kampus dan isu lainnya, serta menulis beberapa essai.

Ia juga sempat aktif dalam jurnalis warga yang dinaungi oleh Yayasan LKiS dan PPMN.

Mariyana Ricky P.D.

Adalah jurnalis Solopos sejak 2014 sampai saat ini. Sebelumnya menjadi penyiar di LPPL Radio Publik Sragen Buana Asri Sragen selama hampir 7 tahun.

Nuriyah Hanik Fatikhah

Lahir di Jepara, 10 November 1999. Belajar menulis di LPM Ekspresi dan sedang menempuh pendidikan S1 di UNY jurusan Pendidikan Sosiologi.

Pito Agustin Rudiana

Sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AJI Yogyakarta (2019-2022). Sehari-hari sebagai jurnalis lepas untuk Tempo, Wanaloka.com. Juga mengisi waktu untuk menulis dan mengedit sejumlah buku. Tertarik dengan isu-isu Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan saat ini tengah mendalami isu Lingkungan, Bencana, dan Sejarah.

Rizka Nur Laily Muallifa

Buruh ketik merdeka.com ini suka liputan dan jalan-jalan ke mana saja. Tertarik dengan banyak isu: budaya, pendidikan, perempuan, lingkungan, energi, dan beberapa lainnya sampai bingung sendiri.

Michelle Gabriela Momole

Lahir di Sleman, 14 November 2001. Mengawali kegiatan jurnalistik di Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar. Saat ini, menjabat sebagai Pemimpin Redaksi BPMF Pijar.

Sabrina Mutiara

Lahir di Blora, Sabrina turut aktif berkecimpung di dunia jurnalistik sejak bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) MISSI UIN Wasilisongo Semarang. Ketertarikannya di dunia jurnalistik membuat dia suka mengeksplor banyak hal tentang sosial, budaya, anak muda, hingga komunitas.

Sirojul Khafid

Merupakan wartawan Harian Jogja sejak 2020. Pria kelahiran 1994 ini lahir di Wonosobo dan kini tinggal di Jogja.

Widi RH Pradana

Saat ini tinggal dan aktif sebagai jurnalis di Yogyakarta

Yuwantoro Winduajie

Lahir di Medan, 14 Juni 1994. Lulusan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) jurusan Antropologi Budaya UGM. Sempat bekerja menjadi jurnalis di Jawa Pos Radar Jogja tahun 2019-2020. Kini aktif menjadi jurnalis di Tribun Jogja.

Bambang Muryanto

Seorang jurnalis AJI Yogyakarta yang aktif menulis untuk independen.id, Serat.id, Project Multatuli dan lain-lain

Mawa Kresna

Mantan Chief Content Officer di Haluan. Sebelumnya editor di Tirto.id dan pernah menjadi jurnalis di Rappler dan Merdeka. Mawa adalah Editorial Manager di Indonesian Data Journalism Network (IDJN).

Arizka Setya Windhiarti

Lahir di Sleman, 23 Maret 1996. Tiga tahun dikasih kesempatan belajar di salah satu media radio di Jogja dan saat ini sedang mengabdi di daerah timur. Suka berkelana dan jalan-jalan, tertarik dengan isu sosial masyarakat.

